



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah oleh sebab beberapa hal yang salah satunya adalah akibat adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain terjadinya perubahan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Dairi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kinerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

25. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
27. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
28. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

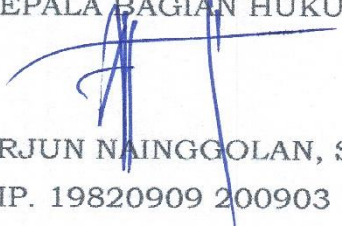
ttd.

BUDIANTA PINEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : (1 – 38 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019. Namun, hingga tahun kedua pelaksanaannya terjadi beberapa perkembangan/perubahan berupa regulasi/peraturan perundang-undangan yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen belanja daerah, maupun pembiayaan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD dan kepada masyarakat;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang perlu dilakukan penyesuaian pada RPJMD Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi akibat pandemi Covid-19 juga turut mendorong pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Selain itu penyusunan Perubahan RPJMD ini dilakukan dalam rangka akuntabilitas kinerja, perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 memiliki nilai- nilai strategis, yaitu :

- a. merupakan pedoman penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan;
- c. merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah;
- d. merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi;
- e. merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 220

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang efektif perlu merespon kondisi sosial yang dinamis. Kondisi daerah, nasional, dan global mengalami dinamika aktual ini, terutama sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membawa dampak di berbagai aspek, terutama pada sistem pelayanan dasar kesehatan, sosial, dan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 5,13% pada 2020, namun mengalami realisasi -0,94%. Pada aspek kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari angka kemiskinan, realisasi penurunan angka kemiskinan telah melampaui target perencanaan, yakni target persentase kemiskinan 8,14% dengan realisasi 8,04%. Meskipun demikian, aktivitas perekonomian yang belum lancar tetap membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, antara lain disebabkan oleh menurunnya nilai komoditas buah-buahan, kopi, dan sayur mayur yang mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun.

Sesuai dengan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan kebijakan nasional yang menjadi dasar perubahan penyusunan Perubahan RPJMD yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran serta indikator, strategi dan arah kebijakan, program perangkat daerah dan pendanaan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 diperlukan untuk merespon kondisi sosial yang dinamis dan perubahan kebijakan nasional, serta merumuskan kembali target pembangunan serta strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang efektif dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan RPJMD memiliki peran strategis dalam rangka mempercepat pencapaian Visi dan Misi **Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, SH** yang dilantik pada tanggal 23 April 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1006 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati Dairi Provinsi Sumatera Utara. Visi yang akan dicapai pada Tahun 2024

yaitu **“Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**.

Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 bagian dari periode keempat (tahap terakhir) dari RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 oleh karena itu memiliki peran strategis untuk menuntaskan pencapaian sasaran dan tujuan dari hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya agar secara keseluruhan tujuan dan sasaran yang ditetapkan perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025 dapat mewujudkan visi misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Dairi yakni **“Terwujudnya masyarakat Dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan”**.

Metode dan tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis bagi Perubahan RPJMD. Tahapan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, yaitu persiapan penyusunan Perubahan RPJMD, penyusunan rancangan awal Perubahan RPJMD, penyusunan rancangan Perubahan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD, perumusan rancangan akhir Perubahan RPJMD, penetapan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

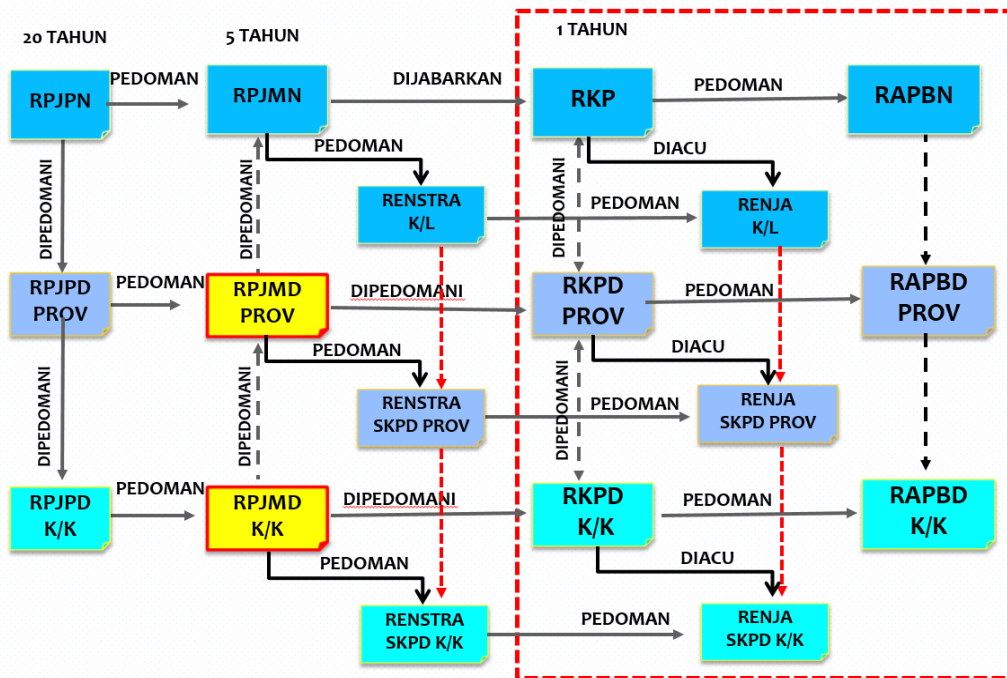
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah



Sumber: UU 25/2004, PP 8/2008, Permendari 86/2017 (diolah)

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 menempatkan RPJMD sebagai instrumen penjabaran program di dalam RPJMN. Oleh karena itu, RPJMD harus sinkron dengan muatan RPJMN dalam rangka mencapai Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diturunkan ke dalam 9 Misi dan 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:



Sumber: Lampiran 1, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Kabupaten Dairi di dalam Pembangunan Wilayah Sumatera dalam konteks RPJMN bagian dari koridor pemerataan. Program prioritas di dalam RPJMN yang direncanakan berjalan di Kabupaten Dairi, antara lain pengembangan komoditas unggulan kopi dan pembangunan desa terpadu, selain menopang *major project* pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Dairi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara juga memiliki peran penting dalam rangka efektivitas pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 berupaya mencapai visi “Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;

2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Hubungan sinergis antara Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Misi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Dairi

RPJMN Tahun 2020- 2024	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Visi: Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman	Visi: Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan
Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 2: Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	Misi 3: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan Misi 4: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan

RPJMN Tahun 2020- 2024	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
<p>Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing</p> <p>Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p>	<p>Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah</p>	<p>Misi 5: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan</p>
<p>Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p> <p>Misi 7: Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga</p> <p>Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p> <p>Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>	<p>Misi 4: Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan <i>clean government</i> (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Misi 2: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik</p>
<p>Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p>Misi 5: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan</p>

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Dairi yang Beriman, Berdaya Saing, Aman, Maju, dan Sejahtera di dalam Kebhinekaan”. Visi tersebut diturunkan ke dalam 5 misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Dairi yang semakin sejahtera;
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik;
3. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan wilayah pemerintahan dengan ketersediaan infrastruktur berdasarkan tata ruang wilayah kabupaten;
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran;
5. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah bidang industri pertanian rakyat, kepariwisataan dan sumber daya alam.

Misi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 telah terbangun sinergitas dengan misi RPJPD, yakni dengan keterkaitan antar misi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Keterkaitan antara Misi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

Misi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024
Misi 1: Mewujudkan masyarakat Dairi yang semakin sejahtera	Misi 2: Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing
Misi 2: Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik	Misi 4: Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan <i>clean government</i> (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah
Misi 3: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan wilayah	Misi 5: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan

Misi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024
pemerintahan dengan ketersediaan infrastruktur berdasarkan tata ruang wilayah kabupaten	administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika
Misi 4: Mewujudkan pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran	Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah
Misi 5: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah bidang industri pertanian rakyat, kepariwisataan dan sumber daya alam	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah

Selanjutnya Perubahan RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik. Kemudian, pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RTRW Kabupaten Dairi

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Mengetahui hal ini maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi telah diintegrasikan dengan KLHS. Sehingga diharapkan dokumen RPJMD Kabupaten Dairi mendukung, mengakomodir dan menindaklanjuti pembangunan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya) dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul, sejahtera dalam harmoni keberagaman. Sedangkan maksud khusus penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah merespon dinamika kondisi sosial daerah, nasional, dan global, terutama sebagai dampak Pandemi Covid-19 maupun merespon kebijakan nasional sehingga tercipta sinergi pembangunan pusat dengan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Membangun integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bagian ini menjelaskan latar belakang perlunya perubahan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Informasi relevan dan penting yang termuat di Bab II menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah terpilih, serta kebutuhan perumusan strategi.

Rincian gambaran umum ini meliputi: aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, serta gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.

Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, mengenai: (1) gambaran kinerja keuangan masa lalu meliputi: gambaran kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, meliputi: gambaran proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta (3) kerangka pendanaan pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, meliputi: proyeksi pendapatan dan belanja dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.

Bagian ini menyajikan gambaran analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan, termasuk permasalahan dan isu aktual yang muncul sehingga melatarbelakangi perlunya perubahan RPJMD.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.

Bagian ini menguraikan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi, yang disertai penjabarannya ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikatornya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu juga memuat program pembangunan daerah, terutama program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

Bagian ini memuat program perangkat daerah di setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai indikator kinerja, target capaian, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Bagian ini menyajikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini merupakan narasi akhir dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, terutama memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman masa transisi.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografis

Aspek geografis Kabupaten Dairi meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Dairi menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 192.780 Ha atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Kabupaten adalah Sidikalang, terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 169 desa/kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Berampu	3.168
2	Gunung Sitember	7.520
3	Lae Parira	4.272
4	Parbuluan	22.700
5	Pegagan Hilir	15.533
6	Sidikalang	7.317
7	Siempat Nempu	6.030
8	Siempat Nempu Hilir	10.450
9	Siempat Nempu Hulu	9.360
10	Silahisabungan	11.920
11	Silima Pungga-pungga	10.168
12	Sitinjo	5.315
13	Sumbul	14.900
14	Tanah Pinem	43.940
15	Tigalingga	20.187
Total		192.780

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2021

Kecamatan terluas di Kabupaten Dairi yaitu Kecamatan Tanah Pinem. Persentase luasan dari Kecamatan Tanah Pinem yaitu sebesar 22,18% dari total luas Kabupaten Dairi. Kecamatan dengan luasan

terkecil yaitu Kecamatan Berampu, yaitu sebesar 2,004% dari total luas Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh
- Sebelah Timur : Kabupaten Samosir
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pakpak Bharat
- Sebelah Barat : Provinsi Aceh (Kota Subulussalam)

2. Letak dan Kondisi Geografis

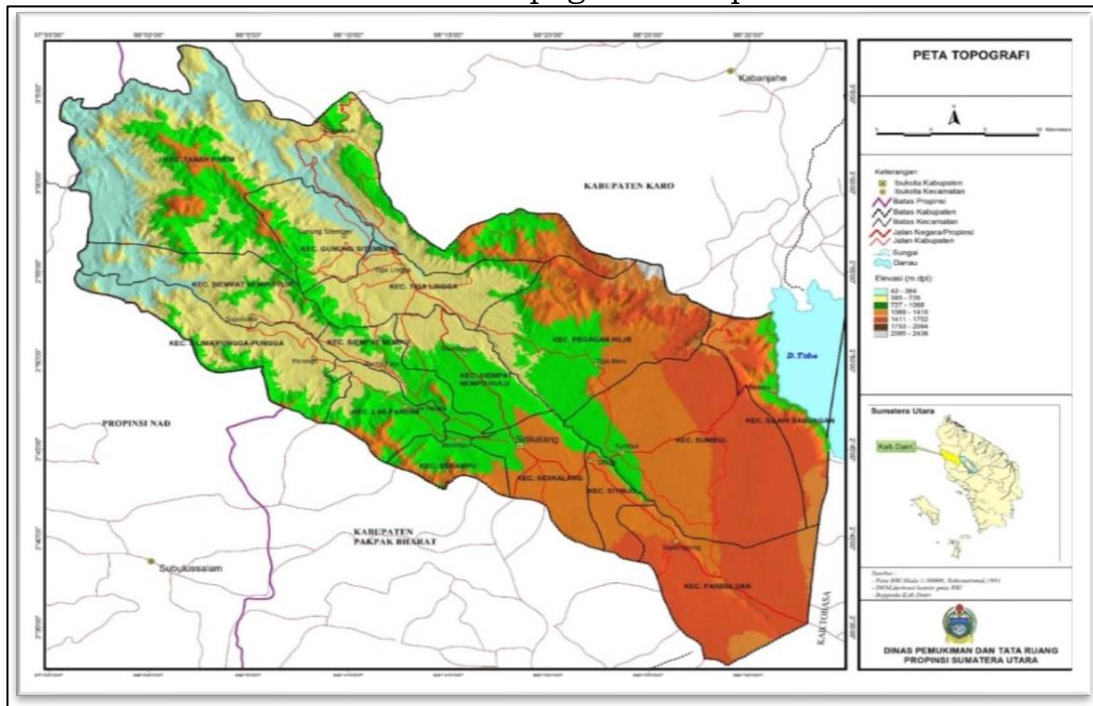
Kabupaten Dairi berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh di bagian utara, Kabupaten Samosir di sebelah timur, Kabupaten Pakpak Bharat di sisi selatan dan Provinsi Aceh (kota Subulussalam) di bagian barat. Kabupaten Dairi memiliki jarak sekitar 153 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dari Kota Medan. Kabupaten Dairi juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki kondisi cukup strategis, yakni sebagai akses menuju atau dari Kota Medan (*primary city*) dan juga salah satu jalur untuk mengakses menuju Provinsi Aceh.

3. Topografi/Kelerengan

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan, dengan ketinggian 200 – 1.431 mdpl. Secara morfologi, Kabupaten

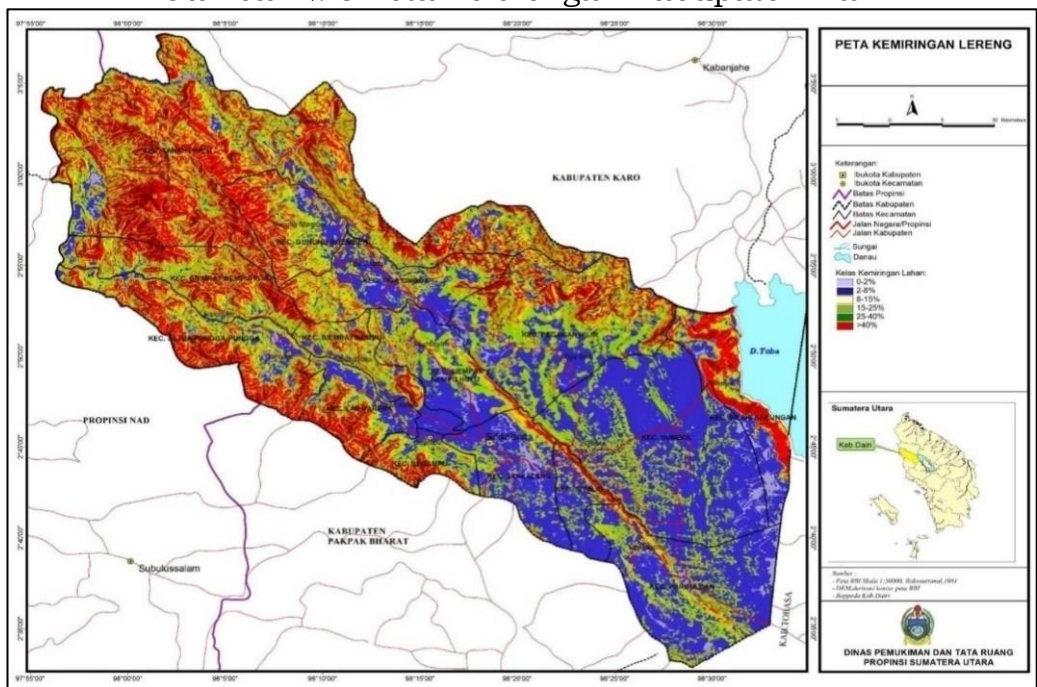
Dairi didominasi dengan kelerengn yang berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Dairi



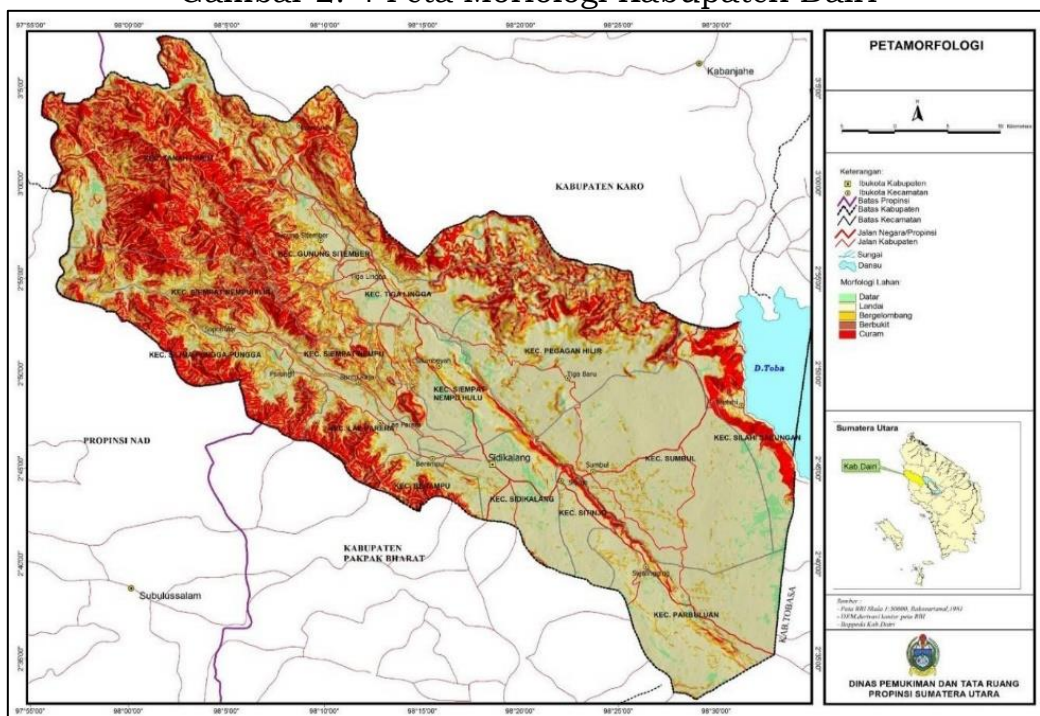
Karakter topografi dan pola drainase alami di Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi. Wilayah yang sangat rentan terhadap erosi, khususnya terdapat di bagian tengah memanjang dari Kabupaten Dairi dari bagian Utara ke Selatan. Beberapa wilayah yang termasuk rentan terhadap erosi diantaranya yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira.

Gambar 2. 3 Peta Kelerengn Kabupaten Dairi



Pola kelerengn di Kabupaten Dairi terbagi menjadi 5 kelompok, diantaranya datar, landai, agak miring, miring hingga agak curam. Kelerengn di Kabupaten Dairi didominasi dengan kemiringan lereng 2-8%, yang terkategori topografi landai. Kabupaten Dairi yang terletak di Bukit Barisan, berpengaruh juga pada kemiringan yang terkategori miring hingga agak curam, dengan kisaran kemiringan sebesar 8% - 45%.

Gambar 2. 4 Peta Morfologi Kabupaten Dairi



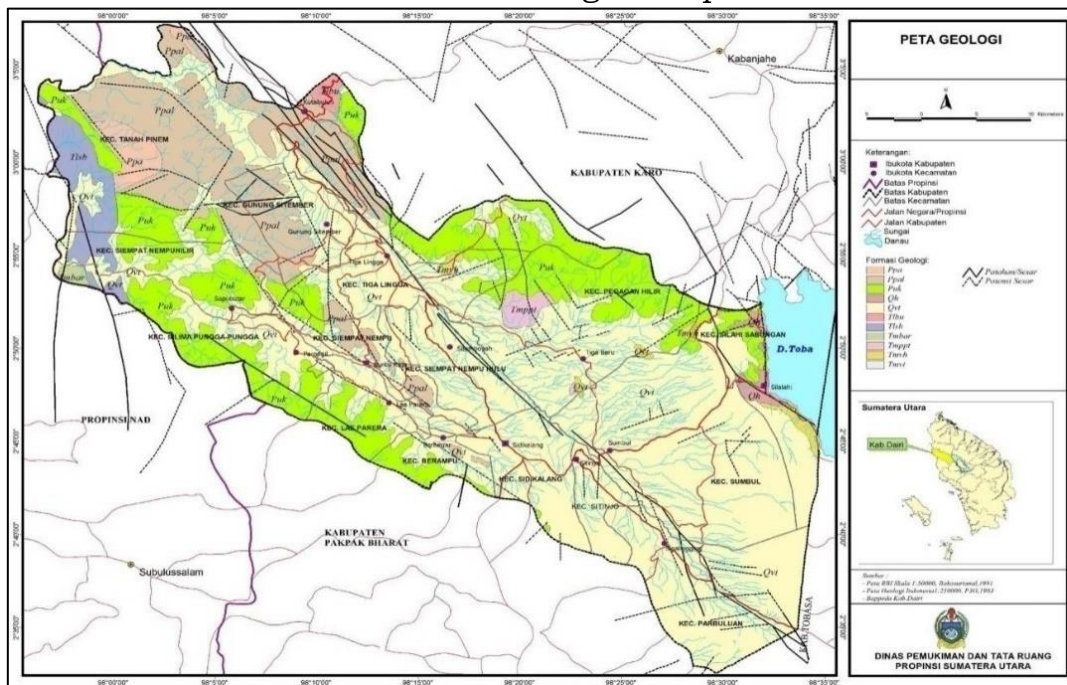
Spesifikasi dari karakter morfologi Kabupaten Dairi disajikan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha atau sekitar 14,43% dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal kurang lebih 88.097 ha atau sekitar 45,70% dari luas Kabupaten Dairi.

4. Geologi

Kondisi geologi regional menurut peta geologi Sidikalang, Kabupaten Dairi termasuk dalam zona fisiografi jajaran pegunungan Bukit Barisan Bagian Timur dan Bagian Tengah. Formasi batuan penyusun dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang di atasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan.

Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Dairi



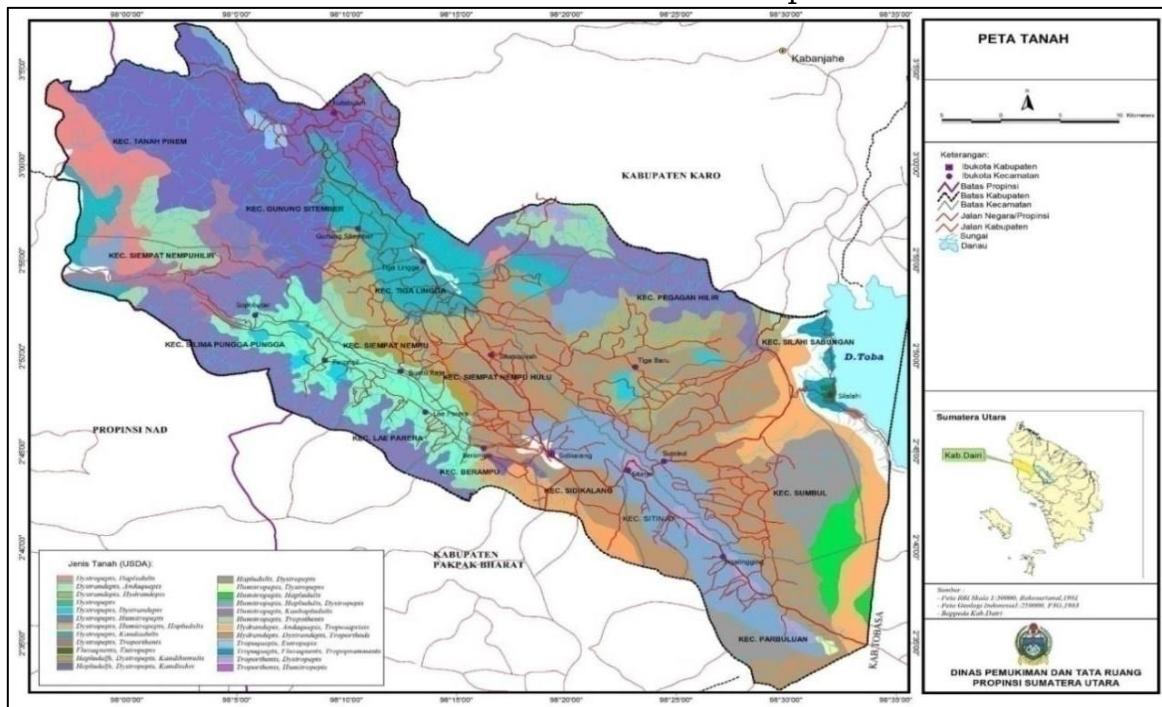
Di atas Formasi Alas diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmpt) yang merupakan anggota Parapat. Formasi tersebut dicirikan dengan litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang

bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Kemudian, secara tidak selaras di atasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

5. Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu. Satuan jenis tanah tersebut diantaranya yaitu tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85% dari luas total Kabupaten Dairi yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Tanah masa permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26%, tanah masa palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83%, tanah garbo diabase sepertijin seluas 23.017,93 ha atau sekitar 11,94% dan sisanya jenis tanah masa jura seluas 231,34 ha.

Gambar 2. 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dairi



Kedalaman efektif tanah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu tanah dengan kedalaman efektif < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga, kedalaman efektif tanah 30 – 90 cm terdapat di sebelah Selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah apabila ditinjau dari sifat kekasarannya, dibedakan menjadi tanah bertekstur halus dan kasar. Tekstur halus menyebar di seluruh

kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah Barat Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga.

6. Hidrologi

Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi aliran air permukaan dan air bawah tanah. Aliran air permukaan direpresentasikan dengan Wilayah Sungai (WS) dan aliran air bawah tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT).

a. Wilayah Sungai (WS)

Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

- WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
- WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara – Lintas Provinsi).

Tabel 2. 2 Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

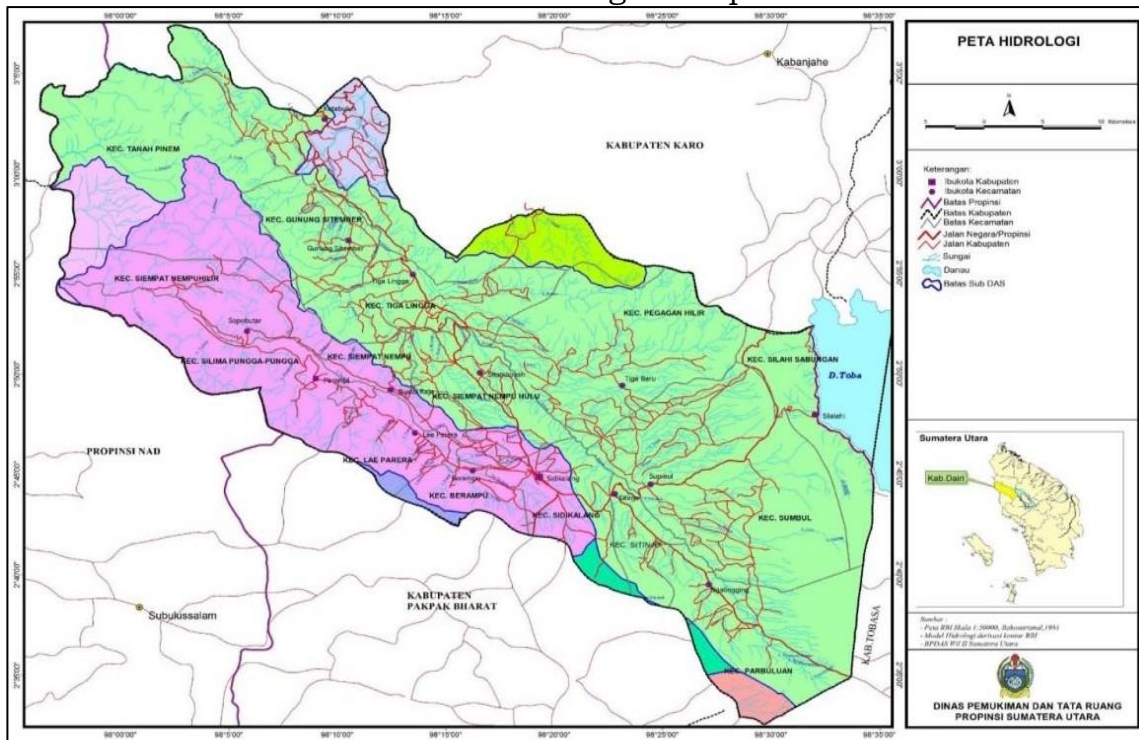
No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pendaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Sungai – sungai di Kabupaten Dairi dominan mengalir secara gravitasi ke arah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Fungsi dari sungai-sungai di Kabupaten Dairi berfungsi sebagai saluran

drainase alami yang mengalirkan air hujan diatas permukaan tanah (*surface run off*).

Gambar 2. 7 Peta Hidrologi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Visualisasi distribusi sungai di Kabupaten Dairi disajikan pada gambar 2.7. Diantara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum.

b. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km².

7. Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979)*, pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Iklim B1
Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2

bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitanjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapungga.

- Iklim C1

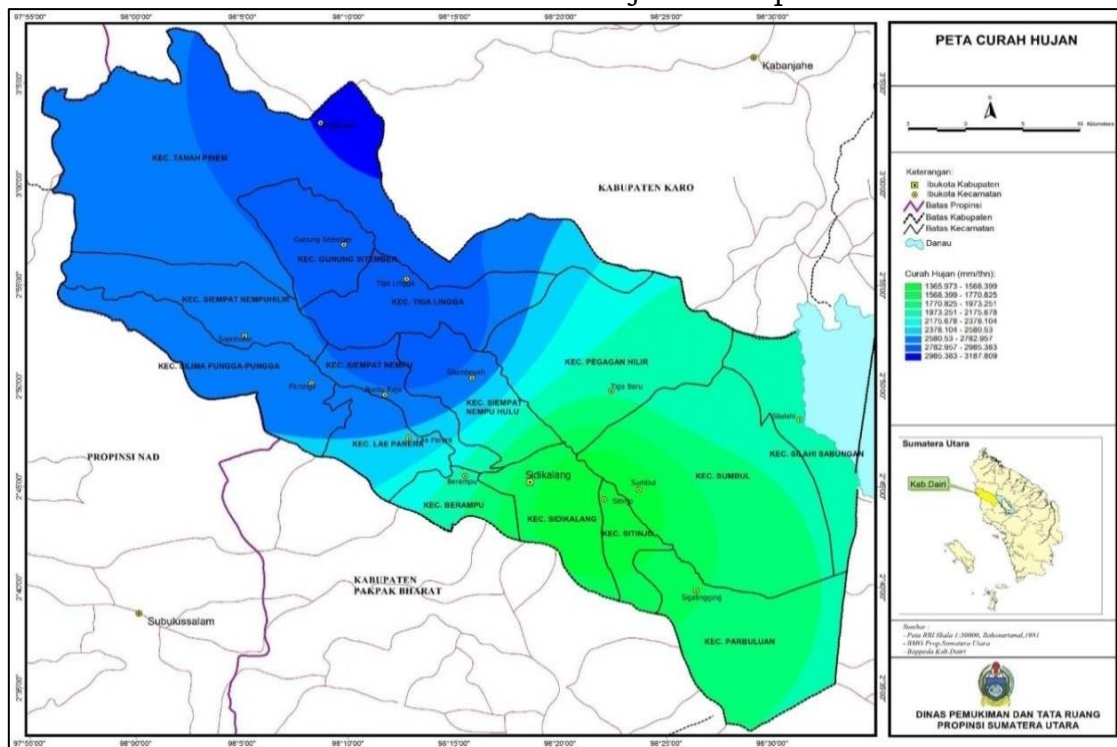
Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.

- Iklim D1

Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 m.dpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 m. dpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 m. dpl. Lihat Gambar berikut.

Gambar 2. 8 Peta Curah Hujan Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

8. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Dairi diinventarisasi pada laporan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) tahun 2019. Berdasarkan dokumen tersebut tercatat penggunaan lahan di Kabupaten

Dairi kurang lebih seluas 192.780 Ha. Penggunaan lahan secara berurutan didominasi dengan hutan negara, perkebunan campuran, dan ladang.

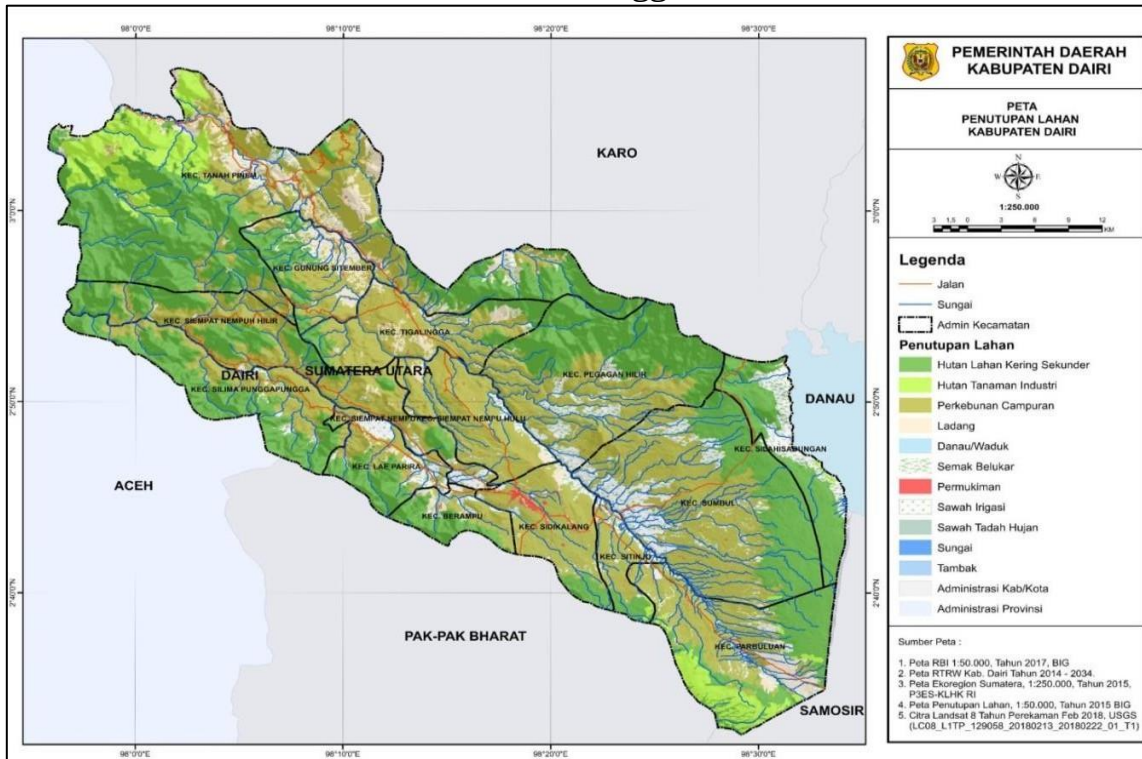
Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	(%)
1.	Hutan	95.603,00	49,592
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	39,948
3.	Ladang	10.463,39	5,428
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,528
5.	Permukiman	1.755,99	0,911
6.	Sungai	520,29	0,270
7.	Perkebunan Kopi	318	0,165
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,057
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,058
10.	Pertambangan	43,5	0,023
11.	Danau/Waduk	24,33	0,013
13.	Tambak	15,84	0,008
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,005
Kabupaten Dairi		192.789,45	100

Sumber: Laporan DDDTLH Kabupaten Dairi dan Hasil Analisa, 2021

Hutan negara sebagai tutupan lahan memiliki luasan sebesar 95.603 Ha atau sekitar 49,60%. Perkebunan Campuran memiliki luasan penggunaan lahan terluas selanjutnya, yaitu sebesar 77.011,74 Ha atau sekitar 40,00%. Penggunaan lahan berupa Ladang seluas 10.463 Ha atau sekitar 5,43%. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 Ha atau sekitar 0,91% dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Gambar 2. 9 Peta Penggunaan Lahan



Kabupaten Dairi tentu telah mengalami perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Adanya laju pertumbuhan dan penambahan penduduk, menjadi diantara komponen yang turut berkontribusi terhadap dinamika perubahan lahan di Kabupaten Dairi. Dinamika penduduk tersebut yang selanjutnya juga menuntut terhadap ketersediaan lahan yang juga semakin meningkat. Dampak selanjutnya maka pembangunan menjadi masif dan tentu berkontribusi dalam memengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Pertanian Lahan Basah

Peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Dairi adalah sawah dengan luas kurang lebih 10.225 Ha atau setara dengan sekitar 5,31% dari luas wilayah Kabupaten Dairi yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Sitember. Dalam rangka meningkatkan produktifitas sawah didukung dengan jaringan irigasi. Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Dairi berdasarkan aspek fungsional seluas kurang lebih 10.225 Ha, sedangkan dari aspek potensial seluas kurang lebih 21.167 Ha.

Berdasarkan pola jaringan irigasi, luasan Daerah Irigasi setengah teknis seluas kurang lebih 6.059 Ha, irigasi sederhana seluas kurang lebih 3.257 Ha dan irigasi non PU seluas kurang lebih 909 Ha dengan

volume rata-rata pemakaian air sekitar 14.104 liter/detik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 4 Daerah Irigasi di Kabupaten Dairi

Luas DI (Ha)		Pola Jaringan (Ha)			Volume Pemakaian (Liter/Detik)	Sumber Air
Potensial	Fungsional	Setengah Teknis	Sederhana PU	Non PU		
21.167	10.225	6.059	3.257	909	14.104	Sungai Waduk/ Embung

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

2. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura

Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 28.839 Ha tersebar diseluruh kecamatan.

Prospek hortikultura akan semakin baik, selain itu tanaman ini dapat ditanam baik di lahan basah maupun lahan kering. Luas lahan peruntukan hortikultura seluas 19.500 Ha tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor.

3. Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Luas kawasan peruntukan perkebunan seluas 32.779 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

4. Peternakan

Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau dan sapi/lembu di seluruh kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hulu sedangkan ternak kuda di Kecamatan Parbuluan. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan),

pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt).

Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

5. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan. Potensi perikanan di Kabupaten Dairi diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang timbul karena adanya perbedaan antar wilayah. Artinya bahwa fenomena wilayah didasarkan pada analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Suatu wilayah merupakan satu kesatuan wilayah sosial ekonomi dan sumber daya hayati perikanan.

Tabel 2. 5 Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi

No.	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
I.	Budidaya		
1.	Kolam Air Tenang	400	217
2.	Mina Padi	450	391,7
3.	Jaring Apung	20	10
II.	Perairan		
1.	Sungai	234	234
2.	Danau	500	500
3.	Bendungan	20	14,1
4.	Genangan Air	200	61
Jumlah		1.824	1.426,8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi:

- a. Perikanan tangkap di Danau Toba (Kecamatan Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi.
- b. Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batak), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya.

6. Pertambangan dan Sumber Daya Alam

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggapungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir yang didulang masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 6 Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi

NO.	Mineral Logam	Lokasi	Cadangan	Keterangan
1.	Timah Hitam	Kecamatan Silima Punggapungga,	Tereka	Cadangan Pb dan Zn Sebesar 6,324 Juta Ton Biji.
2.	Seng	Tanah Pinem,	Tereka	
3.	Perak	Tigalingga, Siempat Nempu Hilir	Tereka	
4.	Emas	Kecamatan Pegagan Hilir	Hipotesa	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan- kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.

Potensi mineral bukan logam dan batuan serta potensi sumber daya mineral di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 7 Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
1.	Batu Lempung	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 229,960 M ³
2.	Batu Padas/Tufa	Tersebar di seluruh Kecamatan	Hipotesa

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
	Riodasit		
3.	Batu Gamping	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sidikalang • Kecamatan Siempat Nempu • Kecamatan Lae Parira • Kecamatan Siempat Nempu Hulu • Kecamatan Tigalingga • Kecamatan Tanah Pinem • Kecamatan Gunung Sitember 	Hipotesa Hipotesa Hipotesa Hipotesa Sekitar 676.312,500 M3 Sekitar 73.235.312,500 M3 Sekitar 13.169.209,375 M3
4.	Sirtu	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
5.	Pasir Kuarsa	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
6.	Marmer	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 135.576 M3

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Tabel 2. 8 Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Potensi
1.	Sidikalang	Batu Kapur, Granit, Batu Gamping, Marmer dan Sirtu
2.	Sitinjo	Pasir Sedimen, Batu Padas
3.	Berampu	Sirtu
4.	Parbuluan	Radioaktif, Pasir Sedimen
5.	Sumbul	Batu Padas, Sirtu
6.	Silahisabungan	Radioaktif, Sirtu
7.	Silima Punggapungga	Timah Hitam Pasir Kuarsa, Emas, Perak, Seng, Batu Gamping dan Sirtu
8.	Lae Parira	Batu Gamping, Batu Padas dan Pasir Sedimen
9.	Siempat Nempu	Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Padas, Tanah Liat dan Pasir Sedimen
10.	Siempat Nempu Hulu	Batu Gamping, Sirtu
11.	Siempat Nempu Hilir	Timah hitam, Dolomit, Perak, Seng, Perak, Sirtu
12.	Tigalingga	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Gamping, Tanah Liat, Batu Padas dan Sirtu
13.	Gunung Sitember	Batu Gamping, Sirtu
14.	Pegangan Hilir	Emas, Sirtu
15.	Tanah Pinem	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Lempung, Marmer, Batu Pualam, Dolomit dan Sirtu

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

7. Pariwisata

a. Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suka alam, maupun suka marga

satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

b. Pariwisata Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel berikut.

Tabel 2. 9 Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
1.	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik
2.	Sitinjo	Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pendaroh, Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, Danau Sicike-cike
3.	Parbuluan	Danau Sicike-cike merupakan tempat penelitian (flora & fauna), ekowisata, berkemah
4.	Sumbul	Wisata Hutan Lae Pandom, Waduk PLTA Renun, Rumah Adat Pakpak (Sikabeng-kabeng), Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matahari, Mejan Palalahan
5.	Silahisabungan	Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap, Danau Toba (Perahu Layar, Speed Boat, Berenang), Wisata Gunung (Hiking, Gantole, Camping), Wisata Hutan (Lintas Alam, Kemah)
6.	Silima Punggapungga	Mata Air Situs Sisingamangaraja XII, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
7.	Lae Parira	Bantuan Kerbo (situs kerbau menjadi batu)
8.	Siempa Nempu Hulu	Letter Z (Kilometer 11), Gua Sitanduk-tanduk, Batu Pangulubalang Sanggapati
9.	Siempat Nempu Hilir	Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornaui, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)
10.	Tigalingga	Lau Belulus, Tank Peninggalan Sejarah, Goa (dalamnya ± 500 meter)
11.	Gunung Sitember	Kendet Liang
12.	Pegagan Hilir	Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan (tempat pemujaan)

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
13.	Tanah Pinem	Danau/Waduk diatas Gunung (luas ± 3 Ha), Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

8. Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan pengembangan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/ anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain.
- b. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain.
- c. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain.
- d. Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/ anyam-anyaman dan lain-lain.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi di landa berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB no. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2004 – 2015, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : Gempa bumi, Banjir, Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung), Tanah Longsor dan Kebakaran Permukiman. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Dairi Tahun 2004-2016

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Terdampak	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
Gempa Bumi	1	1	10	-	-	-	226	1.052
Banjir Bandang	8	-	-	-	-	123	4	34
Tanah Longsor	86	3	5	-	-	-	2	22
Cuaca Ekstrim	42	4	8	-	-	-	397	66
Karhutla	5	-	-	-	-	-	-	-
Kekeringan	3	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran	65	2	1	-	-	121	17	86
JUMLAH	202	10	24	-	-	244	646	1.260

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2015 dan data BPBD Kabupaten Dairi 2012-2016

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2004 – 2016 berdasarkan data yang tercatat dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Gempa Bumi

Bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi dan tercatat sebanyak 1 kali, yaitu kejadian gempa bumi pada tanggal 06 September 2011 berkekuatan 6,7 SR. Kejadian bencana gempa bumi ini mengakibatkan 1 orang meninggal, 10 orang luka-luka, 226 rumah rusak berat dan 1.052 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian bencana gempa bumi ini meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-Pungga, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Tanah Pinem, Gunung Sitember, dan Pegagan Hilir).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 7 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 162 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Tabel 2. 11 Matriks Resiko Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG		KEC. TIGALINGGA: Jumagerat KEC. PEGAGAN HILIR: Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II KEC. GUNUNG SITEMBER: Bukit Lau Kersik KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR: Lae Markelang	
	TINGGI	KEC. TANAH PINEM: Kuta Gamber	KEC. TANAH PINEM: Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Kempawa, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame	KEC. TANAH PINEM: Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar KEC. SUMBUL: Pegagan Julu I

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
			<p>KEC. SUMBUL: Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Kuta Gugung, Barisan Nauli</p> <p>KEC. SIDIKALANG: Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang Malum, Bintang Mersada</p> <p>KEC. TIGALINGGA: Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Mil, Lau Pakpak, Palding Jaya</p> <p>KEC. PEGAGAN HILIR: Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Mbinanga, Bukit Baru</p> <p>KEC. GUNUNG SITEMBER: Gunung Sitember, Lau Lebah, Batu Gunung, Rante Besi, Tupak Raja, Gundaling, Kendit Liang</p> <p>KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR: Lae Itam, Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas, Lae Sering</p> <p>KEC. SIEMPAT NEMPU HULU: Tambahan, Kuta Tengah, Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Bakal Julu, Pandan</p> <p>KEC. SIEMPAT NEMPU: Sinampang, Soban, Bunturaja, Gomit, Juma Antuang, Juma Siulok,</p>	<p>KEC. SIDIKALANG: Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat</p> <p>KEC. PEGAGAN HILIR: Perik Mbue</p> <p>KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR: Pardomuan</p> <p>KEC. SIEMPAT NEMPU HULU: Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong</p> <p>KEC. SIEMPAT NEMPU: Sihorbo, Adian Nangka, Maju, Adian Gupa</p> <p>KEC. SILIMA PUNGA: Lae Panginuman</p> <p>KEC. PARBULUAN: Parbuluan V, Lae Hole II</p> <p>KEC. LAE PARIRA: Sumbul, Lae Parira</p> <p>KEC. BERAMPU: Berampu, Banjartoba</p> <p>KEC. SILAHISABUNGA N: Paropo</p> <p>KEC. SITINJO: Sitinjo II</p>

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
			Sosor Lontung, Huta Imbaru, Juma Teguh KEC. SILIMA PUNGA PUNGA: Lae Rambong, Lae Ambat, Sumbari, Bakal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan KEC. PARBULUAN: Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I, Parbuluan II KEC. LAE PARIRA: Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu KEC. BERAMPU: Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN: Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III, Paropo I KEC. SITINJO: Sitinjo, Sitinjo I, Panji Dabutar	

Sumber. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

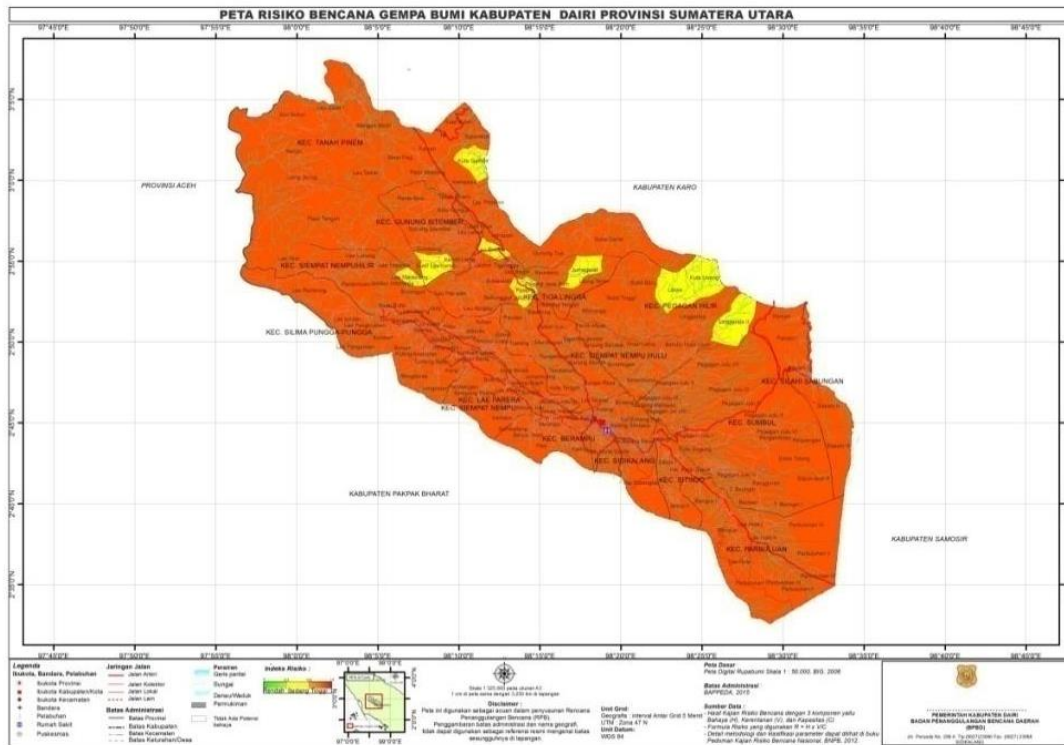
Tabel 2. 12 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	13.786	157.326
PENDUDUK (Jiwa)	-	9.005	269.956
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	3.898.272.216	215.363.355.663
FASILITAS UMUM (Rp)	-	21.800.000.000	570.790.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	340.600.000.000	9.597.600.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.421	64.169

Sumber. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 14,51% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 10 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi gempa bumi menyeluruh di Kabupaten Dairi, dan hanya sebagian kecil saja dari wilayah Kecamatan Pegagan Hilir dan Tanah Pinem yang digolongkan risiko sedang. 9 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 160 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Sebagai tambahan, Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha atau 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi

sebesar 64.169 unit atau 96,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

2. Banjir Bandang

Bencana banjir telah terjadi sebanyak 8 kali kejadian pada periode Tahun 2012 - 2016. Bencana banjir terbesar yang terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana pada tanggal 18 Oktober 2015 yang mengakibatkan 123 orang menderita. Lokasi kejadian bencana banjir meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Tanah Pinem, Silima Pungga-pungga, Lae Parira, dan Siempat Nempu Hulu).

Tabel 2. 13 Matriks Resiko Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH		Kec. Tigalingga: Lau Bagot, Tigalingga, Palding Jaya Kec. L Parira: Sumbul, Lae Parira	
	SEDANG		Kec. T Pinem: Sinar Pagi, Harapan, Gunung Tua, Tanah Pinem Kec. Tigalingga: Sumbul Tengah, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Sireme, Lau Pakpak Kec. P Hilir: Tanjung Saluksuk, Simanduma, Bandar Huta Usang, Onan Lama, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue, Bukit Baru Kec. S5P2: Parongil, Palipi Kec. L Parira: Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu Kec. Silahisabungan: Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III	Kec. P Hilir: Laksa
	TINGGI		Kec. Tigalingga: Lau Mil Kec. P Hilir: Mbinanga Kec. SN Hilir: Jambur Indonesia, Sopo Butar, Lae Sering Kec. S5P2: Uruk Belin, Longkotan	Kec. T Pinem: Lau Njuhar, Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
				Gamber, Lau Primbon, Balandua, Lau Tawar, Suka Dame Kec. Tigalingga: Ujung Teran, Juma Gerat Kec. P Hilir: Lingga Raja, Lingga Raja II, Kuta Usang Kec. SN Hilir: Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Lae Haporas Kec. S5P2: Lae Rambong, Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Bakal Gajah, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Siratah, Polling Anak-anak, Lae Pangaroan Kec. Silahisabungan: Paropo I, Paropo

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 32 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 36 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana banjir bandang.

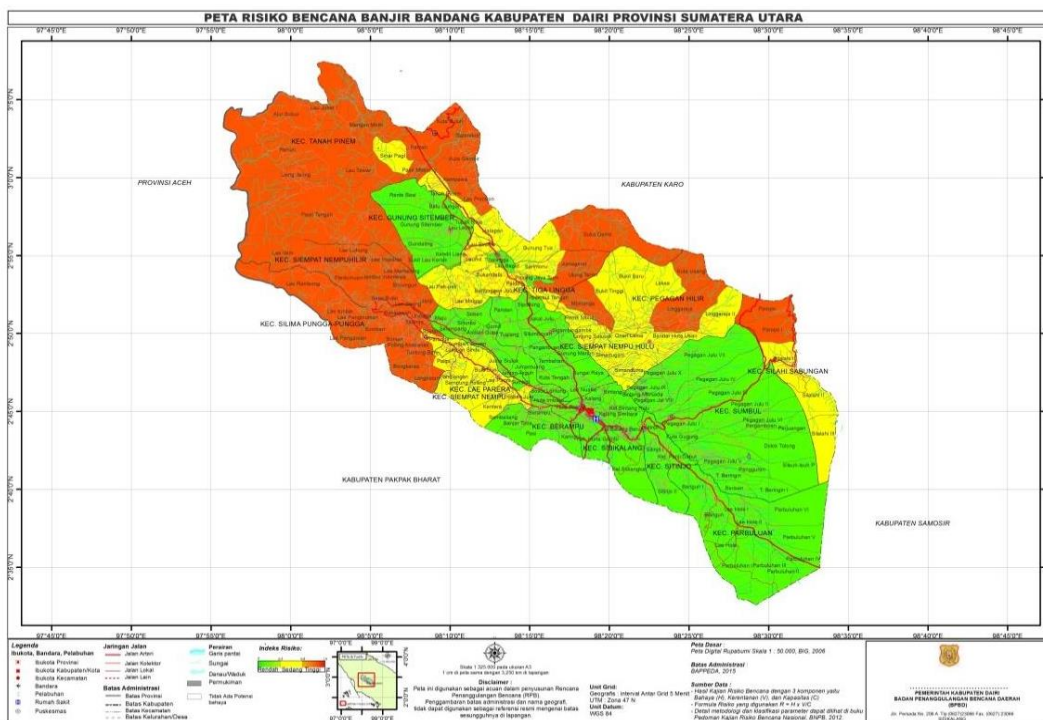
Tabel 2. 14 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BANJIR BANDANG KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	8.420	42.557
PENDUDUK (Jiwa)	-	7.915	30.015
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	23.855.969.914	59.016.084.080
FASILITAS UMUM (Rp)	-	18.674.000.000	67.671.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	291.656.000.000	1.106.765.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.035	7.617

Sumber. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 42.557 ha atau 22,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 30.015 jiwa atau 10,8 % dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 7.617 unit atau 11,4 % dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 11. Peta Indeks Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko banjir bandang, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir dan Pegagan Hilir.

3. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 86 kali kejadian. Bencana Tanah Longsor yang sering terjadi di daerah Kecamatan Tanah Pinem.

Tabel 2. 15 Matriks Risiko Tanah Longsor Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH	Kec. Sidikalang: Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang malum, Hutannya Gambir, Hutannya Rakyat, Bintang Marsada	Kec. Sumbul: Pegagan Julu IV, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran,	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
		Kec. Tigalingga: Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Palding Jaya Kec. P Hilir: Onan Lama Kec. G Sitember: Batu Gun Gun Kec. SN Hulu: Tambahan, Kuta Tengah, Bakal Julu, Sipoltong Kec. S Nempu: Adian Nangka, Buntu Raja, Sosor Lontung, Huta Imbaru Kec. S5P2: Parongil Kec. Parbuluan: Lae Hole I, Lae Hole II Kec. L Parira: Sumbul, Lae Parira, Kabanjulu Kec. Berampu: Berampu Kec. Sitinjo: Panji Dabutar	Tanjung Beringin I, Barisan Nauli	
	SEDANG	Kec. Tigalingga: Palding Kec. P Hilir: Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue Kec. Parbuluan: Parbuluan III, Parbuluan VI, Bangun I	Kec. Sumbul: Pegagan Julu V, Pegagan Julu II, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Kuta Gugung, Pangguruan Kec. Sidikalang: Bintang Hulu, Bintang Kec. Tigalingga: Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap Kec. P. Hilir: Tanjung Saluksuk, Lingga Raja II, Mbinanga Kec. G Sitember: Rante Besi, Tumpak Raja Kec. SN Hilir: Pardomuan, Jambur Indonesia, Sopo Butar Kec. SN Hulu: Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Pandan Kec. S Nempu:	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Maju	
			Kec. S5P2: Lae Ambat, Bakkal Gajah, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi Kec. Parbuluan: Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan V, Parbuluan IV, Lae Hole, Bangun Kec. L Parira: Kentara, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan Kec. Berampu: Karing, Pasi, Sambaliang, Banjar Toba Kec. Silahisabungan: Silalahi I, Silalahi II Kec. Sitinjo: Sitinjo, Sitinjo I	
	TINGGI		Kec. Tanah Pinem: Lau Njuhar, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame, Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar, Kuta Gamber Kec. Tigalingga: Ujung Teran, Juma Gerat, Sukandebi, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir: Simanduma, Laksa, Bukit Baru, Kuta Usang Kec. G Sitember: Bukit lau Kersik,	Kec. T Pinem: Mangan Molih, Renun, Kempawa Kec. S Nempu: Adian Gupa

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Gunung Sitember, Gundaling, Kendit Liang, Lau Lebah Kec. SN Hilir: Lae Itam, Simungun, Janji, Lae Luhung, Lae Haporas, Lae Sering, Lae Markelang Kec. S N Hulu: Gunung Meriah, Sigambir-gambir Kec. S Nempu: Sinampang, Sihorbo, Juman tuang, Kec. S5P2: Lae Rambong, Lae Panginuman, Sumbari, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Lae Pangaroan Kec. L Parira: Sempung Polling, Pandiangan Kec. Silahisabungan: Silalahi III, Paropo, Paropo I Kec. Sitinjo: Sitinjo II	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 54 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana tanah longsor.

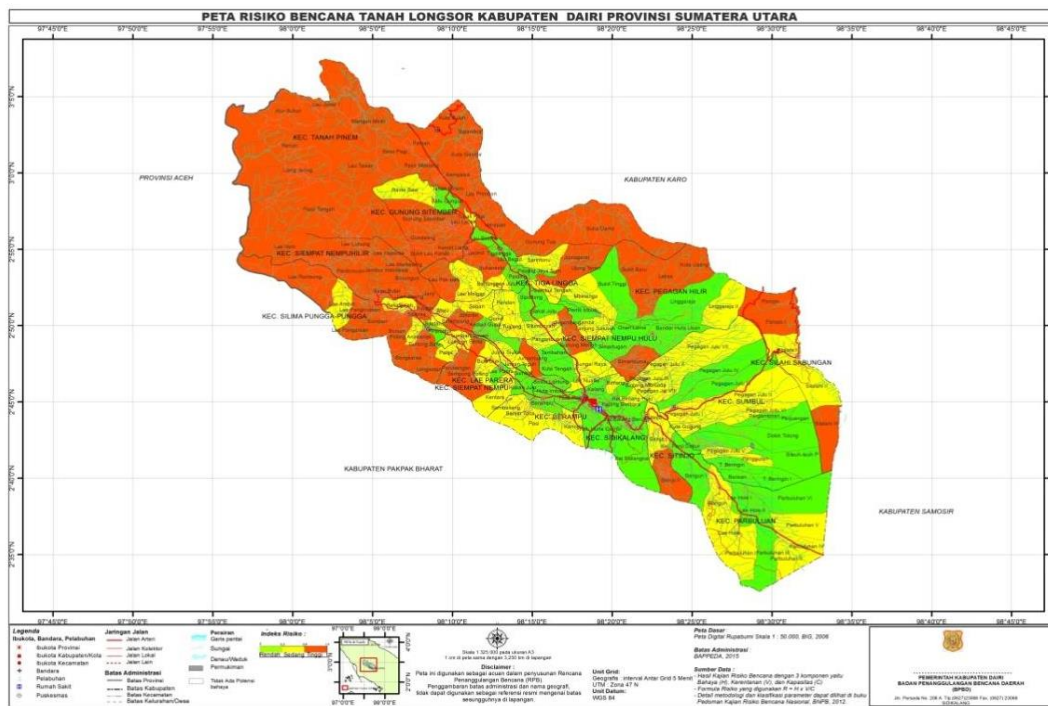
Tabel 2. 16 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO TANAH LONGSOR DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	10.627	35.765
PENDUDUK (Jiwa)	-	15.518	26.829
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	75.366.443.412	122.962.226.481
FASILITAS UMUM (Rp)	-	12.279.000.000	39.972.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	581.421.000.000	972.045.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	3.910	7.517

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi seluas 35.765 ha (18,60 %) dari total luas wilayah dan Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 26.829 jiwa atau 9,6 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 12. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko tanah longsor, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Silimapungpungga dan Silahisabungan.

4. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung

Bencana cuaca ekstrim/angin puting beliung di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 42 kali kejadian. Kejadian bencana cuaca ekstrim terparah terjadi pada tanggal 3 April 2016 yang mengakibatkan 153 rumah rusak berat, 7 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian cuaca ekstrim ini di beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 17 Matriks Risiko Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	KEC. TANAH PINEM: Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Perimbon, Balandua, Harapan,	KEC. TANAH PINEM: Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah,	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
		<p>Sukadame. KEC. SUMBUL: Pangguruan, Barisan Nauli. KEC. PEG. HILIR: Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II. KEC. G. SITEMBER: Bukit Lau Kersik KEC. SI4N HILIR: Lae Itam, Lae Markelang, Lae Luhung, Sopo Butar.</p>	<p>Tanah Pinem, Gunung Tua. KEC. SUMBUL: Kuta Gugung, Perjuangan, Sileu- leu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Pegagan Julu X. KEC. SIDIKALANG: Bintang KEC. TIGALINGGA: Ujung Teran, Jumagerat, Palding, Lau Sireme, Lau Pakpak. KEC. PEG. HILIR: Simanduma, Lingga raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Bukit Baru. KEC. G. SITEMBER: Gunung Sitember, Lau Lebah, Rantai Besi, Tumpak Raja, Kendet Liang. KEC. SI4N HILIR: Simungun, Lae Sering, Lae Haporas. KEC. SI4N HULU: Kuta Tengah, Sigambir-gambir KEC. SI4NEMPU: Soban, Gomit, Juma Teguh. KEC. SI5PP: Lae Rambong, Lae Ambat, Sumbari, Bonian, Bongkaras, Lae Pangaroan. KEC. PARBULUAN: Parbuluan I, Parbuluan II, Parb. IV. KEC. LAE PARIRA: Pandiangan KEC. BERAMPU: Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi I, Silalahi III, Paropo I. KEC. SITINJO:</p>	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Sitinjo I	
	TINGGI		<p>KEC. TANAH PINEM: Liang Jering, Lau Tawar.</p> <p>KEC. SUMBUL: Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran.</p> <p>KEC. SIDIKALANG: Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang Malum, Huta Gambir, Bintang Marsada.</p> <p>KEC. TIGALINGGA: Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Mil, Palding Jaya.</p> <p>KEC. PEG. HILIR: B. Huta Usang, Mbinanga, Perik Mbue</p> <p>KEC. G. SITEMBER: Batu Gun-gun, Gundaling.</p> <p>KEC. SI4N HILIR: Pardomuan, Jambur Indonesia, Janji.</p> <p>KEC. SI4N HULU: Tambahan, Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Bakkal Julu, Sipoltong, Pandan.</p> <p>KEC. SI4NEMPU: Sinampang, Siharbo, Buntu Raja, Juman</p>	<p>KEC. SUMBUL: Pegagan Julu I,</p> <p>KEC. SIDIKALANG : Batang Beruh, Huta Rakyat</p> <p>KEC. SI4NEMPU: Adian Nangka</p>

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Tuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Maju, Adian Gupa KEC. SI5P: Lae Panginuman, Bakkal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Tung-tung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi. KEC. PARBULUAN: Parbuluan V, Parbuluan III, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Lae Hole II, Bangun I. KEC. LAE PARIRA: Lae Parira, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara, Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu. KEC. BERAMPU: Berampu, Banjar Toba. KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi II, Paropo KEC. SITINJO: Sitinjo, Sitinjo, Sitinjo II, Panji Dabutar.	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 94 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana cuaca ekstrim / angin puting beliung.

Tabel 2. 18 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

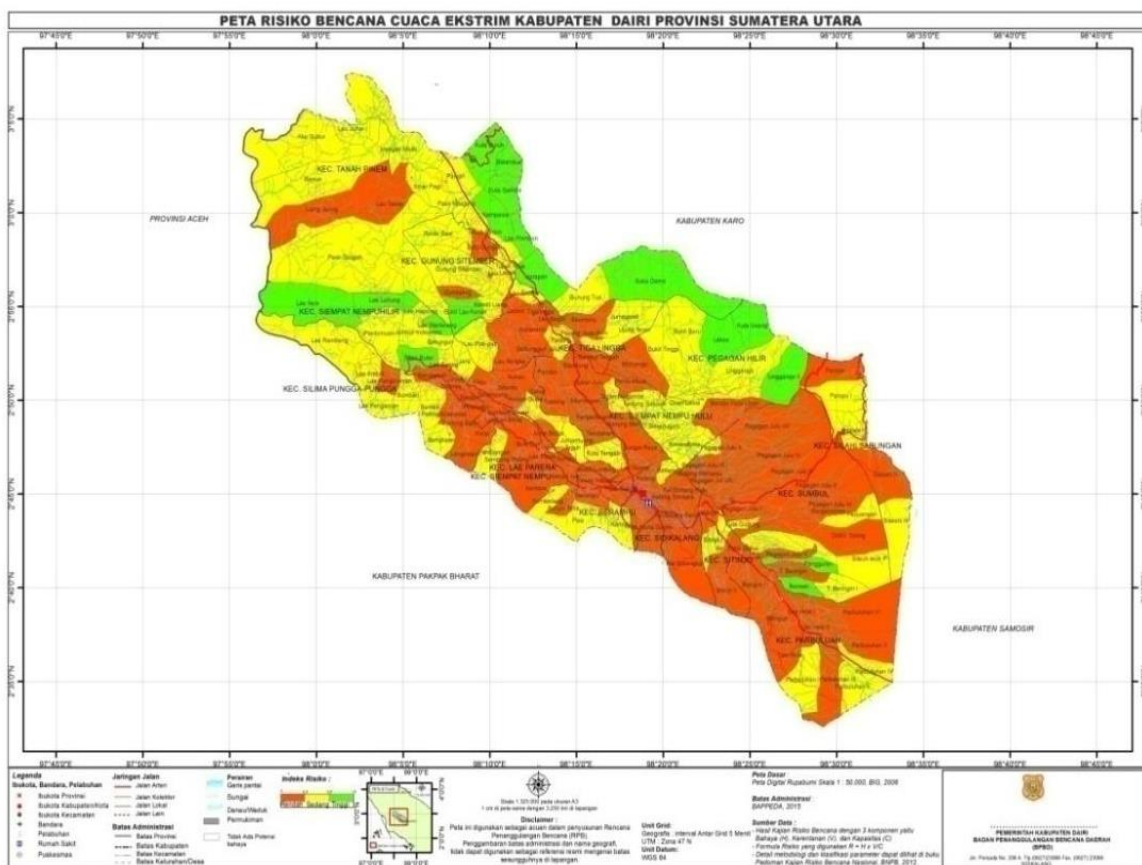
TINGKAT RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM/ ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	35.234	79.595	77.283
PENDUDUK (Jiwa)	20.844	78.959	179.161
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	14.578.309.440	48.433.470.921	148.626.611.240

FASILITAS UMUM (Rp)	49.950.000.000	173.900.014.950	294.350.059.800
RUMAH PDDK (Rp)	692.750.096.100	2.508.900.297.150	5.215.701.127.600
JUMLAH RUMAH (Unit)	4.032	10.532	25.701

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 77.283 ha atau 40,09% dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 179.161 jiwa atau 57,88% dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 25.458 unit atau 38,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 13. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko angin puting beliung, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Lae Parira, Parbuluan, Sidikalang, Sumbul, Sijinjo, dan Siempat Nempu Hulu maupun Siempat Nempu.

5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dairi selama periode 2012 – 2016 tercatat sebanyak 3 kejadian. Umumnya adalah kebakaran hutan di daerah Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan

Sitinjo, Kebakaran yang terjadi ini biasanya tidak menciptakan dampak yang berarti.

Tabel 2. 19 Matriks Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	Kec. Sidikalang: Bintang Kec. P Hilir: Laksa, Simartugan Kec. SN Hilir: Lae Itam, Lae Markelang Kec. S5P2: Lae Rambong	Kec. Tanah Pinem: Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Kuta Buluh, Tanah Pinem, Kempawa, Kuta gambar, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Sukadame Kec. Sumbul: Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Pangguruan, Barisan Nauli Kec. Sidikalang: Kalang, Belang malum, Bintang Marsada Kec. Tigalingga: Ujung Teran, Sarintonu, Jua Gerat, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Palding, Lau Bagot, Tigalingga, Laun Sereme, Palding Jaya Kec. P Hilir: Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga raja, Onan lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Kuta Usang, Lingga Raja II, Bukit Baru Kec. G Sitember:	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Gunung Sitember, Batu Gun-Gun, Tumpak Raja, Kendit Liang Kec. SN Hilir: Lae Luhung, Sopo Butar, Lae Haporas Kec. SN Hulu: Tambahan, Kuta Tengah, Bakkal Julu, Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir- Gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Pandan Kec. S Nempu: Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Sosor Lontung Kec. S5P2 : Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Siboras, Bonian, Tung-tung Batu, Bongkaras, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan Kec. Parbuluan: Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I Kec. L Parira: Lae Parira, Bulu Duri, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara Kec. Berampu: Karing, Pasi, Sambaliang Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Paropo I Kec. Sijinjo: Panji Dabutar	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
	TINGGI		Kec. Tanah Pinem: Liang Jering, Alur Subur, Sinar pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Lau Tawar, Gunung Tua Kec. Sumbul: Pegagan Julu V, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin I Kec. Sidikalang: Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Sidiangkat, Huta Gambir, Huta Rakyat Kec. Tigalingga: Sumbul Tengah, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir: Mbinanga, Perik Mbue Kec. G Sitember: Lau Lebah, Bukit Lau Kersik, Rantai Besi, Gundaling Kec. SN Hilir: Pardomuan, Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Sering Kec. SN Hulu: Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kec. S Nempu: Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kec. S5P2: Bakkal Gajah, Uruk Belin, Longkotan Kec. Parbuluan: Parbuluan V, Lae Hole II Kec. L Parira: Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu Kec. Berampu:	Kec. Sidikalang: Batang Beruh Kec. S Nempu: Adian Gupa

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Berampu, Banjartoba Kec. Silahisabungan : Silalahi III, Paropo Kec. Sijinjo: Sijinjo, Sijinjo I, Sijinjo II	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 101 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 62 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

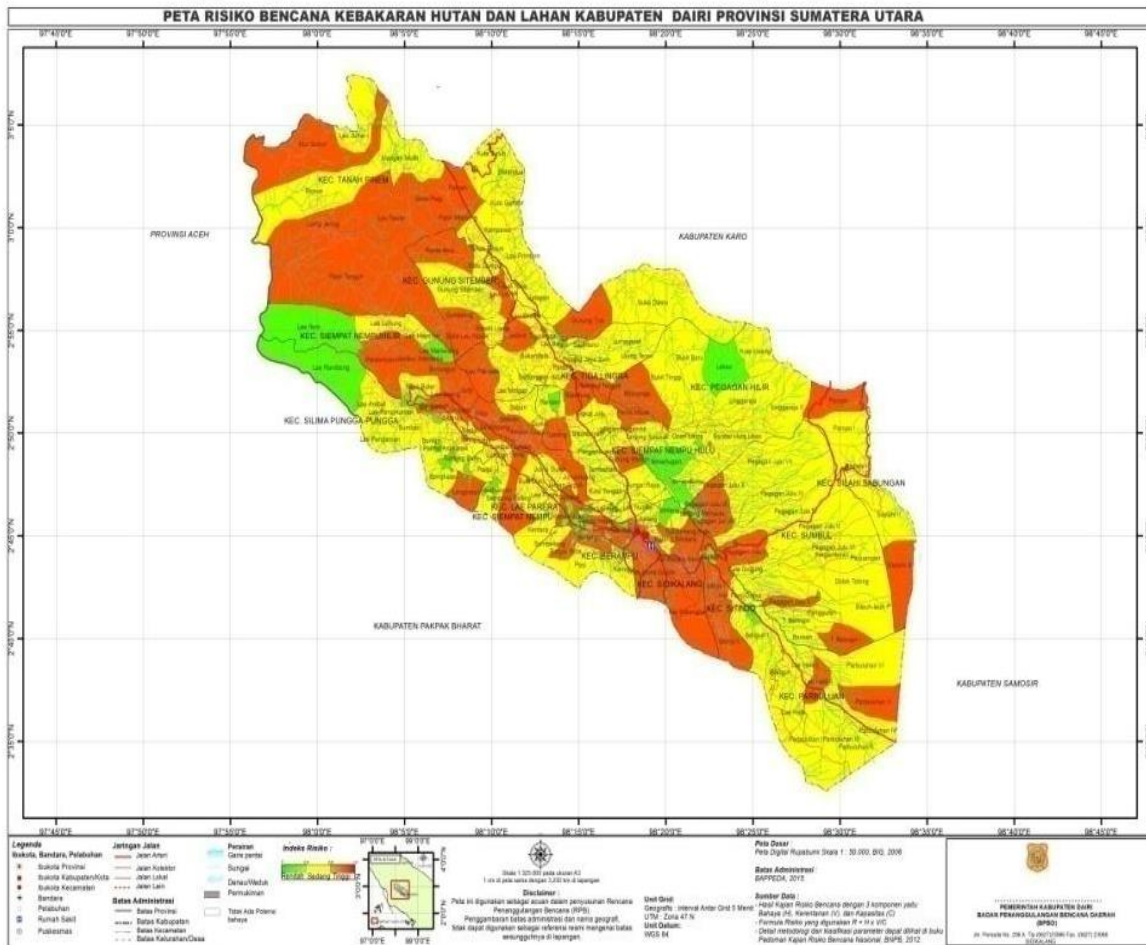
Tabel 2. 20 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	74.822	43.587
PENDUDUK (Jiwa)	-	143.918	116.336
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	69.943.046.260	130.399.124.070
FASILITAS UMUM (Rp)	-	276.850.000.000	211.250.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	5.187.050.000.000	4.095.650.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	62.724	3.320

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 43.587 ha atau 22,6 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 116.336 jiwa atau 41,7 % dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 3.320 unit atau 5,0 % dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 14. Peta Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Di sisi lain, jika melihat pada peta risiko kebakaran hutan dan lahan, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi masih didominasi oleh Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu dan Sidikalang.

6. Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Dairi pada periode 2012 – 2016 dilaporkan terjadi sebanyak 2 kejadian. Walau belum berdampak masif, secara lokal bencana ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air dan membuat gagal panen.

Tabel 2. 21 Matriks Risiko Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG		KEC. TANAH PINEM: Lau Njuhar, Tanah Pinem, Lau Primbon KEC. SUMBUL: Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli KEC. SIDIKALANG: Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang malum, Bintang Marsada KEC. TIGALINGGA: Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Juma Gerat, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Pak-pak KEC. PEGAGAN HILIR : Simanduma, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan KEC. GUNUNG SITEMBER : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Laksa, Mbinanga, Kuta Usang, Lingga Raja II, Perik Mbue, Bukit Baru KEC. SN HILIR : Jambur Indonesia, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas KEC. SN HULU : Tambahan, Kuta Tengah, Sigambir-gambir, Silumboyah,	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
	TINGGI		Kec. Tanah Pinem: Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Balandua, Lau Tawar, Harapan, Gunung Tua, Suka dame Kec. Sumbul: Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VII Kec. Sidikalang: Kota Sidikalang, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat Kec. Tigalingga: Sukandebi, Lau Bagot, Lau Mil, Palding Jaya Kec. P Hilir: Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Laksa, Mbinanga, Kuta Usang, Lingga Raja II, Perik Mbue, Bukit Baru Kec. G Sitember: Bukit lau Kersik, Batu Gungun, Rante Besi Kec. SN Hilir: Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Lae Sering Kec. S N Hulu: Lae Nuaha, Sungai Raya, Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kec. S Nempu: Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kec. Silima Punggapungga: Lae Rambong, Lae Panginuman, Kec. L Parira: Sumbul, Kentara, Lae Parira, Sempung Polling, Lumban Sihite Kec. Silahisabungan: Silalahi, Silalahi II, Silalahi III, Paropo, Paropo I Kec. Sitinjo: Sitinjo,	Kec. T Pinem: Mangan Molih, Renun, Kempawa Kec. S Nempu: Adian Gupa

TINGKAT RISIKO	TINGKAT KAPASITAS		
	RENDAH	SEDANG	TINGGI
		Sitinjo I, Panji Dabutar	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 84 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 76 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kekeringan.

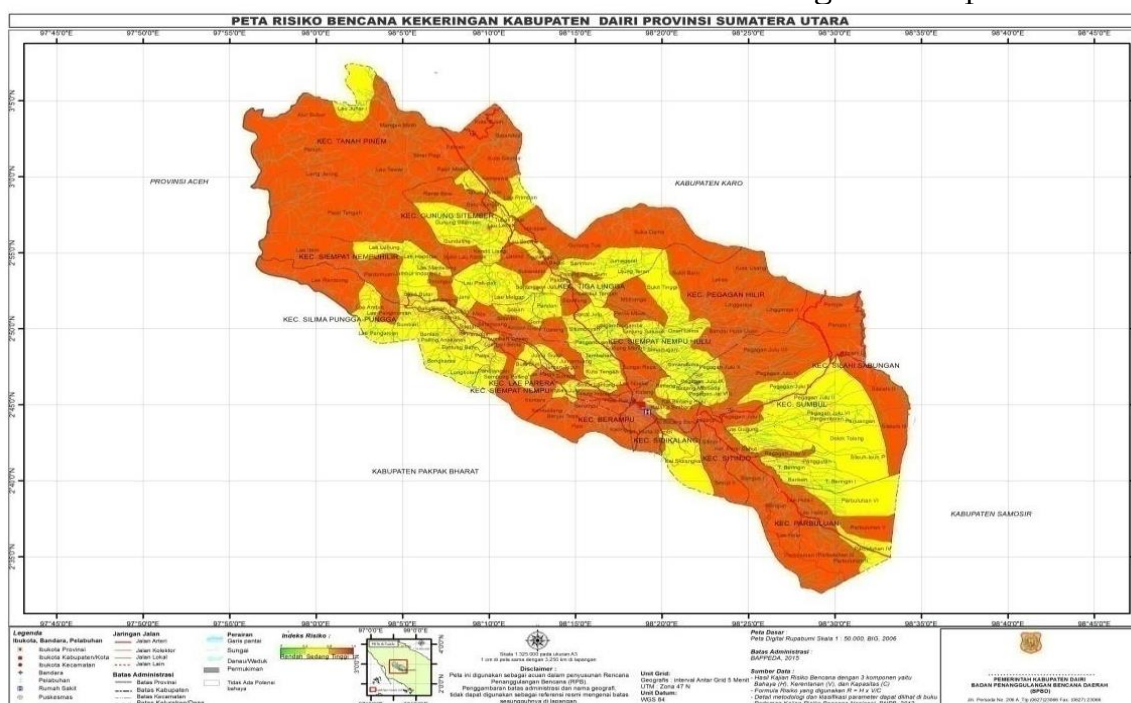
Tabel 2. 22 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	78.110	114.002
PENDUDUK (Jiwa)	-	117.649	161.315
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	68.731.519.992	150.530.107.796

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 114.002 ha atau 59,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 161.315 jiwa atau 57,8 % dari total populasi.

Gambar 2. 15. Peta Indeks Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko kekeringan, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Sidikalang, Sumbul, dan Pegagan Hilir. Dan berdasarkan perkembangan perubahan cuaca global dan kerusakan lingkungan, maka diprediksi tingkat risiko ini akan meningkat secara cepat.

Berdasarkan data DIBI tahun 2004 – 2016 persentase kejadian bencana di Kabupaten Dairi dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah bencana tanah longsor sebesar 43%, Kebakaran Permukiman 32%, Cuaca Ekstrim sebesar 21%, dan banjir bandang 4%.

2.1.1.4. Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi, meliputi:

1. Kawasan Danau Toba

Kawasan Danau Toba di Kabupaten Dairi berada di Kecamatan Silahisabungan. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

2. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Dairi merupakan kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69, meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Siempat Nempu. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

3. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dipusatkan di Sitinjo sebagai pusat agropolitan dan terdiri dari 3 (tiga) distrik, yaitu:

- Distrik Agropolitan Sumbul
- Distrik Agropolitan Tigalingga
- Distrik Agropolitan Parongil

Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara lokalitas, selain Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi

dan terdapatnya kawasan perkotaan Siultinggil, terdapat beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (lokal), yaitu:

a. Kawasan Minapolitan Budidaya di Silahisabungan

Berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan budidaya yaitu suatu konsep perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Danau Toba yang luas dan banyaknya permintaan ikan air tawar bagi kota-kota di Pulau Sumatera menyebabkan prospek minapolitan budidaya cukup prospektif. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat.

b. Kawasan Ekowisata Dairi

Kabupaten Dairi memiliki keindahan panorama alam, kekayaan flora dan fauna yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak mendapat kunjungan wisatawan.

Kabupaten Dairi memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan umumnya masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata.

Sumber daya alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam, meliputi keindahan alam, pariwisata budaya, flora dan fauna sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dairi.

Dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan kecenderungan wisatawan dalam memilih objek atau lokasi wisata untuk dikunjungi. Wisatawan tidak lagi ingin sekedar datang untuk melihat dan menikmati daya tarik objek wisata tertentu dengan kekhasannya tetapi telah meningkat kearah yang dapat memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru. Model wisata seperti ini dikenal dengan istilah ekowisata

(*ecotourism*) atau sering pula digunakan istilah wisata lingkungan, wisata konservasi, wisata eko atau wisata ekologi.

Berdasarkan sebaran lokasi berpotensi sebagai obyek ekowisata yang ditinjau dari kedekatannya dapat dikembangkan menjadi beberapa zona kawasan wisata, seperti:

- Zona kawasan wisata Sidikalang meliputi objek wisata Taman Wisata Iman, Letter S, Lae Pandaroh, Sicike-cike, Puncak Sidiangkat, Letter Z Silumboyah dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Danau Toba, meliputi Danau Toba, Kawasan Hutan, Gunung, Waduk PLTA Renun dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Tigalingga, meliputi Lau Belulus, Lae Simuhur, Danau/Waduk diatas gunung, Agrowisata dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Parongil, meliputi Air Terjun Lae Baski, Panorama Tornaui dan lain-lain.

c. Kawasan Agropolitan Parsiul

Kawasan agropolitan Parsiul di Kabupaten Dairi meliputi Kecamatan Parbuluan, Sitingo dan Sumbul sebagai kawasan terpadu dalam pengembangan hortikultura, perkebunan jeruk dan kopi.

d. Kawasan Perkotaan Siultinggil

Kawasan perkotaan Sidikalang, Sitingo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil merupakan kota-kota di Kabupaten Dairi yang didorong perkembangannya mengingat letaknya yang strategis dilalui jalan nasional dan merupakan gerbang pintu keluar - masuk Provinsi Sumatera Utara dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat. Khusus Kota Parongil diprediksi akan berkembang pesat apabila bahan tambang seng dan timah hitam dieksploitasi sehingga diharapkan memiliki dampak ganda terhadap perkembangan Kota Parongil.

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2020 adalah 308.764 jiwa, terdiri dari 154.828 jiwa penduduk laki-laki dan 154.136 jiwa

penduduk perempuan. Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 101 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata hampir 101 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2020, terdapat 9 kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100% ke atas, yaitu Kecamatan Sidikalang, Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Parbuluan, Gunung Sitember, Berampu dan Sitinjo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara empat kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100%, yang mempunyai arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel 2. 23 Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	26.815	26.618	53.433	100,74
2	Sumbul	22.944	22.662	45.606	101,24
3	Tigalingga	12.047	12.381	24.428	97,30
4	Siempat Nempu	10.065	10.065	20.241	98,91
5	Silima Punggapungga	7.104	7.344	14.448	96,73
6	Tanah Pinem	11.454	11.307	22.761	101,30
7	Siempat Nempu Hulu	10.143	10.040	20.183	101,03
8	Siempat Nempu Hilir	5.934	5.812	11.746	102,10
9	Pegagan Hilir	8.356	8.384	16.740	99,67
10	Parbuluan	12.673	12.563	25.236	100,88
11	Lae Parira	7.178	7.348	14.526	97,69
12	Gunung Sitember	5.461	5.253	10.714	103,96
13	Berampu	4.577	4.454	9.031	102,76
14	Silahisabungan	2.598	2.644	5.242	98,26
15	Sitinjo	7.279	7.150	14.429	101,30
Jumlah		154.628	154.136	308.764	100,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2021

Persebaran penduduk dapat dilihat dari kepadatan penduduk dan persentase penduduk yang menempati suatu wilayah. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 756,09 jiwa/km². Hal ini disebabkan karena Kecamatan Sidikalang merupakan

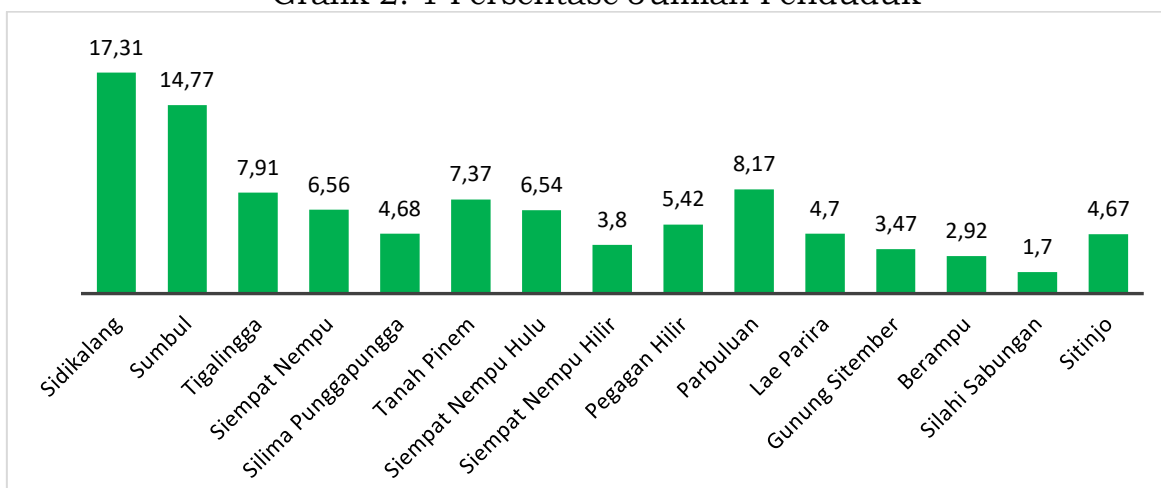
pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 24 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km ²)	%	
1	Sidikalang	53.433	70,67	17,31	756,09
2	Sumbul	45.606	192,58	14,77	236,82
3	Tigalingga	24.428	197	7,91	124,00
4	Siempat Nempu	20.241	60,15	6,56	336,51
5	Silima Punggapungga	14.448	88,35	4,68	163,53
6	Tanah Pinem	22.761	439,4	7,37	51,80
7	Siempat Nempu Hulu	20.183	93,93	6,54	214,87
8	Siempat Nempu Hilir	11.746	105,62	3,80	111,21
9	Pegagan Hilir	16.740	155,33	5,42	107,77
10	Parbuluan	25.236	235,4	8,17	107,20
11	Lae Parira	14.526	42,75	4,70	339,79
12	Gunung Sitember	10.714	77	3,47	139,14
13	Berampu	9.031	40,85	2,92	221,08
14	Silahisabungan	5.242	75,62	1,70	69,32
15	Sitinjo	14.429	53,15	4,67	271,48
Jumlah		308.764	1.927,80	100	160,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2021

Grafik 2. 1 Persentase Jumlah Penduduk

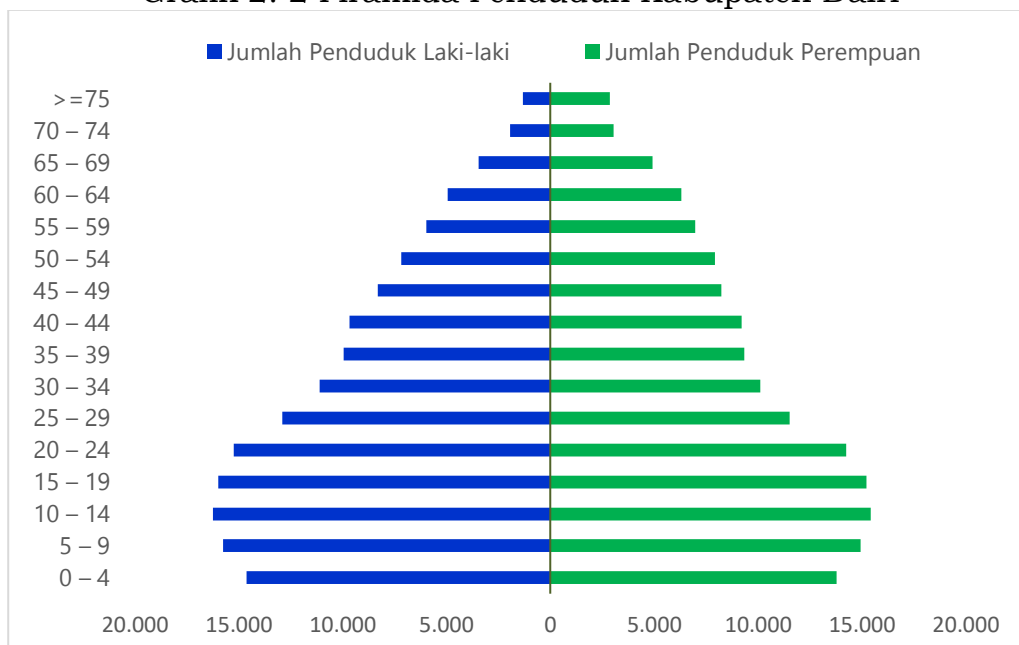


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2021

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan. Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban, yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun), persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (usia 65 tahun ke atas).

Grafik 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Dairi



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2021

Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin dapat disajikan dalam bentuk Piramida. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat berupa jumlah absolut ataupun persentase, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Berdasarkan piramida yang disajikan (Grafik 2.2), menunjukkan bahwa piramida penduduk di Kabupaten Dairi berbentuk seperti segetiga (kerucut) yang memiliki bentuk melebar di bagian alas dan mengerucut di bagian puncaknya. Kondisi tersebut mencerminkan Kabupaten Dairi memiliki piramida penduduk ekspansif. Piramida tersebut menunjukkan

bawah penduduk di Kabupaten Dairi cenderung berada pada penduduk dengan usia muda dan produktif. Kondisi tersebut sekaligus merepresentasikan angka kelahiran yang tinggi dengan tingkat kematian bayi yang rendah. Dengan demikian, lebih lanjut, penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus potensi kesempatan dan tenaga kerja harus dipersiapkan dan terencana dengan baik.

Tabel 2. 25 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Rasio Jenis	
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
1	0 – 4	14.619	13.791	28.410	106,00
2	5 – 9	15.758	14.943	30.701	105,45
3	10 – 14	16.242	15.431	31.673	105,26
4	15 – 19	15.986	15.216	31.202	105,06
5	20 – 24	15.242	14.263	29.540	107,11
6	25 – 29	12.899	11.522	24.421	111,85
7	30 – 34	11.109	10.107	21.216	109,91
8	35 – 39	9.963	9.353	19.316	106,52
9	40 – 44	9.661	9.206	18.867	104,94
10	45 – 49	8.308	8.247	16.555	100,74
11	50 – 54	7.180	7.927	15.107	90,58
12	55 – 59	5.963	6.969	12.932	85,56
13	60 – 64	4.945	6.325	11.270	78,18
14	65 – 69	3.455	4.934	8.389	70,02
15	70 – 74	1.943	3.039	4.982	63,94
16	>=75	1.320	2.863	4.183	46,11
Jumlah		154.628	154.136	308.764	100.32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2021

Tabel Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2020 diatas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu sebesar 200.426 atau 64,91% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang menjadi beban adalah sebesar 90.784 atau 29,40%, dengan penduduk kurang produktif sebesar 56.863 atau 16,42% dari jumlah penduduk. Pada umumnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (45-49) tahun hingga di atas 75 tahun memiliki jumlah yang semakin kecil, yang disebabkan oleh tingkat mortalitas penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, dan juga disebabkan karena adanya migrasi ke luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

2.2. Aspek Kesejahteraan

Sub-bab ini mendeskripsikan aspek kesejahteraan masyarakat yang terfokus pada tiga hal, yaitu: fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga. Gambaran umum aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup aspek-aspek yang tergabung dalam isu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, serta kepegawaian dan persandian. Secara lebih detail, bagian ini mencakup pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan regional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai beberapa data tersebut.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian Kabupaten Dairi dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB di suatu wilayah menunjukkan pertambahan nilai bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah tersebut sehingga mampu menggambarkan aktivitas perekonomian masyarakat. PDRB disajikan dalam dua jenis penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (nominal) dan atas dasar harga konstan (riil). Penggunaan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku ditujukan untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah, sedangkan harga konstan ditujukan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Penghitungan PDRB juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan maupun bahan evaluasi pembangunan periode yang lalu.

Tabel 2. 26 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

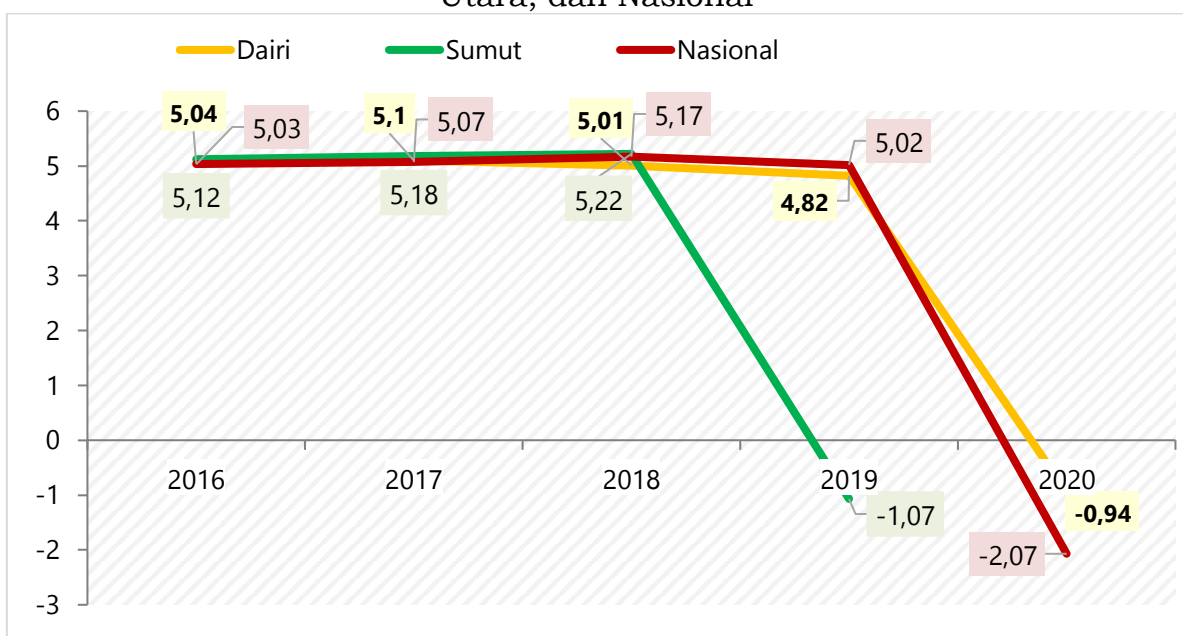
Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)
2016	7.484,07	5.688,45
2017	7.980,47	5.968,77
2018	8.560,78	6.267,82

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)
2019	9.166,42	6.569,81
2020	9.317,91	6.508,05

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Nilai PDRB ADHB di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2016-2020. Kondisi yang sama juga terjadi pada nilai PDRB ADHK. Namun, PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 walaupun tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi yang berkontraksi hingga -0,94 persen pada tahun 2020.

Grafik 2. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

2.2.1.2. Struktur Ekonomi Wilayah

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing lapangan usaha yang membentuk PDRB. Berikut ini adalah nilai PDRB ADHB Kabupaten Dairi beserta kontribusi masing-masing lapangan usaha.

Tabel 2. 27 PDRB ADHB dan Kontribusi Lapangan Usaha Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)					Kontribusi (%)					Rata-Rata Kontribusi (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.269,73	3.445,06	3.668,86	3.875,85	3.979,48	43,69	43,17	42,86	42,28	42,71	42,94
B - Pertambangan dan Penggalian	5,169	5,58	6,04	6,43	6,42	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C - Industri Pengolahan	27,47	30,19	33,56	35,79	36,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38
D - Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	5,68	6,31	6,99	7,27	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,79	6,21	6,643	7,13	7,33	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F - Konstruksi	980,83	1.077,98	1.169,73	1.275,12	1.250,16	13,11	13,51	13,66	13,91	13,42	13,52
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.278,01	1.364,95	1.461,17	1.577,45	1.604,32	17,08	17,10	17,07	17,21	17,22	17,13
H - Transportasi dan Pergudangan	292,72	314,89	345,30	381,23	381,03	3,91	3,95	4,03	4,16	4,09	4,03
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	226,04	240,82	255,05	266,93	258,10	3,02	3,02	2,98	2,91	2,77	2,94
J - Informasi dan Komunikasi	68,98	73,84	78,90	85,59	92,37	0,92	0,93	0,92	0,93	0,99	0,94
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	163,66	175,61	187,28	198,65	199,97	2,19	2,20	2,19	2,17	2,15	2,18
L - Real Estate	200,22	216,90	235,12	255,62	267,07	2,68	2,72	2,75	2,79	2,87	2,76
M,N - Jasa Perusahaan	4,67	5,09	5,57	6,12	6,16	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	758,22	807,37	875,51	945,44	973,58	10,13	10,12	10,23	10,31	10,45	10,25
P - Jasa Pendidikan	145,42	153,93	165,07	176,94	182,41	1,94	1,93	1,93	1,93	1,96	1,94
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,49	54,74	58,86	63,08	63,88	0,67	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68
R,S,T,U - Jasa lainnya	1,48	1,63	1,79	2,01	1,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
PDRB	7.484,07	7.980,47	8.560,77	9.166,42	9.317,91	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

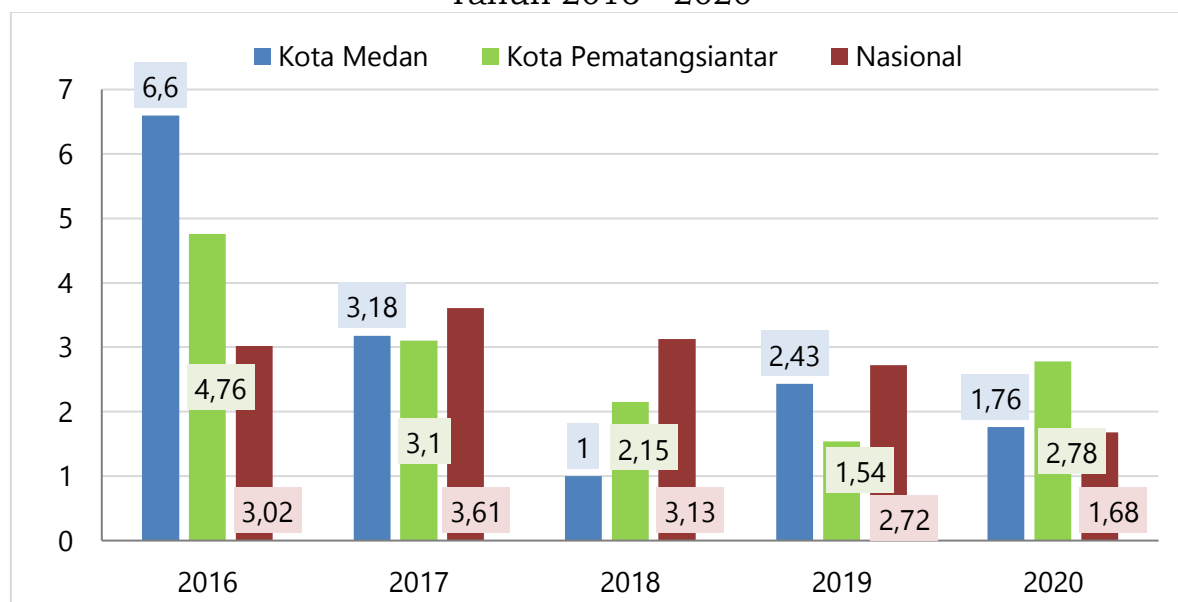
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor yang paling mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 42,94 persen pada periode 2016-2020. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor turut mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,13 persen. Dua sektor lain yang mendominasi yaitu sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata kontribusi masing-masing 13,52 persen dan 10,25 persen. Namun demikian, dari berbagai sektor tersebut tidak ada yang mengalami peningkatan kontribusi yang signifikan.

Tingginya laju pertumbuhan pertanian, kehutanan, dan perikanan disertai dengan besarnya kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Dairi menunjukkan sektor ini potensial untuk dikembangkan. Secara lebih rinci, sub lapangan pertanian menjadi kontributor terbesar sektor ini. Lapangan usaha pertanian menjadi kekuatan ekonomi utama Kabupaten Dairi. Namun, sektor ini tidak menjadi perhatian oleh generasi muda Kabupaten Dairi.

2.2.1.3. Laju Inflasi

Dinamika perkembangan harga barang dan jasa dapat dilihat dari laju inflasi atau deflasi. Indikator ini penting diperhatikan karena mampu menggambarkan pergerakan permintaan dan penawaran di pasar yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat.

Grafik 2. 4 Laju Inflasi Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRD per kapita merupakan angka kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Namun, perhitungan PDRB per kapita memiliki kekurangan, yaitu tidak mampu menggambarkan pemerataan kesejahteraan. Kelemahan tersebut disebabkan oleh besaran angka PDRB per kapita yang sangat dipengaruhi besarnya PDRB dan jumlah penduduk di wilayah perhitungan. Oleh karena itu, analisis PDRB per kapita harus diimbangi dengan indikator kesejahteraan lainnya, khususnya bagi daerah yang perekonomiannya didominasi sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2. 28 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB Kabupaten Dairi (miliar rupiah)	7.484,07	7.980,47	8.560,78	9.166,42	9.317,91
PDRB ADHK Kabupaten Dairi (juta rupiah)	5.688,45	5.968,77	6.267,82	6.569,81	6.508,05
Jumlah Penduduk (orang)	-	-	283.203	284.304	285.481
PDRB per Kapita ADHB (rupiah)	26.670.723	28.312.003	30.228.407	32.241.619	32.639.340
PDRB per Kapita ADHK (ribu rupiah)	20.271.733	21.175.177	22.131.900	-	-
Pertumbuhan PDRB per Kapita	4,50	4,46	4,52	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Dairi secara nominal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara secara riil cenderung fluktuatif.

2.2.1.5. Indeks Gini

Indeks gini digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat yang berdampak pada tingkat kesejahteraan dan potensi persoalan sosial. Jika indeks gini menunjukkan angka nol (0), maka semakin memperlihatkan pemerataan pendapatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika indeks gini mendekati angka satu (1), maka ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin jelas terlihat. Berikut data mengenai indeks gini Kabupaten Dairi dan beberapa daerah

di Provinsi Sumatera Utara. Dari Tabel 2.29 dapat dilihat bahwa rasio gini Kabupaten Dairi lebih baik dari Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. 29 Rasio Gini Kabupaten Dairi dan Beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

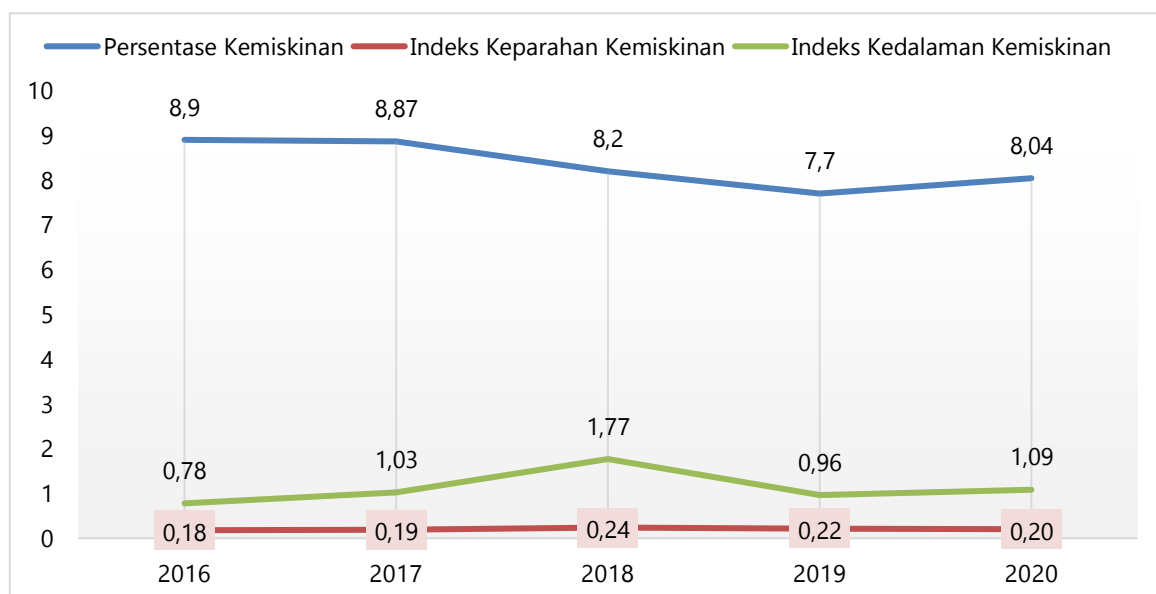
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Dairi	0,301	0,240	0,260	0,290	n/a
Kota Medan	0,332	0,352	0,314	n/a	n/a
Sumatera Utara	0,319	0,315	0,318	0,317	0,316

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan *basic need approach* oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi ini berarti bahwa kemiskinan dihitung menggunakan komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per kapita, maka kemiskinan semakin kecil. Adapun data mengenai kemiskinan di Kabupaten Dairi dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2. 5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Persentase penduduk miskin Kabupaten Dairi mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen pada tahun 2020. Berbeda halnya dengan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan adanya penurunan. Penurunan dalam indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga

semakin menyempit. Sementara untuk penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa adanya penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 30 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) Kabupaten Dairi dan Beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Dairi	24,94	24,98	23,19	21,86	22,93
Samosir	18,01	18,43	16,81	15,79	15,80
Kota Medan	206.87	204	186	183.79	183.54
Kota Pematangsiantar	-	-	22,01	21,99	22,18
Karo	38,74	40,02	35,36	34,08	36,57

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Medan dan Kabupaten Karo, namun lebih tinggi dari Kabupaten Samosir dan Kota Pematangsiantar. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Dairi selalu di atas 20 ribu, sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir berada di bawah angka 20 ribu.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam mengukur aspek kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Konteks pembangunan di Kabupaten Dairi, fokus kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator, meliputi: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Usia Harapan Hidup, dan Rasio Penduduk yang bekerja. Berikut adalah data mengenai capaian indikator-indikator makro untuk menganalisa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dairi.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

IPM dibentuk tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merupakan harapan jumlah tahun hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Sementara tolok ukur pengetahuan dapat dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) pendidikan formal yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara HLS adalah harapan lamanya (tahun) anak pada umur tertentu dalam menempuh sekolah formal di masa mendatang. Sedangkan standar hidup layak dapat digambarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang dapat ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Tabel 2. 31 Perkembangan IPM di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp. 000)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2016	67,95	12,84	8,70	10.190	69,61
2017	68,13	13,06	8,90	10.395	70,36
2018	68,41	13,07	9,15	10.492	70,89
2019	68,79	13,09	9,34	10.602	71,42
2020	69,00	13,10	9,58	10.350	71,57

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Pencapaian angka IPM Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020. Namun demikian, peningkatan tersebut belum signifikan. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan IPM hanya sebesar 1.96. Kondisi ini tidak terlepas dari tiga dimensi tujuan IPM, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan sehat yang ditunjukkan melalui AHH. AHH Kabupaten Dairi dalam lima tahun hanya terakhir mengalami peningkatan 1.05.
2. Dimensi pengetahuan yang ditunjukkan melalui HLS dan RLS. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, HLS dan RLS Kabupaten Dairi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,26 dan 0,88.
3. Dimensi kehidupan yang layak diukur dari pengeluaran per kapita riil pertahun yang disesuaikan. Selama lima tahun

terakhir, pengeluaran riil per kapita pertahun yang disesuaikan di Kabupaten Dairi Rp160.000,-.

Tabel 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM
1	Kota Medan	80,98
2	Kota Pematangsiantar	78,75
3	Kota Binjai	75,89
4	Deli Serdang	75,33
5	Kota Padangsimpun	75,22
6	Kota Tebing Tinggi	75,17
7	Toba	75,16
8	Karo	74,43
9	Kota Sibolga	73,63
10	Tapanuli Utara	73,47
11	Simalungun	73,25
12	Labuhanbatu	72,01
13	Labuhanbatu Utara	71,61
14	Dairi	71,57
15	Labuhanbatu Selatan	71,4
16	Langkat	71
17	Samosir	70,63
18	Asahan	70,29
19	Sedang Bedagai	70,24
20	Tapanuli Selatan	70,12
21	Kota Gunungsitoli	69,31
22	Tapanuli Tengah	69,23
23	Humbang Hasundutan	68,87
24	Kota Tanjungbalai	68,65
25	Batu Bara	68,36
26	Padang Lawas	68,25
27	Pakpak Bharat	67,59
28	Mandailing Natal	66,79
29	Nias Utara	62,36
30	Nias	61,93
31	Nias Selatan	61,89
32	Nias Barat	61,51
33	Padang Lawas Utara	39,85
SUMATERA UTARA		71,77
NASIONAL		71,94

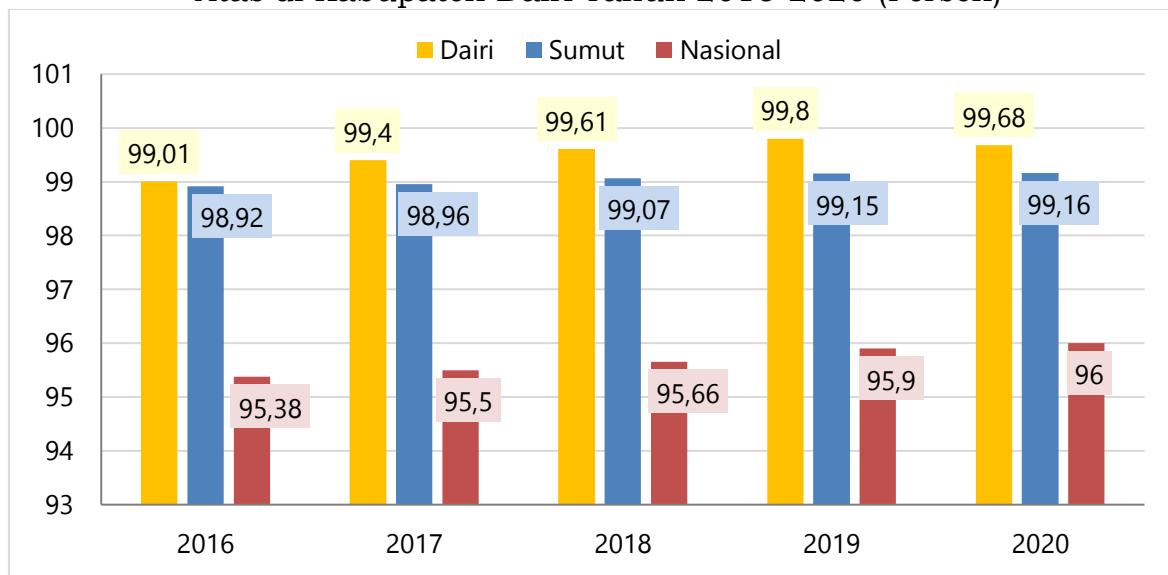
Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Capaian IPM Kabupaten Dairi sudah masuk di dalam kategori IPM tinggi. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, capaian tersebut lebih tinggi dari Kabupaten Samosir dan lebih rendah dari Kota Pematangsiantar, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan juga IPM Nasional. Kondisi ini mengindikasikan masih ada beberapa faktor yang belum mampu dikelola dengan optimal.

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan untuk mengetahui sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar memberi kemanfaatan bagi sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dan melanjutkan pembelajaran. Dalam konteks Kabupaten Dairi, capaian AMH disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

Grafik 2. 6 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

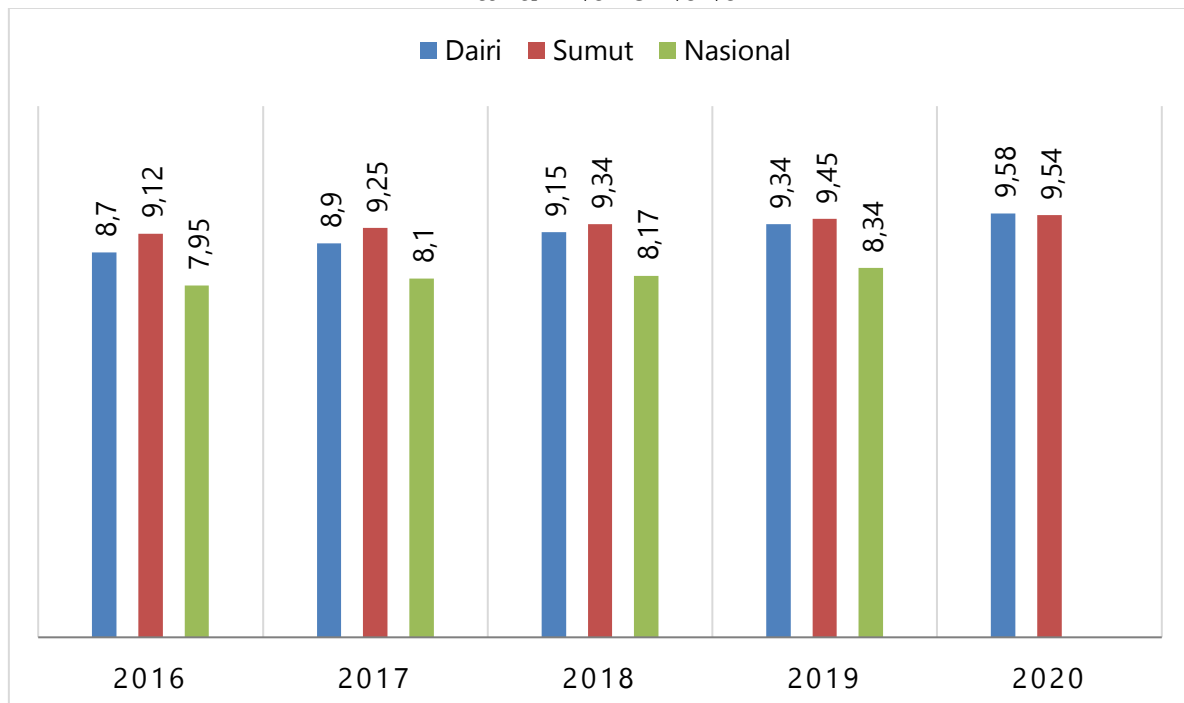
Terdapat sekitar 1,32% masyarakat Kabupaten Dairi yang masih buta huruf hingga tahun 2020. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2019, namun lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maupun nasional.

2.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah

Akses terhadap layanan pendidikan juga dapat diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diikuti oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang

ditamatkan. Capaian RLS di Kabupaten Dairi disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Grafik 2. 7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



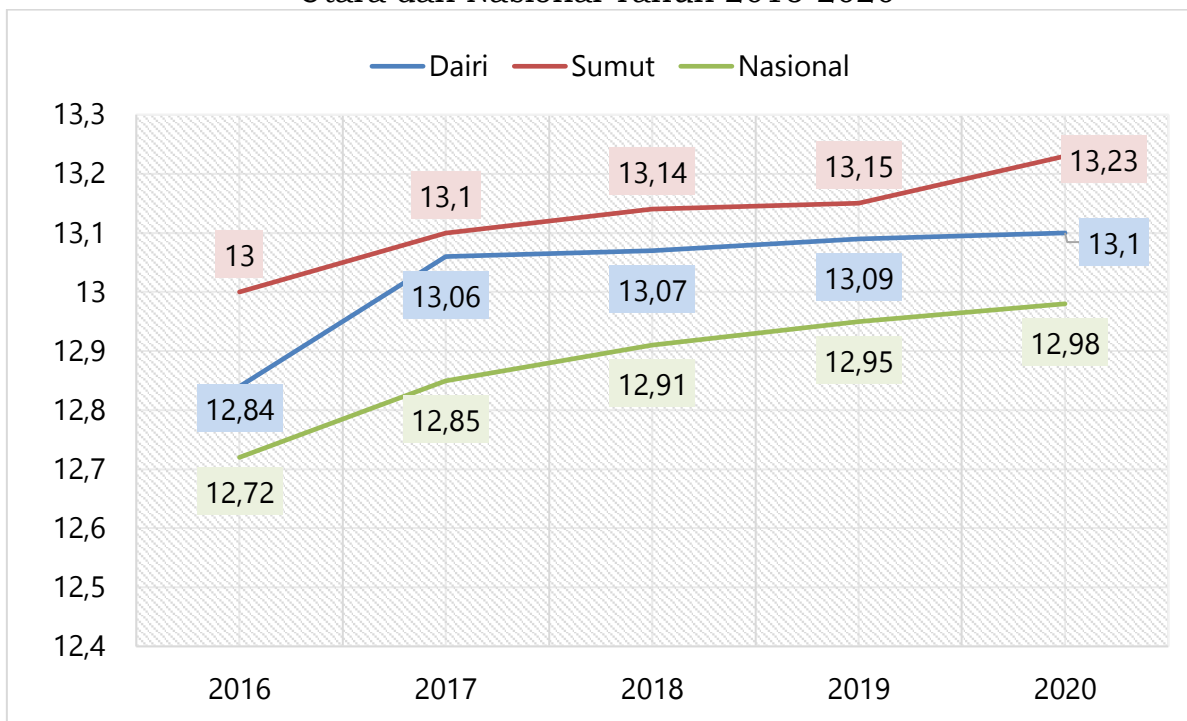
Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

RLS Kabupaten Dairi meningkat secara konsisten meskipun tidak secara signifikan pada tahun 2016 hingga 2020. Capaian RLS Kabupaten Dairi 8,7 pada tahun 2016 dan hanya meningkat 0,88 pada tahun 2020. Secara lebih detail, RLS Kabupaten Dairi masih berada di bawah RLS Provinsi Sumatera Utara. Meski demikian, capaian tersebut sudah berada di atas RLS Nasional. Perkembangan data tersebut mengindikasikan jenjang pendidikan tertinggi rata-rata masyarakat Kabupaten Dairi sudah berada di atas rata-rata nasional.

2.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan durasi lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan dilalui oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (BPS, 2020). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Adapun perbandingan HLS antara Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui grafik berikut.

Grafik 2. 8 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020



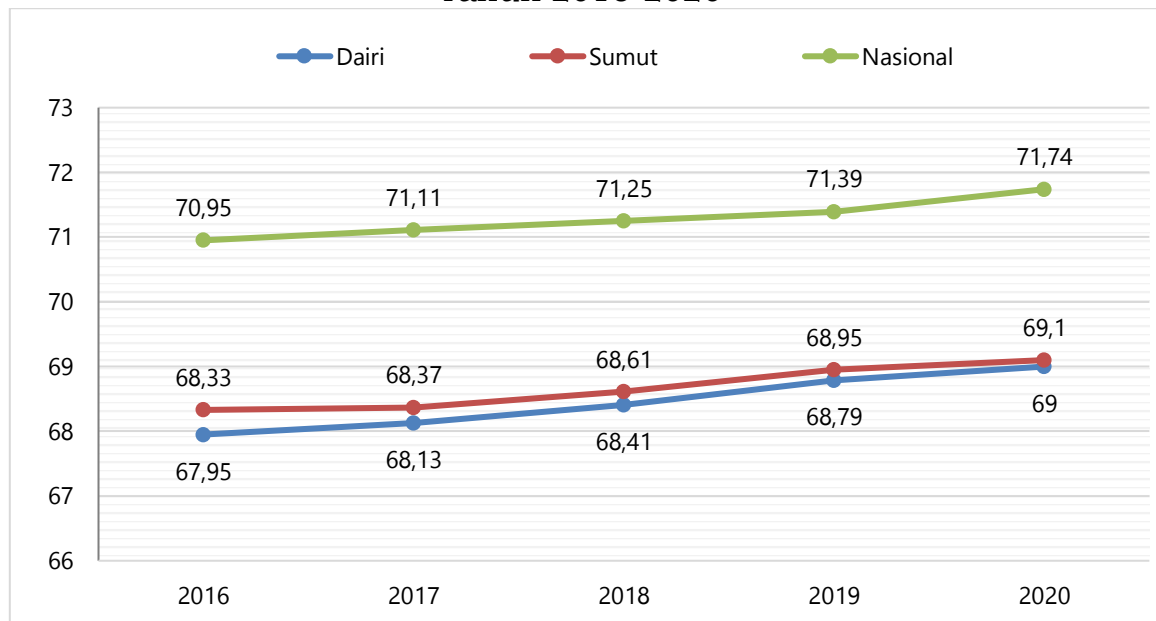
Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Capaian HLS Kabupaten Dairi mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020. HLS tertinggi di Kabupaten Dairi sebesar 13,1 tahun pada tahun 2020. Artinya, rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.1 tahun atau sudah lebih dari 12 tahun. Angka HLS Kabupaten Dairi lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Sumatera Utara. Namun, capaian tersebut lebih tinggi dari angka HLS nasional. Perkembangan data tersebut mengindikasikan semakin membaiknya akses pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Dairi.

2.2.2.5. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya (BPS, 2020). Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan di antaranya meliputi dan program kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, dan pemberantasan kemiskinan. Perbandingan AHH Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional pada tahun 2016-2020 dapat dilihat di grafik berikut.

Grafik 2. 9 AHH Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Tren AHH Kabupaten Dairi meningkat, namun angkanya lebih rendah jika dibandingkan dengan tren AHH Provinsi Sumatera Utara dan AHH Nasional pada tahun 2016-2020. Capaian AHH Kabupaten Dairi meningkat 1.05 dalam kurun waktu 2016-2020 dengan peningkatan tertinggi sebesar 0,38 poin pada tahun 2018-2019. Peningkatan tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan peningkatan AHH Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada tahun yang sama. Kondisi ini menggambarkan masih belum optimalnya usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Dairi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Permasalahan ini disebabkan belum optimalnya kualitas kesehatan ibu, bayi, balita, dan masyarakat.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kesenian, kebudayaan, dan olahraga merupakan potensi daerah yang semestinya dilestarikan dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki fokus dalam pengembangan seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Dairi juga terus berusaha mengelola dan melestarikan kekayaan budaya guna meningkatkan pemahaman sejarah kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian peninggalan dan nilai-nilai tradisional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan festival seni budaya daerah. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan

masyarakat. Kondisi perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Dairi pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 33 Kondisi Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok kebudayaan	16	16	16	16	16
2.	Jumlah bahasa daerah	9	9	9	9	9
3.	Jumlah tari-tarian daerah	19	19	19	19	19
4.	Jumlah budaya daerah yang dikembangkan	4	4	4	4	4
5.	Jumlah budaya daerah yang belum dikembangkan	7	7	7	7	7
6.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	40	40	40	40	40
7.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Kabupaten Dairi	3	3	3	3	3
8.	Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	34	34	34	31	31
9.	Kawasan Cagar Budaya	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Kondisi perkembangan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Dairi tidak mengalami perubahan yang drastis selama tahun 2016-2020. Perubahan hanya terjadi pada penurunan jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan pada tahun 2018-2019. Sementara untuk aspek lain tidak mengalami perubahan sama sekali.

Selain fokus pada pengembangan seni dan budaya, Pemerintah Kabupaten Dairi juga bertekad untuk mengembangkan olahraga. Olahraga merupakan salah satu aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda. Pembinaan di bidang olahraga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat berbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana, dan juga teknologi. Berikut kondisi kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

Tabel 2. 34 Kondisi Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi kepemudaan	41	47	47	47	47
2.	Jumlah organisasi olahraga	16	16	16	16	16
3.	Prasarana olahraga	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan dari 41 buah pada tahun 2016 menjadi 47 buah pada tahun 2017 hingga 2020. Sementara untuk jumlah organisasi olahraga dan prasarana olahraga pada tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yang masing-masing berjumlah 16 buah dan 13 unit.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Dairi.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan. Berikut adalah capaian layanan urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Dairi.

2.3.1.1. Urusan Pelayanan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

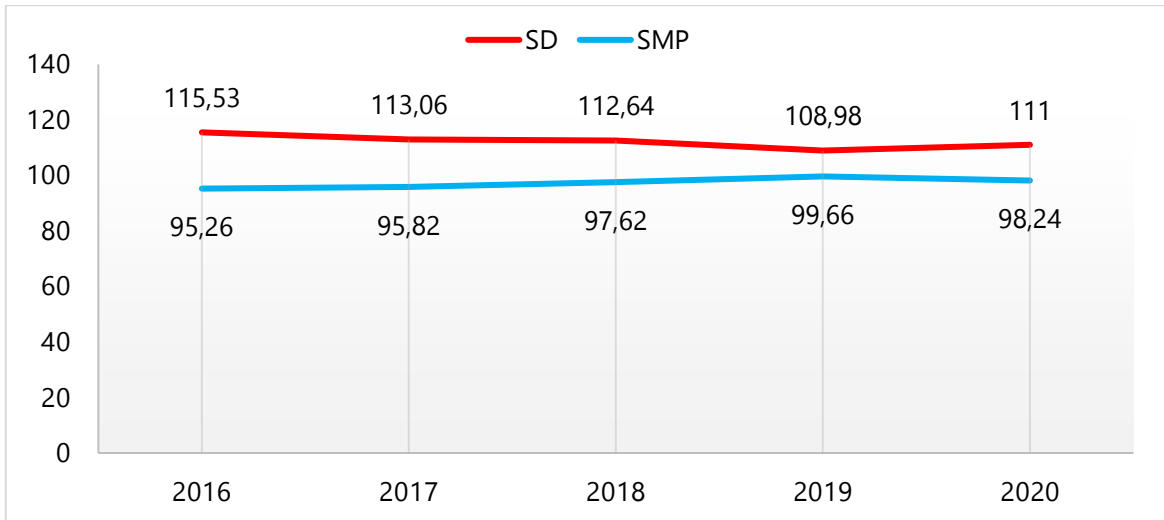
masyarakat serta sosial. Layanan urusan ini memiliki standar pelayanan minimal yang harus dijaga dengan baik. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu bidang terpenting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah modal yang sangat penting bagi pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Dairi berusaha menyelenggarakan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakatnya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok masyarakat di dalamnya. Salah satu dimensi utama dalam pembangunan sektor pendidikan adalah akses pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Dairi, penyediaan akses pendidikan dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan harapan lama sekolah.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator akses yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK mendekati atau lebih dari 100% menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Grafik 2. 10 Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat, SMP/Sederajat Tahun 2016-2020

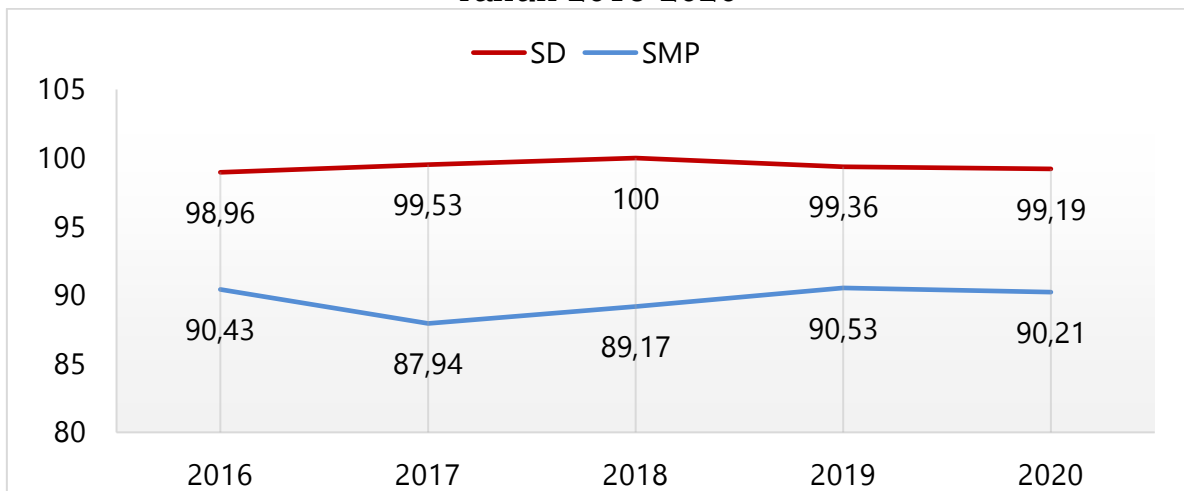


Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Pemerintah Kabupaten Dairi menargetkan seluruh penduduk usia sekolah (7-15 tahun) dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Dairi relatif merata.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat Pendidikan tertentu. Dibandingkan dengan APK, APM mampu memberikan gambaran mengenai partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang Pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut adalah tabel yang menunjukkan APM di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Grafik 2. 11 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat, SMP/Sederajat Tahun 2016-2020

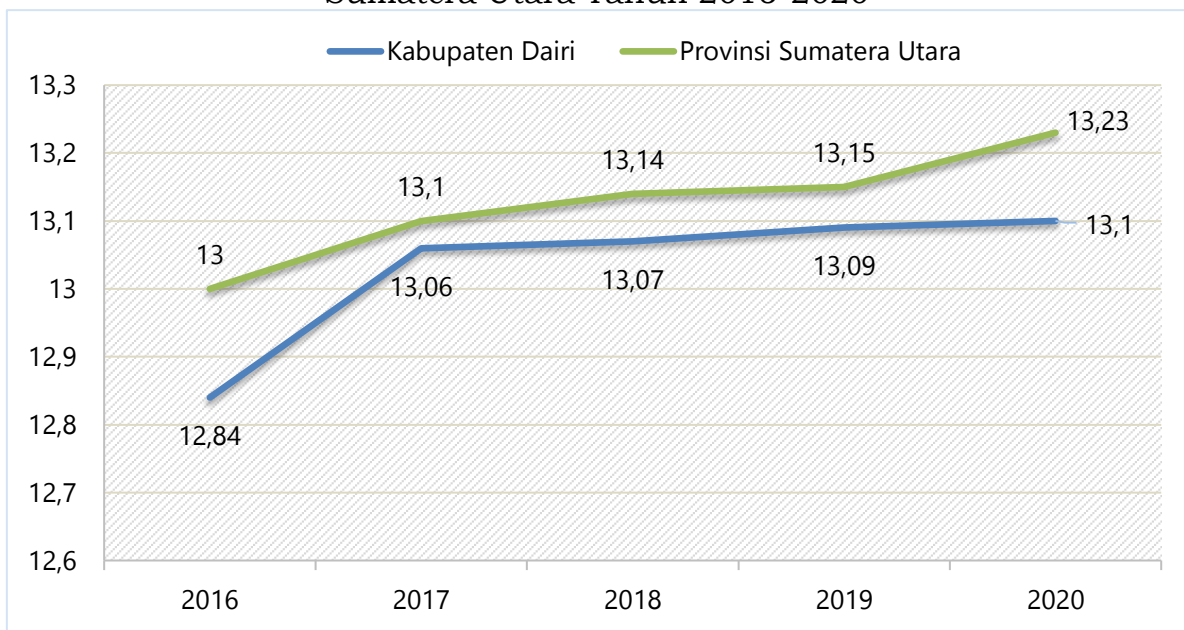


Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

APM Kabupaten Dairi menunjukkan angka yang fluktuatif. APM SD Kabupaten Dairi meningkat sebesar 0,23%, sedangkan APM SMP menurun sebesar 0,22% pada tahun 2016-2020. Data tersebut menunjukkan perbaikan kinerja partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai dengan golongan usia sekolah. Namun demikian, kinerja APM tersebut belum optimal.

Aspek lain dalam menilai bidang pendidikan adalah harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan harapan lama sekolah Kabupaten Dairi 2016-2020.

Grafik 2. 12 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2021

Harapan lama sekolah di Kabupaten Dairi cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 terjadi perubahan sebesar 0,26% dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya pembenahan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang sekolah. Namun, pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi masih perlu ditingkatkan, sebab angka dalam lima tahun terakhir selalu lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara.

Akses pendidikan yang belum optimal, juga dapat dilihat melalui data ketersediaan guru dan sekolah di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 35 Ketersediaan Guru di Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2020/2021

No	Kecamatan	Jumlah Guru								
		SD		MI	SMP		MTs	SMA / SMK		MA
		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1.	Sidikalang	307	92	57	153	92	78	193	64	77
2.	Berampu	71	-	26	41	-	-	-	-	-
3.	Sitinjo	56	25	10	33	3	-	53	-	-
4.	Parbuluan	208	21	-	100	30	-	81	-	-
5.	Sumbul	395	41	-	150	50	-	60	34	-
6.	Silahasabungan	51	-	-	20	7	-	25	-	-
7.	Silima Pungga-pungga	165	-	-	52	-	-	37	-	-
8.	Lae Parira	151	-	-	30	12	-	33	-	-
9.	Siempat Nempu	207	-	-	75	-	-	20	-	-
10.	Siempat Nempu Hulu	171	-	25	65	-	-	25	-	-
11.	Siempat Nempu Hilir	133	-	-	57	-	-	45	-	-
12.	Tigalingga	238	-	18	97	15	-	46	13	-
13.	Gunung Sitember	85	-	8	25	-	-	-	-	-
14.	Pegagan Hilir	142	-	5	48	19	-	60	2	-
15.	Tanah Pinem	203	-	4	59	-	-	69	-	-
	Jumlah	2.583	179	153	1.005	228	78	747	113	77

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Tabel 2. 36 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2020/2021

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah								
		SD		MI	SMP		MTs	SMA / SMK		MA
		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1.	Sidikalang	22	5	3	3	7	3	3	12	3
2.	Berampu	7	-	2	1	-	-	-	-	-
3.	Sitinjo	3	2	1	1	1	-	1	1	-
4.	Parbuluan	17	2	-	3	3	-	2	-	-
5.	Sumbul	37	5	-	5	7	-	1	6	-
6.	Silahasabungan	6	-	-	1	1	-	1	-	-
7.	Silima Pungga-pungga	18	-	-	2	-	-	1	-	-
8.	Lae Parira	13	-	-	1	2	-	1	-	-
9.	Siempat Nempu	20	-	-	3	-	-	1	-	-
10.	Siempat Nempu Hulu	16	-	2	3	-	-	1	-	-
11.	Siempat Nempu Hilir	15	-	-	3	-	-	2	-	-
12.	Tigalingga	22	-	1	3	3	-	1	2	-
13.	Gunung Sitember	9	-	1	1	-	-	-	-	-
14.	Pegagan Hilir	17	-	1	3	2	-	2	1	-
15.	Tanah Pinem	22	-	1	4	-	-	2	-	-
	Jumlah	244	14	12	37	26	3	19	22	3

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Selain akses pendidikan yang belum optimal, terdapat masalah pokok lainnya, yakni belum optimalnya kualitas pendidikan. Hal tersebut terjadi karena belum meratanya kualitas tenaga pendidik dan belum optimalnya kualitas kegiatan belajar mengajar. Permasalahan belum meratanya kualitas tenaga pendidik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Tahun 2020

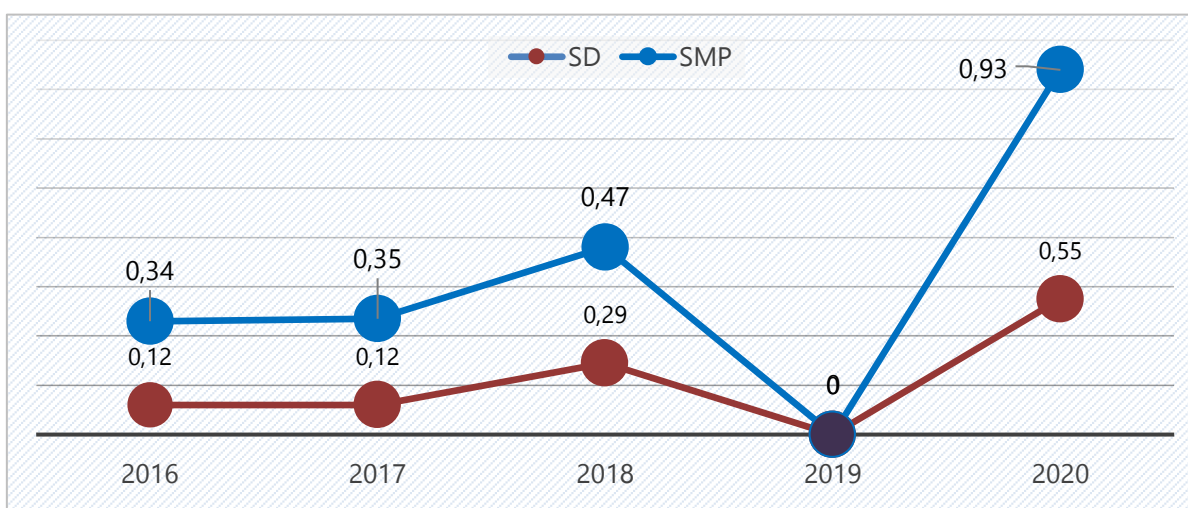
Uraian	Jenjang Pendidikan	
	SD (%)	SMP (%)
Kualifikasi Pendidik (Min. S1/D4)	64,98	87

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Minimnya ketersediaan guru yang berkompeten dijenjang SD dan SMP adalah penyebab belum meratanya kualitas tenaga pendidik. Pendidik yang sudah berkualifikasi S1/D4 di tingkat SD masih rendah jumlahnya. Sementara itu, pendidik yang berkualifikasi S1/D4 di tingkat SMP lebih banyak persentasenya.

Aspek lain untuk yang merepresentasikan kondisi pendidikan adalah angka putus sekolah. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berikut ini adalah grafik angka putus sekolah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

Grafik 2. 13 Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

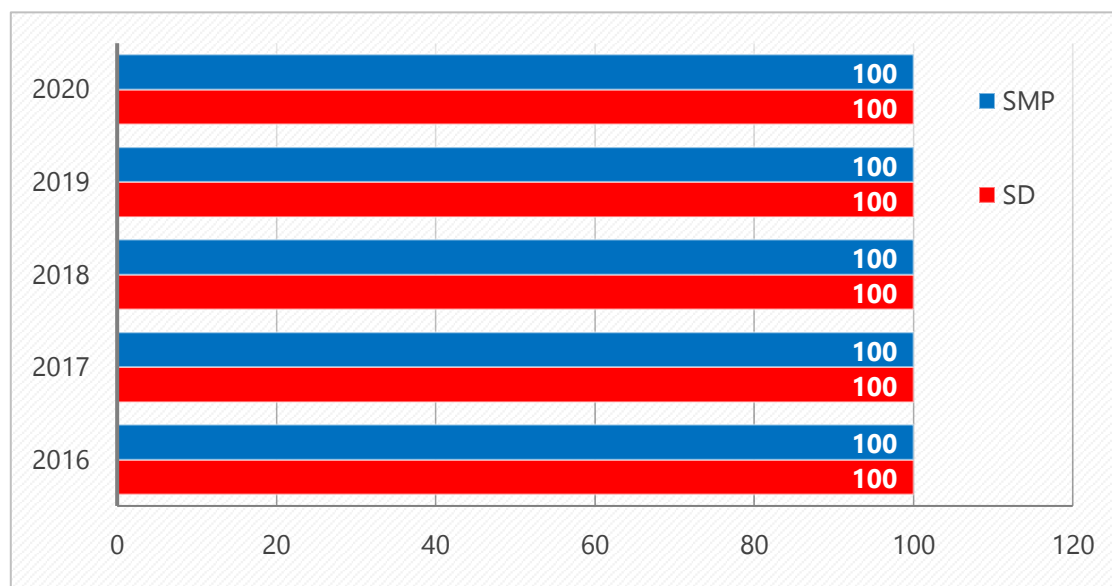


Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Angka putus sekolah di Kabupaten Dairi menunjukkan grafik yang fluktuatif, namun cenderung naik. Angka putus sekolah SD meningkat sebesar 0,5%, sedangkan angka putus sekolah SMP meningkat sebesar 0,93% sepanjang 2019-2020. Data tersebut menggambarkan belum meratanya kondisi pendidikan di Kabupaten Dairi. Aspek selanjutnya adalah angka kelulusan yang merupakan representasi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu

sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan. Berikut adalah gambaran angka kelulusan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

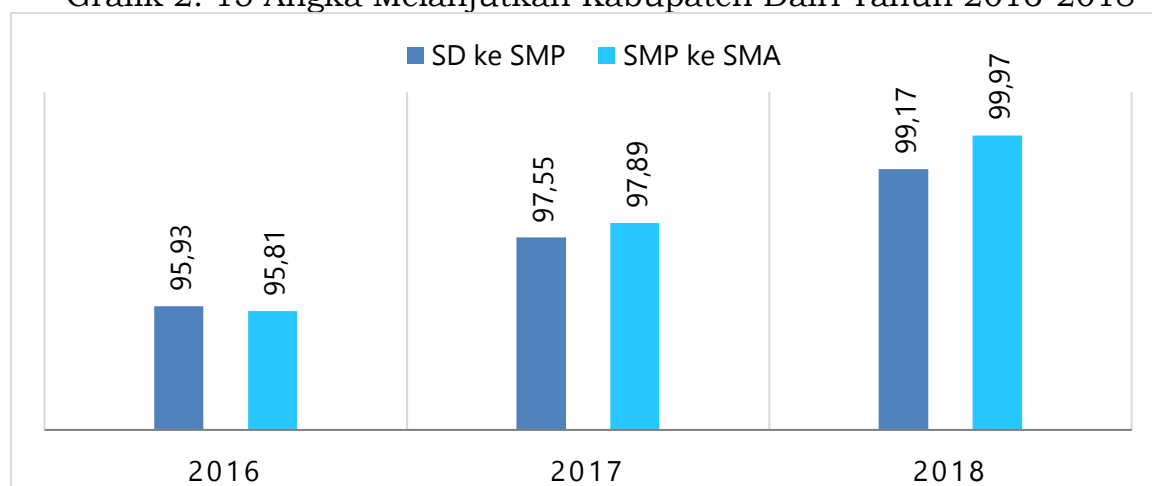
Grafik 2. 14 Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Angka kelulusan di Kabupaten Dairi menunjukkan angka 100%, baik setingkat SD dan SMP. Data tersebut menggambarkan tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Selain angka kelulusan, kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka melanjutkan sekolah yang menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut ini adalah gambaran angka melanjutkan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2018.

Grafik 2. 15 Angka Melanjutkan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2018



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

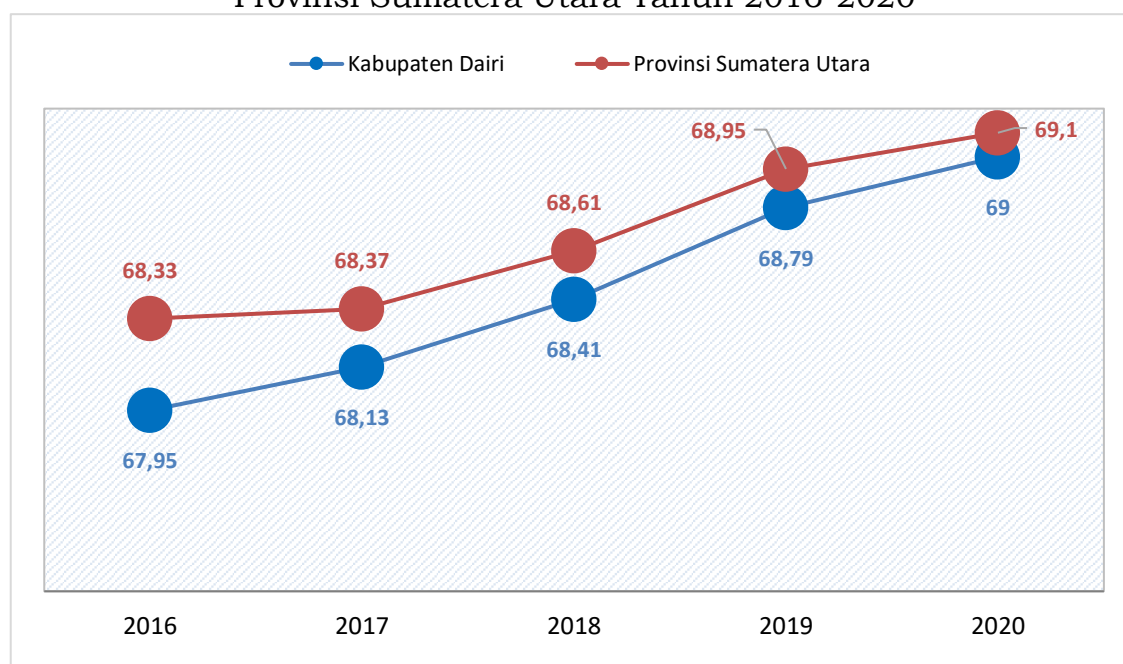
Angka melanjutkan Kabupaten Dairi 2016-2018 mengalami tren kenaikan. Untuk SD ke SMP mengalami peningkatan sebesar 1,62% sepanjang 2017 ke 2018, sedang untuk SMP ke SMA meningkat sebesar 2,08%. Kondisi ini menggambarkan kenaikan dorongan masyarakat untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kondisi kesehatan masyarakat dapat menunjukkan kondisi kualitas kesehatan di suatu daerah.

Secara makro, kualitas kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup. Sedangkan, gambaran kualitas kesehatan bayi, balita, dan masyarakat di Kabupaten Dairi dapat diketahui dari capaian indikator tingkat kematian ibu, bayi, dan balita, dan tingkat kesakitan ibu, bayi, balita, dan masyarakat. Tingkat kematian dapat dilihat menggunakan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Berikut ini adalah gambaran angka harapan hidup di Kabupaten Dairi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 2. 16 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



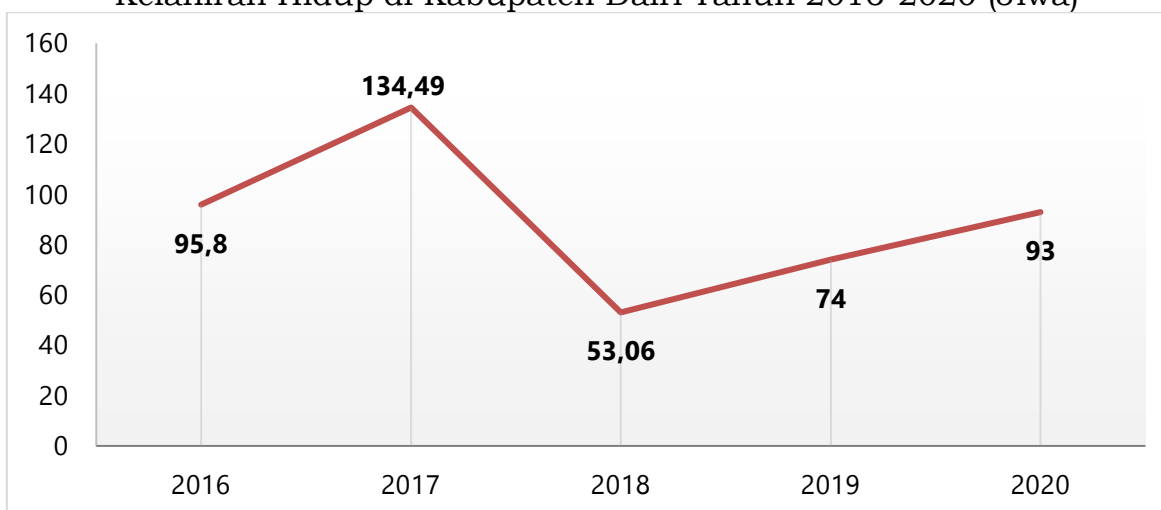
Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2021

Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dari Tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Namun, dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi masih belum lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi yang angkanya selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Data selanjutnya yang merepresentasikan tingkat kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), yang dapat dilihat melalui AKI per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 17 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (Jiwa)

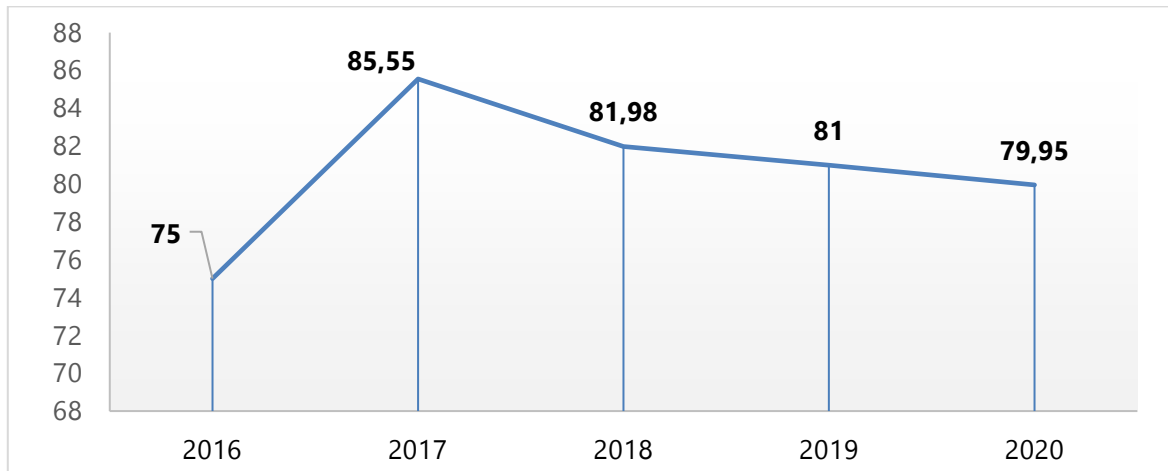


Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Dairi mengalami tren fluktuatif pada tahun 2016-2020. Penurunan AKI paling drastis yaitu sebesar 80,89 jiwa pada tahun 2017-2018, setelah itu AKI mengalami tren kenaikan hingga tahun 2020. AKI tertinggi di Kabupaten Dairi yaitu sebesar 134,49 pada tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kualitas kesehatan ibu hamil di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

Pelayanan kelahiran oleh yang sesuai standar menjadi salah satu indikator capaian upaya pemerintah dalam mengurangi AKI di suatu daerah. Semakin tinggi cakupan pelayanan, maka makin baik pula upaya pemerintah dalam menurunkan AKI. Kondisi cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui grafik berikut.

Grafik 2. 18 Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Tahun 2016-2020



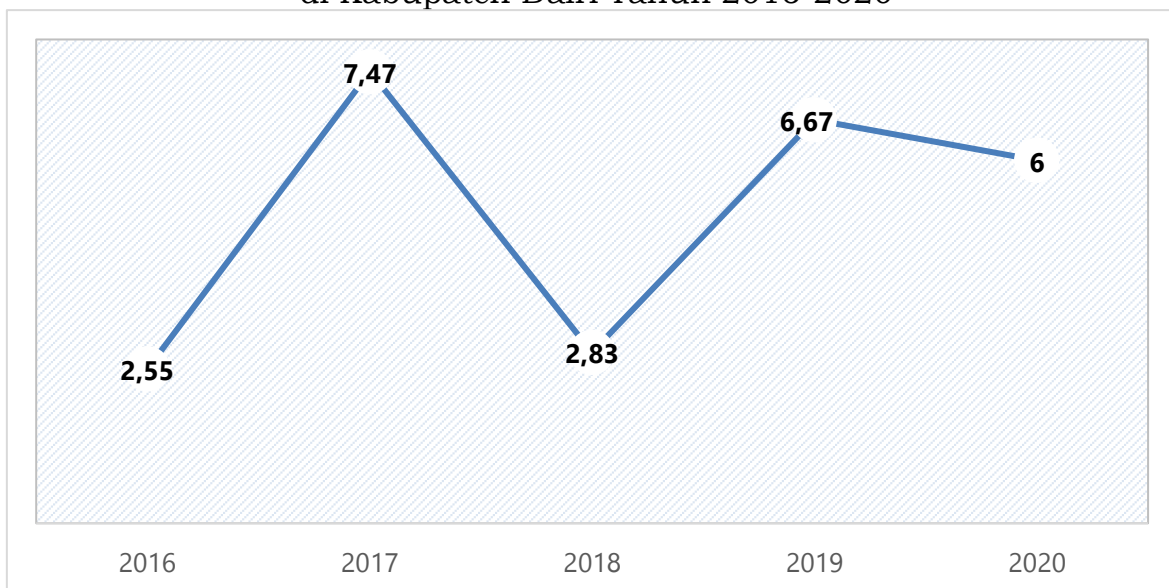
Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Cakupan ibu bersalin mendapatkan layanan sesuai standar di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 mengalami tren cenderung turun dan stagnan. Kenaikan cakupan ibu bersalin mendapatkan layanan bersalin sesuai standar terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 10,5%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2020. Kondisi cakupan ibu bersalin mendapatkan layanan bersalin sesuai standar yang belum mencapai 100% tersebut mengindikasikan rendahnya kualitas kesehatan ibu hamil di Kabupaten Dairi. Persoalan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia kesehatan khususnya bidan di Kabupaten Dairi.

Selain AKI, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa). AKB merupakan indikator penting yang berfungsi untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat pada kelompok usia bayi, sedangkan AKBa merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak pada umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Tingginya angka AKB dan AKBa akan berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di suatu daerah.

AKB mengindikasikan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. AKB adalah indikator penting untuk menggambarkan kondisi derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian dapat dilihat dari menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Capaian AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 19 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



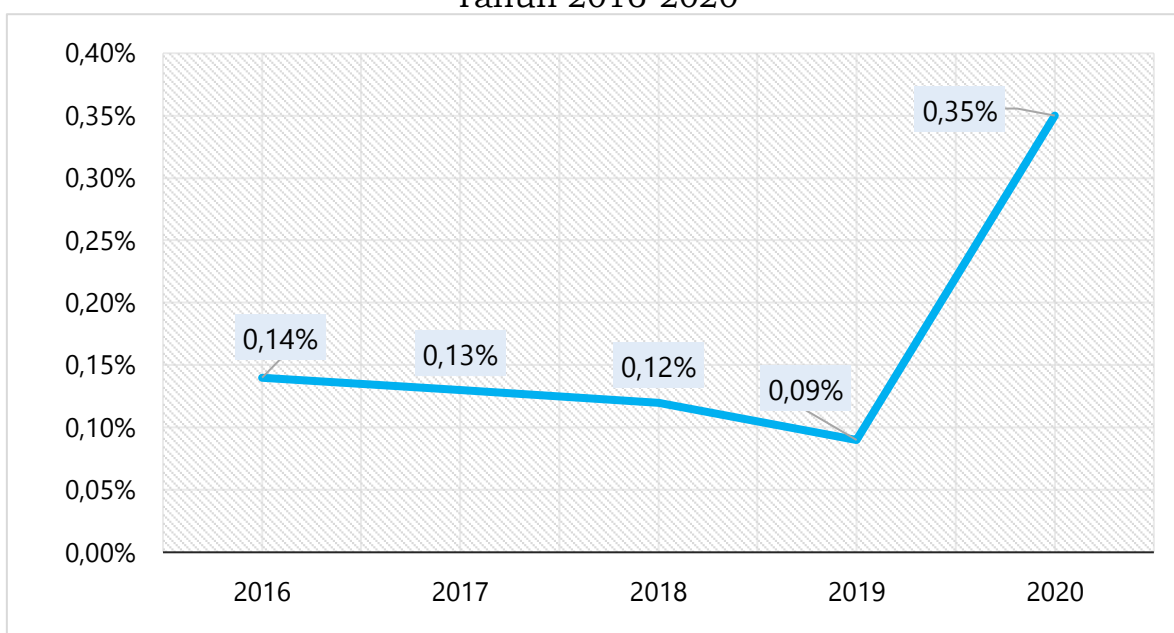
Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif. AKB per 1.000 kelahiran hidup terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2,55 bayi. Namun demikian, AKB per 1.000 kelahiran hidup naik cukup drastis sebanyak 4,92 bayi pada tahun 2017. AKB tertinggi sebanyak 7,47 bayi terjadi pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa diantara 1.000 kelahiran hidup terdapat 7,47 bayi meninggal sebelum berusia tepat 1 tahun di Kabupaten Dairi. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas kesehatan bayi di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi saat dalam kandungan, tingginya bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM), tingginya bayi

lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), bayi dengan gizi buruk masih tinggi, rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap.

Gizi buruk atau malnutrisi merupakan salah satu bentuk malnutrisi di mana seseorang kekurangan asupan makanan yang mengandung energi dan protein. Malnutrisi dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Gizi buruk sebagian besar dialami oleh anak-anak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. WHO (2020) memperkirakan sebanyak 54% kematian bayi dan balita disebabkan kondisi gizi buruk. Bahkan risiko kematian anak dengan gizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan dengan anak normal. Gizi buruk dapat disebabkan oleh buruknya kondisi sosial ekonomi, buruknya gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Berikut adalah gambaran persentase gizi buruk balita di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Grafik 2. 20 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Prevalensi gizi buruk balita di Kabupaten Dairi mengalami tren menurun pada tahun 2016-2019, namun selanjutnya mengalami peningkatan dratis sebesar 0,26% pada tahun 2019-2020. Masih tingginya prevalensi gizi buruk balita mengindikasikan rendahnya kualitas kesehatan balita di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Sementara itu, jumlah balita yang mengalami gizi buruk tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

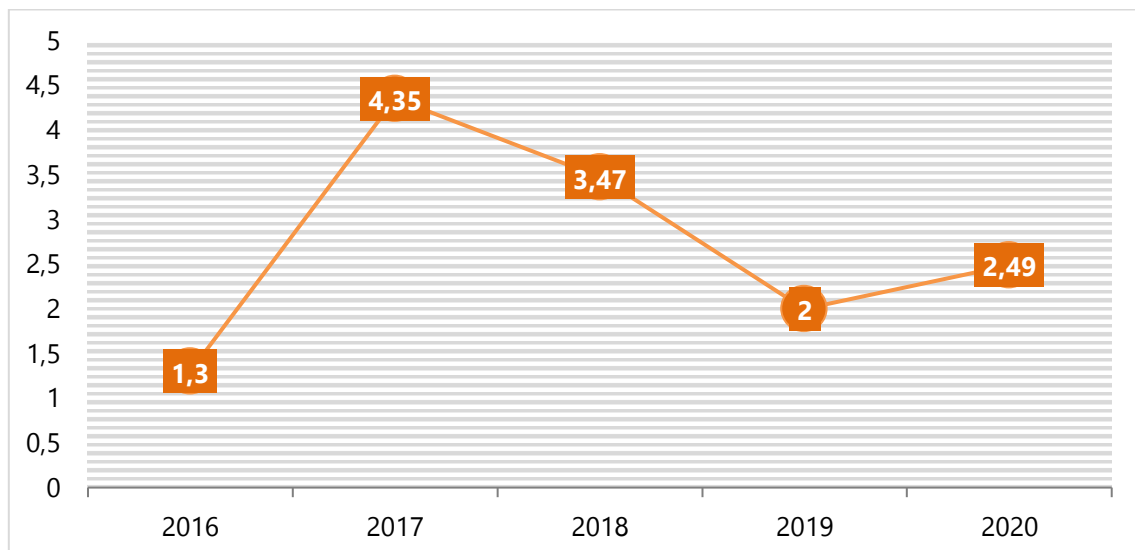
2016	2017	2018	2019	2020
49	42	41	7	111

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Jumlah balita gizi buruk mengalami tren penurunan pada tahun 2016-2019, namun naik dratis sebesar 104 jiwa pada 2019-2020. Faktor yang menyebabkan jumlah gizi buruk yang terlapor di 2020 jauh lebih tinggi dari tahun 2016-2019 antara lain: 1) tersedianya alat antropometri pada tahun 2020; 2) sistem pelaporan sudah menggunakan aplikasi sehingga laporan lebih lengkap dan akurat; 3) seluruh puskesmas sudah memiliki tenaga pelaksana gizi (TPG). Data selanjutnya yang menggambarkan kondisi gizi balita adalah Prevalensi Balita Gizi Kurang. Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya di kemudian hari.

Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 21 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

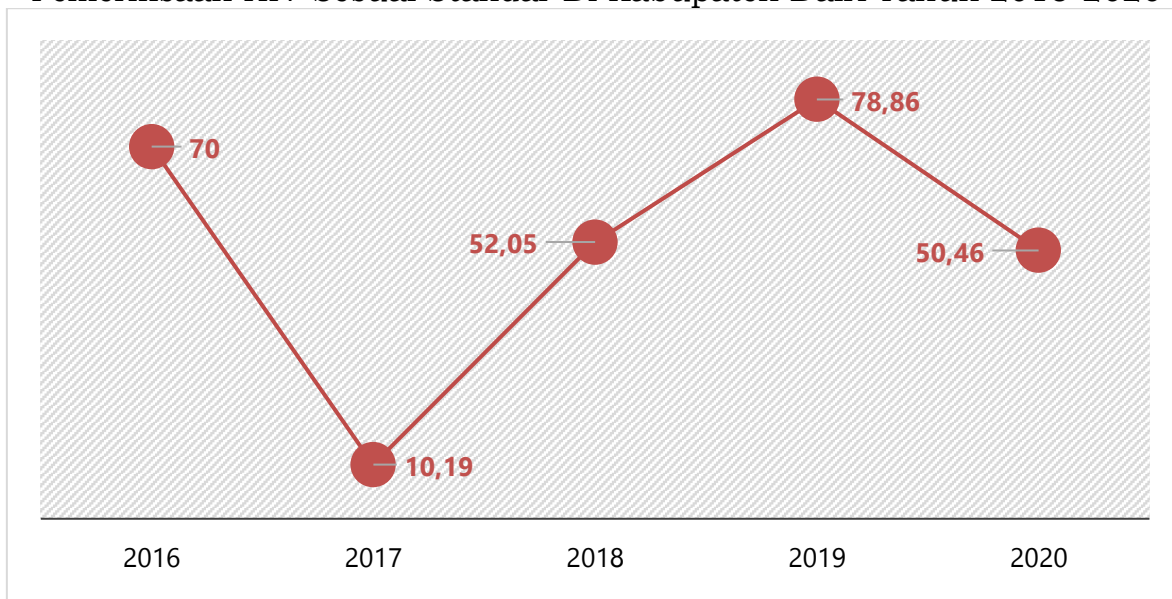
Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Dairi mengalami tren yang fluktuatif. Kenaikan tertinggi adalah sebesar 3,05% pada 2016-2017, namun selanjutnya mengalami penurunan dalam rentang 2017-2019. Prevalensi balita gizi kurang mengalami kenaikan lagi sebesar 0,49% pada 2019-2020. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang memperkuat indikasi masih rendahnya kualitas kesehatan balita di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Kesehatan masyarakat juga ditunjukkan dari tingkat kesakitan masyarakat. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Menurut BPS (2020), keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

HIV merupakan salah satu penyakit menular yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Perlu penanganan khusus bagi penderita kasus HIV. Jumlah orang beresiko kasus HIV yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standar di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 22 Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar Di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

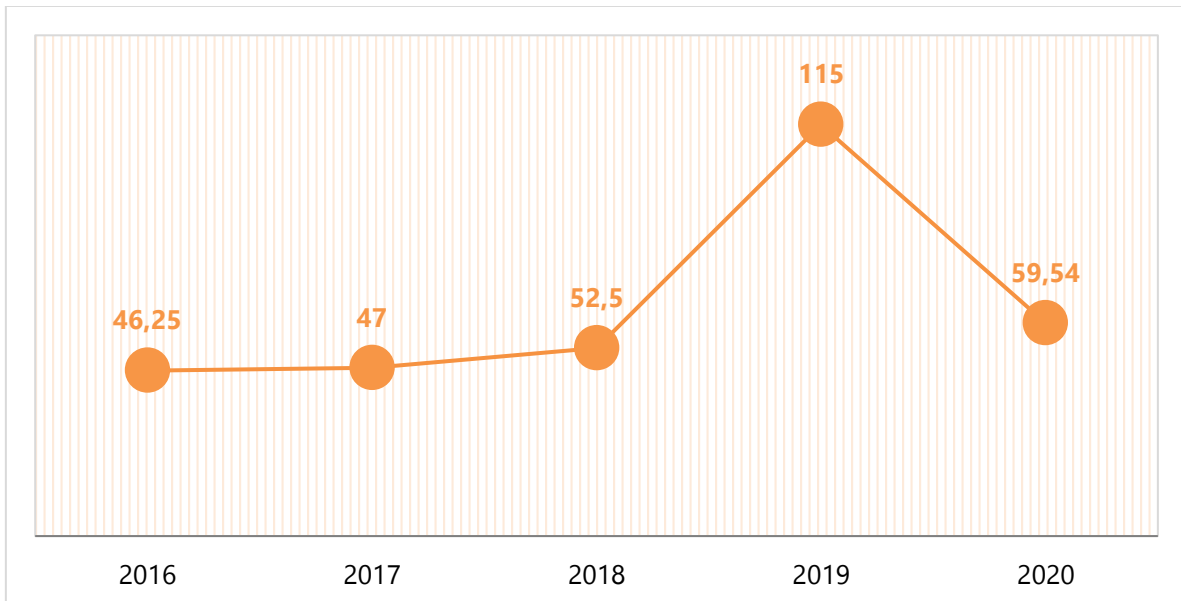
Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV antara lain adalah ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Jumlah orang berisiko kasus HIV yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standar di Kabupaten Dairi mengalami tren fluktuatif. Penurunan paling drastis adalah sebesar 59,81% yang terjadi pada tahun 2016-2017, kemudian setelahnya meningkat lagi dan mencapai puncak sebesar 78,86% pada 2019. Terjadi penurunan sebesar 28,4% pada 2020. Angka tersebut mengindikasikan adanya pembenahan kepedulian terhadap penyakit menular seksual.

Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberculosis (TB) adalah jenis penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue yang ditularkan dengan perantara gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan atau *Aedes albopictus*. Sementara itu, TB/TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, biasanya disertai dengan batuk berdarah. Kuman TBC juga dapat menyerang tulang, usus, atau kelenjar tubuh. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah penderita TBC, baik ketika berbicara, batuk, maupun bersin.

Kedua jenis penyakit tersebut merupakan penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengetahui cakupan penemuan penderita Demam

Berdarah *Dengue* (DBD) dan *Tuberculosis* (TB) di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

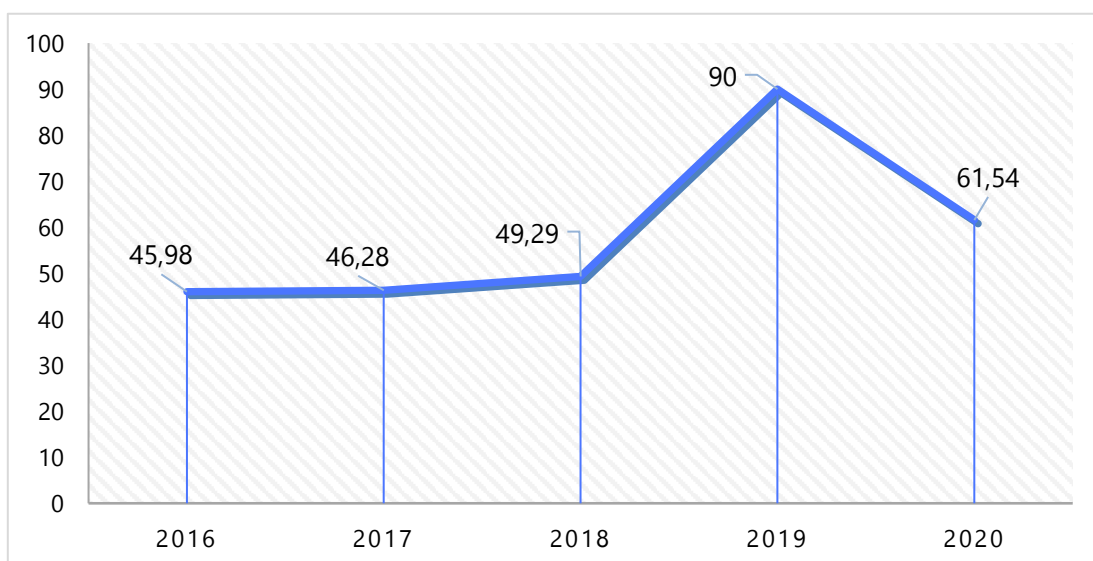
Grafik 2. 23 Cakupan Penemuan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Cakupan Penemuan Penderita Penyakit DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren meningkat pada 2016-2019, namun turun pada 2020. Angka terendah adalah sebesar 45,25 pada tahun 2016, sedangkan angka tertinggi adalah sebesar 115 pada 2019. Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih tingginya temuan demam berdarah diakibatkan kurangnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Selanjutnya adalah gambaran penanganan penderita penyakit tuberculosis di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

Grafik 2. 24 Cakupan Penanganan Penderita Penyakit Tuberculosis di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

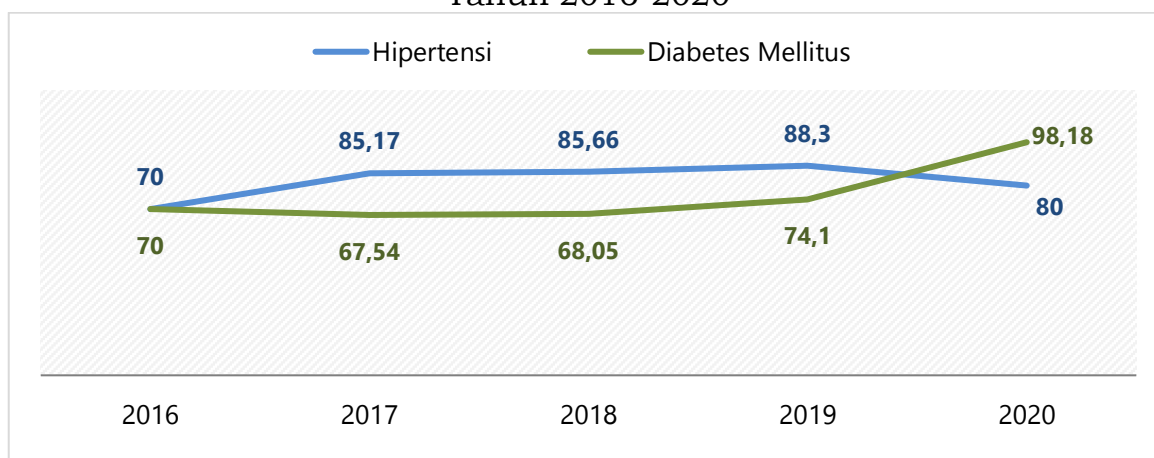


Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Cakupan Penanganan Penderita Penyakit Tuberculosis di Kabupaten Dairi mengalami tren meningkat pada 2016-2019, namun menurun pada 2020. Angka paling tinggi adalah sebesar 90 pada tahun 2019. Persoalan ini mengindikasikan belum optimalnya pelayanan TBC di Kabupaten Dairi.

Selain beberapa penyakit menular yang dijelaskan sebelumnya, angka kesakitan penyakit tidak menular juga perlu menjadi perhatian. Hipertensi dan diabetes mellitus merupakan jenis penyakit tidak menular yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Dairi. Berikut tabel cakupan penderita hipertensi dan diabetes mellitus mendapat pelayanan sesuai standar Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Grafik 2. 25 Cakupan Penderita Hipertensi dan Diabetes Mellitus Mendapat Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

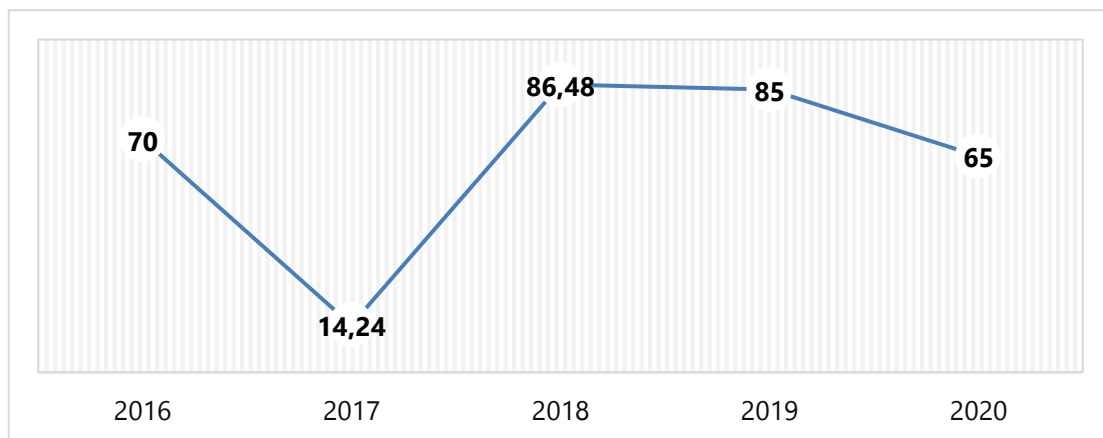


Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Jumlah cakupan penderita hipertensi dan diabetes mellitus mendapat pelayanan sesuai standar di Kabupaten Dairi memiliki tren cenderung naik pada tahun 2016-2020. Sedangkan angka hipertensi mengalami penurunan pada 2019-2020. Cakupan pelayanan keduanya memiliki nilai yang tinggi, hal ini mengindikasikan perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dairi.

Salah satu aspek penting di bidang kesehatan adalah kondisi kesehatan lansia. Lansia secara definisi adalah penduduk dengan usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan salah satu kelompok rentan karena rawan penyakit, oleh karena itu perlu kepedulian lebih terhadap permasalahan kesehatan lansia. Berikut ini adalah gambaran cakupan usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

Grafik 2. 26 Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Cakupan usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif. Angka terendah adalah sebesar 14,24% pada tahun selanjutnya melonjak tajam menjadi 86,48%. Kondisi fluktuatif tersebut mengindikasikan masih perlunya pembenahan di bidang layanan kesehatan lansia.

Penting juga mencermati data jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa warga Dairi. Jumlah cakupan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 39 Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020
n/a	96,17	100	100	79,51

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Secara umum jumlah cakupan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 mengalami tren yang positif, kecuali pada 2019-2020. Jumlah cakupan ODGJ dalam dua tahun yaitu 2018-2019 sudah mencapai 100%. Data tersebut mengindikasikan usaha promotif dan preventif terhadap ODGJ dengan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan sudah baik.

Aspek ketersediaan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jumlah ketersediaan dokter merupakan salah satu indikator untuk mengetahui cakupan jangkauan tenaga kesehatan dalam melayani penduduk. Gambaran jumlah dokter di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 40 Jumlah Dokter di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Umum	49	51	52	52	31
Dokter Gigi	10	8	9	9	6
Dokter Spesialis	7	15	6	6	
Total	66	74	67	67	37

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Ketersediaan dokter di Kabupaten Dairi cenderung naik pada tahun 2016-2019, namun jumlahnya menurun drastis 2019-2020. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya cakupan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Dairi. Permasalahan ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya kesehatan masih belum optimal.

Aspek sarana dan prasarana kesehatan juga termasuk unsur yang mendasar dalam pembangunan sektor kesehatan. Ketersediaan sarana seperti rumah sakit turut mempengaruhi kinerja dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah. Capaian ketersediaan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 41 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Puskesmas dan Pustu	139	140	140	140	140

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Dairi tidak ada perubahan pada tahun 2016-2020. Kondisi ini memiliki arti jika jumlah RS di Kabupaten Dairi sama (1 unit) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rumah sakit yang sampai sekarang menjadi sentra operasional di Kabupaten Dairi adalah RSUD Sidikalang. Sementara itu, jumlah puskesmas dan pustu cenderung stagnan, pada 2016-2017 ada peningkatan sebanyak 1 unit

puskesmas dan pustu. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap layanan puskesmas dan pustu.

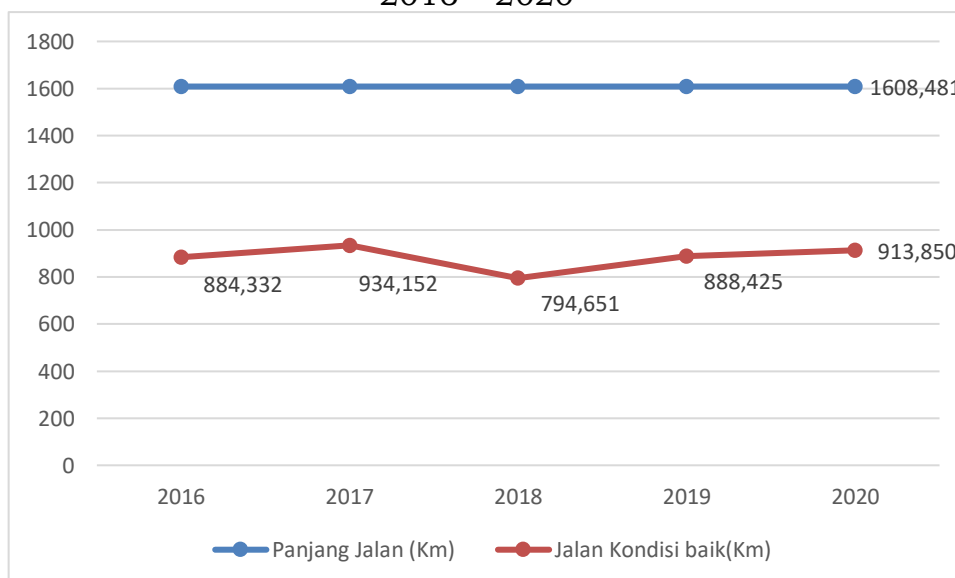
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat keberhasilan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat ditinjau dari beberapa indikator utama yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan kualitas. Indikator penting yang merepresentasikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di antaranya yaitu infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, akses air minum, bangunan dan penataan ruang. Berikut adalah data mengenai kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang di Kabupaten Dairi.

a. Kondisi Jalan dan Jembatan

Ketersediaan dan juga kualitas infrastruktur jalan, menjadi salah satu komponen dalam kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Kondisi tersebut dapat direpresentasikan melalui persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik atau memiliki definisi operasional berupa panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dalam kondisi baik disajikan pada gambar grafik sebagai berikut.

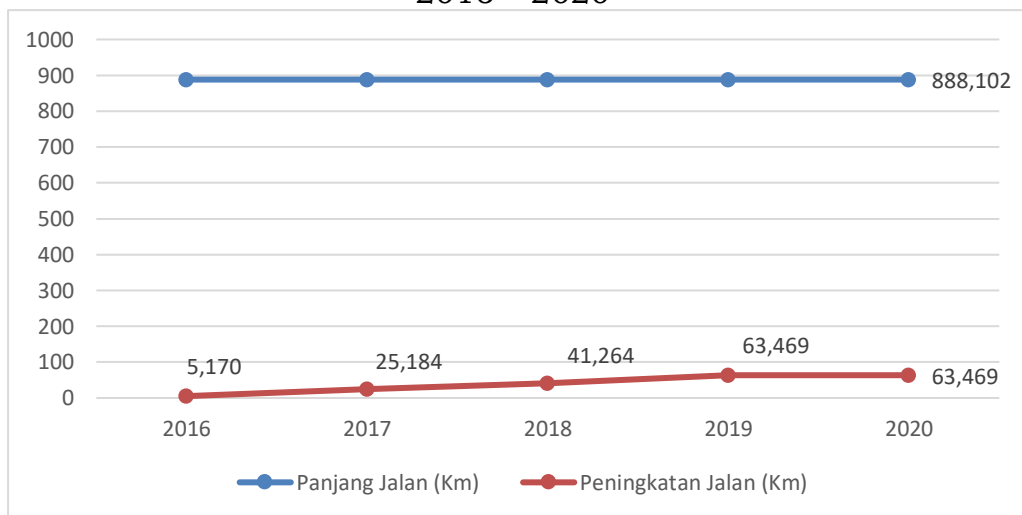
Grafik 2. 27 Jalan Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Persentase jalan dalam Kondisi baik di Kabupaten Dairi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 – 2020. Penurunan sebesar 8,67% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Persentase jalan dalam kondisi baik, selanjutnya mengalami tren yang selalu meningkat dari tahun 2018-2020. Persentase kenaikan sebesar 7,41% dari tahun 2018 hingga 2020. Tren persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi yang cenderung mengalami kenaikan, diantaranya dipengaruhi dengan adanya peningkatan kegiatan konstruksi jalan. Berikut disajikan Persentase peningkatan konstruksi Jalan Kabupaten di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

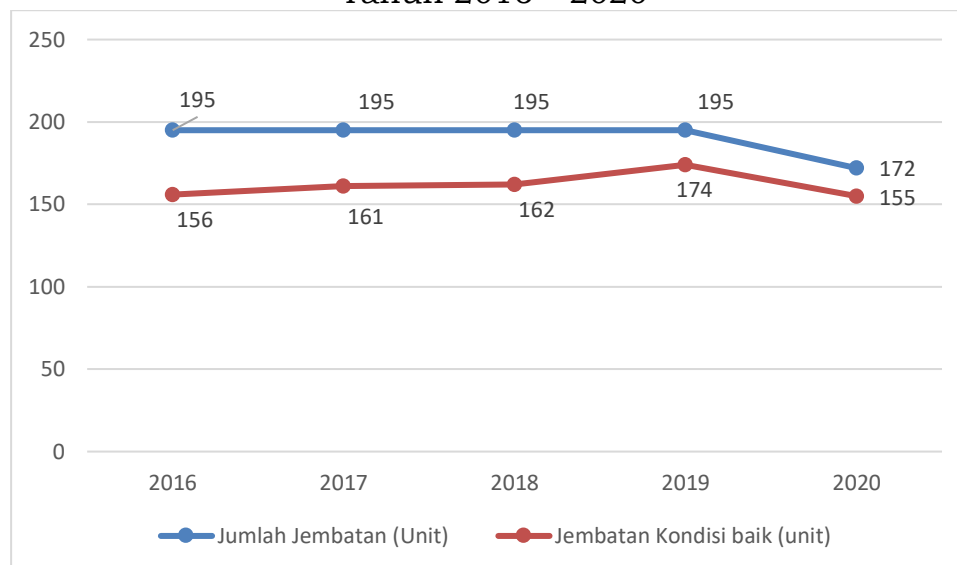
Grafik 2. 28 Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Kegiatan konstruksi jalan di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2020. Kenaikan Persentase sebesar 6,56% dari tahun 2016 ke tahun 2020, menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghadirkan akses jalan dalam kondisi yang baik.

Grafik 2. 29 Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2016 – 2020



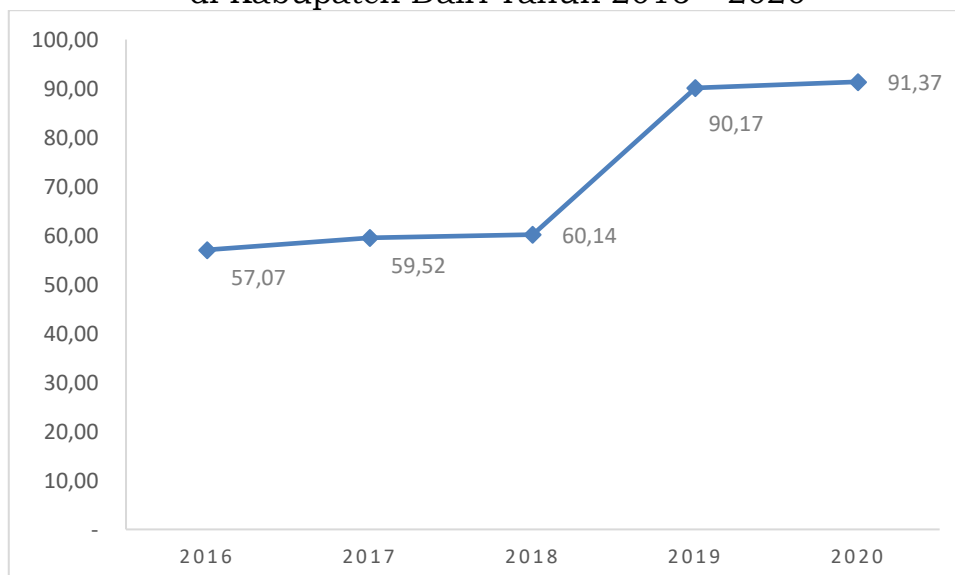
Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Persentase jembatan dalam kondisi baik menunjukkan trend yang mengalami fluktuasi. Mengalami kenaikan dari tahun 2016 menuju tahun 2019, kemudian Kembali mengalami trend penurunan sebesar 19,67% dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Tentunya persentase tersebut perlu untuk ditingkatkan, guna mengoptimalkan akses konektivitas antar wilayah di Kabupaten Dairi.

b. Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2016-2020. Data yang tercatat menunjukkan adanya peningkatan, namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Grafik 2. 30 Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Persentase luas jaringan irigasi selalu mengalami kenaikan. Kenaikan persentase sebesar 34,30% dari tahun 2016 – 2020. Kondisi tersebut masih sangat perlu untuk ditingkatkan guna mengoptimalkan pengairan pertanian di Kabupaten Dairi, terutama terkait dengan kontruksi bangunan irigasi yang masih kurang sesuai dengan kondisi eksisting fisiografi di Kabupaten Dairi.

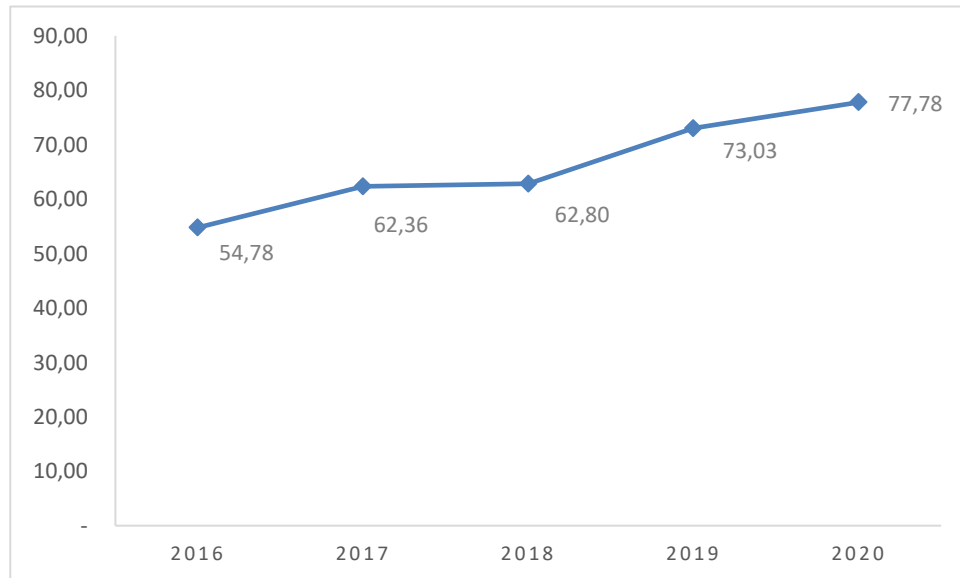
c. Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, maka kondisi tersebut berimplikasi terhadap kebutuhan air minum yang juga meningkat. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk tetap menjaga ketersediaan air dan mampu memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk

menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Grafik 2. 31 Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih Tahun 2016 – 2020



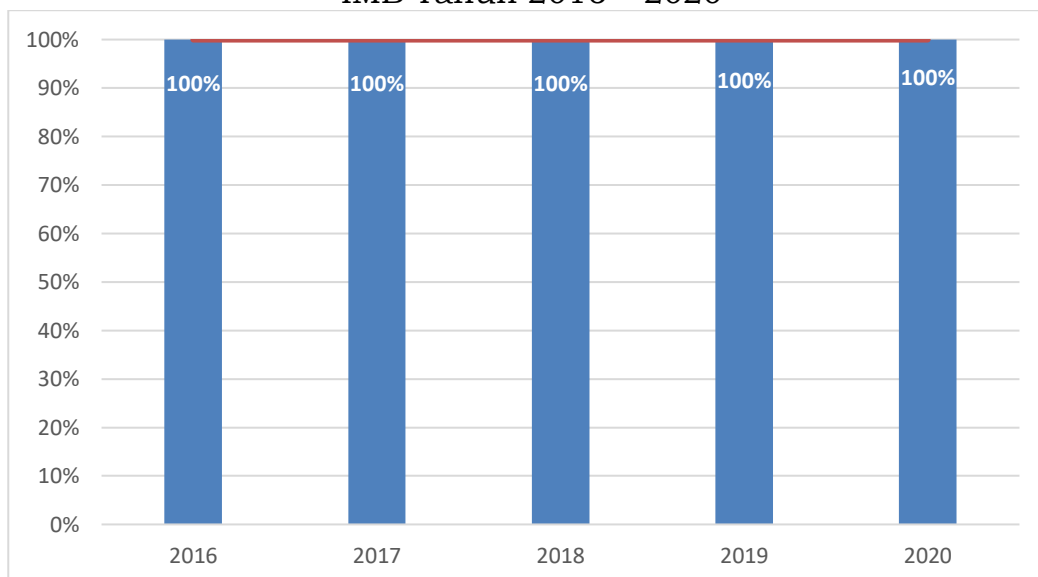
Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Trend persentase capaian tersedianya akses air minum bersih bagi masyarakat di Kabupaten Dairi menunjukkan grafik yang selalu meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Meskipun demikian, masih dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan capaian persentase tersebut, guna akses air minum bersih, dapat terdistribusi dengan merata untuk masyarakat Kabupaten Dairi.

d. Capaian Terlayannya Masyarakat dalam Mengurus IMB

Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Dairi mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi periode 2014-2034. Bidang urusan penataan ruang yang dapat mencerminkan pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum salah satunya adalah terlayannya masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah. Jumlah Bangunan ber- IMB pada tahun 2014-2020 di Kabupaten Dairi disajikan sebagai berikut.

Grafik 2. 32 Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB Tahun 2016 – 2020



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, 2021

Izin bangunan ber – IMB di Kabupaten Dairi selalu memenuhi target yaitu sebesar 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi selalu dapat mengakomodir IMB yang diajukan untuk diproses, dengan tetap mempertimbangkan kondisi tata ruang Kabupaten Dairi. Dengan demikian, monitoring terhadap tata ruang secara teknis maupun regulasi perlu untuk selalu diupayakan dan dipertahankan.

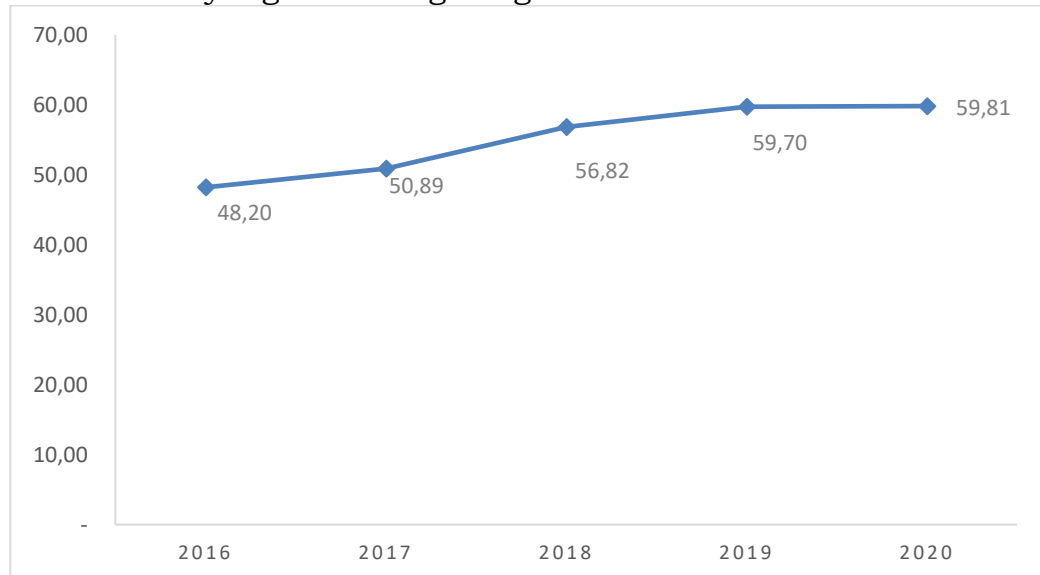
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah,

tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Data perkembangan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 disajikan pada gambar sebagai berikut.

Grafik 2. 33 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2016 – 2020



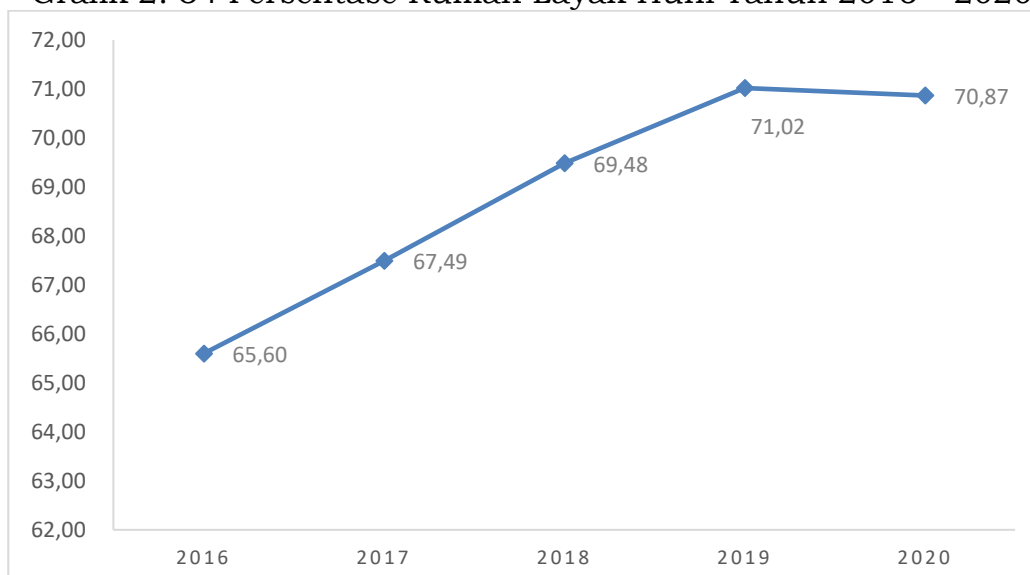
Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rerata peningkatan sebesar 2,9% tiap tahunnya, dari tahun 2016-2020.

b. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah dapat dikatakan layak huni apabila memenuhi 4 kriteria. Kriteria tersebut diantaranya yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum, dan akses sanitasi yang layak. Berikut capaian dari persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Grafik 2. 34 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2016 – 2020



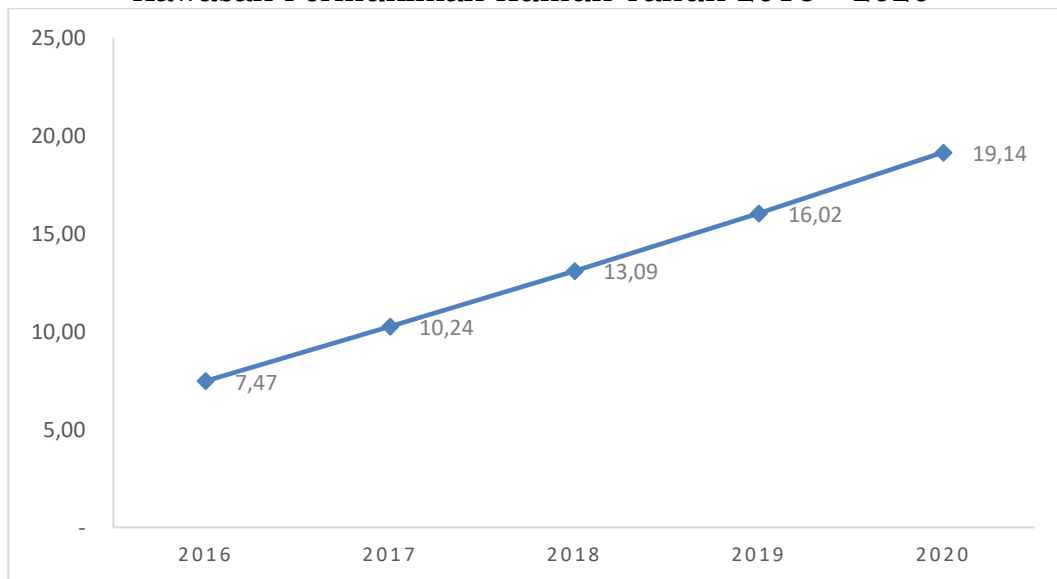
Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Capaian persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi memiliki tren yang cenderung selalu meningkat tiap tahunnya. Capaian tertinggi sebesar 71,02% pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu dengan capaian 0,15%. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi untuk penanganan rumah layak huni di Kabupaten Dairi, guna semakin meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

c. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Aspek urusan perumahan rakyat dan permukiman juga mencakup pada penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada umumnya juga ditunjukkan dengan kualitas buruk dan tidak sehat.

Grafik 2. 35 Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Presentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh memiliki tren kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut mencerminkan semakin berkurangnya rumah yang terkategori tidak layak huni atau perumahan dan kawasan permukiman kumuh tiap tahunnya. Sekaligus juga menunjukkan pemerintah Kabupaten Dairi memiliki perhatian serius terhadap penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan kenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kondusif, tenteram, dan aman. Berikut ini adalah data yang digunakan untuk menganalisis urusan tersebut.

Tabel 2. 42 Jenis Bencana di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Banjir Bandang	0	2	3	1	0	6
2	Gempa Bumi	0	0	0	1	1	2
3	Tanah Longsor	12	30	0	1	1	44
4	Angin Puting Beliung	13	12	18	12	12	67
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1	4	5	9	19

No	Jenis Bencana	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
6	Kebakaran Pemukiman	18	11	17	24	17	87
Total		43	56	42	44	40	225

Sumber: BPBD Kabupaten Dairi, 2021

Bencana yang terjadi di Kabupaten Dairi didominasi oleh bencana Kebakaran pemukiman, diikuti angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang serta gempa bumi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada risiko bencana di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 43 Jumlah Kebakaran yang Terjadi Menurut Laporan Polisi di Kabupaten Dairi Tahun 2020

	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
2020	12	18	-

Sumber: BPBD Kabupaten Dairi, 2021

Jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan pada tahun 2020 sebanyak 12 kejadian. Adanya kejadian kebakaran tersebut mengindikasikan masih rentannya kejadian kebakaran di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 44 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Dairi

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang)	0	90	1.732	2.116	0
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100%	100%	100%	100%	55%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Dairi, 2021

Penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tahun 2016 – 2019 selalu dapat terselesaikan secara keseluruhan yakni 100%. Penurunan tingkat penyelesaian di tahun 2020, yakni hanya sebesar 55%, menunjukkan masih perlunya optimalisasi dalam penanganan penyelesaian pelanggaran K3.

Tabel 2. 45 Jumlah dan Presentasi Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda
2016	1.000	100%
2017	150	66%
2018	139	82,17%
2019	332	100%
2020	239	100%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Dairi, 2021

Terjadi fluktuasi jumlah pelanggaran terhadap Perda dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020. Pelanggaran tertinggi terjadi pada tahun 2016, dan dapat ditangani secara tuntas, 100%. Tahun 2017 dan 2018, terdapat penanganan yang belum tuntas terhadap pelanggar perda. Dengan demikian, optimalisasi terhadap penanganan pelanggaran perda sangat diperlukan.

6. Urusan Sosial

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan dasar. Kewajiban tersebut merupakan amanah konstitusi yang tercantum di dalam UU nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa “*negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial*”. Penyelenggaraan urusan sosial fokus untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial disebabkan oleh dua masalah, yaitu belum optimalnya keberdayaan sosial dan belum optimalnya kualitas pelayanan sosial. Persoalan mengenai belum optimalnya keberdayaan sosial disebabkan oleh rendahnya pendapatan PPKS dan belum optimalnya kapasitas SDM kelompok rentan. Sementara itu, persoalan terkait belum optimalnya kualitas pelayanan sosial diyakini akibat cakupan pelayanan PPKS yang masih rendah dan kualitas pekerja sosial yang belum optimal. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial, seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kondisi PPKS di Kabupaten Dairi dapat dipaparkan melalui beberapa indikator, yaitu jumlah PPKS, persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan persentase rumah tangga menurut jenis program perlindungan sosial yang diterima.

Tabel 2. 46 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

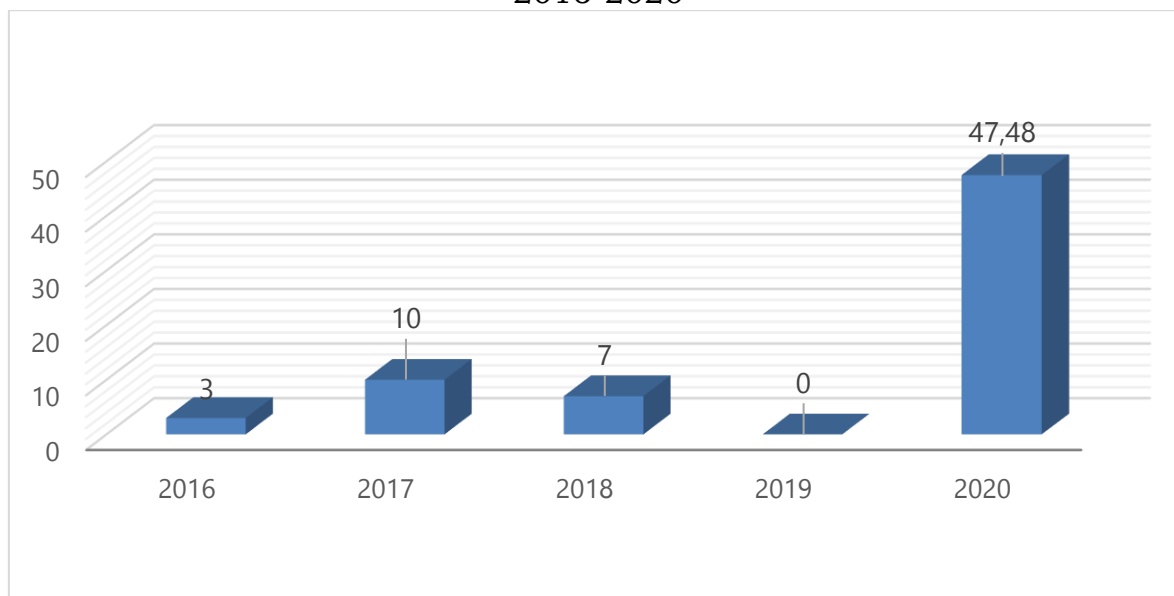
PPKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Balita Terlantar	Orang	-	-	-	-	-
Anak Terlantar	Orang	192	70	50	30	41
Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Orang	-	-	-	-	20
Anak Jalanan	Orang	-	7	-	-	-
Anak Dengan Kedisabilitas	Orang	2	-	-	-	173

PPKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Dengan Korban Kekerasan	Orang	1	-	-	-	15
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	-	-	-	-	-
Lanjut Usia Terlantar	Orang	720	200	150	100	52
Penyandang Kedisabilitas	Orang	373	1.800	1.850	1.885	1.893
Tuna Susila	Orang	-	-	-	-	-
Gelandangan	Orang	-	-	-	-	9
Pengemis	Orang	-	-	-	-	-
Pemulung	Orang	-	-	-	-	5
Kelompok Minoritas	Orang	-	-	-	-	-
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Orang	1	-	-	-	-
Orang Dengan HIV/ODHA	Orang	-	-	-	-	-
Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	-	-	-	-	51
Korban Trafiking	Orang	-	-	-	-	-
Korban Tindak Kekerasan	Orang	-	-	-	-	-
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	-	-	-	-	-
Korban Bencana Alam	KK	74	25	158	7	12
Korban Bencana Sosial	KK	56	17	44	57	14
Perempuan Rawan Sosial	Orang	90	-	-	-	55
Fakir Miskin	Orang	18.361	30.904	30.841	31.746	32.359
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Orang	1	-	-	-	-
Komunitas Adat Terpencil	Orang	1.139	1.132	1.136	1.138	1.140

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Terdapat 26 jenis PPKS di Kabupaten Dairi dan didominasi oleh penduduk miskin dan wanita rawan sosial ekonomi. PPKS memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kesulitan tersebut dapat disebabkan PPKS memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Capaian persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut.

Grafik 2. 36 Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami tren yang fluktuatif pada tahun 2016 hingga 2020. Persentase PPKS yang mendapat bantuan sosial naik pada tahun 2017 sebesar 7 persen, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 10 persen. Peningkatan persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial naik drastis pada tahun 2020 sebesar 47,48 persen.

Tabel 2. 47 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang diterima Tahun 2016-2020

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga Yang Penerima per Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	53.48 %	53.47 %	53.58 %	52.05 %	51.76 %
Program Indonesia Pintar (PIP)	NA	NA	NA	NA	NA
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	53.48 %	53.47 %	53.58 %	52.05 %	51.76 %
Program Keluarga Harapan (PKH)	21.53 %	21.46 %	31.68 %	29.89 %	30.15 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Dairi, 2021

Persentase penerima beras miskin/ beras sejahtera/ bantuan pangan non tunai di Kabupaten Dairi mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Hal tersebut juga berlaku kepada penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Sementara itu, persentase penerima Program Keluarga Harapan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2020.

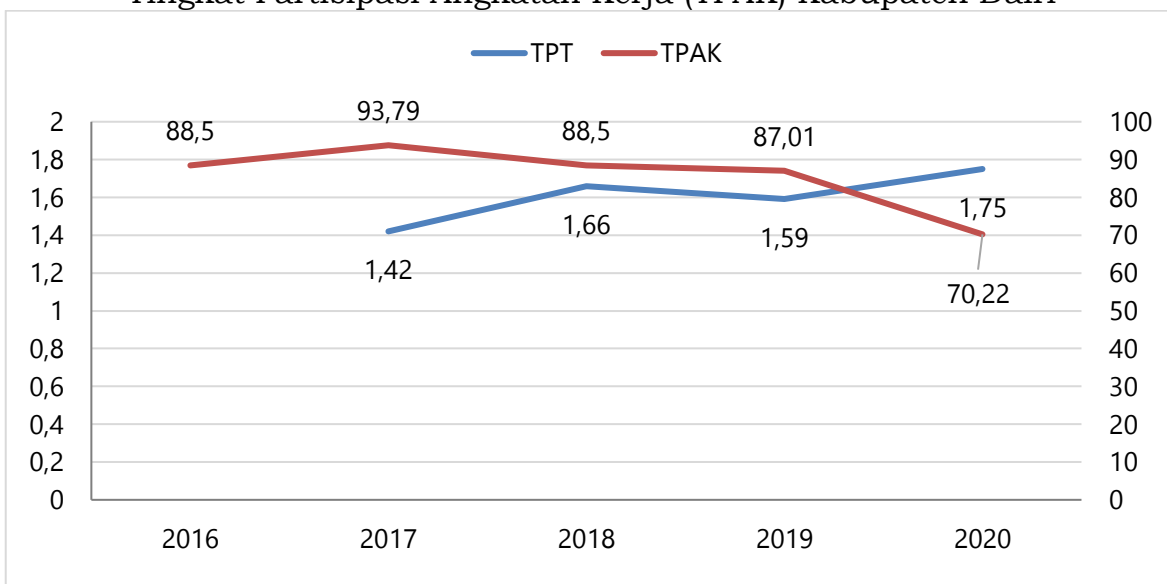
2.3.1.2. Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam menentukan produktivitas suatu daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini merupakan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi



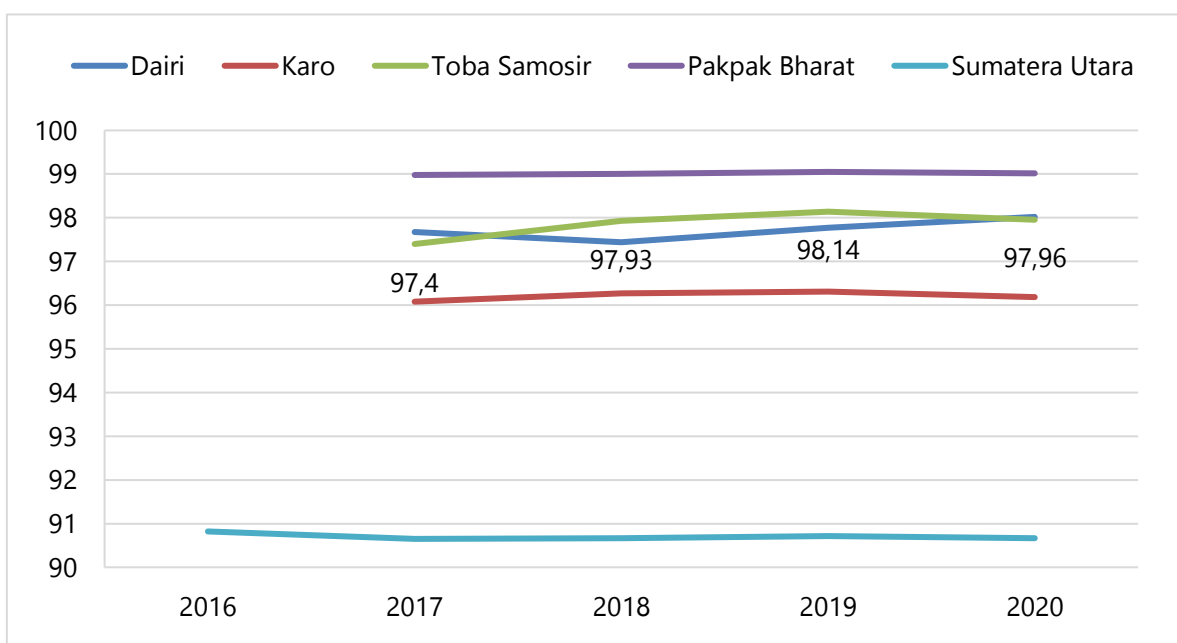
Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung turun. Perkembangan tersebut menggambarkan turunnya Angkatan kerja yang memilih masuk dalam pasar tenaga kerja. Terdapat sekitar 29,78 persen angkatan kerja yang memilih tidak masuk dalam pasar tenaga kerja. Angka tersebut naik cukup besar dari 12,99 pada tahun 2019. Penurunan TPAK Kabupaten Dairi pada tahun 2020 disertai dengan naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun yang sama. Kenaikan TPT menggambarkan semakin banyaknya pengangguran di Kabupaten Dairi. Persoalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan antara lain adalah turunnya tingkat kesempatan kerja yang disebabkan oleh dampak Pandemi COVID-19. Selain itu, belum optimalnya upaya penyaluran tenaga kerja di daerah juga berkontribusi dalam persoalan ini.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Dairi. Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dianalisa dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut ini merupakan perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 38 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

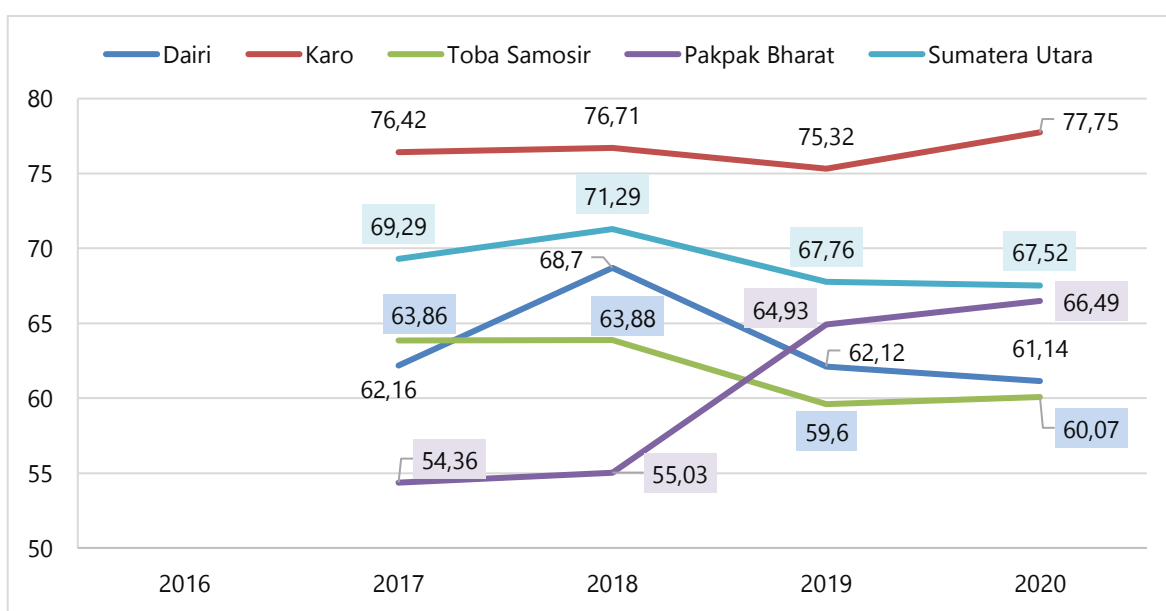


Sumber: BPS Pusat, 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan perbandingan capaian IPM antara penduduk perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Dairi fluktuatif dan cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Sumatera Utara, IPG Kabupaten Dairi lebih tinggi. Namun, perkembangan IPG Kabupaten Dairi masih berada di bawah IPG Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perkembangan data tersebut menunjukkan kesetaraan capaian penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli di Kabupaten Dairi belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain adalah kurangnya optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dan anak.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur tingkat keberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Semakin tinggi tingkat IDG menunjukkan keberdayaan perempuan yang semakin besar pada aspek perekonomian dan politik dikalangan masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 39 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Pusat, 2021

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun. Dibandingkan dengan daerah lain dan rata-rata Provinsi, IDG Kabupaten

Dairi masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perbandingan ini menggambarkan keberdayaan perempuan di Kabupaten Dairi masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya keberdayaan perempuan dalam kegiatan perekonomian dan politik di Kabupaten Dairi. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain adalah kurang optimalnya akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas publik. Kebijakan yang kurang sensitif gender juga berperan dalam menyebabkan permasalahan ini.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan berperan penting dalam memastikan ketercukupan pangan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pangan dapat dianalisa dengan melihat perkembangan Indeks Ketahanan Pangan daerah. Indeks Ketahanan Pangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu: ketersediaan pangan utama, stabilitas harga pangan, skor pola pangan harapan (PPH), persentase konsumsi energi dan protein per kapita. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 48 Perkembangan Indikator Kinerja Pangan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH	n.a	76,55	77,81	71	72,3
Persentase Konsumsi Energi per kapita	92,81	94,13	95,45	69,13	20,52
Persentase Konsumsi Protein per kapita	65,81	79,5	93,19	81,75	59,37

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Dairi yang fluktuatif dan cenderung turun menggambarkan pola diversifikasi pangan lokal yang belum optimal, persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya akses/distribusi pangan. Selain itu, pola konsumsi energi dan protein per kapita juga mengalami penurunan yang cukup besar mulai tahun 2019 hingga tahun 2020. Persoalan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Dairi akibat terdampak pandemic COVID-19.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib non-pelayanan dasar. Lingkup urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten mencakup pemberian izin lokasi, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penyelesaian sengketa tanah, proses ganti rugi, dan lain lain. Kinerja pelayanan pertanahan dapat dianalisis dengan melihat capaian pendaftaran tanah sistematis lengkap. Indikator ini menggambarkan cakupan masyarakat yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Berikut ini merupakan tabel status kepemilikan tanah yang diterbitkan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 49 Status Kepemilikan Tanah yang diterbitkan menurut Kecamatan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Hak Atas Tanah			Jumlah
	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	
2020	158	132	133	423
2019	2.966	5	29	3.000
2018	6.445	1	7	6.453
2017	2.718	1	24	2.743
2016	2.517	3	104	2.624

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2016-2021

Kinerja pelayanan pendaftaran tanah di Kabupaten Dairi fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2019 kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Pelaksanaan pelayanan pemberian izin lokasi terkendala wewenang pemberian izin lokasi yang mengakibatkan instansi daerah terkait hanya memiliki waktu terbatas untuk menerbitkan persetujuan izin lokasi. Selain itu, kualitas pelaksanaan urusan pertanahan terkendala perencanaan yang belum sistematis. Perencanaan terkait kebutuhan tanah belum tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.

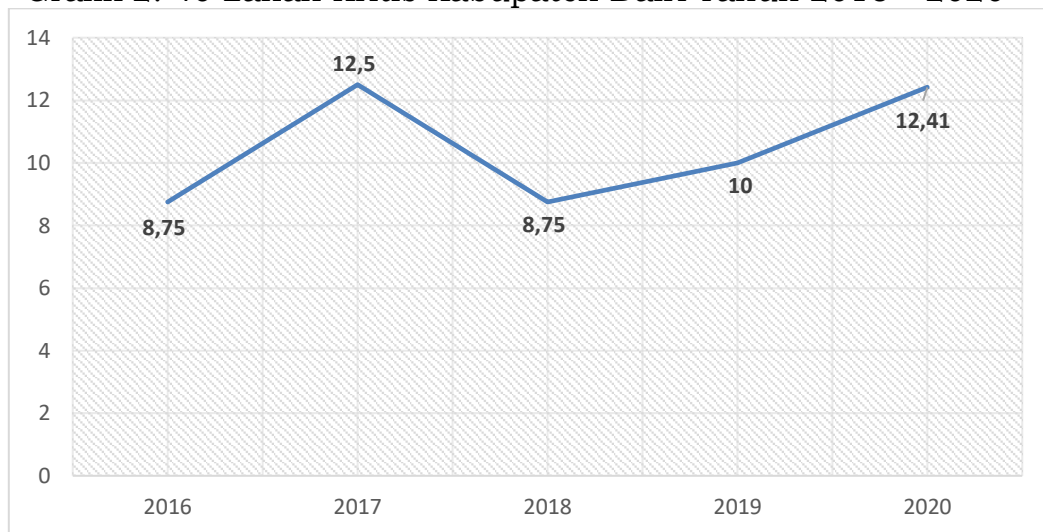
5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Lahan Kritis

Aspek dari urusan lingkungan hidup diantaranya yaitu penanganan lahan kritis. Definisi lahan kritis, menurut PERMENLHK No P.105 Tahun 2018 diartikan sebagai lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai. Keterdapatn lahan kritis, lebih lanjut

dapat berimplikasi sangat kompleks terhadap keterdapatannya sumber daya air dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Grafik 2. 40 Lahan Kritis Kabupaten Dairi Tahun 2016 – 2020



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, 2021

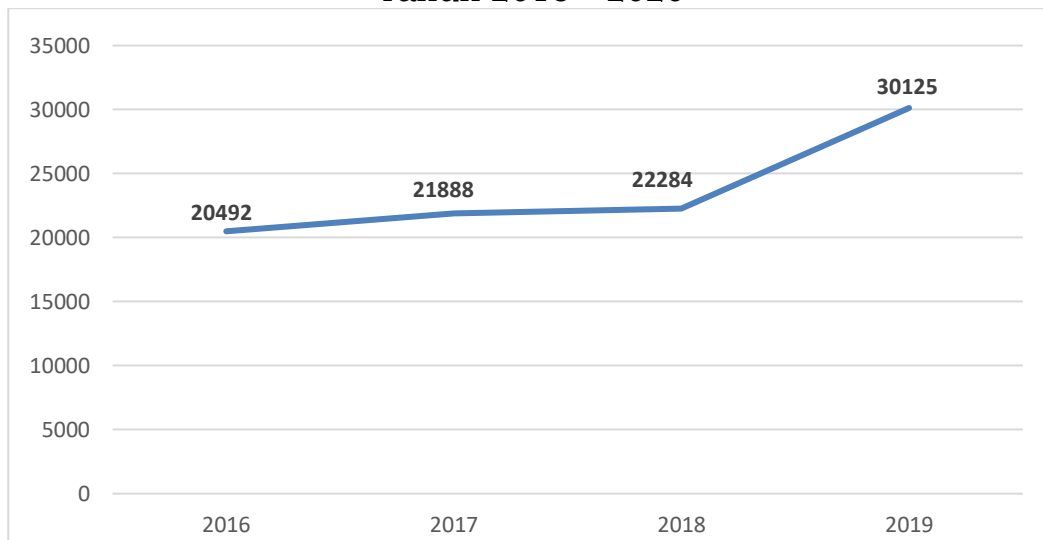
Data dalam LKjIP tahun 2021 mencatat terdapat fluktuasi keterdapatannya lahan kritis di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020. Penanganan lahan kritis dan lebih lanjut terkait sumber daya air merupakan hal yang sangat kompleks. Dibutuhkan kontribusi dan pelibatan lintas sektor dalam penanganannya.

b. Persampahan

Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah pembuangan secara individual, seperti membuang sampah secara individu dengan metode dan cara tersendiri. Cara selanjutnya yaitu dengan membuang sampah secara kolektif yang dikelola oleh pemerintah.

Cara pembuangan sampah di Kabupaten Dairi diarahkan secara kolektif dengan menyediakan tempat sampah, selanjutnya dibuang pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut disajikan volume sampah dalam kurun waktu 4 tahun atau dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Grafik 2. 41 Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Tahun 2016 – 2020



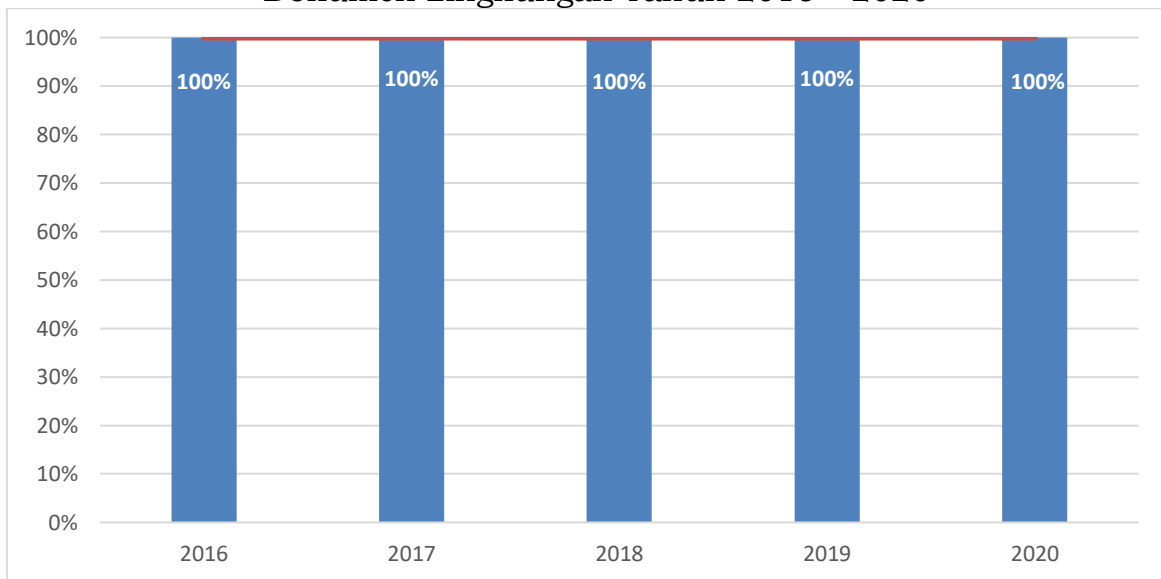
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, 2020

Volume sampah di Kabupaten Dairi selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi menjadi prioritas sebagai salah satu Langkah upaya dalam pengelolaan persampahan. Termasuk diantaranya dalam pengelolaan persampahan meliputi luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik TPA, prasarana dan sarananya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada.

c. Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Selain soal persampahan, dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Dairi juga melaksanakan pengawasan lingkungan, konservasi lingkungan, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kepemilikan dokumen lingkungan oleh perusahaan (AMDAL/UKL/UPL) dan pemantauan pencemaran lingkungan.

Grafik 2. 42 Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tahun 2016 – 2020



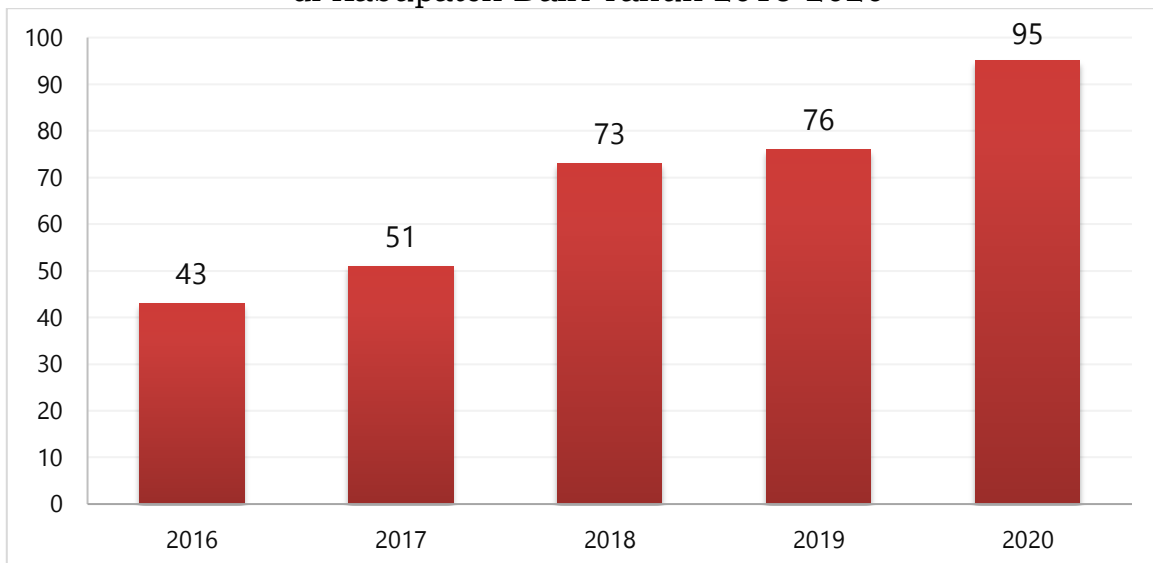
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, 2021

Capaian pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di Kabupaten Dairi memenuhi target mencapai 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki konsentrasi yang serius dalam aspek pengawasan dokumen lingkungan, dengan tujuan untuk tetap memberikan kontrol terhadap segala pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Pencapaian tersebut perlu untuk selalu diupayakan dan dipertahankan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan yang sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak warga negara dalam memperoleh dokumen kependudukan. Tinggi rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan sebagainya menjadi dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun kepemilikan penduduk terhadap dokumen kependudukan dapat dilihat di grafik berikut ini.

Grafik 2. 43 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 52 persen. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 22 persen. Sementara itu, peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3 persen.

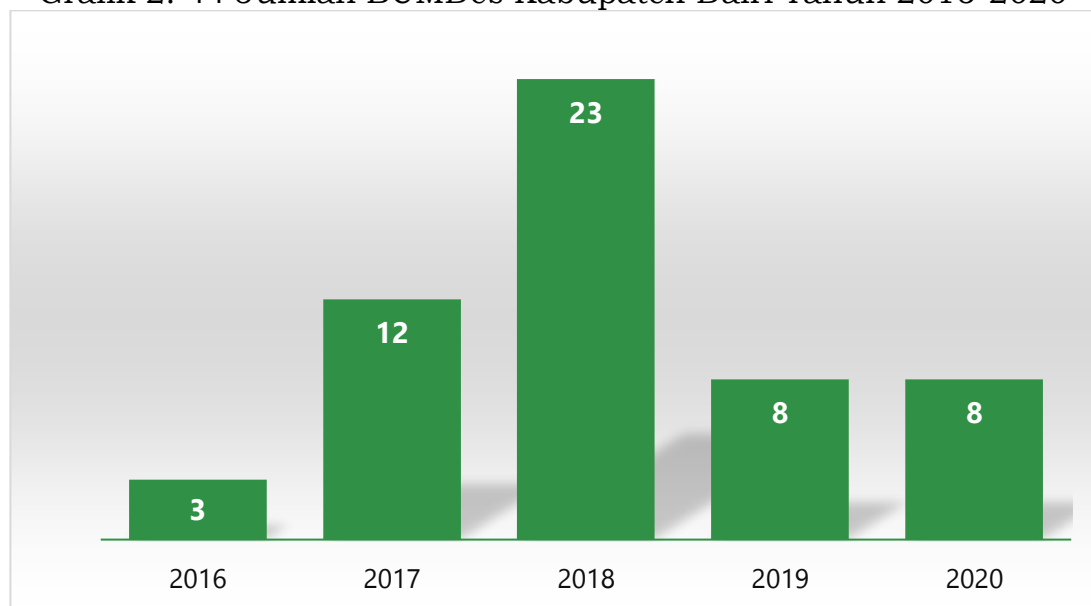
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia maupun perekonomian desa sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemberdayaan desa dapat dianalisis dengan melihat berbagai indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan desa. Salah satu indikator makro pemberdayaan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu desa. Selain itu, jumlah desa mandiri dalam suatu kabupaten juga merupakan salah satu indikator dalam menganalisis kinerja pemberdayaan desa. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) dan jumlah desa mandiri di Kabupaten Dairi.

Salah satu indikator keberdayaan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah Kabupaten Dairi sendiri telah

memfasilitasi pembentukan BUMDes. Berikut jumlah BUMDes di Kabupaten Dairi yang terbentuk pada tahun 2016-2020.

Grafik 2. 44 Jumlah BUMDes Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



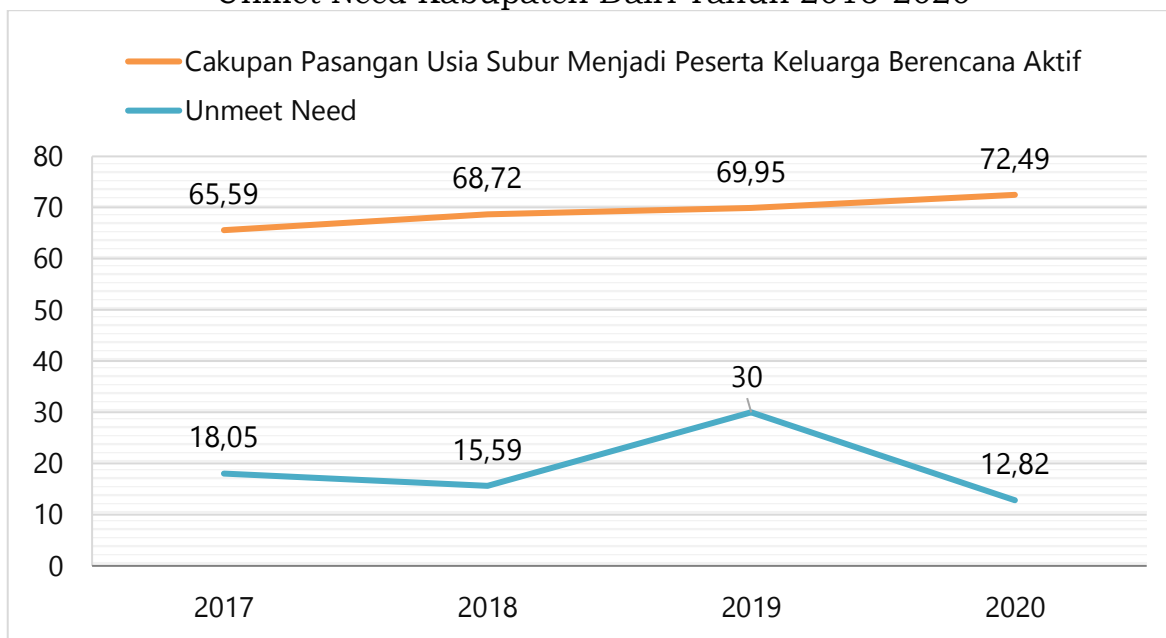
Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

Jumlah pembentukan BUMDes di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 20 desa. Peningkatan pembentukan BUMDes tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 11 desa. Namun, peningkatan tersebut kemudian berujung pada penurunan drastis pembentukan BUMDes pada tahun 2019 sehingga hanya menjadi 8 desa. Rendahnya pembentukan BUMDes tidak terlepas dari rendahnya daya inovasi sumber daya manusia desa.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berperan penting dalam memastikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dairi tetap berdampak positif bagi pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dianalisa melalui perkembangan beberapa indikator kunci seperti tingkat partisipasi pasangan usia subur pada program kontrasepsi, dan tingkat *unmeet need*.

Grafik 2. 45 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif dan Unmet Need Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJiP Kabupaten Dairi 2016-2020

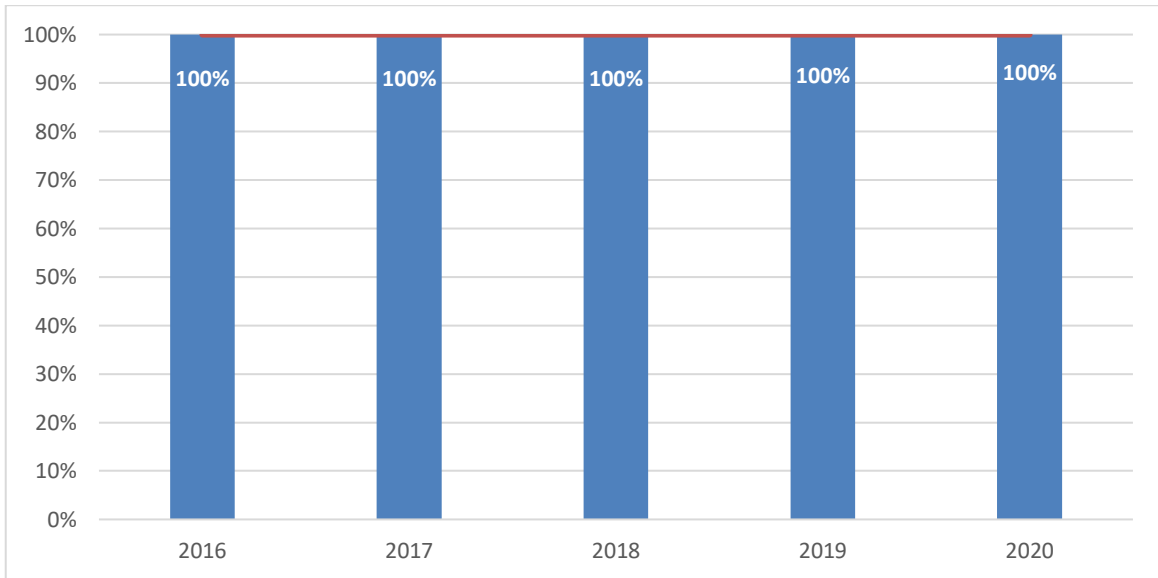
Cakupan Pasangan Usia Subur yang berpartisipasi aktif dalam program KB mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun. Peningkatan tersebut disertai dengan turunnya tingkat *Unmeet Need* di Kabupaten Dairi. Perkembangan ini menggambarkan semakin membaiknya kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk terutama melalui intervensi program Keluarga Berencana. Namun demikian, masih terdapat sekitar 27,51 pasangan usia subur yang belum berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai persoalan terutama belum optimalnya akses program keluarga berencana yang berdampak pada belum optimalnya partisipasi pasangan usia subur.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Fasilitas keselamatan lalu lintas sangat dibutuhkan dalam melengkapi aspek infrastruktur lalu lintas jalan. Semakin optimal dalam pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas, maka semakin memperkecil terjadinya kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan lainnya dalam berkendara atau berlalu lintas. Fasilitas tersebut mencakup lalu lintas udara, laut dan juga daratan.

Grafik 2. 46 Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2016 – 2020



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, 2021

Capaian penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi memenuhi target mencapai 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki konsentrasi yang serius dalam pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas. Pencapaian tersebut perlu untuk selalu diupayakan dan dipertahankan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah, serta akses masyarakat terhadap informasi publik. Kinerja penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi publik dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti Persentase OPD Menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Jumlah Media Yang Digunakan dalam desiminasi informasi.

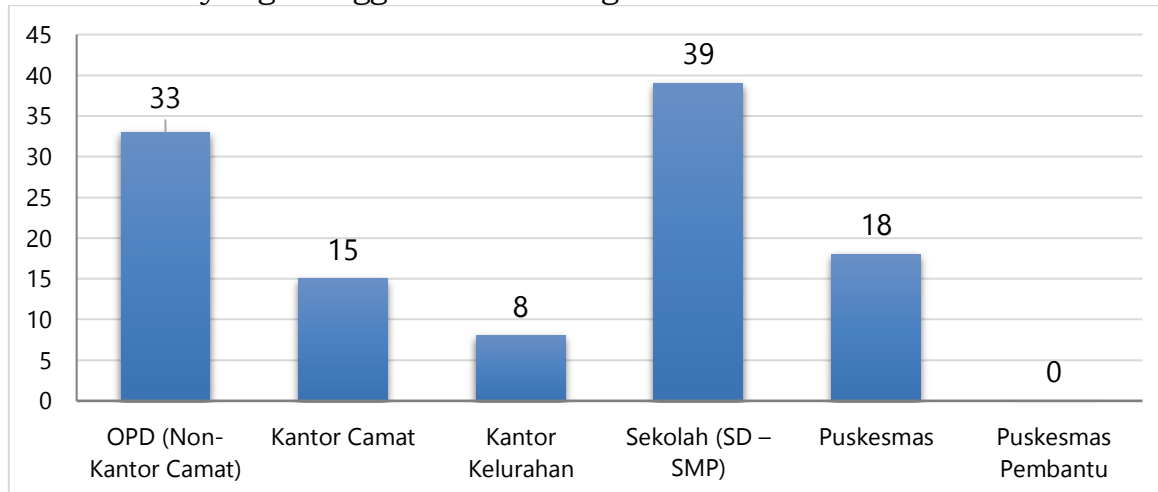
Tabel 2. 50 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	na	na	na	na	17,5
2	Jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi	7	7	7	7	7

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mencapai realisasi tahun 2020 sebesar 17,5 %, dengan target yang ditetapkan sebesar 20 %. Sehingga persentase capaian indikator tersebut mencapai 87,5 %. Sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat 7 Organisasi Perangkat Daerah dan 2 Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi yang sudah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Meskipun capaian indikator tersebut cukup tinggi, namun secara keseluruhan masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan OPD. Persoalan ini disebabkan oleh masih minimnya jumlah kapasitas *bandwidth*, kurangnya alat-alat studio. Sedangkan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi dari tahun 2016 sampai 2020 terlihat stagnan di angka 7 media. Kondisi ini merupakan realisasi yang dipertahankan dari tahun ke tahun mengingat jumlah media yang terbatas di Kabupaten Dairi. Gambaran kondisi komunikasi dan informatika Kabupaten Dairi juga dapat dilihat dari jumlah kantor instansi pemerintah yang menggunakan jaringan internet untuk pelayanan publik.

Grafik 2. 47 Jumlah Kantor Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi yang menggunakan Jaringan Internet Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2021

Penggunaan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan bagi setiap daerah. Jika melihat data Tabel Jaringan internet yang digunakan di Kabupaten Dairi sudah cukup merata, hal ini terlihat dari jumlah kantor camat yang menggunakan jaringan internet adalah keseluruhan kecamatan yaitu 15 kecamatan. Kondisi yang baik juga terlihat pada jumlah sekolah SD sampai SMP yang menggunakan jaringan internet, yaitu 39 sekolah. Namun, pemerataan jaringan internet di setiap kecamatan belum diikuti dengan pemenuhan jaringan internet di

pedesaan. Terlihat bahwa dari 169 desa/kelurahan di Kabupaten Dairi, hanya 8 kantor yang menggunakan jaringan internet pada tahun 2020. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat kebijakan saat ini yang lebih banyak menggunakan akses internet, sehingga pemerataan pembangunan yang dilakukan perlu disertai dengan kualitas jaringan internet yang baik.

Tabel 2. 51 Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sidikalang	na	-	-	-	-
2	Berampu	na	-	-	-	-
3	Sitinjo	na	-	-	-	-
4	Parbuluan	na	-	-	-	-
5	Sumbul	na	1	1	1	1
6	Silahisabungan	na	1	1	1	1
7	Silima Punggapungga	na	1	1	1	1
8	Lae Parira	na	-	-	-	-
9	Siempat Nempu	na	1	1	1	1
10	Siempat Nempu Hulu	na	-	-	-	-
11	Siempat Nempu Hilir	na	-	-	-	-
12	Tigalingga	na	1	1	1	1
13	Gunung Sitember	na	-	-	-	-
14	Pegagan Hilir	na	-	-	-	-
15	Tanah Pinem	na	1	1	1	1
Total		na	6	6	6	6

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2021

Pelayanan pos di Kabupaten Dairi masih kurang merata di semua kecamatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Dairi, hanya sebanyak 6 kecamatan yang memiliki layanan pos pembantu, sehingga akses masyarakat terhadap layanan pos masih terbatas.

Secara keseluruhan, kondisi urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap komunikasi dan informatika masih belum optimal. Penyebab dari persoalan ini diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi dan informatika, baik berupa perangkat lunak

maupun perangkat keras dan belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha mikro berikut ini.

Tabel 2. 52 Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Kecil Mikro Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif	25	67	158	165	165
Jumlah Usaha Mikro	86	98	115	103	13.682

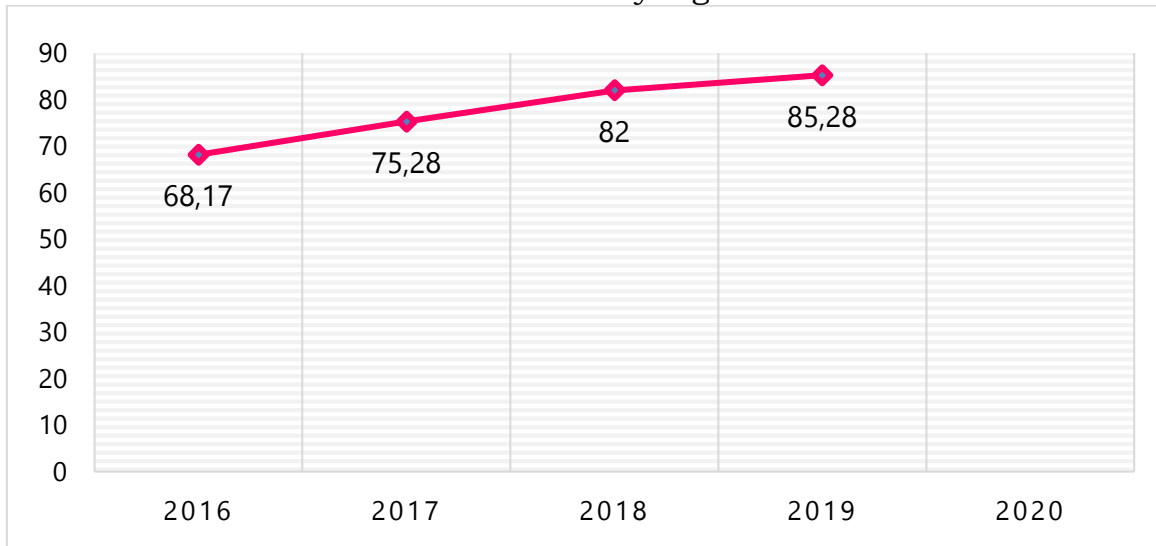
Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2016-2020

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun demikian, kinerja tersebut stagnan pada tahun 2020. Perkembangan ini menunjukkan kinerja penyelenggaraan koperasi yang baik. Disamping itu, jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi juga meningkat cukup besar dari tahun 2016-2018. Meskipun demikian, kinerja urusan koperasi dan UKM mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Namun, tahun 2020 jumlah usaha mikro melonjak drastis karena terdapat Banpres Produktif Usaha Mikro .

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penanaman modal berperan penting dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator utama seperti realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, Persentase Izin yang diterbitkan sesuai SOP juga berperan dalam menggambarkan kinerja pendukung pelayanan ijin permodalan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 48 Persentase Izin yang Terbit Sesuai SOP



Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

Kinerja penunjang layanan penanaman modal di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun. Perkembangan data tersebut mengindikasikan optimalnya pelayanan perijinan pendukung penanaman modal. Namun demikian, masih terdapat sekitar 14,72% ijin penanaman modal yang belum dapat diterbitkan sesuai dengan SOP. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya akses dan fasilitas pendukung layanan perijinan permodalan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga berperan penting dalam memastikan keberdayaan pemuda dan tersedianya akses penyaluran aktivitas olahraga bagi masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti tingkat fasilitasi pemuda dan persentase penanganan gedung olahraga.

Tabel 2. 53 Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasinya Layanan Kepemudaan	500	667	1439	1439	25
Persentase penanganan gedung olahraga	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2017-2020

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Perkembangan data tersebut menunjukkan kinerja organisasi perangkat daerah penanggungjawab sudah optimal. Namun demikian, tingkat fasilitasi layanan kepemudaan mengalami

penurunan yang cukup besar pada tahun 2020. Permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Dairi.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Statistik dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian krusial sebagai sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Ketersediaan data yang berkualitas dan mudah diakses berpengaruh dalam perumusan masalah dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. Urusan statistik juga berperan penting dalam proses evaluasi kinerja pembangunan pemerintah daerah. Statistik daerah Kabupaten Dairi telah dituangkan dalam berbagai laporan data daerah yang meliputi berbagai aspek seperti geografi, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Basis data berbentuk laporan cetak maupun *online* di Kabupaten Dairi sudah tersedia setiap tahun. Namun demikian, jika dicermati lebih detail di setiap indikator, masih terdapat laporan yang indikator tahunnya belum diperbaharui. Beberapa laporan pada tahun tertentu terkadang masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh ketersediaan data yang kurang memadai. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya metode dan sistem pengumpulan data di Kabupaten Dairi.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan persandian di kabupaten mencakup upaya pengamanan informasi daerah serta penetapan pola hubungan persandian antar perangkat daerah. Urusan persandian di Kabupaten Dairi diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara umum, layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Namun, terdapat beberapa persoalan dalam penyelenggaraan urusan persandian. Persoalan tersebut terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dibidang persandian yang belum memadai.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Lingkup urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, pelestarian tradisi masyarakat, pembinaan kesenian masyarakat, penetapan dan pelestarian cagar

budaya. Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yang terkait dengan lingkup urusan tersebut. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 49 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

Secara umum, indikator kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi masih tergolong rendah. Jumlah kelompok kesenian yang terfasilitasi dan jumlah sarana prasarana seni dan budaya mengalami stagnasi dari tahun 2016 sampai 2020. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya komitmen masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan. Selain itu, upaya sosialisasi kebudayaan yang dapat dilakukan juga belum optimal. Sedangkan jumlah pagelaran seni dan budaya, juga mengalami stagnasi dari tahun 2016 sampai 2019 kemudian menurun hingga tanpa pagelaran sama sekali di tahun 2020. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Banyak tempat-tempat umum dan wisata yang dibatasi sehingga sangat berpengaruh terhadap berhentinya pagelaran seni dan budaya. Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih ke depan agar urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi dapat bangkit dan berkembang.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan guna memajukan literasi masyarakat. Selain itu, perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan serta menumbuhkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat.

Perkembangan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Dairi dapat dianalisis dengan melihat capaian kinerja perpustakaan pada beberapa indikator berikut ini.

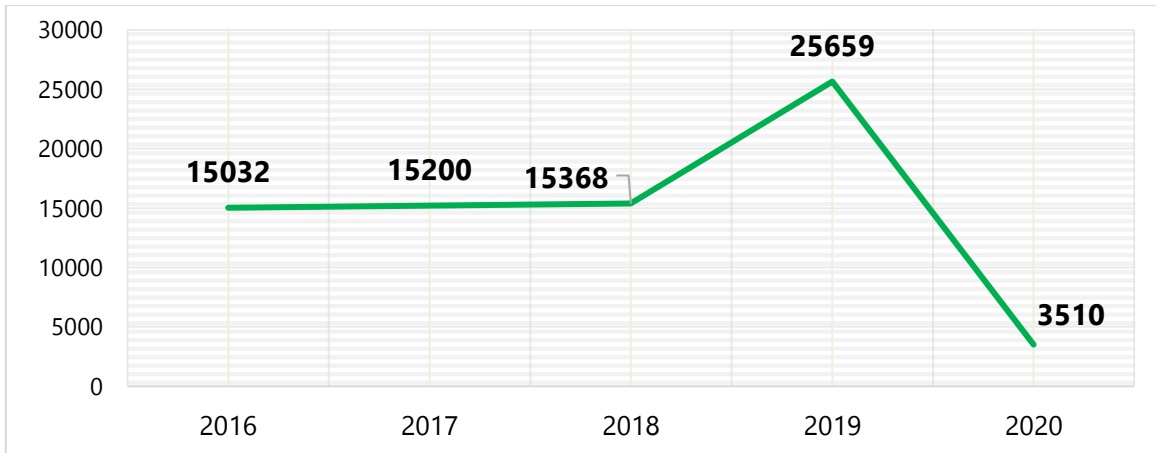
Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

N	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan yang ada	379	398	412	424	424
2	Jumlah koleksi buku	49.488	55.652	55.413	60.730	61.930
3	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan/ dibina	55	53	98	30	59

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2016-2020

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah koleksi buku di Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan sejalan dengan jumlah perpustakaan. Sementara itu, jumlah perpustakaan yang dibina menunjukkan angka yang fluktuatif. Analisis terkait dengan urusan perpustakaan dapat melihat data jumlah pengunjung pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 50 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LkjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

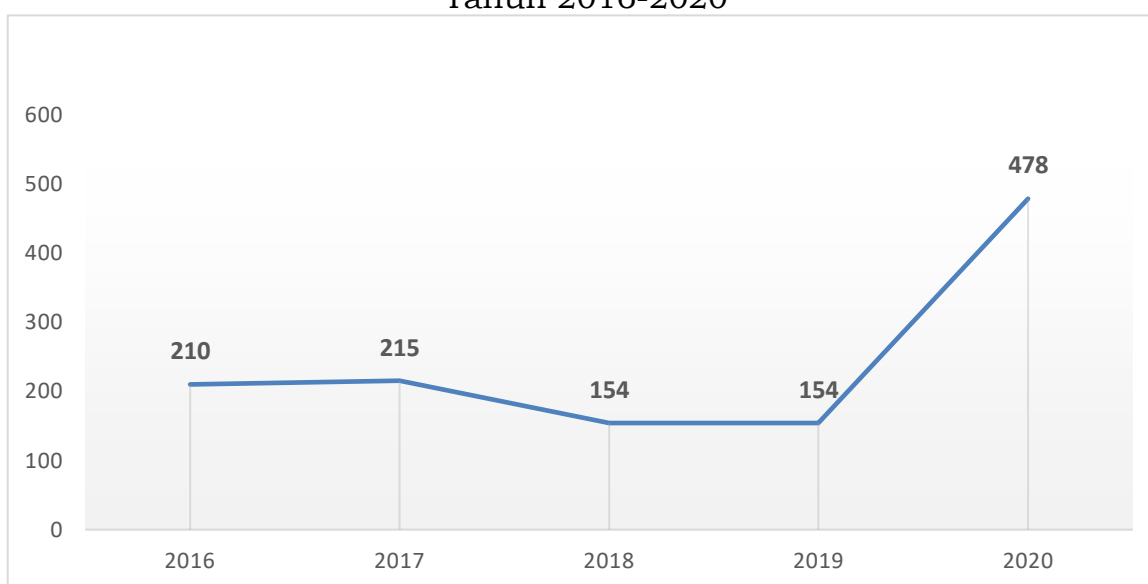
Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2018 hingga 2019, yaitu sebesar 66,9 %. Kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2020 dengan hanya 3510 pengunjung. Penurunan tersebut diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang memberlakukan peraturan baru terkait pembatasan kegiatan secara luring, sehingga banyak aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Namun, di samping hal tersebut, belum optimalnya penyelenggaraan layanan perpustakaan di Kabupaten Dairi juga perlu mendapatkan perhatian.

Peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Dairi harus diimbangi dengan peningkatan jumlah pustakawan. Selain itu, cakupan pelayanan perpustakaan Kabupaten Dairi tergolong masih belum optimal. Terlebih lagi, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan perpustakaan juga masih terkendala jarak dan moda transportasi.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan arsip yang baik dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengembangan organisasi maupun pengambilan keputusan bagi pimpinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan arsip secara baik. Berikut ini adalah kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Grafik 2. 51 Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LkjIP Kabupaten Dairi 2016-2020

Persentase arsip yang dilestarikan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun selama 2016 hingga 2019. Pada tahun 2020 data menunjukkan kenaikan yang signifikan dengan total 478 arsip. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah ada pembenahan dalam pengidentifikasian dan pengumpulan arsip. Perbaikan tersebut tersebut perlu ditingkatkan lagi dengan menyiapkan SDM kearsipan, optimalnya sarana dan prasarana kearsipan, dan optimalisasi penanganan arsip aktif dan inaktif.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian. Beberapa urusan di dalam fokus layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, sektor ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau nelayan setempat. Letak Kabupaten Dairi yang berada di wilayah Danau Toba memberikan keuntungan tersendiri dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 55 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,69	43,17	42,86	42,28	42,71

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga tahun 2019, selanjutnya mengalami kenaikan pada 2019-2020. Penurunan terjadi pada tahun 2016 hingga 2017, yaitu sebesar 0,52 persen. Dalam melihat sektor perikanan perlu melihat sebaran produksi ikan menurut jenis ikan, berikut ini adalah tabel jumlah produksi ikan menurut jenis di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 56 Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan dan Asal Penangkapan di Kabupaten Dairi (ton)

No	Jenis Ikan	Jumlah (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ikan Mas	137,7	121,7	170	183,3	194,3
2	Ikan Mujahir	0	0	1	1	0
3	Ikan Nila	324,5	331,5	2278	2343,5	2593,37
4	Ikan Lele	16	11	41	38,7	35,39
5	Jurung	6	2,5	4	4	3,78
6	Lain-Lain	3,5	1,5	18	8	6,93

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Produksi perikanan menunjukkan tren yang berbeda-beda. Tren meningkat terjadi pada jenis ikan mas, nila, dan lele. Sedangkan tren penurunan terjadi pada ikan jurung. Peningkatan tertinggi terdapat pada jenis ikan nila yang meningkat drastis sebesar 1946,5 ton pada 2017-2018. Perbedaan produksi perikanan perairan umum ini terjadi karena penyebab indikatif rendahnya produktifitas usaha perikanan karena pengelolaan yang belum optimal atau masih secara tradisional.

Aspek lain dalam melihat bidang perikanan adalah rumah tangga perikanan budi daya menurut jenis budi daya ikan. Aspek tersebut melihat sarana budi daya ikan yang digunakan. Berikut adalah data data tentang jumlah rumah tangga perikanan budi daya di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 57 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budi Daya Menurut Jenis Budi Daya Ikan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Jenis Perikanan Budidaya	Rumah Tangga				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kolam	553	554	1856	1866	1850
2	Sawah	208	198	194	190	100
3	Jaring Apung	52	52	56	57	77
4	Pembenihan	11	11	11	11	11

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Jumlah budi daya perikanan di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020 memiliki tren yang berbeda-beda. Tren kenaikan terjadi pada kolam dan jaring apung. Sementara itu, tren penurunan terjadi pada sawah, untuk pembenihan menunjukkan angka yang stagnan yaitu 11 unit. Kenaikan drastis terjadi pada kolam yaitu meningkat sebesar 1302 unit pada 2017-2018. Di sisi lain penurunan paling drastis adalah pada jenis sawah yaitu 90 unit pada tahun 2019-2020. Salah satu permasalahan yang dialami Kabupaten Dairi di bidang perikanan adalah belum optimalnya pemanfaatan kawasan pengembangan perikanan.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kondisi sektor pariwisata di Kabupaten Dairi dapat dilihat dari pertumbuhan dan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Berikut adalah data mengenai peranan sub-kategori sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Dairi pada tahun 2016 hingga 2020.

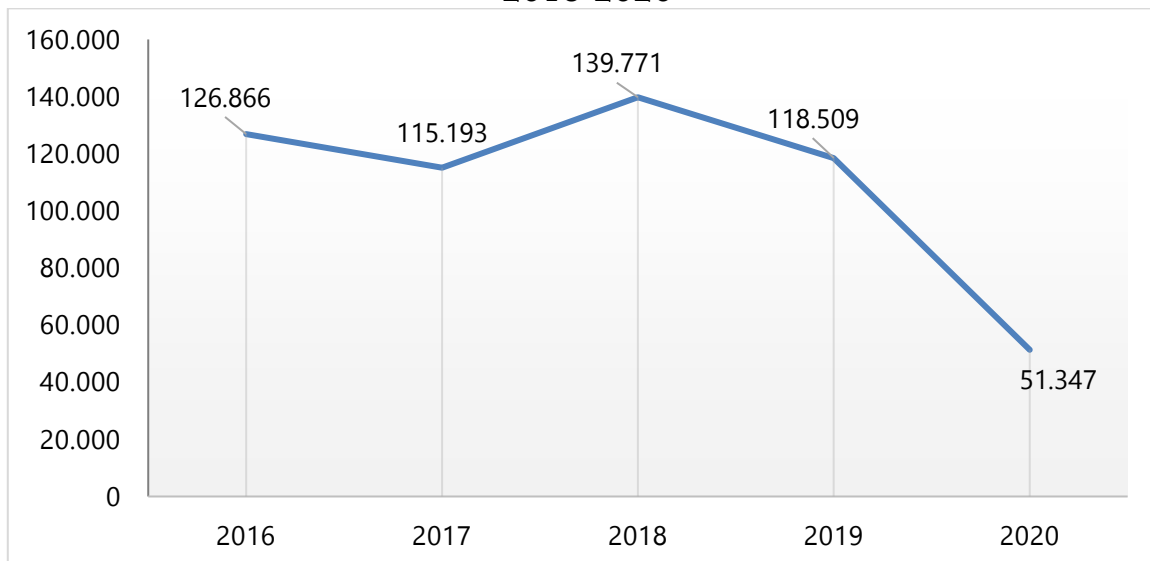
Tabel 2. 58 Peranan Sub Kategori Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Dairi (persen) Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,02	3,02	2,98	2,91	2,77

Sumber: PDRB Kabupaten Dairi Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Peranan Sub Kategori Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Dairi mengalami tren menurun. Penurunan tertinggi adalah sebesar 0,14% pada 2019 -2020. Penurunan pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum disebabkan oleh menurunnya kondisi makro global pandemi *covid-19*. Sementara itu, gambaran mengenai jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 2. 52 Jumlah Kunjungan Wisawatan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

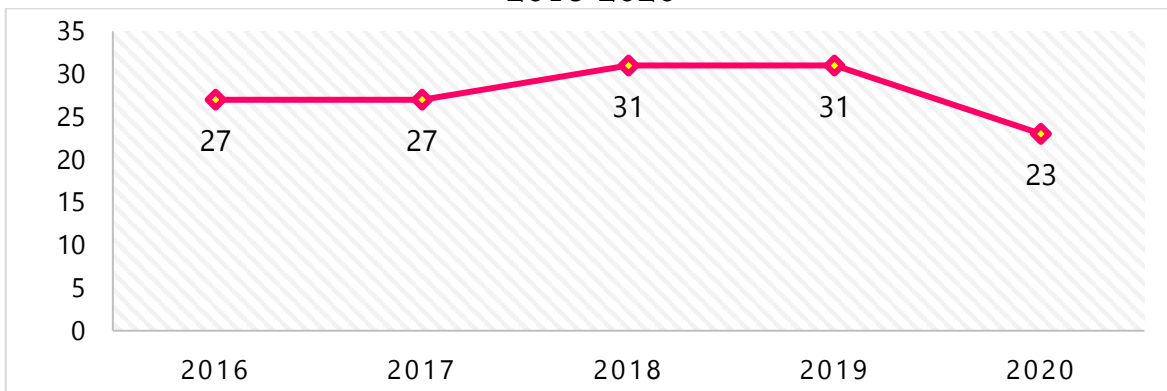


Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan tren yang menurun pada tahun 2016 hingga 2020. Penurunan paling drastis adalah sebesar 67.162 orang pada tahun 2019-2020. Menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung salah satunya dipengaruhi oleh pandemi *covid-19* yang turut mempengaruhi pariwisata di Kabupaten Dairi.

Penyediaan akomodasi juga turut berkontribusi terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Dairi. Akomodasi yang tersedia tersebut disediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang *hospitality*, seperti hotel, losmen, dan sejenisnya. Berikut ini adalah gambaran jumlah usaha hotel di Kabupaten Dairi tahun 2016 hingga 2020.

Grafik 2. 53 Jumlah Perusahaan/Usaha Hotel di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi, 2020

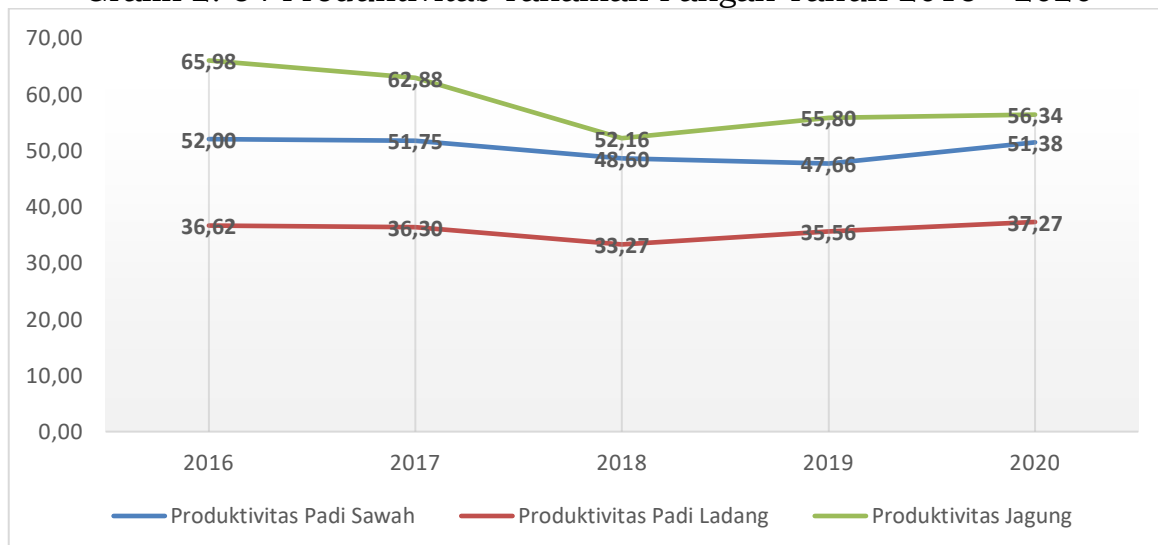
Peningkatan produksi di sektor penyediaan akomodasi sangat dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan dapat didorong dengan penyediaan sektor akomodasi yang dapat mendukung wisatawan. Namun, data pariwisata menunjukkan jumlah hotel di Kabupaten Dairi cenderung stagnan dan menurun pada 2019-2020. Situasi global pandemi *covid-19* menjadi penyebab dari mundurnya sektor pariwisata di Kabupaten Dairi.

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Tanaman Pangan

Sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terbagi menjadi padi sawah, padi ladang dan juga jagung. Masing-masing tanaman pangan memiliki tingkat produktivitas yang berbeda-beda. Produktivitas padi sawah dari tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif tiap tahunnya, dengan kondisi akhir mencapai angka 54,18% di tahun 2020.

Grafik 2. 54 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2016 – 2020



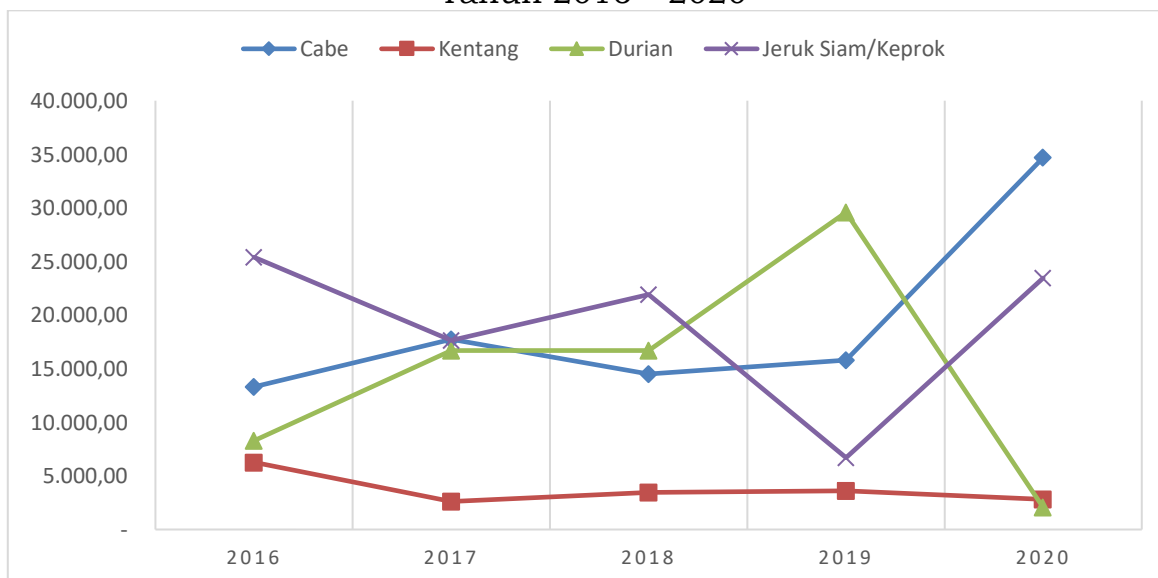
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Diantara ketiga jenis tanaman pangan, yang dominan memiliki produktivitas yang paling tinggi yaitu padi sawah, kemudian jagung dan selanjutnya padi ladang. Produktivitas jagung mengalami nilai paling tinggi pada tahun 2016, melebihi tingkat produktivitas padi ladang maupun padi sawah, yakni sebesar 65,98 kw/ha.

2. Hortikultura

Tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah – buahan. Tanaman hortikultura dominan yang terdapat di Kabupaten Dairi diantaranya yaitu jeruk manis, kentang, cabe merah dan juga durian. Berikut disajikan produktivitas tanaman hortikultura Kabupaten Dairi tahun 2016 hingga tahun 2020.

Grafik 2. 55 Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

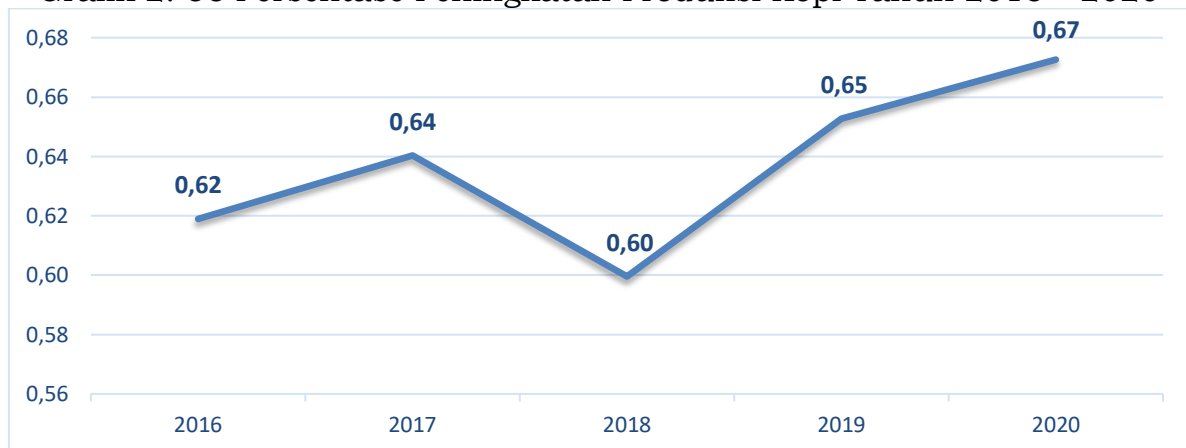
Produktivitas tanaman hortikultura di Kabupaten Dairi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase produktivitas tertinggi dari tanaman hortikultura di Kabupaten Dairi yaitu durian. Produktivitas tanaman hortikultura terendah yaitu kentang dimana memiliki produktivitas cukup signifikan jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura lainnya.

3. Tanaman Perkebunan Kopi

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Dairi, salah satunya adalah kopi. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi topografi Kabupaten Dairi yang memiliki sebagian wilayah berada di dataran tinggi. Kondisi

tersebut mendukung tanaman kopi dapat bertumbuh kembang dengan baik di Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 56 Persentase Peningkatan Produksi Kopi Tahun 2016 – 2020



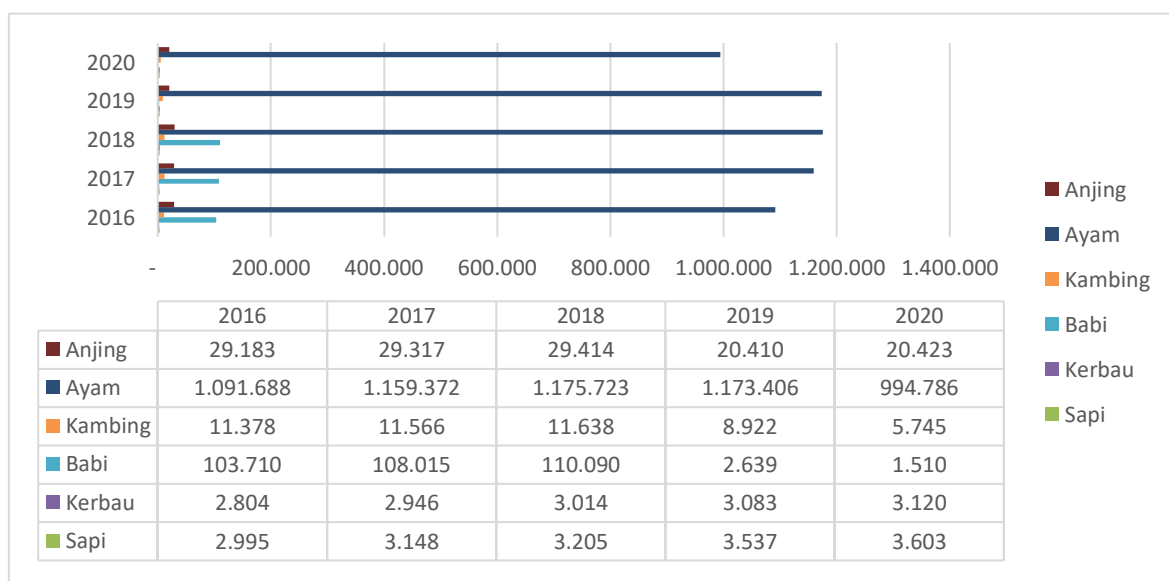
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Grafik menunjukkan terjadinya fluktuasi produktivitas kopi di Kabupaten Dairi tahun 2016 hingga tahun 2020. Peningkatan cukup signifikan dari produksi tanaman kopi di Kabupaten Dairi, terjadi pada tahun 2018 menuju tahun 2020, yaitu sebesar 0,7%.

4. Peternakan

Salah satu sub sektor dari pertanian diantaranya yaitu peternakan. Peternakan di Kabupaten Dairi diantaranya berupa babi dan ayam. Gambar grafik menyajikan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi, khususnya untuk peternakan babi dan ayam.

Grafik 2. 57 Jumlah Populasi Peternakan Tahun 2016 – 2020



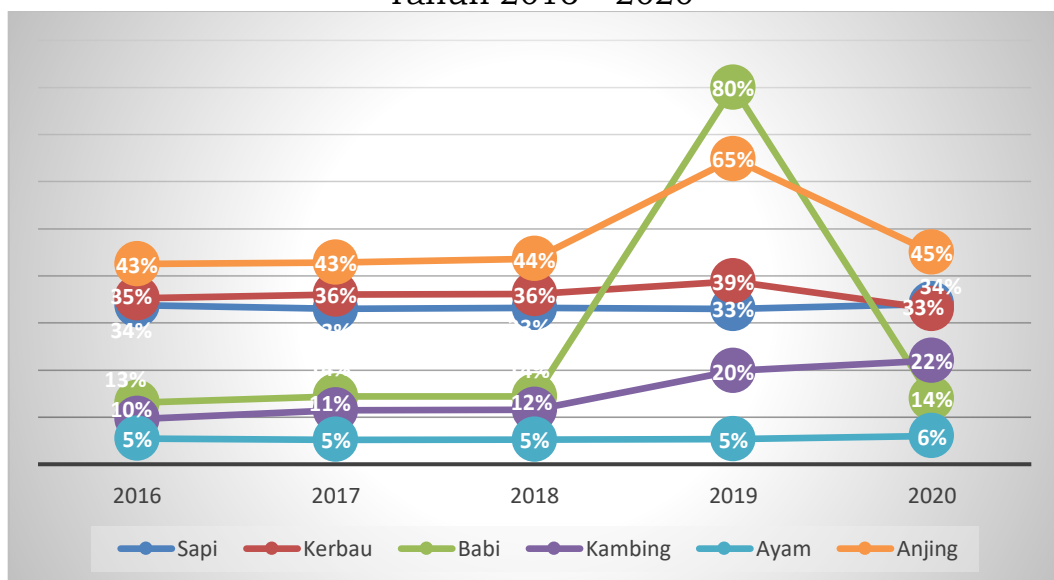
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Jumlah populasi babi dan ayam setiap tahunnya mengalami jumlah peningkatan. Meskipun demikian, jumlah populasi babi dengan ayam cukup signifikan. Babi memiliki populasi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan ayam. Sementara itu urutan selanjutnya adalah anjing, kambing, kerbau, dan sapi.

a. Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi yang terdata terdiri dari sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, anjing. Berdasarkan data, menunjukkan bahwa penanganan kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2014-2019. Berikut disajikan data terhadap penanganan kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 58 Persentase Penanganan Kesehatan Hewan Tahun 2016 – 2020



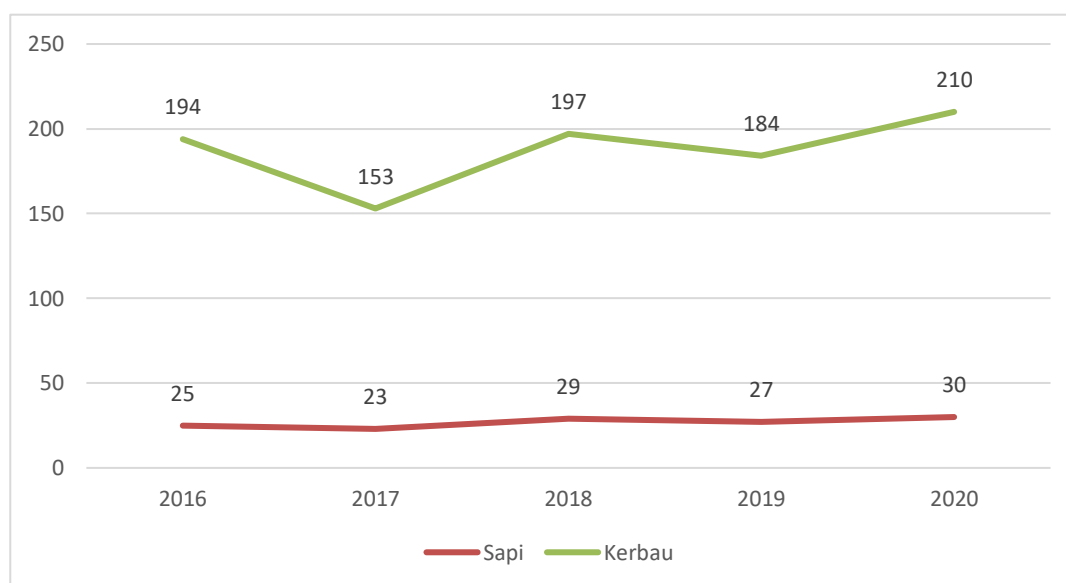
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Upaya terhadap penanganan terhadap kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi perlu untuk dioptimalkan, khususnya terhadap kesehatan hewan ternak babi, kambing dan ayam. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketiga hewan ternak tersebut menunjukkan nilai yang cukup rendah jika dibandingkan pada penanganan terhadap hewan ternak lainnya. Upaya tersebut dimaksudkan selain untuk kesehatan hewan ternak itu sendiri juga untuk menghindarkan timbulnya penyakit yang dapat menular terhadap manusia.

b. Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang

Pemotongan hewan ternak besar maupun kecil cenderung mengalami kenaikan. Kondisi tersebut seperti halnya terjadi pada RPH Sidikalang. Data terkait jumlah pemotongan ternak di RPH Sidikalang tahun 2016 – tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Grafik 2. 59 Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Sidikalang Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Pemotongan hewan ternak di RPH Sidikalang adalah seputar sapi dan kerbau. Pada tahun 2016 total adalah sebanyak 219 ekor, 2017 sebanyak 176 ekor, 2018 sebanyak 226 ekor, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 211 ekor, sementara itu tahun 2020 meningkat menjadi 240 ekor.

2.3.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang penting dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, sektor ini juga dapat berkontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Letak Kabupaten Dairi yang berada di dataran tinggi merupakan penunjang keberadaan hutan. Berikut adalah data mengenai luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 59 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Dairi (ha)

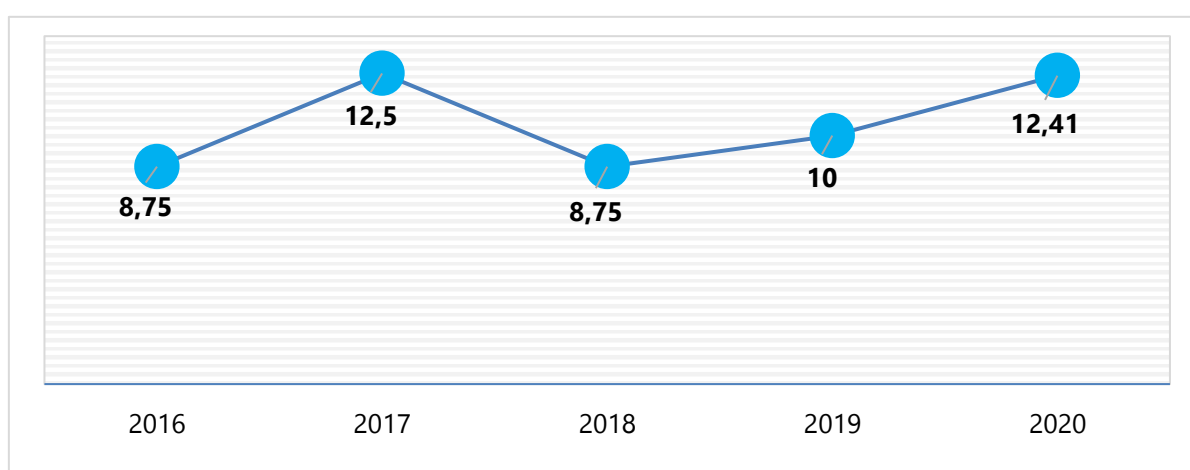
NO	Fungsi Hutan	Luas (ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hutan	289,9	289,9	289,9	289,9	289,9

NO	Fungsi Hutan	Luas (ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Suaka					
2	Hutan Lindung	53.767,42	53.767,42	53.767,42	53.767,42	53.767,42
3	Hutan Produksi Terbatas	30.019,66	30.019,66	30.019,66	30.019,66	30.019,66
4	Hutan Produksi	13722,108	13722,108	13722,108	13722,108	13722,108
5	Hutan Produksi Konservasi	0	0	0	0	0
6	Area Penggunaan Lain	100678	100578	100578	104578	104578

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Kawasan hutan di Kabupaten Dairi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah hutan suaka, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konservasi, dan penggunaan lain. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 mengalami tren yang stagnan. Sementara itu, aspek penting dalam hutan dan lahan adalah rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi lahan kritis bertujuan untuk mengembalikan lahan kembali seperti semula. Berikut ini adalah data mengenai rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

Grafik 2. 60 Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (ha)



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Dairi memiliki tren yang fluktuatif dalam rentang 2016-2020. Pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,75 hektar, kemudian tahun 2018 kembali

menurun 3,75 hektar. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 1,25 hektar dan pada tahun 2020 naik 2,41 hektar. Penanganan lahan kritis merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian.

2.3.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Salah satu sektor yang mendukung perekonomian negara dan daerah adalah energi dan sumber daya mineral. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kabupaten Dairi adalah daerah memiliki cadangan energi dan sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan umum. Berikut adalah data yang menggambarkan jumlah pelanggan energi listrik PT.PLN (Persero) di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 60 Jumlah Pelanggan Energi Listrik PT. PLN (Persero) Menurut Kategori Pelanggan di Kabupaten Dairi

No	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	59399	67358	70427	n/a	74209
2	Komersil	1219	1629	2730	n/a	2918
3	Industri	8	15	20	n/a	20
4	Sosial	1688	1343	2252	n/a	2025
5	Pemerintah	287	408	415	n/a	399

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Pelanggan energi listrik dari PT.PLN (Persero) memiliki beberapa sektor, antara lain rumah tangga, komersil, sektor industri, sosial, dan pemerintah. Tren kenaikan pelanggan PT.PLN adalah pada sektor rumah tangga, komersil dan industri. Kenaikan paling banyak terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu sebesar 3782 pelanggan pada 2019-2020. Sementara itu penurunan jumlah pelanggan terjadi pada sosial dan pemerintah. Penurunan paling banyak adalah pada sektor sosial yang berkurang 227 pelanggan pada 2019-2020.

2.3.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi meskipun

mengalami pertumbuhan yang melambat. Berikut ini adalah data mengenai peranan sub kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Dairi (Persen) Tahun 2016-2020.

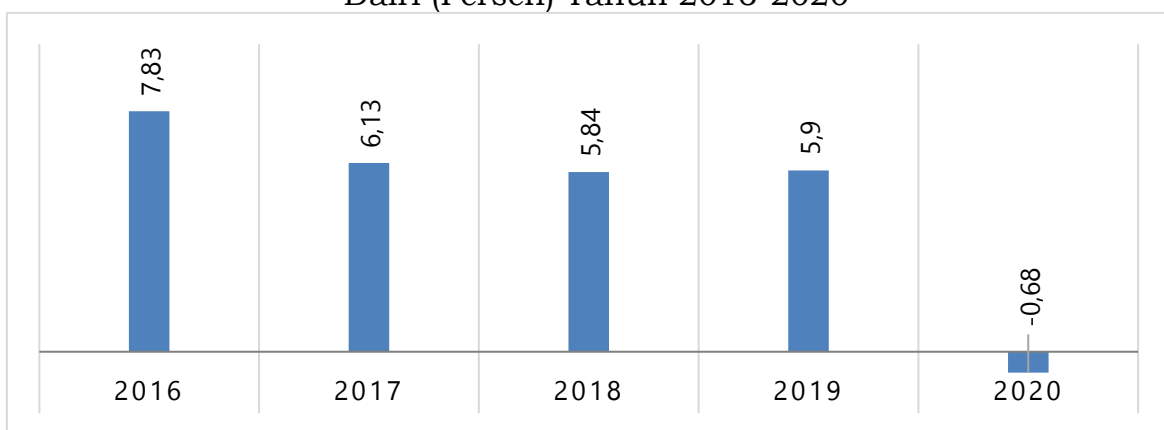
Tabel 2. 61 Peranan Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Dairi (Persen) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,08	17,10	17,07	17,21	17,22

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dairi, 2016-2020

Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor menjadi sub kategori yang mendominasi sektor perdagangan besar dan eceran. Data menunjukkan tiap tahun persentase perdagangan besar reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi adalah sebesar 0,14% pada tahun 2018 ke 2019. Sementara itu, laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor beserta sub kategorinya di Kabupaten Dairi dapat dilihat di grafik berikut.

Grafik 2. 61 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor beserta Sub Kategorinya di Kabupaten Dairi (Persen) Tahun 2016-2020



Sumber: PDRB Kabupaten Dairi Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Pertumbuhan sektor perdagangan menunjukkan tren yang menurun selama periode 2016-2020. Penurunan paling drastis terjadi pada 2019 ke 2020, yang menunjukkan angka negatif di tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi global pandemi *covid-19*, keadaan

tersebut mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat, sehingga menurunkan nilai transaksi di sektor perdagangan.

2.3.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sektor industri pengolahan menjadi sektor potensial yang diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Dairi. Berikut adalah gambaran peranan sub kategori industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Dairi (persen) Tahun 2016-2020.

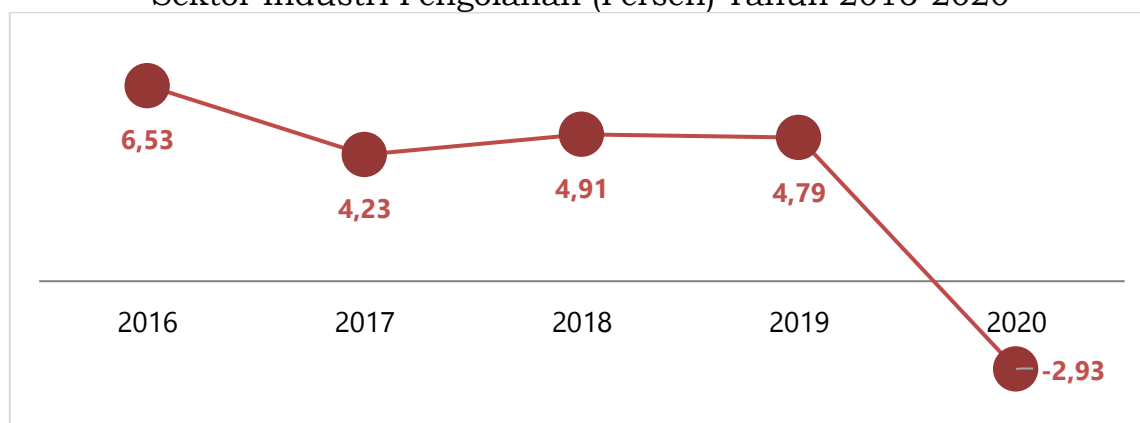
Tabel 2. 62 Peranan Sub Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Dairi (persen) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dairi, 2016-2020

Data yang dirilis oleh BPS tersebut menunjukkan tren kenaikan pada sub kategori pengolahan di Kabupaten Dairi. Meskipun naik, tetapi angka yang ditunjukkan stagnan. Perubahan besaran yang terjadi adalah sebesar 0,1% pada tahun 2016 ke 2017 dan 2017 ke 2018. Penting juga untuk melihat laju pertumbuhan sub kategori pilihan sektor industri pengolahan di Kabupaten Dairi, berikut ini adalah gambarannya.

Grafik 2. 62 Laju Pertumbuhan Sub Kategori Pilihan Sektor Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2016-2020



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dairi, 2016-2020

Tren pertumbuhan sub kategori pilihan sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Penurunan paling drastis adalah sebesar 7,72% pada tahun 2019 ke 2020. Penyebab utama dari penurunan tersebut antara lain adalah situasi pandemi *covid-19*. Selain itu masalah pengembangan industri sangat berkaitan dengan kapasitas SDM, permodalan, metode pemasaran, sarana prasarana pendukung produksi, dan daya saing produk IKM. Faktor-faktor tersebut harus mendapat

perhatian dan intervensi secara komprehensif pada periode perencanaan ke depan.

2.3.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di suatu daerah. Gambaran mengenai kondisi penunjang urusan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; penelitian dan pengembangan; sekretariat dewan; dan pemerintahan umum/sekretariat daerah. Secara rinci, ketujuh urusan penunjang dapat dilihat dalam deskripsi berikut.

2.3.3.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintahan daerah. Urusan ini memiliki fungsi untuk memfasilitasi, mengkoordinasi, pembinaan, dan pengendalian perumusan kebijakan daerah. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah di bawah ini.

Tabel 2. 63 Predikat SAKIP Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Predikat
1	2016	C
2	2017	C
3	2018	C
4	2019	C
5	2020	CC

Sumber: LKjIP Tahun 2016-2020

Predikat SAKIP daerah Kabupaten Dairi masih “C” dan stagnan dari tahun 2016 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa SAKIP daerah masih belum optimal. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh kualitas perencanaan dan pendataan belum berjalan baik.

Selain capaian SAKIP daerah, kinerja Sekretariat Daerah juga dapat dilihat dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian kinerja tersebut dapat ditunjukkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berikut ini LPPD Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

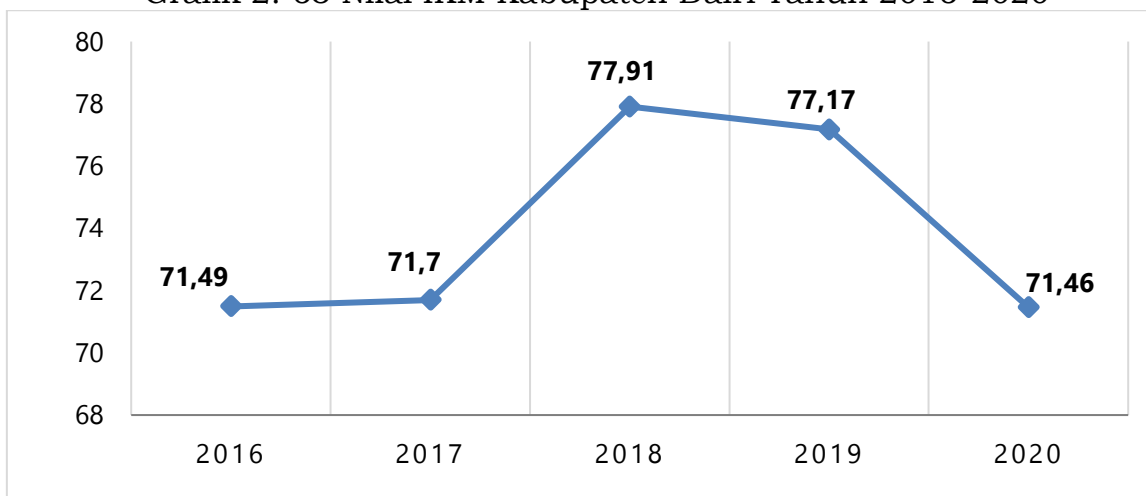
Tabel 2. 64 Predikat LPPD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Predikat LPPD
1	2016	Sedang
2	2017	Sedang
3	2018	Sedang
4	2019	Sedang
5	2020	Tinggi

Sumber: LPPD 2020; LKjIP Tahun 2016-2020

Dalam kurun 5 (lima) tahun, predikat LPPD Kabupaten Dairi menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2016 hingga 2019 predikat LPPD masih dalam kategori “Sedang”, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi ke dalam kategori “Tinggi”. Capaian LPPD ini sudah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi ke kategori “Sangat Tinggi”. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan SPM.

Grafik 2. 63 Nilai IKM Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKjIP Tahun 2016-2021

Nilai IKM Kabupaten Dairi mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu sebesar 5,71 persen. Selain itu, selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai IKM paling tinggi berada pada tahun 2018, sedangkan nilai IKM paling rendah berada pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan optimal. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan terhadap Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan SKM.

Tabel 2. 65 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra Tahun 2016-2020

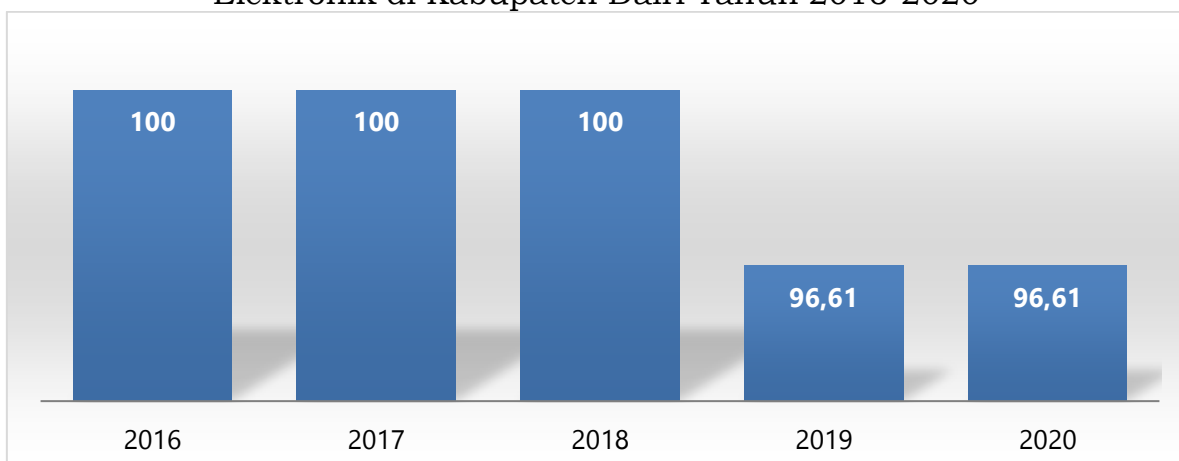
No	Tahun	Jumlah PKM (KK)
1	2016	16.525
2	2017	16.525
3	2018	16.525

4	2019	16.525
5	2020	16.525

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah kelompok penerima manfaat Raskin/ Rastra selalu tetap, yaitu sebesar 16.525 KK. Hal yang perlu dipastikan adalah setiap pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran.

Grafik 2. 64 Persentase Paket Kegiatan yang Dilelangkan Secara Elektronik di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Dari tahun 2016 hingga 2020, persentase paket yang dilelangkan secara elektronik berjalan fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2019 dan 2020, paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik mengalami penurunan kurang lebih 3 persen. Hal ini perlu ditingkatkan kinerja lelang secara elektronik karena berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah.

Tabel 2. 66 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ BUMD di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Monev Perusahaan Daerah/ BUMD	2	2	2	2	2

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan daerah / BUMD dilakukan dalam rangka untuk memastikan kinerjanya baik. Selama 5 (lima) tahun terakhir, monev yang dilakukan sebanyak 2 kali kepada 2 BUMD.

Tabel 2. 67 Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	4	4	4	4	3

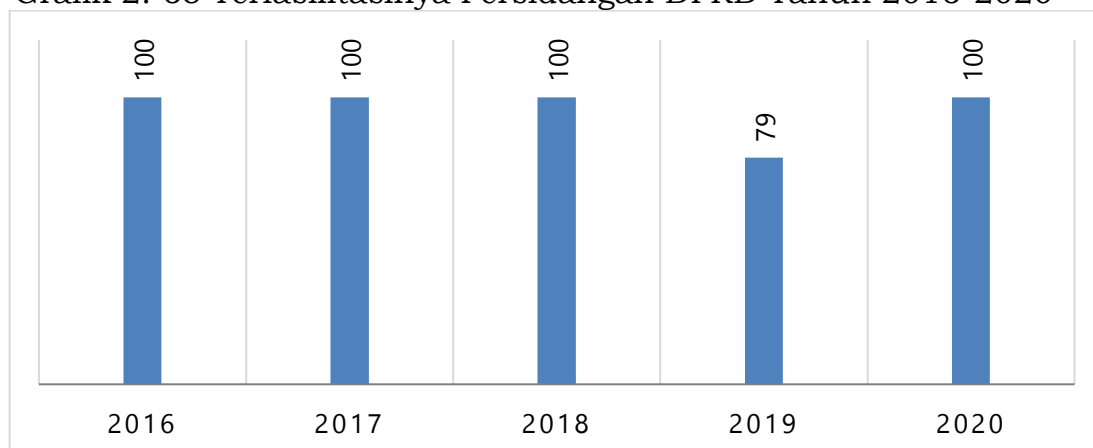
Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Produk hukum daerah yang difasilitasi mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari tahun 2016 hingga 2019, produk hukum yang difasilitasi sebanyak 4 produk dan menurun menjadi 3 produk.

2.3.3.2. Sekretariat DPR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sekretariat Daerah berfungsi mendukung dan memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut ini adalah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 65 Terfasilitasinya Persidangan DPRD Tahun 2016-2020



Sumber: LKjIP Kab. Dairi Tahun 2016-2020

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi dan mendukung tugas anggota DPRD sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan persidangan DPRD yang difasilitasi mencapai 100 persen pada tahun 2020. Meskipun demikian, perlu adanya pencapaian kinerja dari sisi tingkat kepuasan anggota DPRD ke depan.

2.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang dalam pembangunan daerah. Urusan ini sangat penting karena menjadi bahan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara pemenuhan dokumen, Pemerintah Kabupaten Dairi sudah memenuhi seluruh dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selain indikator pemenuhan dokumen perencanaan, indikator lain yang berkaitan dengan kualitas perencanaan perlu dianalisis juga. Hal ini penting dilakukan karena mempunyai pengaruh secara substantif terhadap kualitas pembangunan daerah. Berikut ini adalah beberapa capaian dalam urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 68 Capaian Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	89,00%	90%	89%	n/a	n/a

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

2.3.4.2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang memiliki peran yang sangat dalam memujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kinerja urusan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Pertama, sisi akuntabilitas keuangan dengan indikator Opini BPK/ sementara yang kedua dari sisi kapasitas keuangan dengan indikator tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran kinerja urusan keuangan daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 69 Opini BPK Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Predikat
1	2016	WTP
2	2017	WTP
3	2018	WTP
4	2019	WTP
5	2020	WTP

Sumber: LKjIP Tahun 2016-2020

Kabupaten Dairi mampu mempertahankan Opini BPK selama 5 (lima) tahun terakhir dengan predikat WTP. Predikat WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal mulai dari material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku. Dengan demikian maka, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan baik.

Selain dari sisi akuntabilitas keuangan daerah, kinerja urusan keuangan juga dapat dilihat dari tingkat kapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk

melihat tingkat kemandirian keuangan daerah melalui perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah. Berikut ini adalah persentase PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 70 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Persentase
1	2016	68,003,241,760.34	1,062,706,591,682.34	6.40
2	2017	128,489,751,331.88	1,133,794,210,279.88	11.33
3	2018	73,906,829,603.45	1,080,878,465,095.45	6.84
4	2019	74,360,339,717.75	1,167,522,159,073.75	6.37
5	2020	89,758,997,873.48	1,054,826,116,417.48	8.51
Rata-Rata				7.89

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,89 persen. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang paling tinggi berada pada tahun 2017, sedangkan paling rendah berada pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih belum berjalan optimal karena di satu sisi pertumbuhannya belum stabil dan di sisi lain persentasenya masih di dalam kategori sangat kurang karena berada di bawah 10 persen.

2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan termasuk ke dalam urusan penunjang. Urusan ini mempunyai peran sangat penting bagi peningkatan profesionalitas pegawai. Berikut ini adalah capaian urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 71 Capaian Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Dairi 2016-2020

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	100	100	100	n/a	n/a
Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	10	5	17	n/a	n/a
Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	60	79	38	n/a	n/a
Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	150	160	125	n/a	n/a

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Angka capaian urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Dairi mengalami tren stagnan pada aspek persentase penanganan kasus terhadap pelanggaran disiplin, yaitu sudah mencapai 100%. Sementara itu jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat kepemimpinan mengalami tren fluktuatif, awalnya mengalami penurunan sebanyak 5 pada 2016-2017, kemudian naik drastis sejumlah 12 pada tahun berikutnya. Tren fluktuatif juga terjadi pada jumlah PNS yang diklat fungsional, yaitu meningkat sebanyak 10 orang pada 2016-2017 dan menurun sebanyak 35 pada 2017-2018. Sementara itu, jumlah guru yang mengikuti diklat penilaian kinerja guru mengalami kenaikan sebesar 19 orang orang pada 2016-2017 lalu menurun sejumlah 38 orang pada 2017-2018. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pendidikan dan diklat adalah masih terdapat ASN yang belum memiliki kompetensi di bidangnya, masih terdapat ASN jabatan pelaksana yang berpendidikan dibawah SMA/SMK, serta belum optimalnya upaya pembinaan profesionalisme aparatur di tingkat perangkat daerah.

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang. Urusan ini berfungsi untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan yang baik berdasarkan hasil kajian dan mendorong adanya inovasi daerah. Berikut ini data mengenai capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 72 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Dairi 2016-2020

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	0	0	3	n/a	n/a

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Data capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2018 mengalami kenaikan, yaitu menjadi 3 dokumen pada tahun 2018. Beberapa penyebab indikatif kurang maksimalnya urusan kelitbangan adalah belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, belum optimalnya sumber daya manusia dalam mendukung kinerja kelitbangan serta belum optimalnya inovasi daerah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.

2.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Inspektorat Daerah

Urusan inspektorat daerah merupakan urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan daerah. Pengawasan daerah yang dilaksanakan dengan baik menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Adapun indicator untuk melihat kualitas penyelenggaraan pengawasan daerah adalah maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Tabel 2. 73 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Level Maturitas SPIP	Kapabilitas APIP
1	2016	0	1
2	2017	0	2
3	2018	2	2
4	2019	3	2
5	2020	3	3

Sumber: LPPD 2020; LKjIP Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, maturitas SPIP dan kapabilitas APIP Kabupaten Dairi mengalami peningkatan level. Pada tahun 2018, kedua indicator tersebut masih berada pada level 2, sementara pada tahun 2019 sudah berada pada level 3 dan mampu dipertahankan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi sudah mampu mewujudkan pengawasan daerah yang baik karena telah memenuhi standar dari pemerintah pusat, yaitu pada level 3.

Dari sisi tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) belum sejalan dengan capaian maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74 Persentase Temuan Aparat Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	80,12	81,17	82,22	93,23	59,4

Sumber: LKjIP tahun 2016-2020

Persentase TLHP Kabupaten Dairi mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020. Sementara itu, beberapa tahun sebelumnya TLHP selalu meningkat di atas 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa TLHP belum dilaksanakan secara baik oleh Perangkat Daerah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah memiliki indikator utama pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dan pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita. Semakin besar nilai kedua indikator tersebut, maka semakin besar kemampuan ekonomi suatu daerah. Berikut adalah deskripsi data mengenai kedua indikator tersebut.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per-kapita dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan non-makanan. Pengeluaran untuk konsumsi non-makanan secara umum lebih besar, jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Dairi. Berikut adalah data mengenai pengeluaran per-kapita pada tahun 2016 hingga 2020 di Kabupaten Dairi:

Tabel 2. 75 Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Rp. 000)
Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Per Kapita	10.190	10.395	10.492	10.602	10.350

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2020

Pengeluaran per kapita per tahun menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 hingga 2019, namun mengalami penurunan pada 2020. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016-2017, yaitu Rp.205.000, -. Sementara itu penurunan terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu sebesar Rp. 252.000,-. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi fluktuatif. Pada tahun 2020 penurunan pertumbuhan ekonomi didorong kondisi pandemi *covid-19*. Tabel berikut memuat pengeluaran per kapita per bulan.

Tabel 2. 76 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Jenis Konsumsi	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	513.744	525.945	571.526	587.752	582.111
Non-makanan	288.433	277.994	312.143	413.966	406.610
Jumlah	802.177	803.939	883.669	1.001.718	988.722

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2020

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menunjukkan tren yang selalu meningkat pada 2016 hingga 2019, dan menurun pada 2020. Peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2018 hingga 2019, yaitu

sebesar Rp.118.049,-. Sementara itu penurunan terjadi pada 2019 ke 2020 yaitu sebesar Rp. 12.996,- . Jumlah pengeluaran untuk makanan secara umum lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita untuk non-makanan.

Tabel 2. 77 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Persen) di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Jenis Konsumsi	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	64,04	65,42	64,68	58,67	58,88
Non-makanan	35,96	34,58	35,32	41,33	41,12
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2020

Pengeluaran per kapita, jika dicermati menggunakan data dalam bentuk persentase akan memperlihatkan perspektif yang berbeda. Walaupun pengeluaran per kapita mengalami kenaikan jika dicermati menggunakan angka, namun ternyata pengeluaran per kapita untuk jenis makanan sempat mengalami penurunan sebesar 0,74% pada tahun 2017 hingga 2018. Besarnya pengeluaran per kapita untuk kelompok komoditas makanan disebabkan oleh tingginya kemiskinan atau rendahnya pendapatan masyarakat. Di beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi, rata-rata pengeluaran per kapita untuk komoditas makanan lebih tinggi dari non-makanan.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1. Pekerjaan Umum

Berdasarkan data Tahun 2021, dapat diketahui kondisi jalan dan luas irigasi dalam keadaan baik sebagai berikut.

1. Panjang jalan

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2020 sepanjang 710,62 Km atau sebanyak 44,179%.

Tabel 2. 78 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	Keterangan	Panjang Kondisi Keadaan Baik	Persentase
1	Jalan	710,62 Km	$710,62/1.608,48 = 44,179\%$

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi

2. Luas Irigasi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 79 Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	Keterangan	Luas Irigasi Keadaan Baik	Persentase
1	Irigasi	10.211 Km	10.211/11.175= 91,37%

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi

Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2020 sesuai dengan tabel diatas sepanjang 10.211 Km atau sebanyak 91,37% dari seluruh luas irigasi yang ada.

3. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Dairi

Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan meliputi dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobag dorong, gerobag motor, kontainer, TPS dan depo dan transito) sampai di TPA. Sampai dengan akhir Tahun 2019 daya tampung TPA sebanyak 120.000 M³.

2.4.2.2. Perumahan

1. Penduduk Terlayani Air Minum

Cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk Kabupaten Dairi. Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 80 Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan
2016	14.432
2017	15.366
2018	16.752
2019	17.717
2020	20.817

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2017-2021

Jumlah pelanggan PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi sesuai dengan tabel diatas pada tahun 2013-2020 cenderung meningkat kecuali pada tahun 2015. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Nciho kemudian selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebanyak 6.822 pelanggan.

2. Penduduk Menggunakan Listrik PT. PLN

Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani aliran listrik, yang disalurkan oleh PT.PLN di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Jumlah Pelanggan pada PT PLN (Persero) Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan
2013	53,256
2014	53,256
2015	63,058
2016	59,399
2017	67,358
2018	75.844
2020	79.571

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2021

3. Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Faktor pendukung iklim investasi yang baik dan kondusif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah tingkat kriminalitas di suatu daerah. Angka kriminalitas Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Tabel 2. 82 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
1.	Ketertiban Umum	4	4	4
2.	Perjudian	9	8	1
3.	Kejahatan Terhadap Nyawa	26	7	19
4.	Penganiayaan Berat	4	4	-
5.	Pencurian dengan Pemberatan	21	19	2
6.	Pencurian dengan kekerasan	1	1	-
7.	Narkotika	70	62	8
8.	Perkara Kehutanan (Illegal Logging)	6	4	2
9.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	3	-
Jumlah Kasus		144	112	36

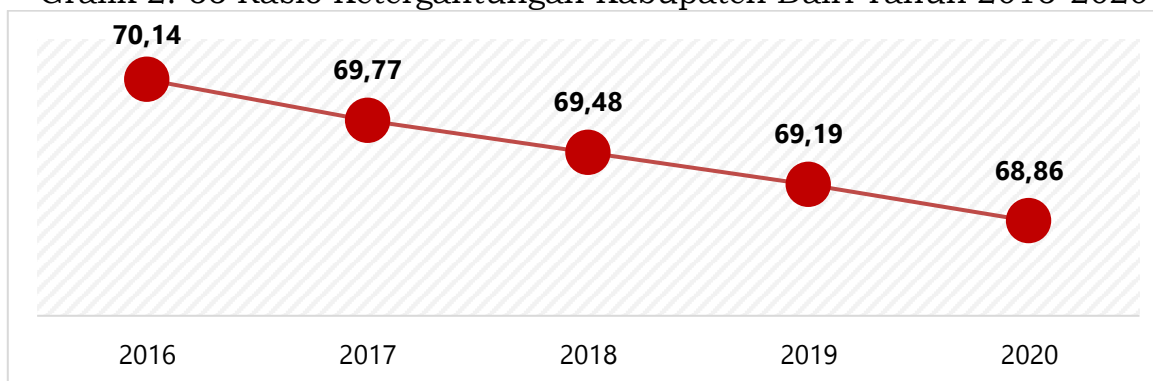
Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2021

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator keadaan ekonomi suatu negara termasuk negara maju atau negara sedang berkembang.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Grafik 2. 66 Rasio Ketergantungan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Pusat, 2015

Data mengenai rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi tersebut diambil dari hasil riset BPS mengenai proyeksi penduduk Sumatera Utara tahun 2010-2020. Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi mengalami tren penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Rasio ketergantungan tertinggi di Kabupaten Dairi yaitu sebesar 70,14 pada tahun 2016. Hal tersebut merepresentasikan bahwa setiap 100 orang berusia kerja/berusia produktif memiliki tanggungan sebesar 70,14 orang yang belum produktif dan orang yang dianggap tidak produktif lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi masih tergolong tinggi.

2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada sub bab ini ditampilkan rangkuman hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 83 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aspek Kesejahteraan						
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1	Laju Pertumbuhan PDRB	5.04	5.1	5.01	4.82	-0,94	<
1.1.2	Laju Inflasi	4.76	3.1	2.15	1.54	2.78	>
1.1.3	PDRB per Kapita	26,670,723	28,312,003	30,228,407	32,241,619	32,639,340	>
1.1.4	Indeks Gini	0.301	0.24	0.26	0.29	n/a	=
1.1.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.78	1.03	1.77	0.96	1.09	>
1.1.6	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.18	0.19	0.24	0.22	0.2	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1.2.1	IPM	69.61	70.36	70.89	71.42	71.57	>
1.2.2	Angka Melek Huruf	99.01	99.4	99.61	99.8	99.68	<
1.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	8.7	8.9	9.15	9.34	9.58	>
1.2.5	Harapan Lama Sekolah	12.84	13.06	13.07	13.09	13.1	>
1.2.9	Angka Harapan Hidup	67.95	68.13	68.41	68.79	69	>
2	Aspek Pelayanan Umum						
2.1	Pendidikan						
2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	115.53	113.06	112.64	108.98	111	>
2.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26	95.82	97.62	99.66	98.24	<
2.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98.96	99.53	100	99.36	99.19	<
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90.43	87.94	89.17	90.53	90.21	<
2.1.5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.84	13.06	13.07	13.09	13.1	>
2.1.6	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.12	0.12	0.29	0	0.55	>
2.1.7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.34	0.35	0.47	0	0.93	>
2.1.8	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	=
2.1.9	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	=
2.1.1 0	Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	95.93	97.55	99.17	-	-	>
2.1.1 1	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	95.81	97.89	99.97	-	-	>
2.2	Kesehatan						
2.2.1	Angka Kematian Bayi	2.55	7.47	2.83	6.67	6	<
2.2.2	Angka Kematian Ibu	95.8	134.49	53.06	74	93	>
2.2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	75	85.55	81.98	81	79.95	<
2.2.4	Usia Harapan Hidup	67.95	68.13	68.41	68.79	69	>
2.2.5	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	70	14.24	86.48	85	65	<
2.2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	1.3	4.35	3.47	2	2.49	>
2.2.7	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan	70	85.17	85.66	88.3	80	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
2.2.8	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70	67.54	68.05	74.1	98.18	>
2.2.9	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	na	96.17	100	100	79.51	<
2.2.10	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.98	46.28	49.29	90	61.54	<
2.2.11	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	70	10.19	52.05	78.86	50.46	<
2.2.12	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	46.25	47	52.5	115	59.54	<
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2.3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	57%	64.45%	59.33%	59.52%	65.14%	>
2.3.2	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	88%	82.56%	83.03%	89.23%	98.80%	>
2.3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang bersih	51.92%	58.36%	62.80%	73.03%	89.72%	>
2.3.4	Capaian Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.3.5	Persentase Luas Irigasi dalam Keadaan Baik	78%	30.38%	60.13%	90.16%	145.35	>
2.3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	1.25%	2.25%	1.68%	2.50%	91.75%	>
2.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
2.4.1	Persentase Rumah Layak Huni	85,79	86,39	90,21	71,02	79,85	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:	
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)	
							Sesuai (=)	
							Melampaui (>)	
2.4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	85.79%	86.39%	90.21%	71.02%	79.85%	>	
2.4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	42%	59.97%	61.30%	63.30%	100%	>	
2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
2.5.1	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	100%	66%	82.17%	100%	100%	=	
2.6	Sosial							
2.6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	3%	10%	7%	0	47.48%	>	
2.7	Tenaga Kerja							
2.7.1	Tingkat pengangguran terbuka	na	1.42	1.66	1.59	70.22	<	
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.8.1	Indeks Pembangunan Gender	na	97.4	97.93	98.14	97.96	>	
2.8.2	Indeks Pemberdayaan gender	na	62.16	68.7	62.12	61.14	<	
2.9	Pangan							
2.9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	na	76.55	77.81	71	72.3	<	
2.9.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	92.81	94.13	95.45	69.13	20.52	>	
2.9.3	Persentase Konsumsi Protein Per kapita	65.81	79.5	93.19	81.75	59.37	>	
2.10	Pertanahan							
2.10.1	Status Kepemilikan Tanah yang Diterbitkan Menurut Kecamatan	2,624	2,743	6,453	3,000	423	<	
2.11	Lingkungan Hidup							
2.11.1	Luas Lahan Kritis	8.75	12.5	8.75	10	12.41	<	
2.11.2	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani	14,906	20,492	21,888	22,284	30,125	=	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
2.11.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	>
2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.12.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	43	51	73	76	95	>
2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.13.1	Jumlah Bumdes	3	12	23	8	8	<
2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.14.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	na	65.59	68.72	69.95	72.49	>
2.14.2	Unmet Need	na	18.05	15.59	30	12.82	<
2.15 Perhubungan							
2.15.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.16 Komunikasi dan Informatika							
2.16.1	Persentase OPD menggunakan SPBE	na	na	na	na	17.5	=
2.16.2	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	7	7	7	7	7	=
2.17 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah							
2.17.1	Jumlah Koperasi Aktif	25	67	158	165	165	>
2.17.2	Jumlah Usaha Mikro	86	98	115	103	n.a	<
2.18 Penanaman Modal							
2.18.1	Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP	68.17%	75.28%	82%	85.28%	na	>
2.19 Kepemudaan dan Olah Raga							
2.19.1	Terfasilitasinya layanan kepemudaan	500	667	1439	1439	25	<
2.19.2	Persentase penanganan gedung olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.20 Kebudayaan							
2.20.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan Yang Terfasilitasi	5	5	5	5	5	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:	
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)	
							Sesuai (=)	
							Melampaui (>)	
2.20. 2	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	3	3	3	3	0	<	
2.20. 3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	1	1	1	1	1	=	
2.21	Perpustakaan							
2.21. 1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	15,032	15,200	15,368	25,659	3,510	<	
2.22	Kearsipan							
2.22. 1	Jumlah Arsip yang Dilestarikan	210	215	154	154	na	=	
2.23	Perikanan dan Kelautan							
2.23. 1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	43.69	43.17	42.86	42.28	42.71	>	
2.24	Pariwisata							
2.24. 1	Jumlah kunjungan wisata	126,866	115,193	139,771	118,509	51,347	<	
2.24. 2	Jumlah usaha hotel	27	27	31	31	23	<	
2.25	Pertanian							
2.25. 1	Produktivitas Tanaman Pangan							
	- Padi Sawah	58.89	59.29	59.69	54.28	54.18	<	
	- Padi Ladang	33.9	34.1	34.3	35.56	35.56	>	
	- Jagung	56.72	59.8	62.28	55.8	55.8	<	
2.25. 2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura							
	- Jeruk Manis	4.19%	4.00%	4.12%	na	3.33%	<	
	- Kentang	4.77%	4.74%	4.76%	na	0.30%	<	
	- Cabe merah	1.68%	1.66%	1.56%	na	34.34%	>	
	- Durian	5.05%	5.17%	4.91%	na	29.14%	>	
2.25. 3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat							
	- Kopi	0.98%	0.92%	1.06%	4.80%	n.a	>	
2.25. 4	Jumlah Populasi Peternakan							
	- Babi	102,285	103,649	104,737	151,000	263,900	<	
	- Ayam	1,104,403	1,121,908	1,138,907	1,352,576	1,173,406	<	
2.25. 5	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak							
	- Sapi	32.77%	33%	33.20%	33.81%	na	>	
	- Kerbau	31.29%	34.01%	36.10%	39.71%	na	>	
	- Babi	1.43%	1.43%	1.41%	23.32%	na	>	
	- Kambing	9.38%	11.49%	11.60%	15.30%	na	>	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
	- Ayam	2.86%	5.10%	3.28%	5.35%	na	>
	- Anjing	25.98%	27.28%	43.50%	45%	na	>
2.25. 6	Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang						
	- Ternak Besar	243	243	362	na	na	=
	- Ternak Kecil	0	0	748	na	na	>
2.26	Kehutanan						
2.26. 1	Rehabilitasi Lahan Kritis	8.75	12.5	8.75	10	12.41	>
2.27	Perdagangan						
2.27. 1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.08	17.1	17.07	17.21	17.22	>
2.27. 2	Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran	7.83%	61.30%	5.84%	5.90%	-0.68%	<
2.28	Perindustrian						
2.28. 1	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	6.53%	4.23%	4.91%	4.79%	-2.93%	<
2.29	Sekretariat Daerah						
2.29. 1	SAKIP	C	C	C	C	C	<
2.29. 2	Predikat LPPD	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	>
2.29. 3	Indeks Kepuasan Masyarakat	71.49	71.7	77.91	77.17	71.46	<
2.29. 4	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelengkan Secara Elektronik	100	100	100	96,61	96,61	=
2.29. 5	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi	4	4	4	4	3	<
2.29. 6	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2	2	2	2	2	=
2.29. 7	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	=
2.30	Sekretariat DPRD						
2.30. 1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	100	100	100	79%	100%	>
2.31	Perencanaan						
2.31. 1	Persentase Penjabaran	89.00%	90%	89%	n/a	n/a	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
	Program RPJMD ke dalam RKPD						
2.31.2	Tersedianya dokumen perencanaan	2	2	2	n/a	n/a	<
2.31.3	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan	5	5	4	n/a	n/a	<
2.31.4	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	1	1	1	n/a	n/a	<
2.31.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten	80.00%	80.00%	80%	n/a	n/a	<
2.32	Keuangan						
2.32.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.32.2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	6.40%	11.33%	6.84%	6.37%	8.51%	>
2.33	Kepegawaian						
2.33.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	100	100	100	n/a	n/a	=
2.34	Pendidikan dan Pelatihan						
2.34.1	Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	10	5	17	n/a	n/a	=
2.34.2	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	60	79	38	n/a	n/a	=
2.34.3	Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	150	160	125	n/a	n/a	=
2.35	Penelitian dan Pengembangan						
2.35.1	Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	0	0	3	n/a	n/a	=
2.36	Pengawasan						
2.36.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	1	2	2	2	3	>
2.36.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	80.12	81.17	82.22	93.23	59.4	<
3	Aspek Daya Saing Daerah						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
3.1	Pengeluaran per kapita	10,190	10,395	10,492	10,602	10,350	<
3.2	Rasio ketergantungan	70.14	69.77	69.48	69.19	68.86	>

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi analisis keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk periode selanjutnya. Hasil analisis digunakan sebagai basis perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi. Data bab ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Dairi bertujuan untuk melihat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi. Capaian tersebut dapat membantu dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Dairi.

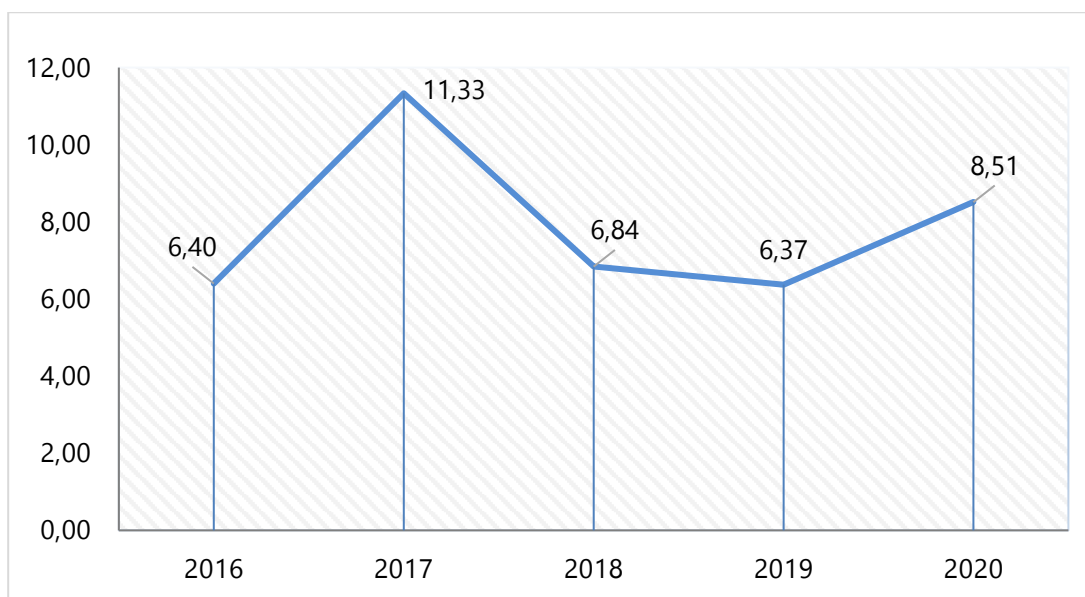
3.1.1. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

Analisis kesehatan fiskal daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja keuangan daerah masa lalu. Analisis ini menggambarkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hasil analisis kesehatan fiskal daerah Kabupaten Dairi dapat diketahui pada bagian berikut.

3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan instrumen untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin baik tingkat kemandirian daerah. Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 1 Kontribusi realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (%)



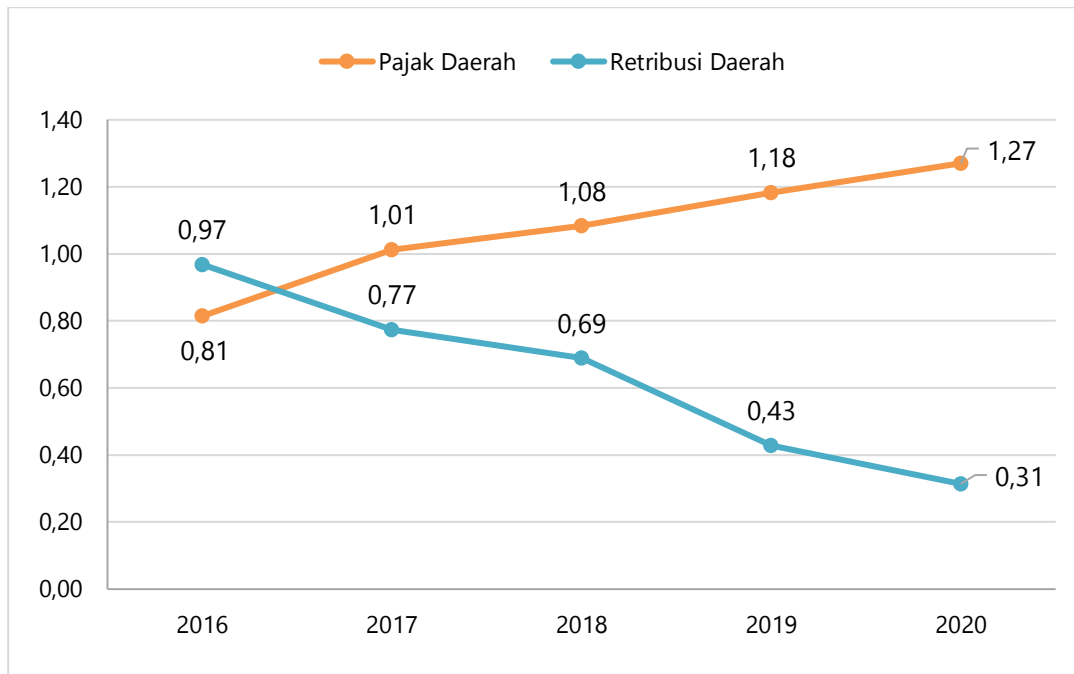
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tren Kontribusi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah melonjak paling tajam sebesar 4.93% pada Tahun 2016-2017, namun turun cukup tajam sebesar -4.50% pada Tahun 2017-2018 dan turun lagi sebesar -0.47% pada Tahun 2018-2019. Kontribusi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah meningkat sebesar 2.14% pada Tahun 2019-2020. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam meningkatkan PAD belum cukup baik selama Tahun 2016-2020. Terlebih lagi, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dairi dalam mendukung otonomi daerah belum optimal karena angka Kontribusi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah masih di bawah 20%.

3.1.1.2. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi realisasi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah merupakan indikator untuk mengukur laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Realisasi pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 2 Kontribusi Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (%)



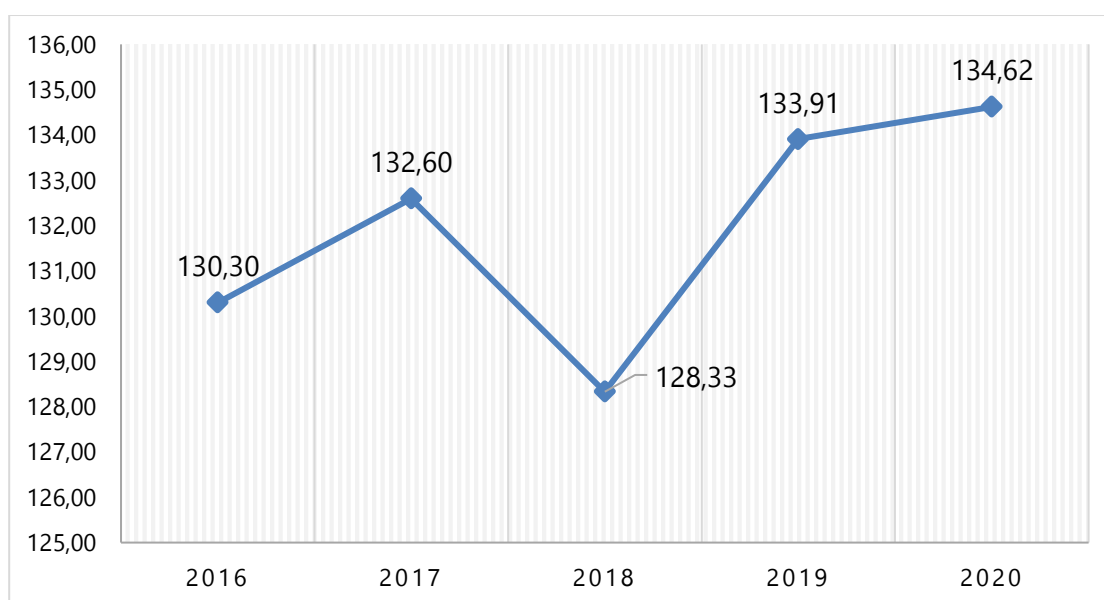
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tren kontribusi realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 naik secara perlahan. Sebaliknya, tren kontribusi realisasi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah turun cukup drastis pada tahun 2016-2020. Peningkatan kontribusi realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi paling tinggi sebesar 0.20% pada Tahun 2016-2017. Sementara itu, kontribusi realisasi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi turun paling drastis sebesar -0.26% pada Tahun 2018-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Daerah berjalan cukup baik, sedangkan laju pertumbuhan Retribusi Daerah belum berjalan optimal. Turunnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan daerah diduga kuat disebabkan oleh pembatalan pemungutan retribusi oleh peraturan perundang-undangan pada komponen Retribusi Izin Gangguan, reformulasi perhitungan retribusi pada komponen Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan pandemi Covid-19 yang berdampak pada melemahnya aktivitas sektor jasa di Kabupaten Dairi.

3.1.1.3. Realisasi Total Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Realisasi Total Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Realisasi total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap realisasi total belanja daerah dan pembiayaan daerah berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan untuk mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Semakin tinggi tingkat realisasinya, maka semakin baik kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks Kabupaten Dairi, kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 3 Realisasi Total Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Realisasi Total Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

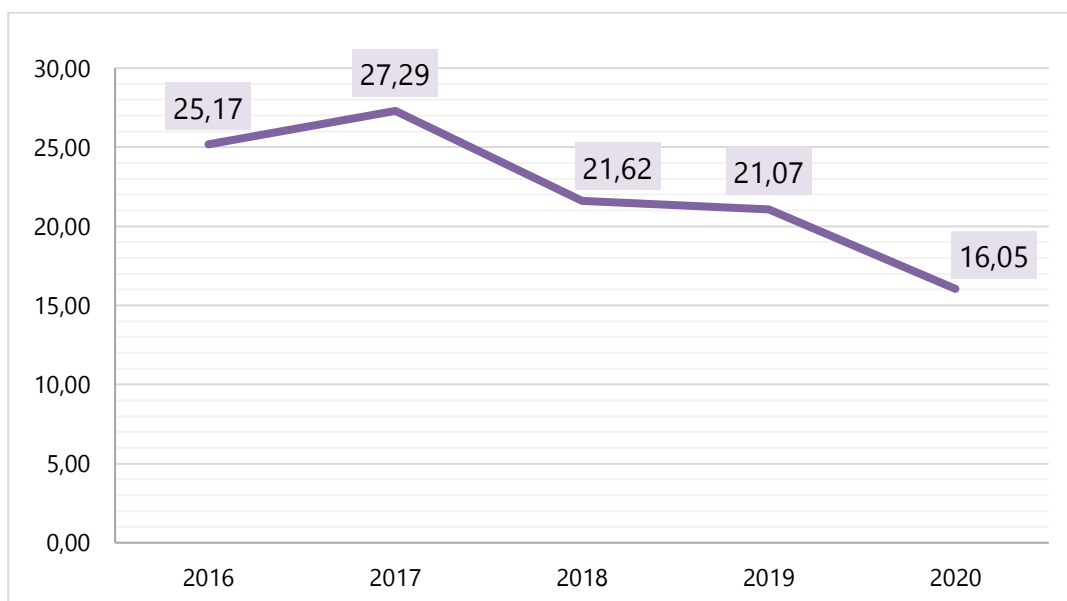
Realisasi total Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap realisasi total Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif dan cenderung meningkat, kecuali tahun 2018. Pertumbuhan realisasi total pendapatan tersebut turun sebesar 4.26% pada tahun 2018, namun melonjak tajam sebesar 5.58% pada tahun 2019 dan selanjutnya naik lagi sebesar 0.71% tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun 2018. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah kembali naik pada tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk merealisasikan

pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dikatakan baik.

3.1.1.4. Realisasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja APBD

Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah maka semakin baik. Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui grafik berikut.

Grafik 3. 4 Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

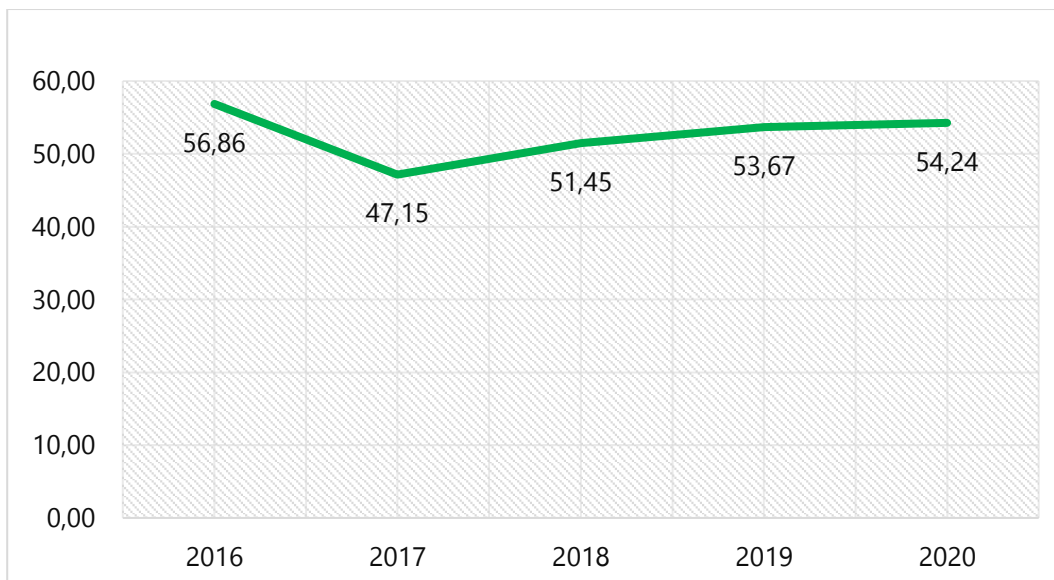
Tren realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Dairi turun pada tahun 2016-2020. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan belanja modal secara drastis pada tahun 2018-2020, di mana penurunan paling drastis sebesar 5.68% terjadi pada tahun 2018 dan sebesar 5.03% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan berkurangnya alokasi belanja untuk pelayanan masyarakat dalam kurun waktu tersebut.

3.1.1.5. Realisasi Belanja Pegawai terhadap realisasi Total Belanja APBD

Analisis realisasi Belanja Pegawai terhadap realisasi Total Belanja digunakan untuk mengukur seberapa besar porsi belanja pegawai terhadap total belanja di suatu daerah. Semakin tinggi porsi belanja

pegawai, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah tersebut semakin buruk. Jika kondisi ini terjadi, maka belanja untuk kebutuhan masyarakat semakin berkurang. Kondisi realisasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat digambarkan melalui grafik berikut.

Grafik 3. 5 Realisasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tren realisasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Dairi cenderung naik pada tahun 2016-2020, kecuali pada tahun 2017. Penurunan realisasi ini paling drastis sebesar 9.71% pada tahun 2017. Namun demikian, realisasi tersebut meningkat tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa porsi belanja pemenuhan kebutuhan pegawai di Kabupaten Dairi semakin meningkat pada tahun 2018-2020. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh total Belanja Daerah Kabupaten Dairi dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan sisanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

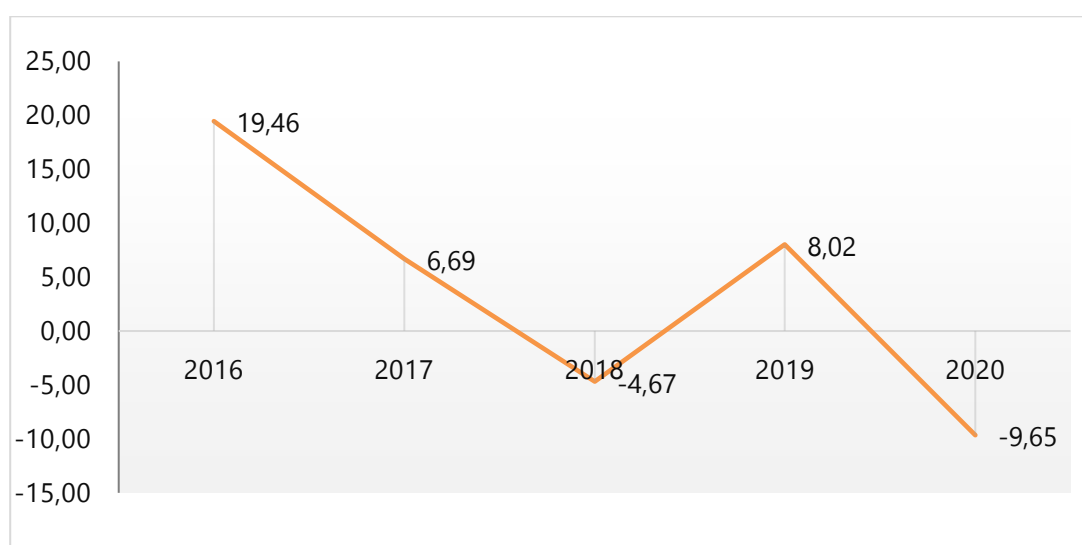
3.1.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2016-2020. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan APBD periode yang akan datang. Berikut merupakan analisis kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui grafik berikut.

Grafik 3. 6 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2015-2020

Tren pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung turun. Pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi sebesar 19.46% pada tahun 2016, namun turun secara drastis sebesar 12.77% pada tahun 2017 dan turun lagi sebesar 11.36% pada tahun 2018. Pertumbuhan Pendapatan Daerah naik sebesar 12.68% pada tahun 2019, namun kembali merosot tajam sebesar 17.67% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah belum optimal yang disebabkan oleh penurunan Kontribusi beberapa komponen Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah yaitu PAD (Pendapatan Retribusi Daerah) dan Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum). Kondisi ini dipicu oleh adanya pandemi COVID-19.

Analisis kinerja pendapatan daerah juga dapat dilihat dari kontribusi tiap komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan

daerah. Rincian rata-rata pertumbuhan dan kontribusi tiap komponen Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No. Akun	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	1,062,706,591,682.34	1,133,794,210,279.88	1,080,878,465,095.45	1,167,522,159,073.75	1,054,826,116,417.48	0.10
4.1	Pendapatan Asli Daerah	68,003,241,760.34	128,489,751,331.88	73,906,829,603.45	74,360,339,717.75	89,758,997,873.48	16.95
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,654,027,559.70	11,481,804,235.24	11,708,281,188.90	13,810,919,111.00	13,398,479,706.00	12.41
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10,290,370,228.00	8,775,219,568.50	7,447,646,332.53	4,997,441,939.57	3,310,148,797.00	-24.13
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,029,770,339.00	10,779,522,587.00	12,998,925,226.00	6,770,706,298.00	13,765,641,353.00	20.87
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	39,029,073,633.64	97,453,204,941.14	41,751,976,856.02	48,781,272,369.18	59,284,728,017.48	32.73
4.2	Pendapatan Transfer	975,996,543,461.00	1,004,542,848,448.00	951,857,095,064.00	1,028,117,439,372.00	907,091,166,775.00	-1.52
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	643,495,769,537.00	629,176,730,114.00	630,738,669,380.00	643,527,342,978.00	581,181,458,518.00	-2.41
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	17,472,042,520.00	14,846,360,356.00	13,765,597,541.00	10,520,264,699.00	12,699,540,754.00	-6.29
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2,321,492,017.00	1,584,577,758.00	4,230,309,839.00	3,862,050,279.00	3,403,017,764.00	28.66
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	623,702,235,000.00	612,745,792,000.00	612,742,762,000.00	629,145,028,000.00	565,078,900,000.00	-2.32
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus	147,231,282,500.00	160,824,789,536.00	154,914,774,714.00	182,980,494,845.00	140,116,339,746.00	0.06
4.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	71,703,017,000.00	87,210,289,950.00	60,157,861,300.00	61,396,185,975.00	48,834,992,229.00	-6.95
4.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	-	-	-	28,951,416,434.00	2,886,853,778.00	
4.2.2.3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	75,528,265,500.00	73,614,499,586.00	94,756,913,414.00	92,632,892,436.00	88,394,493,739.00	4.84

No. Akun	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.2.3	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	138,970,448,000.00	177,553,145,000.00	138,681,480,000.00	148,496,505,000.00	153,898,929,000.00	4.15
4.2.3.2	Pendapatan Dana Insentif Daerah	40,759,805,000.00	51,456,355,000.00	26,750,000,000.00	21,323,941,000.00	25,334,386,000.00	-5.81
4.2.3.3	Pendapatan Transfer Dana Desa	98,210,643,000.00	126,096,790,000.00	111,931,480,000.00	127,172,564,000.00	128,564,543,000.00	7.97
4.2.4	Transfer Pemerintah Provinsi	46,299,043,424.00	36,988,183,798.00	27,522,170,970.00	53,113,096,549.00	31,894,439,511.00	1.83
4.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,299,043,424.00	36,984,005,308.00	27,522,170,970.00	53,113,096,549.00	31,894,439,511.00	1.83
4.2.4.2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	-	4,178,490.00	-	-	-	
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	18,706,806,461.00	761,610,500.00	55,114,540,428.00	65,044,379,984.00	57,975,951,769.00	1761.95
4.3.1	Pendapatan Hibah	17,413,406,461.00	761,610,500.00	48,313,595,428.00	65,044,379,984.00	57,975,951,769.00	1542.94
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	1,293,400,000.00	-	6,800,945,000.00	-	-	16.95

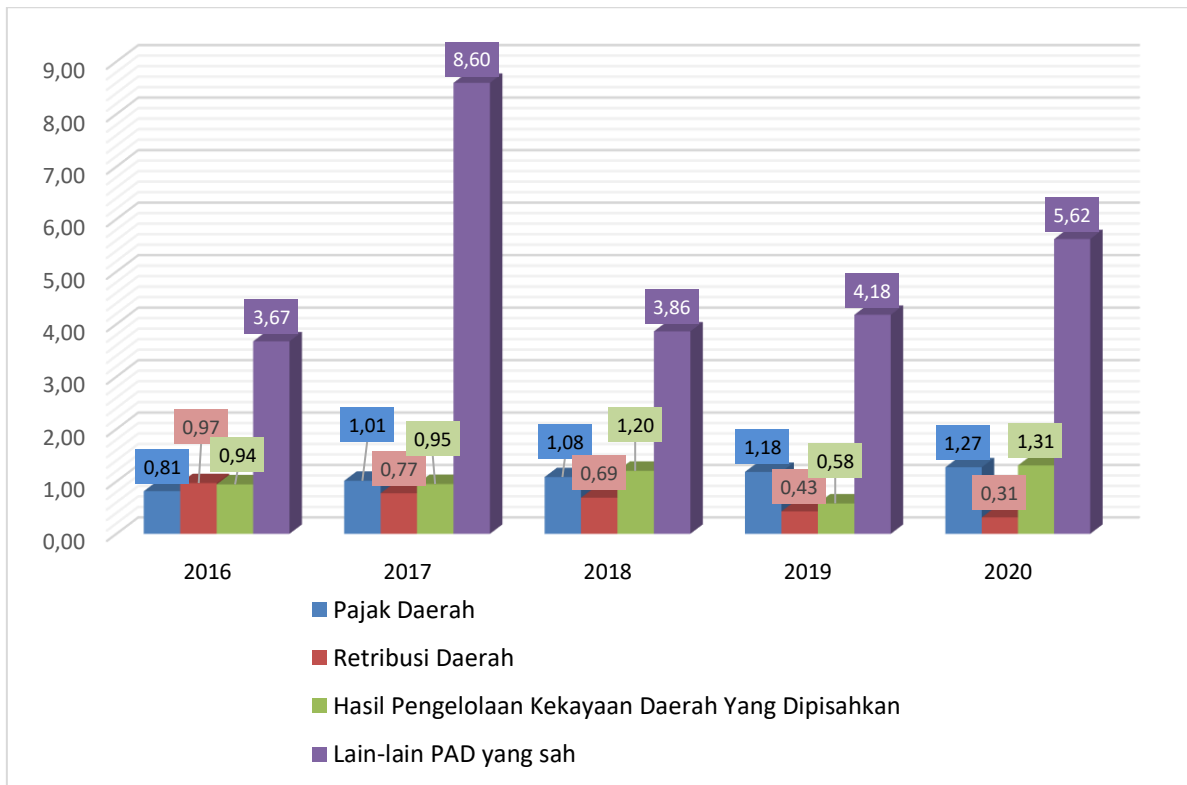
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 sebesar 0.10%. Komponen pendapatan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu PAD sebesar 16.95%. Sementara itu, rata-rata kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 7.89%. Komponen PAD yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar (32.73%) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar (20.87%). Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer termasuk rendah yaitu sebesar - 1.52%, namun komponen ini memiliki rata-rata kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi paling tinggi yaitu sebesar 88.51%. Di dalam komponen Pendapatan Transfer, terdapat komponen Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum yang memiliki rata-rata kontribusi tertinggi terhadap total Pendapatan Transfer yaitu sebesar 56.92%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari ketiga komponen pembentuk Pendapatan Daerah di Kabupaten Dairi, komponen PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan PAD tentunya didukung oleh kontribusi tiap komponen PAD terhadap total PAD. Kontribusi tiap komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat diketahui dari grafik berikut.

Grafik 3. 7 Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Secara umum, kontribusi tiap komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif cenderung naik, kecuali komponen Retribusi Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD meningkat tiap tahun dengan peningkatan paling tinggi sebesar 0.20% pada tahun 2016 ke 2017. Secara kontras, Retribusi Daerah memiliki pertumbuhan kontribusi paling rendah terhadap total PAD di mana tiap tahunnya juga mengalami penurunan. Kontribusi komponen ini turun paling drastis sebesar -0.26% pada tahun 2018-2019.

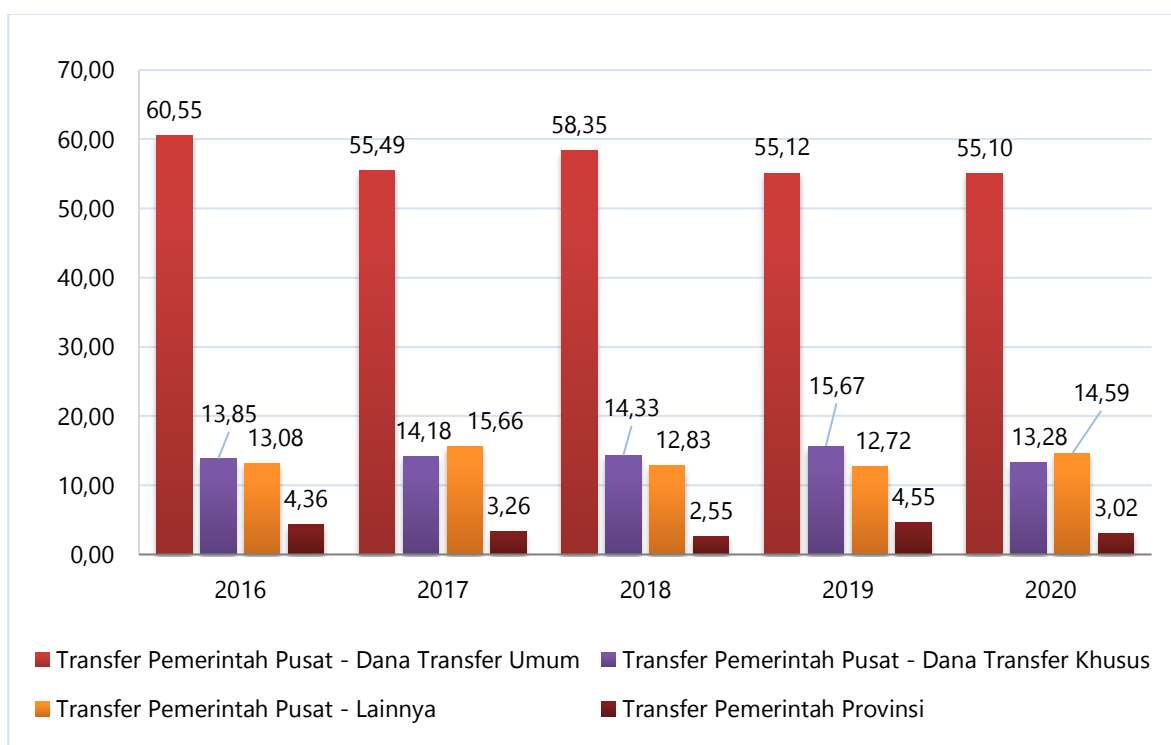
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap total PAD tumbuh tiap tahun kecuali pada tahun 2018-2019 turun sebesar -0.62%. Namun demikian, kontribusi komponen ini tumbuh sebesar 0.73% pada tahun 2019-2020. Komponen Lain-lain PAD yang Sah memiliki pertumbuhan kontribusi terhadap total PAD paling tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Pertumbuhan tertinggi kontribusi komponen ini sebesar 4.92% pada tahun 2016-2017, namun merosot tajam sebesar -4.73% pada tahun 2017-2018. Meskipun demikian, kontribusi komponen ini tumbuh lagi dalam kurun waktu 2018-2020. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD dan masih belum optimalnya pendataan sumber PAD, terutama Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini

perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada berkurangnya PAD, sehingga dapat menyebabkan menurunnya Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi di masa mendatang.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer memiliki kontribusi tertinggi terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah Kabupaten Dairi masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer. Kontribusi tiap komponen Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 8 Kontribusi komponen Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Secara umum, tren pertumbuhan kontribusi tiap komponen Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung turun terutama pada tahun 2020. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum memiliki kontribusi paling tinggi terhadap total Pendapatan Daerah. Sumber utama komponen Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Dairi adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, sumber lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), namun kontribusinya sangat kecil.

Komponen Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Khusus bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. Sementara itu, komponen Transfer Pemerintah Pusat-lainnya bersumber dari Pendapatan Transfer Dana Desa dan Pendapatan Dana Insentif Daerah. Dalam konteks Kabupaten Dairi, kontribusi Pendapatan Transfer Dana Desa terhadap total Pendapatan Daerah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah.

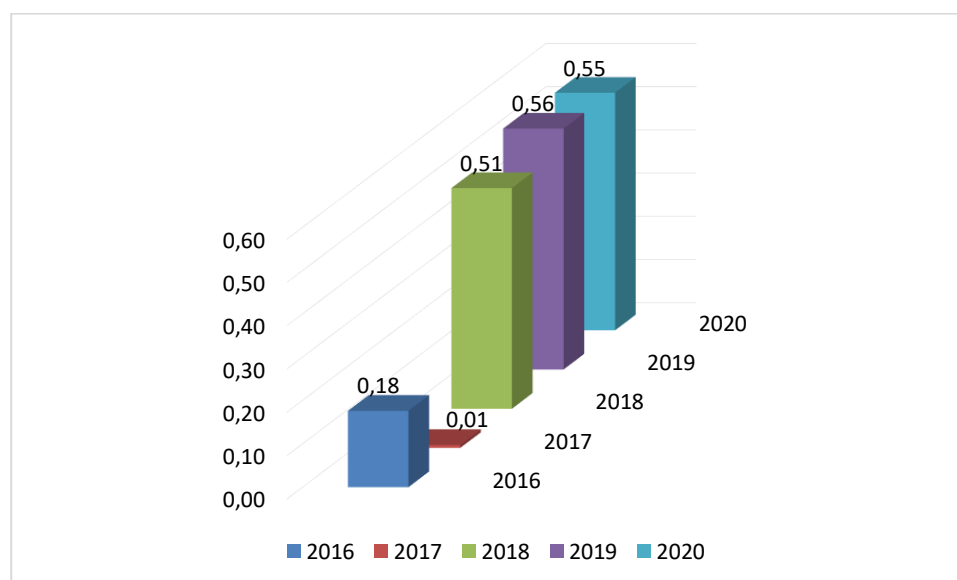
Sementara itu, komponen Transfer Pemerintah Provinsi memiliki kontribusi paling rendah terhadap total Pendapatan Daerah. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Retribusi, di mana Bagi Hasil Pajak lebih tinggi dibandingkan dengan Bagi Hasil Retribusi.

Kontribusi Pendapatan Transfer yang mendominasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi perlu diantisipasi karena alokasi dana dari pemerintah pusat sangat tergantung dengan kondisi APBN yang hingga kini masih difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rata-rata pertumbuhan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi cukup baik selama tahun 2016-2020. Kondisi ini dapat diketahui melalui grafik berikut.

Grafik 3. 9 Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

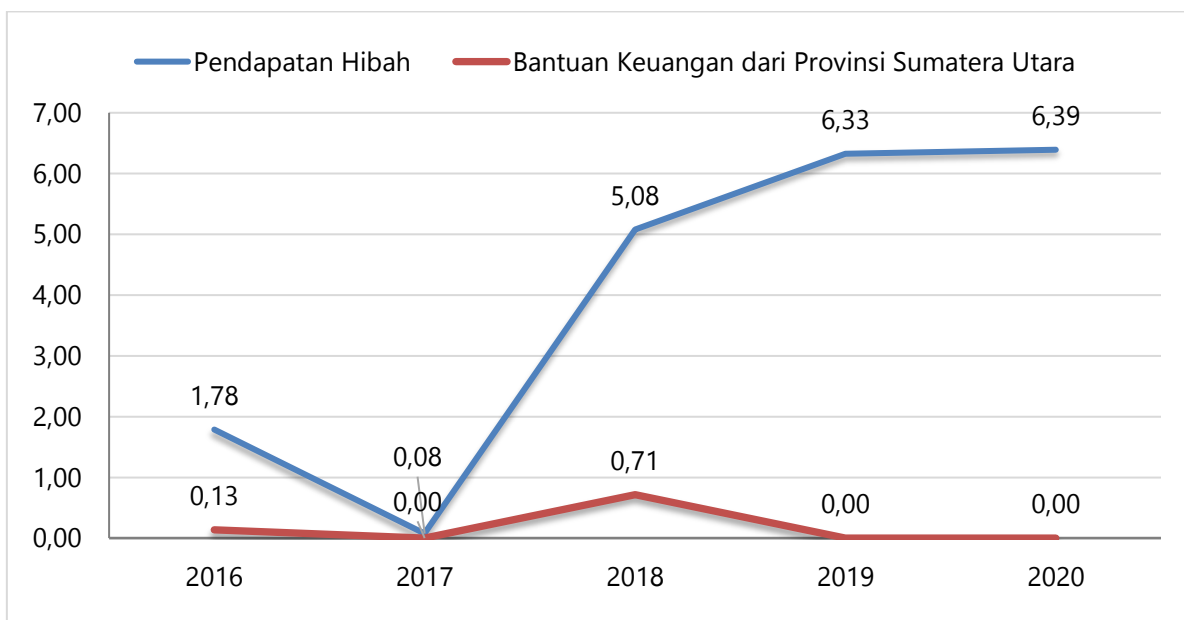


Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Secara umum, tren kontribusi total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 cenderung naik, kecuali tahun 2017 yang turun cukup drastis sebesar 0.17% dari tahun 2016. Namun demikian, kontribusi tersebut melonjak tajam sebesar 0.50% pada tahun 2018, dan naik sedikit pada tahun 2019. Meskipun demikian, kontribusi total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah turun sebesar 0.01% pada tahun 2020.

Penting juga untuk mengetahui kontribusi tiap komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Utara terhadap total Pendapatan Transfer Kabupaten Dairi tahun 2016-2020. Kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 10 Kontribusi tiap komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Transfer Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Secara umum, tren kontribusi Pendapatan Hibah terhadap total Pendapatan Transfer Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 cenderung naik, meskipun tahun 2017 merosot cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2016. Pendapatan Hibah menjadi sumber utama pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara hanya diterima 2 kali pada tahun 2016 (0.13%) dan tahun 2018 (0.71%). Hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah belum optimal.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut tabel gambaran pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

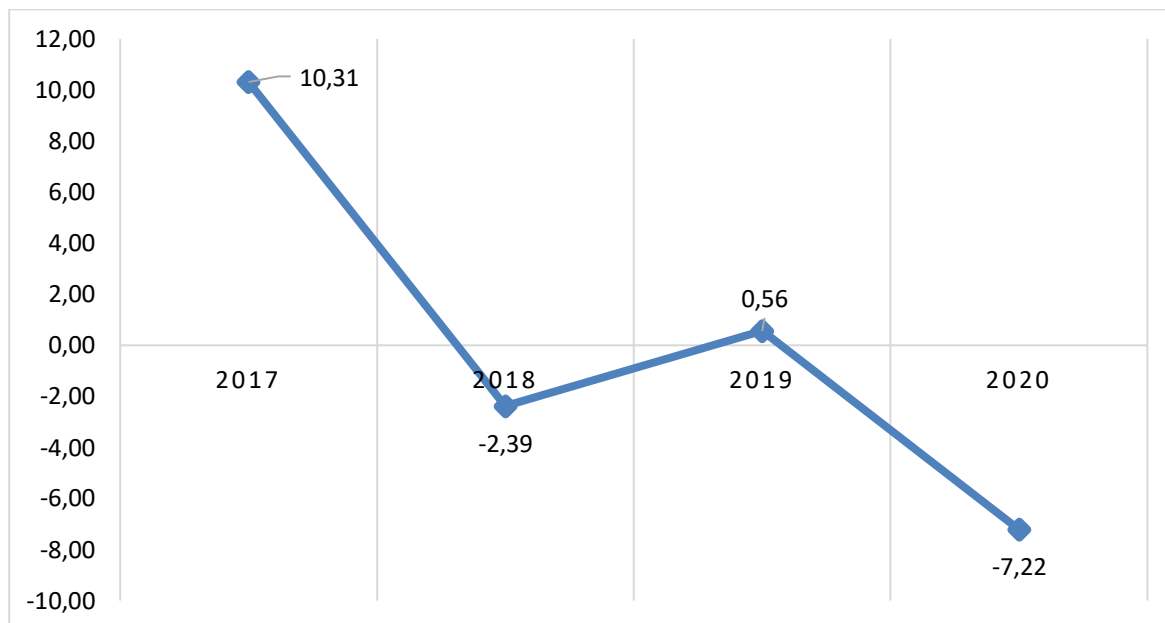
No. Akun	Uraian	Realisasi					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	BELANJA	865,855,781,556.81	955,154,161,982.32	932,367,675,475.91	937,570,732,576.75	869,923,658,395.80	0.32
5.1	Belanja Operasi	646,154,594,436.81	692,199,093,018.32	730,806,237,623.04	737,119,024,625.75	685,541,089,052.00	1.64
5.1.1	Belanja Pegawai	492,294,956,849.00	450,317,422,861.00	479,741,227,070.00	503,235,618,415.00	471,857,855,419.00	-0.83
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149,698,178,110.10	219,524,690,836.48	211,632,801,915.18	223,009,769,210.75	208,791,968,133.00	10.51
5.1.3	Belanja Bunga	197,859,477.71	49,287,204.84	3,126,271.86	-	-	-89.58
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	3,963,600,000.00	21,817,692,116.00	27,700,582,366.00	4,700,512,000.00	4,891,265,500.00	99.61
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	490,000,000.00	11,728,500,000.00	6,173,125,000.00	-	715.40
5.2	Belanja Modal	217,941,187,120.00	260,705,968,964.00	201,561,437,852.87	197,567,865,963.00	139,598,777,988.80	-8.60
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2,645,378,600.00	609,992,000.00	-	4,995,715,640.00	2,549,121,000.00	-75.31
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,917,383,196.00	37,813,955,774.00	29,354,290,073.00	29,561,952,523.00	55,787,660,510.80	21.38
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43,862,921,820.00	41,398,190,987.00	28,660,269,318.00	35,170,065,343.00	18,343,731,181.00	-15.38
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	137,097,386,779.00	167,223,741,294.00	133,352,033,265.87	116,544,242,550.00	54,327,377,616.00	-16.07
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,418,116,725.00	13,660,088,909.00	10,194,845,196.00	11,295,889,907.00	8,590,887,681.00	106.60
5.3	Belanja Tak Terduga	1,760,000,000.00	2,249,100,000.00	-	2,883,841,988.00	44,783,791,355.00	460.24

No. Akun	Uraian	Realisasi					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
						0	
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1,760,000,000.00	2,249,100,000.00	-	2,883,841,988.00	44,783,791,355.00	460.24
6	TRANSFER	127,490,268,500.00	191,651,838,900.00	177,572,305,500.00	193,537,799,700.00	188,475,326,600.00	12.34
6.1	Transfer Bagi Hasil	-	1,058,118,000.00	1,500,000,000.00	1,015,401,000.00	1,020,000,000.00	3.30
6.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	740,682,600.00	865,400,000.00	1,015,401,000.00	1,020,000,000.00	11.54
6.1.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	317,435,400.00	634,600,000.00	-	-	-0.04
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	127,490,268,500.00	190,593,720,900.00	176,072,305,500.00	192,522,398,700.00	187,455,326,600.00	12.15
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	28,479,700,000.00	63,717,135,400.00	63,340,900,000.00	64,845,240,800.00	58,584,122,000.00	28.96
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	98,210,643,000.00	126,096,790,000.00	111,931,480,000.00	126,865,902,400.00	128,871,204,600.00	8.02
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	799,925,500.00	779,795,500.00	799,925,500.00	811,255,500.00	-	-24.63

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Pertumbuhan realisasi Belanja Kabupaten Dairi tahun 2017-2020 mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 11 Pertumbuhan realisasi Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Dairi 2016-2020

Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2017-2020 sebesar 0.32%. Tren pertumbuhan Belanja Kabupaten Dairi pada kurun waktu tersebut fluktuatif cenderung turun. Pertumbuhan Belanja paling tinggi sebesar 10.31% pada tahun 2016-2017, sedangkan pertumbuhan Belanja mengalami kontraksi sebesar -7.22% pada tahun 2019-2020. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan beberapa komponen Belanja Operasi yaitu: 1) Belanja Pegawai sebesar -6.24%, 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar -6.38%, dan 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar -100%.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang wajib dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Dairi tahun sebelumnya terhadap surplus maupun defisit belanja daerah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan daerah di masa mendatang. Gambaran

pembiayaan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

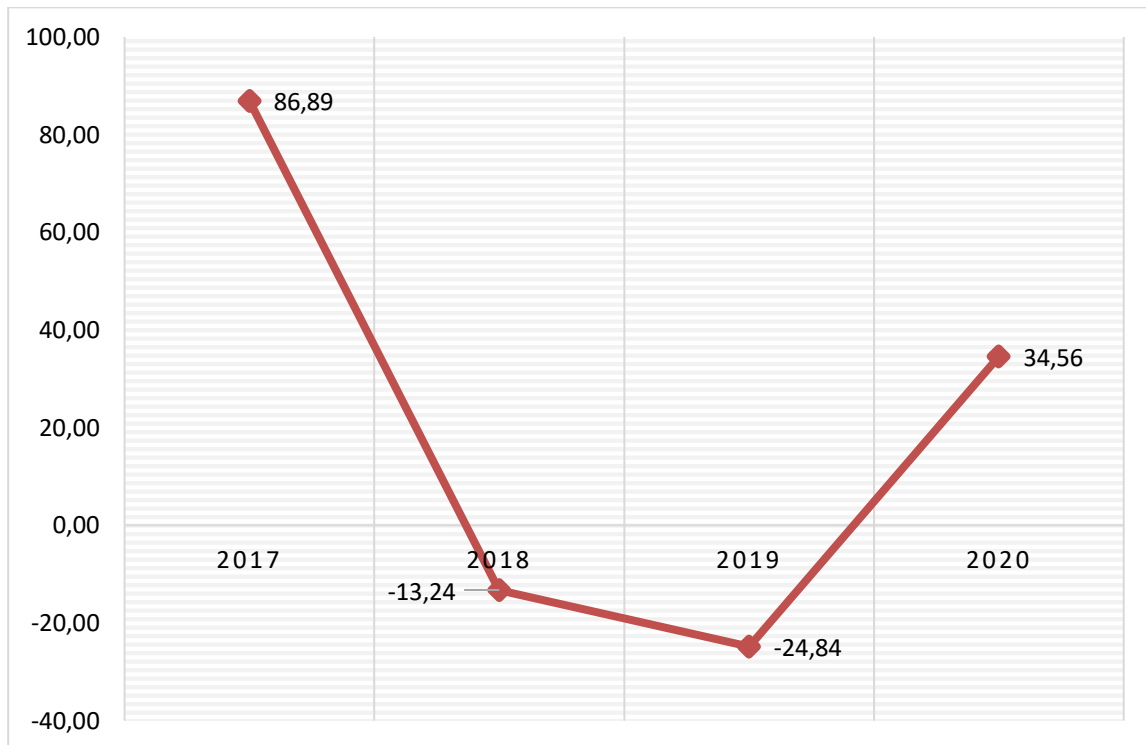
Tabel 3. 3 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No. Akun	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
6	PEMBIAYAAN	72,162,882,658.15	134,863,589,222.69	117,008,651,346.35	87,947,135,465.89	118,344,644,077.89	20.84
6.1	Penerimaan Daerah	94,272,905,688.37	141,523,424,283.68	121,851,798,620.25	87,947,135,465.89	124,360,762,262.89	12.45
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	94,271,905,688.37	141,523,424,283.68	121,851,798,620.25	87,947,135,465.89	124,360,762,262.89	
6.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
6.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1,000,000.00	-	-	-	-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-	-	
6.2	Pengeluaran Daerah	22,110,023,030.22	6,659,835,060.99	4,843,147,273.90	-	6,016,118,185.00	-65.72
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20,841,298,142.00	5,971,403,058.00	4,789,077,715.00	-	6,016,118,185.00	-63.72
6.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	1,268,724,888.22	688,432,002.99	54,069,558.90	-	-	
6.2.4	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017-2020 sebesar 20.84% dengan tren pertumbuhan fluktuatif cenderung turun. Kondisi ini dapat diketahui melalui grafik berikut.

Grafik 3. 12 Pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Dairi 2016-2020

Kenaikan pertumbuhan Pembiayaan Daerah paling tinggi sebesar 86.89% pada tahun 2016-2017, sedangkan secara kontras pertumbuhan Pembiayaan Daerah mengalami kontraksi sebesar -24.84% terjadi pada tahun 2018-2019. Pembiayaan Daerah kembali naik sebesar 34.56% pada tahun 2019-2020.

Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 sebesar 12.45%, di mana tren pertumbuhannya fluktuatif cenderung turun. Hal ini disebabkan oleh SiLPA yang turun sebesar -13.90% pada tahun 2017-2018 dan turun lagi sebesar -27.82% pada tahun 2018-2019. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Daerah Kabupaten Dairi sebesar -65.72% pada tahun 2016-2020 dengan pertumbuhan tiap tahun mengalami tren turun. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya Pengeluaran Daerah pada tahun 2019. Selain itu, tren pertumbuhan 2 komponen utama pembentuk Pengeluaran Daerah (Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo) turun secara drastis tiap tahun.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuiditas. Analisis Neraca Daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 4 Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No. Akun	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	ASET	1,862,736,799,468.57	1,912,571,435,175.08	1,960,715,216,684.63	2,044,203,819,038.24	1,894,467,926,529.28	0.53
1.1	ASET LANCAR	174,864,466,188.54	145,966,994,153.42	136,467,339,577.05	168,274,000,896.62	163,220,798,446.35	(0.68)
1.1.1	Kas	142,878,669,868.68	121,882,229,323.25	88,313,213,502.89	124,414,291,698.89	115,087,129,455.73	(2.21)
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	141,397,018,081.68	120,997,016,725.73	87,422,289,856.29	114,010,460,113.09	100,102,265,451.17	(5.99)
1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	126,406,202.00	155,132,300.00	217,200.00	156,800.00	24,536,629.00	3,860.85
1.1.1.3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	56,994,075.00	30,430,703.00	96,051,334.00	25,054,479.00	315,353,956.16	313.45
1.1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	7,270,612.00	37,688,919.00	270,026,703.00	28,474,957.00	77,687,016.00	279.55
1.1.1.5	Kas di Bendahara BLUD	-	-	-	250,754,987.00	13,695,519,981.00	5,361.71
1.1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	1,290,980,898.00	661,960,675.52	524,628,409.60	10,099,390,362.80	871,766,422.40	416.05
1.1.2	Piutang	17,598,623,480.79	10,014,207,755.59	34,194,130,717.47	25,761,276,551.09	21,571,704,498.98	39.36
1.1.2.1	Piutang Pajak Daerah	4,981,591,712.00	4,651,267,272.00	5,735,181,044.00	6,359,704,593.00	7,516,437,326.00	11.44
1.1.2.2.	Piutang Retribusi Daerah	565,291,583.00	68,993,333.00	68,993,333.00	68,993,333.00	187,595,333.00	42.05
1.1.2.3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5,093,482,150.00	6,472,586,000.00	8,984,027,835.30	13,465,907,000.00	5,041,350,879.00	13.30
1.1.2.4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	4,178,490.00	-	21,775,301,815.00	4,791,828,328.00	-	(92.66)

No. Akun	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan (%)
1.1.2.5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	8,927,692,289.00	541,523,738.00	-	3,641,128,392.00	11,235,905,083.00	4.88
1.1.2.6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	49,460,000.00	28,500,000.00	23,260,000.00	-	-	(53.59)
1.1.2.7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	211,913,087.00	790,056,058.00	478,796,915.10	824,825,283.45	1,016,284,320.20	82.23
1.1.2.8	Penyisihan Piutang	(2,234,985,830.21)	(2,538,718,645.41)	(2,871,430,224.93)	(3,391,110,378.36)	(3,425,868,442.22)	11.45
	Persediaan	14,387,172,839.07	14,070,557,074.58	13,959,995,356.69	18,098,432,646.64	26,561,964,491.64	18.36
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	60,190,291,189.86	62,071,737,854.86	60,580,742,328.00	91,517,963,450.00	96,758,574,576.00	14.38
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	0	
1.2.1.1	Dana Bergulir	1,006,403,120.00	1,006,403,120.00	1,006,403,120.00	1,006,403,120.00	1,006,403,120.00	-
1.2.1.2	Penyisihan Dana Bergulir	(1,006,403,120.00)	(1,006,403,120.00)	(1,006,403,120.00)	(1,006,403,120.00)	(1,006,403,120.00)	-
1.2.2	Investasi Permanen	60,190,291,189.86	62,071,737,854.86	60,580,742,328.00	91,517,963,450.00	96,758,574,576.00	14.38
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	60,190,291,189.86	62,071,737,854.86	60,580,742,328.00	91,517,963,450.00	96,758,574,576.00	14.38
1.2.2.2	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	0
1.3	ASET TETAP	1,623,093,873,576.02	1,697,991,031,596.83	1,744,743,237,187.02	1,772,059,875,771.78	1,623,248,572,402.46	0.13
1.3.1	Tanah	380,889,117,580.00	371,179,911,250.61	371,333,923,810.61	377,634,353,438.70	382,928,956,808.70	0.15

No. Akun	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan (%)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	226,641,560,939.75	251,448,488,982.23	277,510,657,914.02	297,456,680,195.81	371,141,321,683.66	13.32
1.3.3	Gedung dan Bangunan	606,934,381,413.40	597,129,228,494.70	624,462,795,318.55	648,546,720,348.15	656,120,003,003.16	2.00
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,056,001,283,969.81	1,224,882,574,374.48	1,346,656,189,345.56	1,452,415,939,753.56	1,521,789,206,604.91	9.64
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	72,235,302,357.68	76,420,614,838.36	83,980,369,738.45	89,979,310,848.45	95,282,348,588.88	7.18
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	9,578,065,923.00	18,949,023,793.00	8,380,446,595.00	6,974,548,317.00	1,878,454,823.57	(11.94)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(729,185,838,607.62)	(842,018,810,136.55)	(967,581,145,535.17)	(1,100,947,677,129.89)	(1,405,891,719,110.42)	17.97
1.4	ASET LAINNYA	4,588,168,514.15	6,541,671,569.97	18,923,897,592.56	12,351,978,919.84	11,239,981,104.47	47.03
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	248,424,769.67	73,771,000.00	79,109,117.85	298,124,773.50	-	28.45
1.4.3	Aset Tak Berwujud	1,876,663,736.00	1,876,663,736.00	1,932,091,193.69	1,932,091,193.69	2,337,981,880.30	11.98
1.4.4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1,281,150,761.60)	(1,529,647,648.80)	(1,789,230,027.54)	(1,861,575,119.08)	(1,991,098,347.94)	11.84
1.4.5	Aset Lain-lain	22,559,772,274.51	22,647,167,725.53	39,140,522,057.53	33,395,074,962.25	29,651,396,053.90	11.83
1.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18,815,541,504.43)	(16,526,283,242.76)	(20,438,594,748.97)	(21,411,736,890.52)	(18,758,298,481.79)	0.97
	JUMLAH ASET	1,862,736,799,468.57	1,912,571,435,175.08	1,960,715,216,684.63	2,044,203,819,038.24	1,894,467,926,529.28	0.53

No. Akun	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan (%)
2	KEWAJIBAN	14,198,093,215.06	35,255,460,443.00	9,114,155,499.02	12,551,803,173.15	10,999,160,356.29	24.88
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,144,023,656.16	35,255,460,443.00	9,114,155,499.02	12,551,803,173.15	10,999,160,356.29	37.92
2.1.1	Bagian Lancar Utang Bunga Pinjaman	49,287,204.84	3,126,271.86	-	-	-	(96.83)
2.1.2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56,994,075.00	30,430,703.00	96,051,334.00	25,054,479.00	315,353,956.16	231.74
2.1.3	Utang kepada Pihak Ketiga	13,276,390,273.33	35,062,521,607.24	8,884,964,135.02	12,424,369,762.15	10,520,501,948.13	67.74
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	688,432,002.99	54,069,558.90	-	-	-	(96.07)
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	59,611,250.00	40,501,375.00	97,398,000.00	54.21
2.1.6	Utang Beban	72,920,100.00	105,312,302.00	73,528,780.00	61,877,557.00	65,906,452.00	(16.95)
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	54,069,558.90	-	-	-	-	(100.00)
2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	54,069,558.90	-	-	-	-	(100.00)
	JUMLAH KEWAJIBAN	14,198,093,215.06	35,255,460,443.00	9,114,155,499.02	12,551,803,173.15	10,999,160,356.29	34.44
3	EKUITAS	1,848,538,706,253.51	1,877,315,974,732.08	1,951,601,061,185.61	2,031,652,015,865.09	1,883,468,766,172.99	2.35

No. Akun	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan (%)
3.1	EKUITAS	1,848,538,706,253.51	1,877,315,974,732.08	1,951,601,061,185.61	2,031,652,015,865.09	1,883,468,766,172.99	2.35
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,862,736,799,468.57	1,912,571,435,175.08	1,960,715,216,684.63	2,044,203,819,038.24	1,894,467,926,529.28	2.37

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rata-rata pertumbuhan Aset Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 hanya sebesar 0.53%. Rendahnya pertumbuhan aset tersebut disebabkan karena Aset Lancar, Kas, dan Kas di Daerah mengalami pertumbuhan negatif dalam kurun waktu tersebut. Rata-rata pertumbuhan Kas sebesar -2.21%, sedangkan Aset Lancar tumbuh rata-rata sebesar -0.68%. Sementara itu, Kas di Kas Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -2.21%.

Aset Tetap Kabupaten Dairi rata-rata tumbuh sebesar 0.13% pada Tahun 2016-2020. Komponen Aset Tetap yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (17.97%), Peralatan dan Mesin (13.32%), Jalan, Irigasi, dan Jaringan (9.64%), dan Aset Tetap Lainnya (7.18%). Sementara itu, komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah yaitu Tanah (0.15%) dan Konstruksi dalam Pengerjaan (-11.94%).

Rata-rata pertumbuhan Kewajiban Kabupaten Dairi cukup tinggi yaitu sebesar 24.88% pada Tahun 2016-2020. Kewajiban Jangka Pendek tumbuh rata-rata sebesar 37.92%. Hal ini dikarenakan tingginya rata-rata pertumbuhan komponen Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar 231.74% dan Utang kepada Pihak Ketiga sebesar (67.7.4%).

Selain melakukan analisis Neraca Daerah, diperlukan juga analisis Rasio Keuangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan posisi keuangan Kabupetan Dairi dari satu periode ke periode berikutnya. Perhitungan Rasio Keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1) Rasio Likuiditas, 2) Rasio Solvabilitas, dan 3) Rasio Aktivitas.

3.1.1.1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Rasio Likuiditas terdiri dari Rasio Lancar/*Current Ratio* dan Rasio Cepat/*Quick Ratio*.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan kemampuan suatu daerah untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar atau aset lancar. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan suatu daerah untuk

melunasi utang menggunakan aset daerah. Berikut adalah rumus perhitungan Rasio Lancar.

$$\text{Rasio Lancar} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Hutang Lancar}$$

Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Analisis Rasio Lancar Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (%)

Tahun	Aktiva Lancar (Aset Lancar)	Utang Lancar (Kewajiban Jangka Pendek)	Rasio Lancar
2016	174,864,466,188.54	14,144,023,656.16	12.36
2017	145,966,994,153.42	35,255,460,443.00	4.14
2018	136,467,339,577.05	9,114,155,499.02	14.97
2019	168,274,000,896.62	12,551,803,173.15	13.41
2020	163,220,798,446.35	10,999,160,356.29	14.84

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rasio Lancar Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif cenderung naik, kecuali pada tahun 2017 di mana merupakan Rasio Lancar paling rendah. Pada tahun 2017, penurunan Rasio Lancar terjadi sangat drastis disebabkan oleh Aset Lancar turun sebesar -16.53% dibandingkan dengan Aset Lancar tahun 2016, padahal Kewajiban Jangka Pendek naik cukup drastis sebesar 149.26% dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek tahun 2016. Meskipun demikian, Rasio Lancar sebesar 14.84% pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi dapat melakukan pelunasan Kewajiban Jangka Pendek menggunakan Aset Lancar.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio *quick* adalah ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset likuid atau uang tunai (aset cepat). Rasio ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan fiskal suatu daerah. Rasio cepat digunakan untuk mengetahui Utang jangka pendek pemerintah daerah yang dapat dipenuhi dengan menjual semua aset likuid pemerintah daerah dalam waktu singkat. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin baik kemampuan keuangan suatu daerah. Berikut merupakan rumus perhitungan rasio cepat.

$$\text{Rasio Cepat} = (\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}) / \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$

Hasil perhitungan Rasio Cepat Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (%)

Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Cepat
2016	174,864,466,188.54	14,387,172,839.07	14,144,023,656.16	11.35
2017	145,966,994,153.42	14,070,557,074.58	35,255,460,443.00	3.74
2018	136,467,339,577.05	13,959,995,356.69	9,114,155,499.02	13.44
2019	168,274,000,896.62	18,098,432,646.64	12,551,803,173.15	11.96
2020	163,220,798,446.35	26,561,964,491.64	10,999,160,356.29	12.42

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Pertumbuhan Rasio Cepat Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Rasio Cepat merosot paling tajam sebesar -7.61% pada tahun 2016 ke tahun 2017. Meskipun demikian, Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dikatakan dalam kondisi baik karena memiliki nilai rasio > 1.00. Hal ini menunjukkan bahwa Aset Lancar Pemda Kabupaten Dairi lebih besar dibandingkan dengan Aktiva Lancar. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Dairi mampu melunasi Kewajiban Jangka Pendek melalui pencairan Aset Lancar.

3.1.1.2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman di suatu daerah. Rasio yang digunakan dalam Rasio Solvabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Rasio total Utang terhadap total Aset
2. Rasio Utang terhadap Modal

1. Rasio Total Utang terhadap Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang meliputi utang pemerintah daerah, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat ditutup oleh aktiva. Semakin kecil nilai rasio, maka semakin baik tingkat keamanannya. Berikut rumus rasio total Utang terhadap Aset.

$$\text{Rasio Utang terhadap total Aset} = (\text{Total Utang} / \text{total Aset}) * 100$$

Hasil perhitungan Rasio Utang terhadap total Aset Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 7 Rasio Utang terhadap total Aset Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016 – 2020 (%)

Tahun	Total Utang	Total Aset	Rasio
2016	14,198,093,215.06	1,862,736,799,468.57	0.76
2017	35,255,460,443.00	1,912,571,435,175.08	1.84
2018	9,114,155,499.02	1,960,715,216,684.63	0.46
2019	12,551,803,173.15	2,044,203,819,038.24	0.61
2020	10,999,160,356.29	1,894,467,926,529.28	0.58

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rasio Utang Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Rasio Utang paling tinggi sebesar 1.84% pada tahun 2017 disebabkan karena total Utang melonjak tajam sebesar 148.31% dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, Rasio Utang paling rendah sebesar 0.46% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh total Utang tahun 2018 turun sangat drastis sebesar -74.15% dibandingkan dengan tahun 2017. Rasio Utang tahun 2019 dan 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Rasio Utang tahun 2018. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki solvabilitas cukup baik karena aset yang dimiliki dapat menutup utang jangka panjang dan jangka pendek. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Dairi perlu mengantisipasi kenaikan utang di masa mendatang agar dapat mempertahankan solvabilitas dalam kondisi baik.

2. Rasio Utang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan keuangan daerah saat pemeriksaan. Semakin kecil nilainya, menunjukkan semakin mandiri keuangan daerah atau tidak tergantung pembiayaan dari hutang. Berikut rumus menghitung Rasio Utang terhadap Modal.

$$\text{Rasio Utang terhadap Modal} = (\text{Total Utang} / \text{Total Modal}) * 100$$

Hasil perhitungan Rasio Utang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Rasio total Utang terhadap total Modal Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (%)

Tahun	Total Utang	Total Modal (Ekuitas)	Rasio
2016	14,198,093,215.06	1,848,538,706,253.51	0.77
2017	35,255,460,443.00	1,877,315,974,732.08	1.88
2018	9,114,155,499.02	1,951,601,061,185.61	0.47
2019	12,551,803,173.15	2,031,652,015,865.09	0.62
2020	10,999,160,356.29	1,883,468,766,172.99	0.58

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rasio total Utang terhadap total Modal (Ekuitas) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Rasio paling tinggi sebesar 1.88% pada tahun 2017 disebabkan oleh melonjaknya total Utang tahun 2017 sebesar 148.31% dibandingkan dengan total Utang tahun 2016. Rasio lebih besar dari 1.00 menunjukkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dairi pada tahun 2017 kurang baik. Sementara itu, rasio paling rendah sebesar 0.47% pada tahun 2018 disebabkan oleh total Utang turun secara drastis sebesar -74.15% pada tahun 2018, sedangkan total Modal tahun 2018 naik sebesar 3.96% dibandingkan tahun 2017. Rasio tersebut naik sebesar 0.15% pada tahun 2018-2019, namun turun sebesar -0.03% pada tahun 2019-2020. Kondisi rasio lebih kecil dari 1.00 pada tahun 2018-2020 tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam kondisi baik untuk memenuhi seluruh kewajiban.

3.1.1.3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio untuk melihat efektifitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Dairi. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa efektif pemerintah daerah menggunakan persediaan, piutang, dan aset tetap dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Rasio ini diukur melalui rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

1. Rasio Rata-rata Umur Piutang

Rasio rata-rata umur piutang merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang

atau mengubah piutang menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi perputaran piutang. Perputaran piutang didapatkan dari perhitungan pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, di mana rata-rata piutang pendapatan daerah didapatkan dari saldo awal ditambah saldo akhir piutang dibagi 2 (dua). Berikut merupakan hasil perhitungan rata-rata umur piutang Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020.

Tabel 3. 9 Rasio rata-rata umur piutang Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata umur Piutang	6.73	6.31	6.61	6.12	6.78

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rasio rata-rata umur Piutang Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif cenderung naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang berjalan cukup efisien di mana Pemerintah Kabupaten Dairi hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 7 hari untuk mengubah piutang menjadi kas. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Dairi perlu mengantisipasi adanya peningkatan rasio rata-rata umur piutang yang menunjukkan bahwa durasi pelunasan piutang membutuhkan waktu makin lama. Hal ini dapat menimbulkan resiko piutang tidak dilunasi secara tepat waktu.

2. Rasio Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana yang tertanam dalam bentuk persediaan. Persediaan yang dimiliki digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur persediaan.

Tabel 3. 10 Rasio rata-rata umur persediaan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata umur Persediaan	519.44	531.12	535.33	412.92	281.35

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Rasio rata-rata umur Persediaan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren turun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Persediaan telah dikelola secara efisien. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Dairi

telah berupaya mengalokasikan komponen anggaran Persediaan untuk pelayanan publik secara efisien.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu Pemerintah Kabupaten Dairi. Analisis ini berfokus pada realisasi kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah ke depan.

3.2.1 Kontribusi Penggunaan Anggaran

Analisis kontribusi penggunaan anggaran bertujuan untuk menyajikan data analisis terkait kontribusi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, kontribusi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, dan analisis pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran pada periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis kontribusi penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi.

3.2.1.1 Kontribusi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Analisis kontribusi realisasi belanja terhadap anggaran belanja bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Kontribusi realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran (target) dan kemudian diperoleh tingkat realisasi belanja. Berikut merupakan kontribusi realisasi belanja terhadap target anggaran belanja Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

Tabel 3. 11 Realisasi Belanja terhadap total Belanja, rata-rata kontribusi komponen Belanja terhadap total Belanja, dan rata-rata pertumbuhan tiap komponen Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No.	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		2016			2017			2018		
5	BELANJA	954,819,548,611.00	865,855,781,556.81	90.68	1,092,375,030,585.00	955,154,161,982.32	87.44	1,057,124,293,528.00	932,367,675,475.91	88.20
5.1	Belanja Operasi	707,920,785,850.00	646,154,594,436.81	91.27	774,578,415,926.00	692,199,093,018.32	89.36	837,690,582,337.00	730,806,237,623.04	87.24
5.1.1	Belanja Pegawai	524,274,141,590.00	492,294,956,849.00	93.90	485,309,445,516.00	450,317,422,861.00	92.79	511,107,192,168.00	479,741,227,070.00	93.86
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	179,182,644,260.00	149,698,178,110.10	83.55	265,805,767,410.00	219,524,690,836.48	82.59	271,730,326,369.00	211,632,801,915.18	77.88
5.1.3	Belanja Bunga	205,000,000.00	197,859,477.71	96.52	55,000,000.00	49,287,204.84	89.61	5,000,000.00	3,126,271.86	62.53
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	4,259,000,000.00	3,963,600,000.00	93.06	22,573,203,000.00	21,817,692,116.00	96.65	42,938,063,800.00	27,700,582,366.00	64.51
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	835,000,000.00	490,000,000.00	58.68	11,910,000,000.00	11,728,500,000.00	98.48
5.2	Belanja Modal	241,898,762,761.00	217,941,187,120.00	90.10	314,796,614,659.00	260,705,968,964.00	82.82	216,933,711,191.00	201,561,437,852.87	92.91
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2,652,213,600.00	2,645,378,600.00	99.74	867,214,800.00	609,992,000.00	70.34	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,773,849,790.00	31,917,383,196.00	91.79	46,963,031,303.00	37,813,955,774.00	80.52	33,172,930,346.00	29,354,290,073.00	88.49
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44,796,275,371.00	43,862,921,820.00	97.92	48,673,368,176.00	41,398,190,987.00	85.05	30,257,701,438.00	28,660,269,318.00	94.72
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156,960,704,000.00	137,097,386,779.00	87.35	204,064,190,308.00	167,223,741,294.00	81.95	141,129,880,164.00	133,352,033,265.87	94.49
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,715,720,000.00	2,418,116,725.00	89.04	14,228,810,072.00	13,660,088,909.00	96.00	12,373,199,243.00	10,194,845,196.00	82.39

No.	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		2016			2017			2018		
5.3	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	1,760,000,000.00	35.20	3,000,000,000.00	2,249,100,000.00	74.97	2,500,000,000.00	-	-
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	1,760,000,000.00	35.20	3,000,000,000.00	2,249,100,000.00	74.97	2,500,000,000.00	-	-
6	TRANSFER	127,490,268,500.00	127,490,268,500.00	100.00	191,671,968,900.00	191,651,838,900.00	99.99	177,572,305,500.00	177,572,305,500.00	100.00
6.1	Transfer Bagi Hasil	-	-	-	1,058,118,000.00	1,058,118,000.00	100.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	-	-	740,682,600.00	740,682,600.00	100.00	865,400,000.00	865,400,000.00	100.00
6.1.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	-	-	317,435,400.00	317,435,400.00	100.00	634,600,000.00	634,600,000.00	100.00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	127,490,268,500.00	127,490,268,500.00	100.00	190,613,850,900.00	190,593,720,900.00	99.99	176,072,305,500.00	176,072,305,500.00	100.00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	28,479,700,000.00	28,479,700,000.00	100.00	63,717,135,400.00	63,717,135,400.00	100.00	63,340,900,000.00	63,340,900,000.00	100.00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	98,210,643,000.00	98,210,643,000.00	100.00	126,096,790,000.00	126,096,790,000.00	100.00	111,931,480,000.00	111,931,480,000.00	100.00

No.	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		2016			2017			2018		
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	799,925,500.00	799,925,500.00	100.00	799,925,500.00	779,795,500.00	97.48	799,925,500.00	799,925,500.00	100.00

Lanjutan Tabel Realisasi Belanja terhadap total Belanja, rata-rata kontribusi komponen Belanja terhadap total Belanja, dan rata-rata pertumbuhan tiap komponen Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Kode rekenin g	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rata-rata pertumbuhan (%)	Rata-rata kontribusi komponen belanja terhadap total belanja (%)
		2019			2020				
5	BELANJA	1,048,271,228,465.89	937,570,732,576.75	89.44	977,852,317,734.00	869,923,658,395.80	88.96	0.32	
5.1	Belanja Operasi	820,055,341,934.89	737,119,024,625.75	89.89	760,850,168,827.00	685,541,089,052.00	90.10	1.64	76.58
5.1.1	Belanja Pegawai	536,195,505,361.29	503,235,618,415.00	93.85	495,087,139,422.00	471,857,855,419.00	95.31	-0.83	52.67
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	271,432,111,573.60	223,009,769,210.75	82.16	259,310,287,270.00	208,791,968,133.00	80.52	10.51	22.15
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-89.58	0.01
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	5,874,600,000.00	4,700,512,000.00	80.01	6,402,742,135.00	4,891,265,500.00	76.39	99.61	1.36
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,553,125,000.00	6,173,125,000.00	94.20	50,000,000.00	-	-	715.40	0.39
5.2	Belanja Modal	217,615,886,531.00	197,567,865,963.00	90.79	154,516,988,197.00	139,598,777,988.80	90.35	-8.60	22.24
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8,937,070,600.00	4,995,715,640.00	55.90	8,900,000,000.00	2,549,121,000.00	28.64	-75.31	0.24
5.2.2	Belanja Modal Peralatan	33,803,602,597.00	29,561,952,523.00	87.45	60,005,054,575.00	55,787,660,510.80	92.97	21.38	4.07

Kode reke-nin-g	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rata-rata pertumbuhan (%)	Rata-rata kontribusi komponen belanja terhadap total belanja (%)
		2019			2020				
	dan Mesin								
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,813,420,474.00	35,170,065,343.00	95.54	18,723,266,619.00	18,343,731,181.00	97.97	-15.38	3.67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	126,591,764,800.00	116,544,242,550.00	92.06	58,242,162,751.00	54,327,377,616.00	93.28	-16.07	13.26
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,470,028,060.00	11,295,889,907.00	98.48	8,646,504,252.00	8,590,887,681.00	99.36	106.60	1.00
5.3	Belanja Tak Terduga	10,600,000,000.00	2,883,841,988.00	27.21	62,485,160,710.00	44,783,791,355.00	71.67	460.24	1.18
5.3.1	Belanja Tak Terduga	10,600,000,000.00	2,883,841,988.00	27.21	62,485,160,710.00	44,783,791,355.00	71.67	460.24	1.18
									0.00
6	TRANSFER	194,015,650,000.00	193,537,799,700.00	99.75	188,557,770,800.00	188,475,326,600.00	99.96	12.34	19.23
6.1	Transfer Bagi Hasil	1,020,000,000.00	1,015,401,000.00	99.55	1,024,599,000.00	1,020,000,000.00	99.55	3.30	0.10
6.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1,020,000,000.00	1,015,401,000.00		1,024,599,000.00	1,020,000,000.00	99.55	11.54	0.08
6.1.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	-		-	-	-	-0.04	0.02
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	192,995,650,000.00	192,522,398,700.00	99.75	187,533,171,800.00	187,455,326,600.00	99.96	12.15	19.13
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	64,923,086,000.00	64,845,240,800.00	99.88	58,661,967,200.00	58,584,122,000.00	99.87	28.96	6.08
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	127,172,564,000.00	126,865,902,400.00	99.76	128,871,204,600.00	128,871,204,600.00	100.00	8.02	12.98

Kode rekening	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rata-rata pertumbuhan (%)	Rata-rata kontribusi komponen belanja terhadap total belanja (%)
		2019			2020				
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	900,000,000.00	811,255,500.00	90.14	-	-	-	-24.63	0.07

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Kontribusi realisasi terhadap anggaran Belanja Kabupaten Dairi mengalami tren fluktuatif cenderung turun pada tahun 2016-2020. Rata-rata pertumbuhan kontribusi realisasi terhadap anggaran Belanja yaitu sebesar 0.32%. Tren kontribusi realisasi dan anggaran tiap komponen Belanja dan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontribusi realisasi terhadap anggaran Belanja Operasi mengalami tren fluktuatif cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.64%.
- 2) Kontribusi realisasi terhadap anggaran Belanja Modal mengalami tren fluktuatif cenderung turun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -8.60%.
- 3) Kontribusi realisasi terhadap anggaran Belanja Tak Terduga mengalami tren fluktuatif cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.18%. Namun demikian, tidak terdapat anggaran Belanja Tak Terduga pada tahun 2018.

Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran Belanja Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Operasi yaitu sebesar 76.58%. Belanja operasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah. Sementara itu, rata-rata kontribusi realisasi Belanja Modal terhadap total Belanja yaitu sebesar 22.24%. Anggaran Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan fisik dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dairi justru cenderung turun dari sisi kontribusi anggaran terhadap realisasinya, bahkan rata-rata pertumbuhannya pada kondisi minus.

Perlu juga untuk mencermati kondisi anggaran Transfer dan komponen pembentuknya. Kontribusi realisasi terhadap anggaran Transfer mengalami tren cenderung turun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19.23% pada tahun 2016-2020. Sementara itu, kondisi tiap komponen Transfer yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontribusi realisasi terhadap anggaran Transfer Bagi Hasil mengalami tren cenderung stagnan pada tahun 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.30%. Namun demikian, Kabupaten Dairi tidak memperoleh anggaran Transfer Bagi Hasil pada tahun 2016.

- 2) Kontribusi realisasi terhadap anggaran Transfer Bantuan Keuangan mengalami tren cenderung stagnan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 100%.

3.2.1.2 Kontribusi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui gambaran riil alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Dairi. Hasil perhitungan menjadi basis penentuan prioritas kebijakan alokasi anggaran untuk 1 periode RPJMD. Kontribusi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	446,746,395,481.00	390,270,354,434.00	390,752,957,425.00	401,143,442,569.00	387,142,507,001.00	-3.34
2	Belanja Tambahan Penghasilan	27,196,807,073.00	27,786,295,440.00	56,228,239,041.00	55,263,722,624.00	45,550,901,678.00	21.31
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
4	Belanja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	629,298,145.00	666,666,055.00	252,418,380.00	773,815,089.00	759,701,196.00	37.13
5	Belanja Bahan Habis Pakai	8,568,500,878.00	20,465,673,204.60	20,635,994,429.72	21,162,556,090.92	29,226,789,436.20	45.08
6	Belanja Jasa kantor	40,235,835,911.00	51,823,748,665.00	51,880,611,586.21	31,571,119,131.60	48,769,436,763.40	11.06
7	Belanja perawatan motor	7,163,322,189.00	6,351,177,127.00	6,710,525,022.00	6,332,119,337.00	6,070,713,965.00	-3.86
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,076,550,500.00	14,147,234,366.60	13,178,036,552.00	14,769,274,663.80	11,137,770,087.40	13.95
9	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,108,223,052.00	1,160,502,332.00	660,047,515.00	869,760,515.00	276,976,125.00	-18.70
10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2,199,430,700.00	2,022,731,600.00	2,224,312,300.00	2,392,983,400.00	685,028,500.00	-15.46
11	Belanja Honorarium	16,574,693,900.00	29,350,275,113.00	30,266,566,707.00	32,123,764,489.00	38,004,745,544.00	26.16
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	55,000,000.00	-	-	-	-	-100.00
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	2,234,453,885.00	1,994,597,931.00	2,984,453,716.00	3,055,442,311.00	2,871,788,084.00	8.82
14	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1,352,400,000.00	3,061,162,000.00	8,244,879,000.00	8,262,957,000.00	12,102,885,000.00	85.59
15	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	48,588,000.00	2,144,039,675.00	2,549,291,383.00	2,374,364,643.00	1,954,233,600.00	1076.76
16	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	576,493,000.00	586,581,000.00	718,211,390.00	762,079,235.00	608,048,000.00	2.52
17	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	392,844,204.00	581,987,000.00	1,097,653,000.00	1,019,756,100.00	152,680,000.00	11.16
18	Belanja Perjalanan Dinas	35,095,150,782.00	40,193,823,090.00	40,248,220,843.00	40,828,081,285.95	29,114,923,229.00	-3.15
19	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-	0.00
Jumlah		598,653,987,700.00	593,006,849,033.20	629,032,418,289.93	623,105,238,484.27	614,829,128,209.00	0.69

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Secara umum, pertumbuhan realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya pertumbuhan komponen Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan pada tahun 2016-2020. Sementara itu, terdapat beberapa komponen belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang mengalami tren pertumbuhan naik, yaitu: 1) Belanja Habis Pakai, 2) Belanja Honorarium, dan 3) Belanja Premi Asuransi Kesehatan.

Selain melakukan analisis realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis terhadap kontribusi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur juga perlu dilakukan. Hal ini bertujuan mengetahui kemampuan pengeluaran daerah dalam membiayai kebutuhan aparatur. Kontribusi ini dihitung melalui perbandingan total belanja pemenuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah. Kontribusi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total Pengeluaran Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 13 Kontribusi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total Pengeluaran Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Daerah)	Kontribusi
1	2016	598,653,987,700.00	887,965,804,587.03	63.85
2	2017	620,393,144,473.20	961,813,997,043.31	67.70
3	2018	629,032,418,289.93	937,210,822,749.81	67.12
4	2019	623,105,238,484.27	937,570,732,576.75	66.46
5	2020	614,829,128,209.00	875,939,776,580.80	70.19

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Kontribusi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 mengalami tren pertumbuhan fluktuatif cenderung naik. Kontribusi ini turun sebesar -0.66% pada tahun 2018-2019, namun naik secara drastis sebesar 3.73% pada tahun 2019-2020. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya alokasi anggaran belanja untuk pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dairi.

3.2.1.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya. Sementara itu, belanja periodik adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan pemerintahan daerah. Gambaran belanja periodik, wajib, dan mengikat Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 14 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Operasi	602,031,330,531.71	637,544,071,418.84	624,956,628,237.86	650,344,964,893.00	621,568,735,279.00	0.89
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	446,746,395,481.00	390,270,354,434.00	390,752,957,425.00	401,143,442,569.00	387,142,507,001.00	-3.34
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	27,196,807,073.00	27,786,295,440.00	56,228,239,041.00	55,263,722,624.00	45,550,901,678.00	21.31
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
4	Belanja Bunga	197,859,477.71	49,287,204.84	3,126,271.86	-	-	-67.19
5	Belanja Bagi Hasil	0.00	1,058,118,000.00	1,500,000,000.00	1,015,401,000.00	1,020,000,000.00	2.48
6	Belanja Bantuan	127,490,268,500.00	190,593,720,900.00	176,072,305,500.00	192,522,398,700.00	187,455,326,600.00	12.15
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22,110,023,030.22	6,659,835,060.99	4,843,147,273.90	0.00	6,016,118,185.00	-65.72
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,841,298,142.00	5,971,403,058.00	4,789,077,715.00	0.00	6,016,118,185.00	-47.79
2	Pembayaran Pokok Utang	1,268,724,888.22	688,432,002.99	54,069,558.90	-	-	-79.29
TOTAL (A+B)		624,141,353,561.93	616,817,611,039.83	629,799,775,511.76	650,344,964,893.00	627,584,853,464.00	0.17

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tren pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0.17%, di mana Belanja Operasi memiliki rata-rata pertumbuhan positif, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan negatif. Belanja Operasi juga mengalami tren fluktuatif cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan 0.89%. Hal ini disebabkan sebagian komponen pembentuk memiliki rata-rata pertumbuhan positif, di mana komponen Belanja Tambahan Penghasilan PNS tumbuh sebesar 21.31%, Belanja Bantuan sebesar 12.15%, dan Belanja Bagi Hasil tumbuh sebesar 2.48%.

Secara kontras, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 mengalami tren turun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -65.72%. Kondisi ini disebabkan oleh kedua komponen pembentuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan negatif, di mana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tumbuh sebesar -47.79% dan Pembayaran Pokok Utang tumbuh sebesar -79.29%.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun sebelumnya atau periode sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa akan datang dan untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan salah satunya dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil.

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan APBD ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis sumber penutup defisit riil.

Tabel 3. 15 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	1,062,706,591,682.34	1,133,794,210,279.88	1,080,878,465,095.45	1,167,522,159,073.75	1,054,826,116,417.48
	Dikurangi:					
2	Belanja Daerah	865,855,781,556.81	955,154,161,982.32	932,367,675,475.91	937,570,732,576.75	869,923,658,395.80
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22,110,023,030.22	6,659,835,060.99	4,843,147,273.90	0.00	6,016,118,185.00
A	Defisit Riil	174,740,787,095.31	171,980,213,236.57	143,667,642,345.64	229,951,426,497.00	178,886,339,836.68
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	141,523,424,283.68	121,851,798,620.25	87,947,135,465.89	124,360,762,262.89	114,771,775,499.57
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,029,770,339.00	10,779,522,587.00	12,998,925,226.00	6,770,706,298.00	13,765,641,353.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi	151,553,194,622.68	132,631,321,207.25	100,946,060,691.89	131,131,468,560.89	128,537,416,852.57

	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
(A-B)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	23,187,592,472.63	39,348,892,029.32	42,721,581,653.75	98,819,957,936.11	50,348,922,984.11

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Hasil perhitungan analisis penutup defisit tersebut menunjukkan bahwa sumber penutup defisit keuangan daerah Kabupaten Dairi masih berasal dari SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat;
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;

6. Pemantapan kinerja organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang mudah, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal;
7. Peningkatan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, akademisi/peneliti, aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam rangka peningkatan dan penagihan pajak daerah;

Strategi dan kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk penanganan dampak Covid-19, antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya;
- 4) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Dalam konteks perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, proyeksi APBD ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu, *pertama*, pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh daerah di Indonesia dan salah satunya adalah Kabupaten Dairi; *kedua*, APBD tahun 2021 dan RKPD tahun 2022 sebagai *baseline*; dan *ketiga*, perkembangan perekonomian makro dan mikro daerah serta kebijakan keuangan pemerintah pusat. Adapun hasil proyeksi APBD Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2024

No.	Uraian	APBD 2021	RKPD 2022	Prediksi 2023	Prediksi 2024
4	Pendapatan Daerah	1,158,649,492,000.00	1,143,517,552,000.00	1,160,105,600,500.00	1,162,266,727,852.50
4.1	Pendapatan Asli Daerah	86,204,500,000.00	80,780,460,000.00	87,372,688,000.00	89,244,455,250.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19,405,000,000.00	20,005,000,000.00	20,405,100,000.00	20,813,202,000.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3,939,500,000.00	3,946,460,000.00	4,143,783,000.00	4,350,972,150.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,000,000,000.00	7,500,000,000.00	11,275,000,000.00	11,500,500,000.00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	51,860,000,000.00	49,329,000,000.00	51,548,805,000.00	52,579,781,100.00
4.2	Pendapatan Transfer	1,014,860,892,000.00	1,014,860,892,000.00	1,014,860,892,000.00	1,014,860,892,000.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	988,912,236,000.00	988,912,236,000.00	988,912,236,000.00	988,912,236,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,948,656,000.00	25,948,656,000.00	25,948,656,000.00	25,948,656,000.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	57,584,100,000.00	47,876,200,000.00	57,872,020,500.00	58,161,380,602.50
4.3.1	Pendapatan Hibah	57,584,100,000.00	47,876,200,000.00	57,872,020,500.00	58,161,380,602.50
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-
5	BELANJA	1,208,249,492,000.00	1,194,539,656,873.00	1,189,984,589,793.69	1,192,468,544,644.30
5.1	Belanja Operasi	814,316,616,556.00	795,525,507,995.12	797,032,583,881.11	798,542,958,716.94
5.1.1	Belanja Pegawai	505,300,996,168.00	477,833,052,000.00	479,027,634,630.00	480,225,203,716.58
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300,988,314,423.00	312,493,255,995.12	312,805,749,251.11	313,118,555,000.36
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	6,802,305,965.00	5,099,200,000.00	5,099,200,000.00	5,099,200,000.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,225,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
5.2	Belanja Modal	195,879,275,444.00	200,845,483,877.89	201,347,597,587.58	201,850,966,581.55

No.	Uraian	APBD 2021	RKPD 2022	Prediksi 2023	Prediksi 2024
5.3	Belanja Tak Terduga	6,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	192,053,600,000.00	188,168,665,000.00	189,104,408,325.00	189,574,619,345.81
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1,200,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	190,853,600,000.00	187,148,665,000.00	188,084,408,325.00	188,554,619,345.81
	Surplus / (Defisit)	(49,600,000,000.00)	(137.791752.475,00)	(29,878,989,293.69)	(30,201,816,791.80)
6	PEMBIAYAAN	49,600,000,000.00	42,000,000,000.00	29,878,989,293.69	30,201,816,791.80
6.1	Penerimaan Daerah	52,600,000,000.00	45,000,000,000.00	32,878,989,293.69	33,201,816,791.80
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	52,600,000,000.00	45,000,000,000.00	32,878,989,293.69	33,201,816,791.80
6.1.2	Penerimaan Piutang Daerah				
6.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya				
6.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi				
6.2	Pengeluaran Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
6.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.4	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-

Proyeksi Pendapatan daerah Kabupaten Dairi mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,10 persen. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya penurunan pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar -1.31 persen, sementara pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan. Dari ketiga komponen pendapatan daerah, PAD mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa APBD ke depan lebih difokuskan pada optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan PAD.

Dari sisi belanja daerah, proyeksi belanja daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,08 persen. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan belanja daerah yang signifikan pada tahun 2021. Selain itu, pertumbuhan belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan umum keuangan daerah yang bersifat ekspansif agar mampu mendorong dan menstimulasi kondisi perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.

Implikasi dari tingginya pertumbuhan belanja daerah ini membuat APBD Kabupaten Dairi mengalami defisit sampai akhir periode. Defisit APBD yang paling tinggi berada pada tahun 2022. Defisit ini akan ditutup oleh penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan hanya dikeluarkan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembahasan sub bab ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya dalam 1 (satu) periode ke depan. Dalam menghitung kapasitas riil kemampuan daerah, sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu terkait proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat. Berikut ini adalah proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Dairi.

3.3.2.1 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib penting untuk dilakukan sebagai bahan untuk menghitung kerangka pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah selama 1 (satu)

periode ke depan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja yang bersifat wajib adalah alokasi anggaran atau belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib Kabupaten Dairi.

Tabel 3. 17 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Dairi Tahun 2023-2024

No	Uraian	Tahun		Prediksi 2023	Prediksi 2024
		APBD 2021	RKPD 2022		
A	Belanja Mengikat	550,449,243,331.45	524,707,040,399.27	525,948,497,017.67	527,192,986,966.63
1	Belanja Pegawai	505,300,996,168.00	477,833,052,000.00	479,027,634,630.00	480,225,203,716.58
2	Belanja Barang dan Jasa	45,148,247,163.45	46,873,988,399.27	46,920,862,387.67	46,967,783,250.05
B	Belanja Wajib	111,231,301,213.14	116,265,488,447.00	122,169,386,313.50	124,013,221,737.15
1	Pendidikan	8,543,619,182.50	8,993,283,350.00	9,667,779,601.25	9,909,474,091.28
2	Kesehatan	42,075,521,850.00	44,290,023,000.00	46,504,524,150.00	47,434,614,633.00
3	Infrastruktur	55,309,283,052.48	57,613,836,513.00	60,494,528,338.65	61,099,473,622.04
4	Pendidikan dan Pelatihan ASN	2,981,232,128.16	3,011,345,584.00	3,086,629,223.60	3,117,495,515.84
5	Pengawasan	2,321,645,000.00	2,357,000,000.00	2,415,925,000.00	2,452,163,875.00
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-
C	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT		661,680,544,544.59	640,972,528,846.27	648,117,883,331.17	651,206,208,703.78

Rata-rata pertumbuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, yaitu sebesar 1,18 persen. Kenaikkan ini terjadi seiring adanya kenaikan

pendapatan daerah. Sementara itu, pertumbuhan belanja yang bersifat wajib lebih tinggi dibandingkan dengan belanja bersifat mengikat.

3.3.2.2 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah yang akan dimiliki untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Dairi untuk 1 (satu) periode ke depan. Dengan kata lain, kapasitas riil kemampuan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan mengurangkan penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Penggunaan komponen pengeluaran wajib dan mengikat dalam perhitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun hasil proyeksi kapasitas riil keuangan daerah kabupaten Dairi, adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 18 Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2024

No	Uraian	Tahun			
		APBD 2021	RKPD 2022	Prediksi 2023	Prediksi 2024
1	Pendapatan	1,158,649,492,000.00	1,056,747,904,398.00	1,160,105,600,500.00	1,162,266,727,852.50
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	52,600,000,000.00	45,000,000,000.00	32,878,989,293.69	33,201,816,791.80
	Total Penerimaan	1,211,249,492,000.00	1,101,747,904,398.00	1,192,984,589,793.69	1,195,468,544,644.30
	Dikurangi				
4	Belanja Tak Terduga	6,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
5	Belanja Bantuan Keuangan Desa	190,853,600,000.00	187,148,665,000.00	188,084,408,325.00	188,554,619,345.81
6	Belanja Bagi Hasil	1,200,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
7	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
8	Pengeluaran Wajib dan Mengikat	661,680,544,544.59	640,972,528,846.27	648,117,883,331.17	651,206,208,703.78
	Kapasitas Riil Kemampuan	348,515,347,455.41	259,606,710,551.73	350,262,298,137.52	349,187,716,594.70

No	Uraian	Tahun			
		APBD 2021	RKPD 2022	Prediksi 2023	Prediksi 2024
	Keuangan				

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dairi dalam 1 (satu) periode ke depan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yaitu sebesar - 0,62 persen. Hal ini disebabkan karena *trend* pendapatan daerah mengalami fluktuatif. Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah ke depan di luar pengeluaran wajib dan mengikat.

3.3.2.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan rencana penggunaan kapasitas riil kapasitas keuangan daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) prioritas penggunaan anggaran. Berikut ini adalah tabel rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 3. 19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun			
	APBD 2021	RKPD 2022	Prediksi 2023	Prediksi 2024
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,211,249,492,000.00	1,101,747,904,398.00	1,192,984,589,793.69	1,195,468,544,644.30
Prioritas I	661,680,544,544.59	640,972,528,846.27	648,117,883,331.17	651,206,208,703.78
Prioritas II	348,515,347,455.41	259,606,710,551.73	350,262,298,137.52	349,187,716,594.70
Priorita III	201,053,600,000.00	201,168,665,000.00	194,604,408,325.00	195,074,619,345.81

Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Dairi ke depan di bagi ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk membiayai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar.
2. Prioritas II, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Prioritas III, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi anggaran untuk prioritas II dan III tidak termasuk dalam membiayai anggaran pada komponen prioritas I yang terkait dengan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang alokasinya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan dalam kebijakan alokasi anggaran.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab IV RPJMD mencakup identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Penyusunan Bab IV dilakukan melalui analisis atas gambaran umum kondisi daerah yang berisi tentang capaian kinerja pembangunan pada Bab II. Adanya permasalahan pembangunan kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis bersifat yang membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Dairi. Elaborasi antara permasalahan pembangunan di setiap urusan dengan lingkungan strategis menjadi dasar bagi perumusan isu strategis Kabupaten Dairi yang harus diintervensi pada periode pembangunan 2019-2024. Selanjutnya, permasalahan dan isu strategis ini akan menjadi bahan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (*das sein*) dengan kenyataan/realitas (*das sollen*). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah permasalahan pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sub bab ini membahas 2 (dua) hal, yaitu permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Dairi dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap permasalahan pokok pembangunan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

4.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan

Permasalahan pokok pembangunan merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah tersebut diselesaikan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Hasil identifikasi permasalahan pokok pembangunan ini didasarkan pada telaah bab II tentang gambaran umum daerah. Adapun masalah pokok Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, maka pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Saat ini, kualitas pendidikan di Kabupaten Dairi masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat akses pendidikan maupun pemerataan tenaga pendidik.

Dari sisi akses pendidikan, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Harapan Lama Sekolah. Pada tahun 2020, APK jenjang pendidikan SMP Kabupaten Dairi mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,53 persen, sementara APK jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan terutama jenjang pendidikan SMP masih belum optimal. Hal yang sama juga terjadi di indikator harapan lama sekolah yang masih belum optimal juga. Dari tahun 2016 hingga 2020, harapan lama sekolah Kabupaten Dairi masih lebih kecil dibandingkan harapan lama sekolah Provinsi Sumatra Utara. Meskipun demikian, harapan lama sekolah Kabupaten Dairi mengalami *trend* peningkatan dari tahun ke tahun.

Permasalahan pendidikan lain juga berkaitan dengan belum meratanya tenaga pendidik, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan pendistribusian tenaga pendidikan. Pada tahun 2020, persentase guru SD yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan hanya sebesar 64,98 persen, sementara persentase guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan hanya sebesar 87 persen. Selain tenaga pendidik, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada seluruh sekolah. Kondisi tersebut mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, selain sektor pendidikan. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan saat ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan strategis di sektor kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2020, AKI mengalami peningkatan sebanyak 93 kasus dari tahun sebelumnya hanya 74 kasus;
- b) Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2020, AKB sebanyak 6 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya;
- c) Masih tingginya kasus gizi buruk. Pada tahun 2020, jumlah balita gizi buruk sebanyak 111 balita, sementara pada tahun 2019 hanya 7 balita;
- d) Belum optimalnya angka harapan hidup Kabupaten Dairi. Dari tahun 2016 hingga 2020, angka harapan hidup Kabupaten Dairi masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatra Utara.

3. Tingginya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Dairi mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Dairi meningkat sebesar 0,34 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi salah satunya dipengaruhi oleh Covid-19.

Selain persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan

sebenarnya 0,02 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

4. Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Infrasruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak bagi pengembangan sebuah wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik, penataan wilayah perumahan dan permukiman, penanganan sanitasi dan ketersediaan air bersih serta kelengkapan fasilitas publik dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Namun, seiring dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan kebijakan tata ruang wilayah, penataan jaringan infrastruktur belum dapat diwujudkan secara baik. Kondisi infrastruktur yang belum berkualitas ini ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kondisi jalan mantap yang belum memadai. Pada tahun 2020, kondisi jalan mantap tidak mencapai target, yaitu hanya 56,51 persen dari target 56,75 persen. Selain ketercapaian target, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa masih ada jalan kabupaten dalam kondisi rusak maupun sedang.
- b) Masih terdapatnya kondisi jembatan yang rusak, dimana sampai tahun 2020 kondisi jembatan dalam kondisi baik masih sebesar 90,12 persen dari target 91,21 persen;
- c) Belum optimalnya layanan air bersih. Pada tahun 2020, cakupan layanan air bersih telah menjangkau 221.134 jiwa dari total penduduk sebanyak 284.304 jiwa. Dengan kata lain, ketersediaan akses air bersih baru mencapai 77,78 persen;
- d) Tingkat kerusakan jaringan irigasi masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar jaringan irigasi berada pada punggung perbukitan. Meskipun demikian, irigasi dalam kondisi baik sudah mencapai 91,31 persen pada tahun 2020;
- e) Masih terdapatnya kawasan kumuh. Pada tahun 2020, capaian realisasi penanganan kawasan kumuh sebesar 29,56 persen dari target 58,42 persen atau capaiannya hanya 50,60 persen.

5. Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Belum optimalnya pelayanan publik dapat dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM Kabupaten Dairi mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu

sebesar 5,71 persen. Selain itu, selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai IKM paling tinggi berada pada tahun 2018, sedangkan nilai IKM paling rendah berada pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan optimal.

Kondisi riil IKM dapat dilihat di beberapa sektor publik yang langsung menyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti sektor kependudukan dan sektor penanaman modal yang masih belum optimal. Di sektor kependudukan masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan, misalnya realisasi kepemilikan Kartu Keluarga (KK) hanya 96 persen. Sementara dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah masih rendahnya penerbitan perizinan sesuai dengan SOP, yaitu masih terdapat sekitar 14,72 persen ijin penanaman modal yang belum dapat diterbitkan sesuai dengan SOP.

6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Pada tahun 2020, lahan kritis Kabupaten Dairi, seluas 12,41 Ha, meningkat dari tahun sebelumnya hanya 10 Ha.

Pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah volume sampah yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Kabupaten Dairi juga berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana mengamankan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing

Tabel 4. 1 Permasalahan Pokok Pembangunan di Kabupaten Dairi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan		
Belum optimalnya Kualitas Pendidikan	Belum optimalnya akses dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Minimnya sarana penunjang kegiatan pengajaran
		Ketersediaan ruang kelas yang perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya partisipasi pendidikan PAUD
		Belum optimalnya pemberian bantuan/apresiasi bagi siswa SD-SMP dari keluarga kurang mampu
	Belum meratanya kualitas tenaga pendidik	Minimnya ketersediaan guru yang kompeten diberbagai jenjang pendidikan
		Banyaknya guru yang belum tersertifikasi
		Banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan (S1/D4)
		Belum meratanya distribusi guru hingga ke pedalaman
	Belum optimalnya kualitas kegiatan belajar mengajar	Belum optimalnya penerapan kurikulum 2013
		Minimnya penguasaan terhadap teknologi Pendidikan
		Banyaknya sekolah yang belum terakreditasi A
		Belum optimalnya pendidikan kesetaraan (termasuk pengentasan buta huruf)
Kesehatan		
Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	Tingginya komplikasi saat kehamilan
		Tingginya komplikasi saat persalinan
		Tingginya komplikasi pasca persalinan/Nifas
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Rendahnya kunjungan K1 dan K4
		Kurangnya nutrisi saat kehamilan
		Tingginya bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
		Tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Tingginya angka bayi gizi buruk	
		Rendahnya Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
	Rendahnya kualitas kesehatan balita	Tingginya angka balita gizi buruk	
		Tingginya angka stunting	
		Tingginya angka kesakitan balita	
		Rendahnya Imunisasi Dasar Lengkap	
	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Minimnya pengetahuan tentang PHBS	
		Tingginya angka kesakitan penyakit menular	
		Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular	
		Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan	
		Rendahnya status gizi masyarakat	
	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan	Kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan	
		Rendahnya kompetensi tenaga kesehatan	
	Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Kurang meratanya distribusi prasarana kesehatan	
		Kurangnya pemeliharaan prasarana pelayanan kesehatan	
		Kurang meratanya distribusi sarana pelayanan kesehatan	
		Kurangnya pemeliharaan dan perawatan alat kesehatan	
		Belum optimalnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	
	Kemiskinan		
	Masih tingginya tingkat kemiskinan	Masih tingginya angka pengangguran	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja			
Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja			
Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan			
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan pelatihan dan bantuan yang diberikan			
Penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum memadai		Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	
		Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri (tergantung)
	Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan	Tidak meratanya akses pendidikan dan distribusi guru Kurangnya ekonomi keluarga peserta didik
	Terbatasnya akses kesehatan	Pelayanan tenaga medis Sarana dan Prasarana kesehatan
Infrastruktur Wilayah		
Belum optimalnya akses dan kualitas jaringan jalan	Akses jalur darat belum optimal	Belum optimalnya ketersediaan jalur strategis kabupaten yang menghubungkan pusat pertumbuhan
		Belum optimalnya pemerataan kualitas jaringan jalan
		Ketersediaan jembatan belum optimal
	Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat terbangun	Perlu ditingkatkannya pengawasan dan kualitas konstruksi jalan dan jembatan Masih belum maksimalnya rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten
Belum optimalnya akses terhadap air bersih	Belum optimalnya pemanfaatan air bersih	Inventarisasi sumber air bersih yang layak
		Belum optimalnya jaringan perpipaan air bersih
		Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
		Masih rendahnya kapasitas pengelola (masyarakat)
Belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni	Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum maksimal
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana belum memadai
		Ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan belum memadai
		Perlu ditingkatkannya kualitas rumah tidak layak/ rusak
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
	Belum optimalnya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan Publik		
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan masih terbatas
		Perlu ditingkatkannya optimalisasi pelayanan adminduk sampai tingkat desa
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP
		Belum optimalnya pengelolaan data potensi investasi daerah
Lingkungan Hidup		
Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup daerah	Masih rendahnya cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup	Perencanaan lingkungan hidup yang sesuai regulasi belum optimal
		Pengawasan sumber-sumber pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Belum optimalnya penanganan lahan kritis
		Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum optimal
	Belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan limbah B3	Pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil Limbah B3 masih rendah
	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
		Belum adanya pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
		Pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat belum optimal

4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan capaian kinerja. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan realisasi kinerja 2019 dan 2020 RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)	Tercapai (=)		
		Melampaui (>)			
Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan				
1.1	Angka Partisipatif Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	>	a. Belum optimalnya akses dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan b. Belum meratanya kualitas tenaga pendidik c. Belum optimalnya kualitas kegiatan belajar mengajar	a. Sarana penunjang kegiatan pengajaran; b. Ketersediaan guru yang kompeten diberbagai jenjang pendidikan c. Kualifikasi Pendidikan guru (S1/D4) d. Pemerataan distribusi guru hingga ke pedalaman e. Optimalisasi penerapan kurikulum 2013 f. Penguasaan terhadap teknologi Pendidikan	
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	>			
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	<			
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	<			
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	<			
1.6	Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	>			
1.7	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	>			
1.8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	>			
1.9	Angka Putus Sekolah SD/MI	>			
1.10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	>			
1.11	Angka Kelulusan SD/MI	=			
1.12	Angka Kelulusan SMP/MTs	=			
2	Kesehatan				
2.1	Angka Kematian Bayi	<	a. Rendahnya kualitas kesehatan ibu; b. Rendahnya kualitas kesehatan bayi; c. Rendahnya kualitas kesehatan Balita; d. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat; e. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan; f. Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	a. Manajemen resiko komplikasi kehamilan; b. Manajemen resiko komplikasi persalinan; c. Manajemen resiko komplikasi pasca persalinan/Nifas; d. Optimalisasi kunjungan K1 dan K4; e. Optimalisasi nutrisi saat kehamilan; f. Optimalisasi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); g. Peningkatan pengetahuan tentang PHBS; h. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; i. Peningkatan status gizi masyarakat; j. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan; k. Optimalisasi	
2.2	Angka Kematian Ibu	>			
2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	<			
2.4	Usia Harapan Hidup	>			
2.5	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	<			
2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	>			
2.7	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<			
2.8	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	>			
2.9	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<			
2.10	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan	<			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)		
		Tercapai (=)		
Melampaui (>)				
	Kesehatan Sesuai Standar			kompetensi tenaga kesehatan;
2.11	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	<		
2.12	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	<		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	>	a. Belum optimalnya pemerataan kualitas jaringan jalan;	a. Pengelolaan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan jalan;
3.2	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	>	b. Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;	b. Pengawasan mutu pelaksanaan pembangunan.
3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang bersih	>	c. Belum optimalnya pengawasan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung;	
3.4	Capaian Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB	=	d. Belum optimalnya penanganan daerah irigasi (DI);	
3.5	Persentase Luas Irigasi dalam Keadaan Baik	>	e. Semakin tingginya potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang yang telah ditetapkan.	
3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	>	f. Perlunya pengembangan data base jalan/jembatan infrastruktur dasar.	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	>	a. Perlu ditingkatkannya kualitas rumah tidak layak/ rusak	a. Dukungan/Fasilitasi Pemerintah dalam menjalankan kewenangan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	>	b. Ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan belum memadai;	b. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman;
4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	>	c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan korban bencana belum maksimal;	c. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)	Tercapai (=)		
		Melampaui (>)			
				d. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh; e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehat perumahan.	atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	=		a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Perda b. Belum optimalnya kapasitas anggota Satpol-PP	a. Peningkatan penegakan Perda b. Peningkatan kerjasama antar lembaga
6	Sosial				
6.1	Tingkat Kemiskinan			a. Rendahnya pendapatan PPKS; b. Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial	a. Optimalisasi pendampingan kelompok rentan; b. Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/ pengembangan kewirausahaan; c. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan sosial; d. Ketersediaan pekerja sosial yang kompeten
6.2	PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				
6.3	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Menerima Jaminan Sosial				
6.4	Presentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat				
6.5	Terbentuknya desa tangguh bencana				
6.6	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana				
6.7	Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana				
Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja				
1.1	Pencari kerja yang ditempatkan	=		a. Rendahnya penyebaran informasi lowongan kerja; b. Belum optimalnya kompetensi Angkatan kerja c. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pelatihan kerja	a. peningkatan penyebaran infoamsi lowongan kerja b. peningkatan kompetensi angkatan kerja sesuai pasar kerja c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
1.2	Besaran pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi/masyarakat/ teknologi tepat guna/kewirausahaan				
1.3	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun				
1.4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)			
		Tercapai (=)			
		Melampaui (>)			
1.5	Tingkat pengangguran terbuka	<			
1.6	Jumlah angkatan kerja	<			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan			a. Masih rendahnya kualitas perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi;	a. Optimalisasi Peran lembaga pengarusutamaan gender;
2.2	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mendapat Pelayanan Komprehensif			b. Peran perempuan dalam organisasi publik belum optimal;	b. Optimalisasi Peran organisasi perempuan dalam peningkatan partisipasi publik;
				c. Belum optimalnya pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak	c. Kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak;
					d. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media dalam upaya perlindungan perempuan dan anak;
					e. Ketersediaan fasilitas penanganan dan pendampingan
3	Pangan				
3.1	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100)	<		a. Belum optimalnya diversifikasi pangan	a. peningkatan diversifikasi pangan
3.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	>		b. Belum optimalnya data PPH	b. penguatan data PPH
3.3	Persentase Konsumsi Protein Per kapita	>		c. Belum optimalnya ketersediaan pangan	c. peningkatan akses pangan
				d. Belum optimalnya distribusi pangan	
4	Pertanahan				
4.1	Status Kepemilikan Tanah yang Diterbitkan Menurut Kecamatan	<		a. Kurangnya fasilitasi penyelesaian kasus kepemilikan tanah;	a. Sistem yang terintegrasi terkait kebutuhan pertanahan dengan rencana pemanfaatan ruang.
				b. Kurangnya koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset tanah untuk pembangunan.	
5	Lingkungan Hidup				
5.1	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani	=		a. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.	a. Penanaman bibit tanaman teduh dan tanaman hias di perkotaan.
5.2	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah di Kecamatan	>		b. Berkurangnya sumber-sumber air.	b. Penyediaan dokumen status lingkungan hidup
5.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap	>			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		
		Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
	Pelaksanaan Dokumen Lingkungan		c. Adanya lahan kritis. d. Masih rendahnya cakupan pengendalian pencemaran udara.	sebagai basis penentuan kebijakan lingkungan hidup.
5.4	Penurunan Luas Lahan Kritis	<	e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase wilayah perkotaan f. Minimnya pemahaman aparaturnya tentang mekanisme kerja di bidang kebersihan dan pasar. g. Belum optimalnya cakupan pelayanan Rasio Ketersediaan Petugas Kebersihan. h. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah i. Masih kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu 3R.	c. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup. d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30%.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	>	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan b. Belum optimalnya cakupan pelayanan dokumen pencatatan sipil	a. Peningkatan pelayanan kependudukan b. Optimalisasi pelayanan adminduk sampai tingkat desa
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Peningkatan klasifikasi desa dari desa swadaya menjadi desa swakarya	<	a. Belum optimalnya kapasitas aparaturnya pemerintah desa b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	a. Optimalisasi pengelolaan potensi desa b. Optimalisasi tata kelola pemerintahan desa
7.2	Terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	<	c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa d. Belum optimalnya pengelolaan aset desa	c. Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	>	a. Belum optimalnya akses pelayanan dan kualitas Keluarga	a. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung program Keluarga
8.2	Cakupan pasangan usia	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)		
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
	subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)		Berencana (KB)	<p>Berencana;</p> <p>b. Optimalisasi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi tepat sasaran;</p> <p>c. Kapasitas dan ketersediaan SDM Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);</p> <p>d. Pemahaman dan kepedulian masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;</p> <p>e. Optimalisasi mitra kerja keluarga berencana</p>
9	Perhubungan			
9.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	=	<p>a. Masih banyaknya ruas jalan yang belum mempunyai trayek;</p> <p>b. Terminal belum berfungsi secara optimal;</p> <p>c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;</p> <p>d. Manajemen Lalu Lintas yang belum optimal.</p> <p>e. Masih rendahnya fasilitas kelengkapan jalan;</p> <p>f. Belum optimalnya pemanfaatan dermaga pelabuhan Silalahi.</p>	<p>a. Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata;</p> <p>b. Pengontrolan sistem pelayanan angkutan umum dan barang;</p> <p>c. Pembangunan sarana dan prasarana;</p> <p>d. Optimalisasi kawasan terminal penumpang.</p>
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	=	<p>a. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi</p> <p>b. Belum optimalnya pembinaan KIM</p> <p>c. Belum optimalnya SDM pengelola informasi publik</p>	<p>a. Penyusunan master plan sistem pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>b. Optimalisasi tata kelola TIK</p> <p>c. Pembuatan data center yang terintegrasi</p>
11	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah			
11.1	Jumlah Koperasi Aktif	<	a. Masih rendahnya	a. Akses Permodalan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)			
		Tercapai (=)	Melampaui (>)		
11.2	Jumlah Usaha Mikro	<		<p>keterkaitan usaha (kemitraan) koperasi dengan usaha lainnya.</p> <p>b. Masih rendahnya animo masyarakat untuk ikut dalam Koperasi.</p> <p>c. Belum optimalnya pengendalian koperasi yang tidak sesuai dengan aturannya.</p> <p>d. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).</p> <p>e. Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat.</p> <p>f. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.</p> <p>g. Belum optimalnya kerjasama usaha (kemitraan), baik <i>backward linkages</i> maupun <i>forward linkages</i>.</p>	<p>UMKM</p> <p>b. Peningkatan kapasitas Sosial <i>Marketing</i> dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>c. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM</p> <p>d. Peningkatan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam berwirausaha</p>
12 Penanaman Modal					
12.1	Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP	>		<p>a. Belum terjaminnya jaringan internet dalam pengoperasian aplikasi perizinan secara elektronik terintegrasi (OSS).</p> <p>b. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.</p> <p>c. Masih rendahnya cakupan pelayanan informasi peluang investasi.</p> <p>d. Belum optimalnya daya serap tenaga kerja dari realisasi penanaman modal.</p>	<p>a. Peningkatan Standar Pelayanan Administrasi atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif.</p> <p>b. Regulasi yang berpihak pada investor.</p> <p>c. Peningkatan dan pembenahan infrastruktur terkait dengan penanaman modal.</p> <p>d. Tersedianya data dan informasi investasi secara elektronik yang lengkap dan mudah diakses.</p>
12.2	Persentase peningkatan investasi	=			
12.3	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	=			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)		
		Tercapai (=)		
Melampaui (>)				
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Terfasilitasinya pelayanan kepemudaan	<	a. Rendahnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; b. Kurangnya pembinaan organisasi pemuda	a. Partisipasi dalam kompetisi daerah; b. Ketersediaan sarana dan pra sarana pelatihan; c. Kerjasama dengan mitra pembangunan;
13.2	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	=		
13.3	Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga	=		
14	Statistik			
14.1	Jumlah Ketersediaan Data Statistik Daerah	<	a. Belum optimalnya SDM statistik b. Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral	a. Optimalisasi kualitas data statistik daerah dan sektoral
15	Persandian			
			Belum optimalnya SDM persandian	Ketersediaan sarana dan prasarana serta pelatihan
16	Kebudayaan			
16.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan Yang Terfasilitasi	=	a. Rendahnya komitmen masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan	a. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya; b. Optimalisasi identifikasi sumber-sumber budaya; c. Promosi kebudayaan
16.2	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	<		
16.3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	=		
17	Perpustakaan			
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		a. Terbatasnya jangkauan dan kualitas pelayanan perpustakaan	a. Kapasitas SDM pengelola perpustakaan; b. Variasi koleksi buku; c. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan
18	Kearsipan			
18.1	Jumlah Arsip Yang Dilestarikan	=	a. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengelola arsip daerah b. Belum optimalnya sarana dan prasarana arsip daerah c. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan arsip daerah berbasis digital	a. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah b. Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)			
		Tercapai (=)			
		Melampaui (>)			
Urusan Pilihan					
1	Perikanan dan Kelautan				
1.1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			a. Adanya peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pelarangan keramba jaring apung b. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pengembangan perikanan c. Masih tingginya harga pakan dan bibit d. Pengelolaan ikan (darat) masih secara tradisional	a. Peningkatan pemberdayaan kelompok nelayan b. peningkatan fasilitasi dan bantuan pakan dan bibit perikanan c. peningkatan pengelolaan perikanan secara modern
	- Ikan Gabus	>			
	- Ikan Mujair	>			
	- Ikan Nila	>			
	- Ikan Bilih	>			
	- Ikan Mas	>			
	- Ikan Lainnya	>			
1.2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				
	- Ikan Nila	>			
	- Ikan Mas	<			
	- Ikan Lele	>			
2	Perindustrian				
2.1	Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis	<		a. Kurangnya daya saing pemasaran produk IKM. b. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pelaku IKM untuk menciptakan produk berkualitas. c. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan industri/perusahaan. d. Masih rendahnya kemitraan usaha industri/perusahaan.	a. Regulasi terkait industri agribisnis. b. Riset dan inovasi terkait industri agribisnis c. Tersedianya bahan baku untuk memperlancar proses produksi.
2.2	Jumlah Produk IKM bidang agribisnis Yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi	<			
3	Pariwisata				
3.1	Jumlah Objek Wisata Yang berkembang Yang Ditangani	<		a. Belum memadainya infrastruktur di obyek wisata yang sudah ada. b. Minimnya event pariwisata. c. Masih terdapat obyek wisata yang belum dikelola. d. Minimnya usaha di bidang pariwisata.	a. Penataan obyek wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung b. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah pusat. c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan di sekitar lokasi wisata d. Peningkatan sarana promosi wisata melalui event dan pameran untuk mengundang wisatawan lokal
3.2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	<			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)			
		Tercapai (=)	Melampaui (>)		
					dan mancanegara
4	Pertanian				
4.1	Produktivitas Tanaman Pangan			a. Belum adanya konsisten petani dalam menanam komoditas pertanian b. Masih tingginya losing produk dan losing time sebelum panen maupun pasca panen c. Belum optimalnya kelembagaan petani d. Belum optimalnya produksi peternakan; e. Belum optimalnya penyuluhan pertanian f. Belum optimalnya pengendalian bencana pertanian	a. Modernisasi sektor pertanian b. peningkatan jaringan irigasi c. peningkatan pemasaran hasil pertanian d. Peningkatan kelembagaan pertanian; e. peningkatan pengendalian bencana pertanian
	- Padi Sawah	<			
	- Padi Ladang	>			
	- Jagung	<			
4.2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura				
	- Jeruk Manis	<			
	- Kentang	<			
	- Cabe merah	>			
	- Durian	>			
4.3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat				
	- Kopi	>			
4.4	Jumlah Populasi Peternakan				
	- Babi	<			
	- Ayam	<			
4.5	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak				
	- Sapi	>			
	- Kerbau	>			
	- Babi	>			
	- Kambing	>			
	- Ayam	>			
	- Anjing	>			
4.6	Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang				
	- Ternak Besar	=			
	- Ternak Kecil	na			
4.7	Jumlah Kelompok Tani Yang Terfasilitasi	=			
4.8	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	=			
5	Perdagangan				
5.1	Tersediannya dokumen Informasi Harga Dan Ketersediaan Barang Pokok (33 jenis)	<		a. Belum optimalnya kerja sama antara pasar dengan kelompok binaan pemerintah daerah. b. Belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok pedagang/usaha informal. c. Penggunaan alat UTTP belum memenuhi standar kemetrolgian. d. Belum adanya neraca perdagangan. e. Belum optimalnya	a. Peningkatan kualitas produk unggulan daerah. b. Optimalisasi akses dan distribusi barang pokok (33 jenis)
5.2	Jumlah Produk bidang agribisnis Yang Dipromosikan	=			
5.3	Jumlah Alat UTTP Yang Ditera/Tera ulang	<			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		
		Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
			<p>cakupan pelayanan informasi harga, komoditas, dan jenis produk.</p> <p>f. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar.</p> <p>g. Masih minimnya fasilitasi distribusi produk-produk masyarakat.</p>	
Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum				
1	Perencanaan			
1.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	<	a. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan	a. Peningkatan sinergi antar dokumen perencanaan
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan	<	b. Belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan	b. Penyusunan indikator kinerja smart-s
1.3	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan	<	c. Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan (SIPD)	c. Pembuatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
1.4	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	<	d. Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pengendalian dan evaluasi	
1.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten	<		
2	Keuangan			
2.1	Opini laporan keuangan	=	a. Belum optimalnya kualitas data base pajak	a. Optimalisasi koordinasi pelayanan pajak daerah
2.2	Penyusunan APBD tepat waktu	=	b. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah	b. Optimalisasi penerapan teknologi dalam pelayanan pajak dan retribusi
2.3	LKPD Tepat Waktu	=	c. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam menilai dan memeriksa data perpajakan	c. Penerapan reward dan punishment
2.4	Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam KUA/PPAS	=	d. Belum optimalnya sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak	d. Pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi
2.5	Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	<	e. Belum optimalnya pengelolaan retribusi daerah	
2.6	Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah	<		
3	Kepegawaian			
3.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	=	a. Belum optimalnya sistem merit dalam penempatan jabatan pegawai b. Belum optimalnya disiplin pegawai	a. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)		
		Tercapai (=)		
Melampaui (>)				
4	Pendidikan dan Pelatihan			
4.1	Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	=	a. Masih rendahnya jabatan yang terisi sesuai kompetensi b. Belum optimalnya <i>database</i> terkait kompetensi pegawai	a. Peningkatan kompetensi pegawai
4.2	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	=		
4.3	Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	=		
5	Penelitian dan Pengembangan			
5.1	Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbang daerah yang dihasilkan	=	a. Belum optimalnya SDM Litbang (JF belum ada) b. Belum optimalnya kerjasama dalam mendukung inovasi daerah c. Belum optimalnya penerapan IPTEK bagi masyarakat	a. Penerapan inovasi daerah b. Optimalisasi dukungan pelaksanaan litbang
6	Pengawasan			
6.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	>	a. Masih rendahnya komitmen OPD maupun desa dalam menjalankan TLHP b. Belum optimalnya pendampingan APIP c. Belum adanya perangkat daerah yang menjalankan zona integritas d. Masih adanya temuan berulang	a. Optimalisasi sistem pengawasan daerah b. Optimalisasi integrasi sistem pengaduan masyarakat
6.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	<		
7	Sekretariat DPRD			
7.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	>	a. Belum optimalnya penggunaan TIK dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD b. Belum efektifnya fasilitasi administrasi dan anggaran untuk menopang kinerja DPRD	a. Pelayanan kesekretariatan kepada DPRD yang efektif
8	Sekretariat Daerah			
8.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<	a. Belum optimalnya pendampingan kepada OPD dalam penerapan SAKIP b. Belum optimalnya perumusan kebijakan daerah c. Belum optimalnya efektifitas pengendalian kebijakan daerah d. Belum optimalnya	a. Pengendalian penerapan reformasi birokrasi
8.2	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah	=		
8.3	Rekomendasi LKPJ	=		
8.4	Nilai LPPD	>		
8.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	<		
8.6	Persentase Paket kegiatan Yang	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)	Tercapai (=)		
		Melampaui (>)			
	Dilelangkan Secara Elektronik			kapasitas BUMD e. Indikator belum berorientasi kepada <i>outcome</i> f. Belum terpenuhinya target SPM	
8.7	Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan	=			
8.8	Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi	<			
8.9	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	=			
8.10	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan PDAM Tirta Nciho Menurut Wilayah Teknis	<			
8.11	Persentase Kios Yang Dikelola PD Pasar yang Ditempati Pedagang	<			
8.12	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	=			
9	Kewilayahan – Kecamatan				
9.1				a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan	a. Peningkatan kapasitas desa/kelurahan
10	Kesatuan Bangsa dan Politik				
10.1	Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<		a. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan b. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	Peningkatan pembinaan ormas dan orpol
10.2	Jumlah tokoh agama/adat/ masyarakat yang mengikuti kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<			
10.3	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik	<			

4.3. Isu Strategis

4.3.1. Isu Nasional

Arahan Presiden Republik Indonesia yang menjadi dasar bagi perumusan RPJMN 2020-2024 merupakan isu strategis nasional yang harus direspon oleh perencanaan pembangunan daerah. Lima arahan Presiden sebagai berikut:

- 1. Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.

- 2. Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3. Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
- 4. Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5. Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arahan Presiden tersebut kemudian diinstrumentasikan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

Tabel 4. 3 Agenda Pembangunan Nasional di dalam RPJMN tahun 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Uraian
1	<p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:</p> <p>Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan • Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2	<p>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:</p> <p>Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah • Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang • Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah • Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata • Peningkatan daya dukung lingkungan

No	Agenda Pembangunan	Uraian
	pemanfaatan ruang	serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
3	<p>Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing:</p> <p>Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan • Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial • Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dan daya saing
4	<p>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:</p> <p>Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila • Pemajuan dan pelestarian kebudayaan • Moderasi beragama • Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5	<p>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:</p> <p>bertujuan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar • Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Pembangunan infrastruktur perkotaan • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6	<p>Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim:</p> <p>Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim • Pembangunan rendah karbon

No	Agenda Pembangunan	Uraian
	dan perubahan iklim	
7	<p>Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik:</p> <p>Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas • Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan • Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber • Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri • Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan

4.3.2. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 merumuskan isu-isu strategis pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agraris, pariwisata, reformasi birokrasi, sosial kemasyarakatan dan olahraga serta infrastruktur yang berwawasan lingkungan yang ditindaklanjuti melalui prioritas pembangunan dan kegiatan strategis daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan

Melalui kegiatan strategis daerah meliputi pembangunan unit sekolah baru, pemberian bantuan operasional untuk siswa kurang mampu, pembangunan unit pojok baca, pembangunan kampung beasiswa, kerjasama sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha industri, penguatan materi kearifan lokal, penguatan pembelajaran jarak jauh pada tenaga pendidik dan gubernur/wakil gubernur menyapa melalui kelas motivasi.

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Melalui kegiatan strategis daerah meliputi penanganan covid-19 yang komprehensif, pembangunan dan rehabilitasi RS Haji Medan, pemberian makanan tambahan dalam rangka penurunan stunting, peningkatan kapasitas layanan kesehatan RSJ Prof. DR. M. Ildrem, kampanye gerakan masyarakat sehat, pemberian jaminan

kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan mobil medis/bus kesehatan.

3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan

Melalui kegiatan strategis daerah meliputi fasilitasi kerjasama 10 sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri, fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM, pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi, dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.

4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

Melalui kegiatan strategis daerah meliputi mempertahankan pencapaian opini WTP dan dukungan terhadap laporan keuangan kabupaten/kota, peningkatan capaian nilai SAKIP dan peningkatan capaian indeks pelayanan publik.

5. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga

Melalui kegiatan strategis daerah meliputi penguatan pusat wawasan kebangsaan, pembangunan 300 kampung bersih narkoba, channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan, gubernur/wakil gubernur mendengar melalui dialog dengan masyarakat, pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial, peningkatan pembinaan atlet, pemberian suplemen tambahan bagi atlet, pembangunan sports centre, persiapan tuan rumah PON XXI Tahun 2024 dan dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

6. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris

Melalui kegiatan strategis daerah meliputi peningkatan produksi daging sapi, peningkatan produksi daging kambing/domba, mempertahankan produksi cabe merah, bawang putih dan bawang merah dan peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya.

7. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

Meliputi kegiatan strategis daerah meliputi penanganan jalan strategis provinsi, fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang, optimalisasi jaringan irigasi, pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir, pembangunan sistem penyediaan air minum, pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca dan penyediaan

energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin.

8. Peningkatan daya saing dan sektor pariwisata

Meliputi kegiatan strategis daerah meliputi penatan kawasan wisata dan cagar budaya, dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba, digitalisasi promosi pariwisata dan pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.

4.3.3. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Dairi tahun 2005-2025

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi dirumuskan berbasis analisis lingkungan eksternal dan internal sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Analisis Isu Strategis Lingkungan Internal dan Eksternal RPJPD Kabupaten Dairi tahun 2005-2025

Kelemahan	Ancaman
Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas, disiplin serta kinerja aparatur pemerintah dan masyarakat masih kurang memadai • Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang ramping dan gesit menuju keperintahan yang baik (<i>good governance</i>) belum memadai • Sistem Informasi Manajemen kegiatan antar instansi belum memadai • Belum lengkapnya sarana dan prasarana dan jumlahnya masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dalam mendukung tugastugas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan • Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan belum memadai • Kesempatan pendidikan gratis untuk wajib belajar 12 tahun belum memadai • Pemanfaatan teknologi dan informasi masih rendah • Rendahnya PAD dan Pendapatan Perkapita • Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan • Rendahnya minat investasi masyarakat • Belum dimanfaatkannya hasil penelitian/studi • Manajemen usaha tani yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonomi nasional yang belum mantap • Harga komoditas pertanian yang fluktuatif • Komoditas Hasil Bumi/Pertanian sejenis dari daerah lain (kompetitor) • Budaya luar yang masuk • Kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi yang kurang mendukung terhadap kebijakan daerah • Wilayah yang rentan terhadap bencana alam (longsor) • Masih adanya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada

Kelemahan	Ancaman
Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya kelangkaan pupuk • Sistem pertanian organik yang belum begitu dikembangkan • Pemberdayaan masyarakat belum ditingkatkan • Pemberian layanan dasar air minum belum optimal • Administrasi kependudukan yang <i>single</i> belum memadai • Alas hak tanah belum tertib • Antisipasi bahaya teroris belum ada 	

4.3.4. Telaah RTRW Kabupaten Dairi 2013-2033

Penyusunan RPJMD berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Dairi 2013-2033, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Dairi yang sejahtera berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi untuk “Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah” melalui:
 - a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Lintas Tengah dan sarana pendukungnya.
 - b. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Poros Provinsi.
 - c. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Nasional.
 - d. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Provinsi.

- e. Peningkatan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jaringan jalan Kabupaten.
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan di PKL dan PPK
2. Strategi untuk mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, melalui:
- a. Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b. Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.
 - c. Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d. Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.
 - e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri.
3. Strategi yang diperlukan untuk “Meningkatkan fungsi Kota Sidikalang sebagai PKW dan Kota Sumbul sebagai PKLp” melalui;
- a. Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal
 - c. Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.
4. Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka ”Memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung, dan lain-lainnya” melalui:

- a. Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat
 - c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - d. Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung, terutama hutan lindung.
 - e. Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk enclave dan relokasi.
5. Strategi dalam rangka "Mendorong peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan" melalui :
- a. Peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
 - b. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c. Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi
 - d. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
6. Strategi yang perlu diterapkan dalam kerangka "Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan" melalui:
- a. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).

- b. Peningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- c. Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- d. Pembangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- e. Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman.
- f. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Dairi terdiri atas:

1. Rencana pengembangan sistem perkotaan yang terdiri atas beberapa bagian, antara lain adalah PKW, PKLp, PPK, dan PPL. Penjelasan lebih lengkap tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 4. 5 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Kabupaten Dairi

No.	Fungsi Hierarki	Kota	Fungsi Utama
1.	PKW	Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten ▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pusat Perdagangan dan Jasa Regional ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi Barang dan Jasa ▪ Terminal Regional Tipe B ▪ Pusat Pelayanan Sosial ▪ Pusat Kawasan Agropolitan ▪ Transit ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pendidikan ▪ Pusat Pelayanan Pariwisata
2.	PKLp	Sumbul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian dan

No.	Fungsi Hierarki	Kota	Fungsi Utama
			Perkebunan ▪ Permukiman Perkotaan
		Tigalingga	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Peternakan
		Parongil	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Kawasan Pertambangan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Permukiman Perkotaan
3	PPK	Bunturaja	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan
4	PPL	Kutabuluh	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan
		Silalahi	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Pariwisata ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi Perikanan ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Permukiman
		Berampu	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian
		Sigalingging	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Lae Parira	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Perikanan
		Silumboyah	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Tiga Baru	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Sopobutar	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan
		Gunung Sitember	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
			▪

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi

2. Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
 - a. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - b. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
 - c. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;

- e. Rencana pengembangan prasarana persampahan;
- f. Rencana sistem pengelolaan air minum;
- g. Rencana sistem jaringan drainase;
- h. Rencana sistem jaringan air limbah

Rencana pola ruang Kabupaten Dairi terdiri atas:

a) Kawasan hutan lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Dairi ditetapkan seluas 60.463,89 Ha yang tersebar di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Punggapungga, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan resapan air di Kabupaten Dairi seluas 51.317 Ha yang tersebar di kawasan hutan Delleng Cengkeh, Sibuatan Selatan, Adian Tinjoan, dan Dairi.

c) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Dairi terdiri dari sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.

d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Kawasan suaka alam di Kabupaten Dairi berada di kawasan hutan Adian Tinjoan (Register 67) terletak di sebelah Selatan Kabupaten Dairi dan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Luas kawasan hutan Adian Tinjoan di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih 7.912 Ha sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11.868 Ha berada di Kabupaten Pakpak Bharat.

e) Kawasan lindung geologi

Kriteria kawasan lindung geologi, yaitu adanya patahan/sesar sehingga berpotensi timbul gempa tektonik. Kabupaten Dairi termasuk wilayah rawan terhadap bencana alam geologi yang didasari letaknya berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Dairi dan patahan/sesar sungai Lae Renun Kecamatan yang berpotensi terhadap bencana alam geologi meliputi Kecamatan Sidikalang, Parbuluan, Sumbul, Silima Punggapungga, Siempat

Nempu, Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

f) Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Dairi berupa gempa bumi, tanah longsor, amblesan dan angin puting beliung.

Kriteria kawasan rawan bencana alam, yaitu:

- Adanya patahan/sesar sehingga berpotensi timbul gempa tektonik
- Kawasan rawan tanah longsor, ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- Merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung

Berdasarkan karakter topografi, jenis tanah, hidrologi, pola drainase alami dan klimatologi, bahwa delineasi kawasan lindung bencana alam seluas kurang lebih 29.229,12 Ha atau sekitar 14,69% dari luas Kabupaten Dairi, terletak di seluruh kecamatan.

g) Ruang terbuka hijau

RTH di Kabupaten Dairi diarahkan di Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo), Sumbul, Tigalingga dan Parongil berupa taman kota dan kawasan pertanian.

Dari segi pemanfaatannya, RTH berfungsi sebagai penyejuk dan elemen estetika lingkungan serta sebagian dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga baik pada skala lingkungan maupun kota, disamping itu ada juga yang bersifat privat seperti jalur hijau dan fasilitas taman yang ada disepanjang perumahan (pola perumahan linier) disepanjang jalan atau yang ada di tempat rekreasi, seperti Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo.

Rencana pola ruang kawasan budidaya;

a) Kawasan peruntukan hutan produksi

Penetapan Hutan Produksi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Unsur hutan produksi antara lain:

- Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Dairi seluas 3.902,83 (tiga ribu sembilan ratus dua koma delapan puluh tiga) hektar atau sekitar 6,64% dari luas Kabupaten Dairi, terletak di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan dan Siempat Nempu Hulu.

- Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Dairi seluas 50.901,31 (lima puluh ribu sembilan ratus satu koma tiga puluh satu) hektar, terletak di Kecamatan Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Punggapungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

b) Kawasan peruntukan hutan rakyat

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih sekitar 12.439 Ha yang tersebar di 15 kecamatan.

c) Kawasan peruntukan pertanian

- Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Dairi adalah sawah dengan luas kurang lebih 10.225 Ha atau setara dengan sekitar 5,31% dari luas wilayah Kabupaten Dairi yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Sitember.

- Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 28.839 Ha tersebar diseluruh kecamatan.

d) Kawasan peruntukan perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Luas kawasan peruntukan perkebunan seluas 32.779 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

e) Kawasan peruntukan peternakan

Pemenuhan kebutuhan ternak di Kabupaten Dairi pengembangan peternakan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan, utamanya jenis komoditas ternak kerbau, lembu, kambing, babi dan ayam. Hal ini terkait dengan kearifan lokal di Kabupaten Dairi, dimana dalam pemenuhan jenis ternak sebagaimana disebutkan diatas digunakan

sebagai media dalam hubungan sosial kemasyarakatan/adat istiadat.

f) Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan.

g) Kawasan peruntukan pertambangan

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir. Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.

h) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan pengembangan sebagai berikut:

- Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain;
- Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain;
- Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain;

- Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyam-anyaman dan lain-lain.

i) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari pariwisata alam dan pariwisata budaya.

- Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

- Pariwisata Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi.

j) Kawasan peruntukan permukiman

- Permukiman Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Dairi dikembangkan di kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

- Permukiman Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Mengingat desa-desa di Kabupaten Dairi jumlahnya relatif banyak, mencapai 169 desa/kelurahan, maka sistem perdesaan diarahkan sebagai berikut:

- Sistem dusun memiliki pusat dusun;
- Terdapat satu pusat bagi setiap desa;
- Beberapa desa memiliki pusat pelayanan/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
- Perdesaan yang lokasinya strategis, langsung berhubungan dengan ibukota kecamatan (IKK);
- Perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan, diorientasikan berhubungan langsung dengan pusat kota

4.3.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi

Hasil penjaringan isu pada kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kabupaten Dairi. Isu pembangunan tersebut terutama terkait masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 6 isu di Kabupaten Dairi yang akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tabel di bawah ini menunjukkan capaian TPB dan isu strategis dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi.

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Indikator TPB Kabupaten Dairi Berdasarkan Pencapaian

No.	INDIKATOR	Nomor Indikator	Pencapaian		
			Tercapai	Belum Tercapai	Belum Ada Data
	Dimensi Sosial (68 indikator)				
	TPB 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.2.1*		√	
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.3.1.(a)		√	
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1.3.1.(b)	√		
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1.3.1.(c)		√	
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1.3.1.(d)		√	

No.	INDIKATOR	Nomor Indikator	Pencapaian		
			Tercapai	Belum Tercapai	Belum Ada Data
6	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.5.1*	√		
7	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1.5.1.(a)		√	
8	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1.5.1.(b)	√		
9	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1.5.1.(c)		√	
10	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	1.5.1.(d)		√	
11	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1.5.2.(a)	√		
12	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1.5.3*	√		
13	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	1.a.1*		√	
14	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	1.a.2*	√		
JUMLAH			6	8	0
	TPB 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.1.1.(a)	√		
2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2.1.2*		√	
3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	2.1.2.(a)	√		
4	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	2.2.2.(a)	√		
5	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	2.2.2.(b)	√		
6	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	2.2.2.(c)		√	
7	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	2.3.1*	√		
JUMLAH			5	2	0
	TPB 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
1	Angka Kematian Ibu (AKI).	3.1.1*		√	
2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	3.1.2*		√	
3	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.1*		√	
4	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.2*		√	

No.	INDIKATOR	Nomor Indikator	Pencapaian		
			Tercapai	Belum Tercapai	Belum Ada Data
5	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.2.(a)	√		
6	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	3.2.2.(b)	√		
7	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	3.3.1.(a)	√		
8	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	3.3.2.(a)	√		
9	Kejadian Malaria per 1000 orang.	3.3.3*	√		
10	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	3.3.4.(a)		√	
11	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	3.3.5*		√	
12	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	3.3.5.(b)		√	
13	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	3.4.1.(a)	√		
14	Prevalensi tekanan darah tinggi.	3.4.1.(b)		√	
15	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	3.4.1.(c)		√	
16	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	3.4.2*			√
17	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	3.4.2.(a)		√	
18	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	3.5.1.(e)			√
19	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	3.5.2*			√
20	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	3.7.1*	√		
21	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	3.7.1.(a)	√		
22	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	3.7.1.(b)	√		
23	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	3.7.2*	√		
24	Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2.(a)		√	
25	Unmet need pelayanan kesehatan.	3.8.1.(a)	√		
26	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.8.2*		√	
27	Proporsi kematian akibat keracunan.	3.9.3.(a)	√		
28	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	3.a.1*	√		
29	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	3.b.1.(a)		√	
30	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	3.c.1*	√		
JUMLAH			14	13	3
TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua					

No.	INDIKATOR	Nomor Indikator	Pencapaian		
			Tercapai	Belum Tercapai	Belum Ada Data
1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	4.1.1*		√	
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	4.1.1.(d)	√		
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	4.1.1.(e)		√	
4	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	4.1.1.(g)	√		
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	4.2.2.(a)		√	
6	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	4.4.1*		√	
7	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	4.6.1.(a)	√		
8	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	4.a.1*	√		
9	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	4.c.1*	√		
JUMLAH			5	4	0
TPB 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	5.1.1*	√		
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	5.2.1*	√		
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	5.2.2.(a)	√		
4	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	5.3.1*	√		
5	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	5.3.1.(a)	√		
6	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	5.5.2*		√	
7	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	5.6.1*		√	
8	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	5.6.1.(a)		√	
JUMLAH			5	3	0
Jumlah Total Pencapaian Indikator			35	30	3
%			51,5	44,1	4,4
Dimensi Lingkungan (30 Indikator)					

No.	INDIKATOR	Nomor Indikator	Pencapaian		
			Tercapai	Belum Tercapai	Belum Ada Data
	TPB 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	6.1.1.(a)		√	
2	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	6.1.1.(b)		√	
3	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	6.1.1.(c)		√	
4	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	6.2.1.(a)	√		
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	6.2.1.(b)		√	
6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	6.2.1.(c)	√		
7	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	6.2.1.(d)	√		
8	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	6.2.1.(e)	√		
9	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	6.2.1.(f)	√		
10	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	6.3.1.(a)	√		
11	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	6.3.1.(b)		√	
12	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	6.4.1.(b)	√		
13	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	6.5.1.(a)		√	
14	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	6.5.1.(g)	√		
JUMLAH			8	6	0
	Dimensi: Ekonomi (32 indikator)				
	TPB 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				
	TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	8.1.1*		√	
2	PDB per kapita.	8.1.1.(a)		√	
3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	8.2.1*		√	
4	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	8.3.1*	√		
5	Persentase tenaga kerja formal.	8.3.1.(a)	√		

No.	INDIKATOR	Nomor Indikator	Pencapaian		
			Tercapai	Belum Tercapai	Belum Ada Data
6	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	8.3.1.(b)	√		
7	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	8.3.1.(c)	√		
8	Upah rata-rata per jam pekerja.	8.5.1*	√		
9	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	8.5.2*		√	
10	Tingkat setengah pengangguran.	8.5.2.(a)			√
11	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	8.6.1*	√		
12	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	8.9.1*		√	
13	Jumlah wisatawan mancanegara.	8.9.1.(a)		√	
14	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	8.9.2*		√	
15	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	8.10.1*	√		
16	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	8.10.1.(a)	√		
17	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	8.10.1.(b)	√		
JUMLAH	9	7	1		
	TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi				
1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	9.2.1*	√		
2	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	9.2.1.(a)		√	
3	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	9.2.2*		√	
4	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	9.3.1*			√
5	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	9.3.2*			√
6	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	9.5.1*		√	
7	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	9.c.1.(a)	√		
JUMLAH	2	3	2		
	TPB 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara				
1	Koefisien Gini.	10.1.1*	√		
2	Jumlah Desa Mandiri.	10.1.1.(d)		√	
3	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	10.2.1*			√
JUMLAH	1	1	1		

	TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	11.1.1.(a)	√		
2	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	11.3.2.(b)		√	
3	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	11.5.1*		√	
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	11.5.1.(a)		√	
5	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	11.5.1.(c)		√	
6	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	11.6.1.(a)		√	
7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	11.b.2*	√		
JUMLAH			2	5	0
	TPB 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				
1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	12.4.2.(a)		√	
2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	12.5.1.(a)		√	
3	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	12.6.1.(a)		√	
4	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	12.7.1.(a)		√	
5	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	12.8.1.(a)		√	
JUMLAH			0	5	0
	TPB 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	13.1.1*		√	
JUMLAH			0	1	0
	TPB 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
	TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati				
1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	15.1.1.(a)		√	
2	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	15.3.1.(a)		√	
3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	15.9.1.(a)		√	
JUMLAH			0	3	0
Jumlah Total Pencapaian Indikator			10	20	0
%			33,3	66,7	0
Dimensi Hukum dan Tata Kelola (12 indikator)					

	TPB 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
1	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	16.1.4*		√	
2	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	16.2.1.(a)		√	
3	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	16.2.1.(b)	√		
4	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	16.2.3.(a)	√		
5	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	16.6.1*		√	
6	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(a)	√		
7	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(b)	√		
8	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	16.6.1.(c)	√		
9	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	16.7.1.(b)		√	
10	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	16.9.1*		√	
11	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	16.9.1.(a)		√	
12	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	16.10.2.(c)		√	
JUMLAH			5	7	0
Jumlah Total Pencapaian Indikator			5	7	0
%			41,7	58,3	0
	TPB 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan				
1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	17.1.1*	√		
2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	17.1.1.(a)		√	
3	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	17.1.2*		√	
4	Proporsi individu yang menggunakan internet.	17.8.1*		√	

5	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	17.17.1.(a)		√	
JUMLAH			1	4	0
Jumlah Total Pencapaian Indikator			13	15	4
%			40,6	46,9	12,5

Tabel 4. 7 Rumusan Isu Strategis KLHS P-RPJMD Kabupaten Dairi

No.	ISU STRATEGIS KLHS P-RPJMD	INDIKATOR	Nomor Indikator
1	Kesejahteraan masyarakat	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.2.1*
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1.3.1.(d)
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1.3.1.(c)
		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	1.a.1*
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2.1.2*
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	2.2.2.(c)
		Laju pertumbuhan PDB per kapita.	8.1.1*
		PDB per kapita.	8.1.1.(a)
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	8.2.1*
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	8.5.2*
		Tingkat setengah pengangguran.	8.5.2.(a)
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	8.9.1*
		Jumlah wisatawan mancanegara.	8.9.1.(a)
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	8.9.2*
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	9.2.1.(a)
		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	9.2.2*
		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	9.3.1*
		Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	9.3.2*
		Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	9.5.1*
Jumlah Indikator:			19
2	Infrastruktur Dasar Daerah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	6.1.1.(a)
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	6.1.1.(b)
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	6.1.1.(c)

No.	ISU STRATEGIS KLHS P-RPJMD	INDIKATOR	Nomor Indikator
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	6.2.1.(b)
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	6.3.1.(b)
		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	6.5.1.(a)
		Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	11.3.2.(b)
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	11.5.1*
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	11.5.1.(a)
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	11.5.1.(c)
Jumlah Indikator:			19
3	Kebencanaan	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1.5.1.(a)
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1.5.1.(c)
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	11.5.1*
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	11.5.1.(a)
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	11.5.1.(c)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	13.1.1*
Jumlah Indikator:			6
4	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	11.6.1.(a)
		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	12.4.2.(a)
		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	12.5.1.(a)
		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	12.7.1.(a)
		Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	15.1.1.(a)
		Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	15.3.1.(a)
		Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	15.9.1.(a)
Jumlah Indikator:			7
5	Sistem Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.3.1.(a)
		Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	1.5.1.(d)
		Angka Kematian Ibu (AKI).	3.1.1*
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	3.1.2*
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.1*
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.2*

No.	ISU STRATEGIS KLHS P-RPJMD	INDIKATOR	Nomor Indikator
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	3.3.4.(a)
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	3.3.5*
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	3.4.1.(b)
		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	3.4.1.(c)
		Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	3.4.2*
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	3.4.2.(a)
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	3.5.1.(e)
		Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	3.5.2*
		Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2.(a)
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	3.3.5.(b)
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.8.2*
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	3.b.1.(a)
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	5.6.1*
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	5.6.1.(a)
		Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	4.1.1*
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	4.1.1.(e)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	4.2.2.(a)
		Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	4.4.1*
Jumlah Indikator:			24
6	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	5.5.2*
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	12.6.1.(a)
		Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	11.3.2.(b)
		Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	12.8.1.(a)
		Jumlah Desa Mandiri.	10.1.1.(d)
		Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	10.2.1*
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	17.1.1.(a)
		Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	17.1.2*
		Proporsi individu yang menggunakan	17.8.1*

No.	ISU STRATEGIS KLHS P-RPJMD	INDIKATOR	Nomor Indikator
		internet.	
		Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	17.17.1.(a)
		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	16.1.4*
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	16.2.1.(a)
		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	16.6.1*
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	16.7.1.(b)
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	16.9.1*
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	16.9.1.(a)
		Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	16.10.2.(c)
Jumlah Indikator:			17

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi

4.3.6. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Dairi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi dan isu kebijakan pembangunan nasional, regional Provinsi Sumatera Utara, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu KLHS Perubahan RPJMD, serta kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), maka dirumuskan isu strategis perencanaan jangka menengah Kabupaten Dairi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, sebagai berikut.

4.3.6.1. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini di daerah, salah satunya di Kabupaten Dairi. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,34 persen atau meningkat menjadi 8,04 pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya hanya sebesar 7,7 persen. Kondisi ini membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi belum optimal.

Salah satu penyebab kenaikan tingkat kemiskinan adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dairi. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Dairi mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen atau 1,75 persen dari tahun sebelumnya hanya 1,59 persen. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat juga turut berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020, tingkat konsumsi energi per kapita masyarakat menurun menjadi 20,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar 69,13 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat konsumsi protein per kapita yang mengalami penurunan, yaitu menjadi 59,37 persen dari tahun sebelumnya sebesar 81,75 persen. Hal ini disebabkan oleh akses dan distribusi pangan yang belum berjalan optimal.

4.3.6.2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pemetaan permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan Kabupaten Dairi telah menggambarkan berbagai permasalahan pokok. Selain itu, telaah beberapa dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menunjukkan isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi di bidang sumber daya manusia. Secara umum, pemetaan masalah pada rumpun sumber daya manusia, sosial, dan budaya menunjukkan belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Dairi relatif dibandingkan daerah sekitar dan rata-rata provinsi.

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Dairi yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu; kualitas pendidikan yang belum optimal. Kualitas pendidikan tersebut salah satunya ditandai dengan belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Dairi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Dairi juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi. Kelompok rentan di Kabupaten Dairi juga masih didominasi oleh golongan penduduk miskin dan perempuan rentan ekonomi dan sosial. Sedangkan kinerja pemberdayaan perempuan juga masih relatif belum optimal dengan turunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 68,7 pada tahun 2018 menjadi 61,14 pada tahun 2020. Berbagai persoalan tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, isu terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia

ini layak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi.

4.3.6.3. Pemulihan Ekonomi Daerah

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Dairi, pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan atau agenda prioritas yang dapat meningkatkan permintaan eksternal bagi daerah lain yang mengalami defisit ekonomi dan meningkatkan permintaan internal bagi daerah lain yang mengalami surplus ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi ekonomi.

Beberapa agenda prioritas daerah yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: 1) penyediaan data dan informasi pembangunan dan statistik sektoral sebagai bahan analisis perumusan kebijakan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2) penumbuhkembangan industri kreatif Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk memperluas peluang dan kesempatan kerja, 3) penumbuhkembangan inkubator bisnis dan *start up* di berbagai sektor usaha UMK diharapkan mendorong tumbuhnya sektor dan pelaku ekonomi (wirausahawan) baru melalui berbagai kegiatan termasuk pembangunan *Dairi Techno Park*, 4) peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan 5) perbaikan dan peningkatan kinerja PD Pasar dan peningkatan cakupan layanan usaha dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda-agenda prioritas tersebut menjadi penentu bagi percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Dairi.

4.3.6.4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi

Isu strategis rumpun tata kelola Kabupaten Dairi yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah dengan isu strategis rumpun tata kelola di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Misalnya terkait agenda pengendalian reformasi birokrasi yang belum

optimal yang dapat dilihat dari belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik, belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi. Padahal, pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, realitas lapangan di Kabupaten Dairi menunjukkan belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Beberapa realitas lapangan di atas perlu direspon dalam pembangunan mendatang dengan sistem manajemen kinerja yang baik antara kepala daerah dengan perangkat daerah, pembangunan sistem pelayanan publik yang responsif serta pelaksanaan survei kepuasan layanan secara reguler. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mengikuti tuntutan perkembangan jaman dan kebijakan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik.

4.3.6.5. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pembangunan Kabupaten Dairi memasuki periode akhir dari RPJPD Kabupaten Dairi. Hal ini berarti tujuan akhir pembangunan jangka panjang kabupaten harus dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dairi yang dimuat dalam RPJPD. Perwujudan sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap dalam RPJMD memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi yang terpadu. Mengingat pembangunan infrastruktur wilayah seringkali

membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah mencakup peningkatan konektivitas baik kualitas jalan dan jembatan maupun pengelolaan perhubungan; pemenuhan standar cakupan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah meliputi: jalan, pengairan, bangunan gedung, air bersih, sanitasi, penataan ruang, dan PSU di kawasan permukiman; meningkatkan layanan angkutan umum penumpang dan barang untuk melayani masyarakat dan dukungan terhadap sektor usaha; sertaantisipasi potensi ancaman (rawan) bencana pada beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Peningkatan konektivitas ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana logistik serta melayani potensi kunjungan wisatawan ke pusat-pusat wisata Dairi dalam rangka mendukung status Dairi sebagai salah satu destinasi strategis wisata nasional. Selanjutnya terkait dengan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah, hal tersebut menjadi pemegang peranan penting sebagai salah satu faktor dalam pencapaian target pembangunan baik Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah fokus dalam penanganan stunting, dimana sektor air bersih, sanitasi dan perumahan menjadi bagian dalam memerangi stunting. Dorongan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang meliputi bidang perumahan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS).

Selanjutnya terkait dengan penataan ruang, pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang daerah, baik struktur maupun pola ruang. Pengelolaan sistem perencanaan ruang yang terpadu juga akan dapat memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dampak negatif pembangunan yang mengarah kepada perusakan lingkungan akan dapat ditekan. Jika persoalan ini dapat diatasi maka keberlanjutan dan kesinambungan untuk kehidupan masyarakat Dairi pada masa yang akan datang akan dapat terjaga.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab V memuat tentang rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Dairi pada periode 2019-2024. Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tidak lepas dari amanat RPJPD Kabupaten Dairi 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi adalah “**Terwujudnya masyarakat Dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan**”. Adapun sasaran pokok dalam periode keempat pembangunan jangka panjang tersebut yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin mandiri, semakin makmur, sejahtera, berkeadilan dan maju;
2. Hasil pembangunan terus diperkuat atau semakin dimantapkan;
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan ukuran-ukuran yang nyata;
4. Semakin mantapnya lembaga-lembaga dan pranata ekonomi daerah.

5.1. Visi

Rumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah:

**MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN
MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN**

Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi tersebut menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>“Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”</p>	Dairi Unggul	<ul style="list-style-type: none"> • UNGGUL dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (<i>value added</i>) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. • UNGGUL dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. • UNGGUL dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	Menyejahterakan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.
	Harmoni Keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> • Keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

5.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Dairi dibutuhkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Dairi memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

MISI 1:

Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian

Pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Dairi. Hampir 72% masyarakat Kabupaten Dairi bekerja di sektor pertanian. Analisis LQ (*Location Quotient*) terhadap PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri bahkan sudah berpotensi untuk di ekspor.

Untuk meningkatkan daya saing kekuatan ekonomi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu mengembangkan sektor pertanian terutama subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memiliki beberapa keunggulan dan juga mensinergikan dengan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi (angkutan) agar dihasilkan *multiplier effect* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dengan tidak mengabaikan sektor-sektor ekonomi lainnya sekaligus untuk menciptakan kondisi ketahanan pangan yang mantap di Kabupaten Dairi.

Konsep pengembangan AGRI UNGGUL menjadi basis pengembangan sektor pertanian yang sinergis dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan komoditas pertanian unggulan Kabupaten Dairi. Pengelolaan sistem pertanian terpadu yang cerdas dan modern (*smart farming*) dari hulu ke hilir mencakup: peningkatan kuantitas dan kualitas budi daya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang didukung: SDM petani yang memadai, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna *alsintan* (alat dan

mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian) yang berkualitas, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan bahan baku pertanian menjadi bahan jadi atau setengah jadi bagi komoditas perdagangan, serta penciptaan iklim pemasaran yang baik sesuai kebutuhan pasar.

Secara operasional, Misi 1 diaplikasikan dalam pembangunan sektor pertanian yang disinergikan dengan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas mencakup budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani sekaligus memantapkan kondisi ketahanan pangan daerah. Sektor perindustrian dan perdagangan tidak hanya diarahkan untuk mendukung industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, namun juga mendukung bidang tenaga kerja sehingga mampu memberikan nilai tambah dan membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru.

MISI 2:

Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing

Keberadaan manusia sebagai sumber daya yang sangat penting akan memberi nilai tambah dalam pembangunan karena dengan kemampuannya dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dan kualitas memegang peranan penting dalam proses keberhasilan pembangunan daerah. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas pembangunan daerah. Kuantitas SDM tanpa disertai kualitas yang memadai akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Kualitas SDM adalah mutu SDM yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non fisik.

Sejalan dengan defenisi pembangunan daerah yakni pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), maka pembangunan SDM merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan mutu SDM sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Ketersediaan SDM yang unggul merupakan modal utama dalam percepatan pengembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Misi ke-2 merupakan upaya manajemen SDM Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kualitas unggul SDM masyarakatnya untuk mencapai kondisi masyarakat Kabupaten Dairi yang memiliki derajat kesehatan masyarakat yang baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berbudaya serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga memiliki daya saing dalam produktivitas pembangunan Daerah.

Secara operasional Misi 2 diaplikasikan dalam pembangunan sektor kesehatan, pembangunan sektor pendidikan, dan sektor pembangunan lainnya yang terkait dalam upaya penyiapan dan pembentukan SDM masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul, yakni pelayanan perpustakaan, untuk membentuk SDM yang sehat dan cerdas. Selanjutnya untuk mewujudkan SDM yang produktif, memiliki daya saing dan karakter budaya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari pengendalian penduduk, pembinaan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembinaan kepemudaan, pembinaan olahraga dan pembinaan kebudayaan. Terhadap kelompok masyarakat marginal dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan pembinaan tersendiri dengan meningkatkan cakupan layanan pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat.

MISI 3:

Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah

Kondisi geografis Dairi memberikan keuntungan dan peluang bagi Kabupaten Dairi untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan yang diharapkan dapat didayagunakan dengan tetap mempertimbangkan

faktor kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tidak semata-mata menjadi sumber daya potensial tetapi menjadi sumber daya riil yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Selain sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan pembangunan daerah, potensi pengembangan kepariwisataan yang didukung penguatan usaha ekonomi kreatif dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu fokus sektor pembangunan yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terkait dengan peluang yang muncul seiring perkembangan pembangunan kepariwisataan baik secara global maupun nasional. Kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan kepariwisataan melalui kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba memberikan peluang dan harapan bagi Kabupaten Dairi untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Dairi.

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Dairi diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional KSPN Danau Toba dengan fokus pengembangan di Tao Silalahi Kecamatan Silahisabungan, sekaligus mengoptimalkan keberadaan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Dairi, yakni: Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo dan Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-cike dalam satu kawasan strategis destinasi wisata, meliputi Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, dan Kecamatan Silahisabungan serta wilayah pendukung Kecamatan Sidikalang.

Pengembangan sektor kepariwisataan yang dikembangkan dalam konsep kepariwisataan berbasis keindahan alam (*nature*), pertanian (*agro*), dan budaya (*culture*) diharapkan akan memberikan *multiplier effects* yang mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat dengan penempatan sektor pariwisata sebagai “*lokomotif penarik gerbong*” peningkatan produksi dan pemasaran pada sektor pada sektor pembangunan lainnya, seperti: industri kerajinan, pengolahan produk pertanian, kreatifitas seni dan budaya, kuliner/usaha rumah makan, usaha penginapan, usaha transportasi serta usaha ekonomi kreatif lainnya mulai dari level usaha mikro, kecil sampai menengah.

Pembangunan sektor pariwisata juga dikembangkan dalam konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diwujudkan dalam konsep pengembangan Desa Wisata yang mengintegrasikan pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), pariwisata berbasis ekowisata (*eco tourism*), pariwisata berbasis komunitas (*community-based*), pariwisata berbasis budaya (*culture-based*), pariwisata berbasis *good tourism governance*, pariwisata berbasis *supply and demand* serta pengembangan wilayah/kawasan (*regional development*). Untuk mendukung pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dibutuhkan adanya upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat di desa dan peran dari pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Secara operasional, Misi 3 diaplikasikan dalam upaya peningkatan produksi pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan untuk menjamin pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diaplikasikan dalam pembangunan lingkungan hidup. Berbagai upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD) dengan kemudahan penanaman modal dan perizinan.

MISI 4:

Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya *government* menjadi *governance* yang menekankan kepada kolaborasi, keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*) menjadi pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi titik sentral perhatian segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi.

Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam administrasi dan manajemen pemerintahan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tata kerja dan

pengawasannya. Dalam rangka mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan teknologi informatika untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Setiap instansi pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan keberadaan teknologi informasi yang ada dalam menyampaikan informasi dan melakukan diseminasi kepada warga masyarakat. Disisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memberikan rasa aman dengan situasi ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara dengan baik serta akses yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, mendapatkan informasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan media dan teknologi informatika secara terbuka dan interaktif.

Secara operasional, Misi ke-4 diaplikasikan pada upaya mewujudkan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, organisasi, administrasi umum, fungsi pendukung DPRD, fungsi pengawasan, serta fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, antara lain: perencanaan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pelayanan publik dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI 5:

Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika

Peningkatan kualitas infrastuktur daerah khususnya infrastruktur prioritas tidak boleh dikesampingkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya sehingga pembangunan infrastruktur bukan sebatas kegiatan pengalokasian dana untuk bangunan fisik belaka, tetapi harus memperhatikan berbagai aspek seperti daya tahan, daya dukung, daya guna dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur perlu ditempatkan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan dan peluang membuka lapangan kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sejak proses perencanaan sampai kepada pengendalian pembangunan infrastruktur daerah perlu dilakukan sesuai NSPK yang mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Menyikapi perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat, termasuk perubahan regulasi dan mekanisme pelayanan yang lebih mengarah kepada digitalisasi, maka pembangunan infrastruktur daerah ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas pendukung aktivitas pelayanan, termasuk di dalamnya peningkatan teknologi informatika yang lebih handal. Pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mendukung institusi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun dalam penyediaan barang dan jasa yang secara langsung dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat berupa penataan lingkungan permukiman yang sehat termasuk penyediaan fasilitas sosial dan ruang publik yang layak.

Secara operasional, Misi ke-5 diaplikasikan pada peningkatan kinerja pembangunan pada sektor pelayanan infrastruktur daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, prasarana perhubungan, prasarana penyediaan air baku/air minum, dan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang

diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya dalam setiap misi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024
 Visi: “Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir	Keterangan
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Indikator Tujuan: Tingkat Kemiskinan	Persen	7,7	8,14	8,04	8,08	8,02	7,96	7,9	8,03	8,02	8,00-7,80	7,79-7,60	7,79-7,60	Indikator kemiskinan pindahan dari misi 2
		Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Indikator Sasaran: Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	N/A	100,10	115,21	100,11	100,12	100,13	100,14	115,21	115,22	115,23	115,24	115,24	Tetap
		Menurunnya pengangguran daerah	Indikator Sasaran: Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,59	1,36	1,75	1,34	1,32	1,3	1,28	1,50	1,32	1,30-1,20	1,19-1,10	1,19-1,10	Indikator kemiskinan pindahan dari misi 2
Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,42	70,97	71,57	71,05	71,13	71,21	71,29	72,24	72,87	73,50	74,09	74,09	Tetap

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir	Keterangan
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indikator Sasaran: Indeks Pendidikan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68,83	69,27	69,72	69,72	Revisi indikator
		Meningkatnya derajat kesehatan	Indikator Sasaran: Angka Harapan Hidup	Tahun	68,79	68,6	69	68,7	68,8	68,9	69	69,15	69,98	70,81	71,64	71,64	Tetap dengan sedikit revisi
		Meningkatnya standar hidup	Indikator Sasaran: Pengeluaran per-kapita	Angka	10602	N/A	1035,00	N/A	N/A	N/A	N/A	10.752,4	10.958,9	11.095,1	11.219,5	11.219,5	Indikator baru
Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	56,31	65,6	63,05	66,6	67,6	68,6	69,6	66,6	67,31	67,76	68,22	68,22	Tetap

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir	Keterangan
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Air	Angka	70	71	55,56	72,00	73	74	75	72	53,81	53,91	54,01	54,01	Tetap
			Indeks Kualitas Udara	Angka	55,55	81	98,02	82,00	83	84	85	82	85,69	85,79	85,89	85,89	
			Indeks Kualitas Lahan	Angka	46,61	50	42,45	51,00	52	53	54	51	56,49	58,2	59,91	59,91	
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,82	5,13	-0,94	5,18	5,23	5,28	5,33	1,00-2,00	2,00-3,00	3,00-4,00	4,00-5,00	4,00-5,00	Revisi indikator (urusan pindahan dari Misi 1)
		Meningkatnya pengelolaan pariwisata	Indikator Sasaran: Persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4,54	N/A	2,23	N/A	N/A	N/A	N/A	3,59	4,88	5,04	5,17	5,17	Revisi indikator
		Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian	Indikator Sasaran: Laju pertumbuhan perdagangan sektor eceran	Persen	7,37	N/A	1,67	N/A	N/A	N/A	N/A	5,93	6,72	7,51	8,3	8,3	Sasaran dan indikator sasaran baru

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir	Keterangan
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan <i>Good Governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan <i>Clean Government</i> (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)		Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	D	C	CC	B	B	Revisi indikator
		Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	Indikator Sasaran: Nilai SAKIP	Nilai	C	C	CC	B	B	B	B	CC	B	B	BB	BB	Revisi indikator
		Meningkatnya pemerintahan yang bersih	Indikator Sasaran: Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tetap
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,17	N/A	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	72	74	77	80	80	Revisi indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir	Keterangan
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
			Indikator Sasaran: Indeks SPBE	Angka	N/A	N/A	N/A	50	100	100	100	2,0	2,5	2,7	3,0	3,0	Revisi Indikator
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		Indikator Tujuan: Indeks Rasa Aman	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	Revisi indikator
		Meningkatnya ketahanan daerah	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Daerah	Angka	50	60	42	65	70	75	80	65	70	75	80	80	Tetap
		Meningkatnya kohesivitas sosial	Indikator Sasaran: Angka Potensi Konflik Sosial	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	3	2	1	1	Revisi indikator
	Meningkatnya keberdayaan desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65	
		Meningkatnya kemandirian dan kemantapan desa	Indikator Sasaran: Persentase desa maju	Persen	0,025	N/A	0,031	N/A	N/A	N/A	N/A	0,043	0,050	0,062	0,075	0,075	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir	Keterangan
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur Daerah		Indikator Tujuan: Indeks Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47,98	49,58	51,16	51,78	51,78	Indikator baru
		Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Indikator Sasaran: Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70,10	77,09	89,07	89,79	89,79	Revisi indikator
		Berkurangnya kawasan kumuh	Indikator Sasaran: Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	Persen	19,14	N/A	19,14	N/A	N/A	N/A	N/A	22,06	24,99	27,91	30,83	30,83	Revisi indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir	Keterangan
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan lalu lintas	Indikator Sasaran: Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan memadai	Persen	55	60	0	55	60	65	70	55	60	65	70	70	Revisi indikator

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan yang dijabarkan pada Bab IV. Strategi dan Arah Kebijakan dengan demikian sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator di dalam RPJMD dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan.

Tabel 6. 1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Peningkatan sarana pertanian yang modern	Peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi sektor pertanian
			Peningkatan bantuan alsintan yang tepat sasaran dan tepat guna bagi petani
			Peningkatan fasilitasi dan pengadaan benih yang bersertifikat
			Peningkatan Akses untuk Pembiayaan Pertanian
		Peningkatan produksi peternakan	Peningkatan fasilitasi dan pengadaan benih ternak unggul
		Peningkatan prasarana pertanian	Peningkatan kualitas infrastruktur pertanian
			Peningkatan jaringan irigasi pertanian
		Peningkatan kualitas pengendalian Hama Penyakit dan bencana pertanian	Optimalisasi koordinasi dan pelayanan pengendalian penyakit hewan
			Peningkatan koordinasi pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman dan bencana pertanian
		Peningkatan akseibilitas petani terhadap teknologi, sumber pembiayaan dan pasar	Penguatan kemitraan petani dengan pelaku usaha pemasaran produk pertanian
			Peningkatan fasilitasi pembentukan koperasi petani
			Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan aparatur OPD
		Peningkatan Produksi perikanan	Peningkatan pemberdayaan pembudi daya perikanan
			Peningkatan fasilitasi bagi kelompok usaha perikanan
			Peningkatan kualitas hasil olahan produk perikanan
			Fasilitasi sarana dan prasaran perikanan (Pakan dan Bibit)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan sistem dan jaminan pemasaran produk lokal	Peningkatan kerjasama pemasaran produk lokal
			Peningkatan pemasaran produk lokal secara online
		Pemantapan ketahanan pangan	Peningkatan diversifikasi pangan daerah
			Peningkatan dukungan regulasi mengenai ketersediaan pangan daerah
			Peningkatan cadangan pangan daerah
			Peningkatan akses pangan daerah
			peningkatan pemanfaatan pangan
	peningkatan keterjangkauan pangan		
	Menurunnya pengangguran daerah	Peningkatan kesempatan kerja masyarakat	Peningkatan ketersediaan data ketenagakerjaan
			Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal
			Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja
		Peningkatan pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial
			Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi ketenagakerjaan
Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal			
Misi 2: Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing			
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana pendukung kegiatan belajar
			Peningkatan ketersediaan layanan PAUD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Optimalisasi pemberian bantuan/apresiasi bagi siswa SD-SMP dari keluarga kurang mampu	
			Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan kesetaraan dan non-formal	
		Pemerataan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan sertifikasi guru	
			Peningkatan kualifikasi guru	
		Optimalisasi kualitas kegiatan belajar mengajar	Optimalisasi penerapan kurikulum 2013	
			Penggunaan teknologi dalam pembelajaran	
		Optimalisasi pembinaan olahraga	Optimalisasi pembinaan atlet-atlet muda	
			Peningkatan partisipasi atlet dalam kompetisi keolahragaan	
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	
		Peningkatan komitmen masyarakat dalam pelestarian budaya	Peningkatan ketersediaan sarana promosi kebudayaan	
			Peningkatan upaya pengembangan sanggar seni budaya	
			Optimalisasi pembangunan sektor kebudayaan	
			Optimalisasi identifikasi sumber-sumber budaya	
		Peningkatan akses dan kualitas masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Optimalisasi kapasitas SDM pengelola perpustakaan	
			Peningkatan koleksi buku	
			Pengembangan perpustakaan keliling	
			Optimalisasi penggunaan perpustakaan digital	
		Meningkatnya derajat	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	Peningkatan manajemen resiko kehamilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kesehatan		Penurunan risiko komplikasi pasca persalinan
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi	Penurunan risiko BBLR dan BBBGM
			Peningkatan nutrisi bayi dalam kandungan
			Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
			Optimalisasi gizi bayi
			Peningkatan kualitas kesehatan balita
		Peningkatan imunisasi dasar lengkap untuk balita	
		Penurunan prevalensi stunting	Peningkatan nutrisi ibu hamil
			Perbaikan sanitasi masyarakat
			Peningkatan gizi pada balita
		Penurunan resiko penyakit menular dan tidak menular	Optimalisasi pengetahuan tentang PHBS
			Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
			Peningkatan status gizi masyarakat
			Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
		Optimalisasi ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
			Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
		Peningkatan akses pelayanan dan kualitas keluarga berencana	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung program keluarga berencana
			Optimalisasi advokasi, komunikasi informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan Fungsi Kampung KB
		Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi keluarga	Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan keluarga
			Peningkatan peran keluarga dalam kesehatan reproduksi
		Optimalisasi mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan distribusi sarana prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas kesehatan
		Peningkatan kualitas sistem informasi rumah sakit	Integrasi sistem rujukan
			integrasi sistem administrasi rumah sakit
		Optimalisasi manajemen bisnis Rumah Sakit Daerah	Optimalisasi tata kelola keuangan rumah sakit
			Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan RSUD
			Peningkatan ketersediaan tenaga spesialis
	Meningkatnya standar hidup	Peningkatan pendapatan PPKS	Optimalisasi pendampingan kelompok rentan
			Optimalisasi pelaksanaan KUBE
			Optimalisasi kualitas dan validitas data PPKS
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial	Peningkatan sarana dan prasarana layanan sosial
			Optimalisasi pembinaan PPKS
			Peningkatan kualitas pekerja sosial
		Optimalisasi upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Optimalisasi jaminan sosial kelompok rentan
			Optimalisasi perlindungan sosial korban bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas organisasi dan kewirausahaan pemuda	Optimalisasi pembinaan kepemimpinan pemuda
			Optimalisasi pembinaan kewirausahaan pemuda
			Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta terkait pengembangan kepemudaan
		Peningkatan kualitas perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik	Peningkatan peran lembaga pengarusutamaan gender
			Peningkatan kecakapan hidup perempuan
			Peningkatan peran organisasi perempuan dalam partisipasi publik
		Optimalisasi pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Optimalisasi kapasitas SDM lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak
			Optimalisasi keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
			Peningkatan ketersediaan fasilitas penanganan dan pendampingan perempuan dan anak
		Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Peningkatan cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup	Optimalisasi perencanaan lingkungan hidup sesuai regulasi
		Peningkatan pengendalian pencemaran	Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		lingkungan hidup	Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
			Optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Optimalisasi pengendalian dan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil Limbah B3
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
			Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
			Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat
		Optimalisasi pengelolaan sampah	Optimalisasi sampah yang ditangani
			Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
			Peningkatan cakupan daerah pelayanan daerah
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan pariwisata
Pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan (<i>Quality and sustainable tourism</i>)	Pengembangan obyek wisata premium		
Pengembangan SDM pariwisata	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata		
Pengembangan pemasaran pariwisata	Pemasaran pariwisata berbasis digital		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif	
			Penumbuhan pelaku ekonomi kreatif baru	
	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah	
			Peningkatan promosi penanaman modal daerah	
			Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara berkala	
			Optimalisasi penerbitan/penyempurnaan Peraturan Daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi	
			Optimalisasi pengembangan/pemanfaatan sistim aplikasi pelayanan penanaman modal	
			Peningkatan pengelolaan data potensi penanaman modal daerah	
			Peningkatan akses dan kapabilitas KUKM	Optimalisasi pengembangan koperasi
			Peningkatan jaringan pemasaran produk KUKM dan ekonomi kreatif dengan dukungan teknologi informasi	Inisiasi pemasaran produk KUKM berbasis digital
				Optimalisasi pengembangan KUKM
			Peningkatan kualitas produk IKM	Peningkatan sarana dan prasarana produksi IKM
	Peningkatan <i>packaging</i> produk IKM			
	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas SDM IKM			
	Peningkatan kemitraan IKM dengan <i>stakeholders</i> terkait			
	Peningkatan mediasi ke lembaga Perbankan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan sistem dan jaminan pemasaran produk lokal	Peningkatan kerjasama pemasaran produk lokal
			Peningkatan pemasaran produk lokal secara online
			Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan
			Peningkatan pembinaan kelompok pedagang / usaha informal
		Peningkatan kualitas pengelolaan pasar	Peningkatan integrasi sistem pelayanan informasi harga, komoditas dan jenis produk
			Peningkatan kapasitas SDM PD pasar dalam pengelolaan pasar
			Peningkatan fasilitasi dan distribusi produk pertanian masyarakat
<p>Misi 4: Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan <i>Good Governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan <i>Clean Government</i> (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan fungsi pengendalian kebijakan daerah	Penguatan kualitas produk hukum daerah
			Peningkatan efektifitas pengendalian kebijakan daerah
			Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa
			Peningkatan kapasitas BUMD
		Peningkatan kematangan kelembagaan	
		Peningkatan fasilitasi kinerja DPRD	Peningkatan fasilitasi administrasi dan anggaran untuk menopang kinerja DPRD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi alat-alat perlengkapan dewan
		Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah	Peningkatan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah
			Peningkatan keselarasan perencanaan daerah
			Penguatan peran masyarakat dalam perencanaan daerah
			Optimalisasi penggunaan sistem perencanaan daerah
		Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
		Peningkatan kapasitas ASN	Peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
		Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian	Peningkatan <i>system merit</i> dalam penempatan jabatan pegawai
			Peningkatan disiplin pegawai
		Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	Pengembangan potensi kewilayahan di desa-desa
			Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan
			Peningkatan peran SDM pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDesa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Memaksimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna	
	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Penguatan kualitas pelaporan keuangan daerah	
			Pengembangan integrasi sistem perencanaan dengan penganggaran daerah	
			Peningkatan efektifitas pengelolaan aset daerah	
		Peningkatan kapasitas keuangan daerah	Penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah	
			Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah	
		Peningkatan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Penguatan integritas kelembagaan dan aparatur daerah	
			Peningkatan integrasi sistem pengaduan masyarakat	
			Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informatika	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
				Peningkatan kualitas pelayanan pemanfaatan data kependudukan
	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Penguatan pemahaman regulasi desa	
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	
			Peningkatan sistem pelayanan publik	
	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		Peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip daerah	
			Peningkatan sarana dan prasarana arsip daerah	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Peningkatan penggunaan sistem informasi pengelolaan arsip daerah	
		Peningkatan akses terhadap informasi publik	Peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi	
		Peningkatan tata kelola TIK	Peningkatan jaringan telekomunikasi dan data	
			Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan TIK	
			Peningkatan kualitas data statistik daerah dan sektoral	
			Peningkatan keamanan informasi daerah	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketahanan daerah	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan Pelatihan Pencegahan dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana	
			Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana	
			Peningkatan Koordinasi <i>Pentahelix</i> Dalam Penanggulangan Bencana	
		Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan Ketersediaan Peralatan Tanggap Darurat Bencana	
			Peningkatan Ketersediaan Logistik Korban Bencana	
		Peningkatan Pelayanan Pasca Bencana	Peningkatan Penyusunan Regulasi Pasca Bencana	
	Meningkatnya kohesivitas sosial	Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung K3
				Peningkatan kapasitas SDM trantibum
				Peningkatan standar operasional penanganan trantibum
		Peningkatan kohesivitas sosial		Peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memperkuat kelembagaan kerukunan umat beragama
			Peningkatan partisipasi politik masyarakat
			Peningkatan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap Ormas dan Orpol
			Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
			Peningkatan deteksi dini konflik sosial
Meningkatnya keberdayaan desa	Meningkatnya kemandirian dan kemantapan desa	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan peran pendamping desa
			Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran desa
			Peningkatan kapasitas dan peran BUMDesa
Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika			
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Optimalisasi ketersediaan jalur strategis kabupaten
			Peningkatan pemerataan jaringan jalan
			Optimalisasi pengawasan dan kualitas konstruksi jalan kabupaten
			Peningkatan pemeliharaan jalan
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Peningkatan layanan transportasi umum
			Peningkatan ketersediaan fasilitas perhubungan
			Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	
			Peningkatan kelaikan angkutan barang dan orang	
		Optimalisasi pengelolaan air limbah	Peningkatan ketersediaan jaringan air limbah	
		Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan	
			Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum	
			Pengelolaan dan inventarisasi sumber air baku	
		Peningkatan kualitas perencanaan pemanfaatan ruang daerah	Peningkatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	
			Pembangunan sistem informasi tata ruang	
		Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan	Peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus kepemilikan tanah	
			Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset tanah untuk pembangunan	
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan gedung dan prasarana lainnya	
			Optimalisasi penyediaan fasilitas publik	
			Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi	
		Berkurangnya kawasan kumuh	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
			Peningkatan ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan
			Peningkatan kualitas rumah tidak layak/ rusak
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
			Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum
	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan lalu lintas	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan
			Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan gorong-gorong dan drainase
			Peningkatan layanan transportasi umum
			Peningkatan ketersediaan fasilitas perhubungan
			Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan
			Peningkatan kelaikan angkutan barang dan orang

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Arah kebijakan tahunan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), melalui pengembangan layanan umum yang unggul.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2021)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Dairi yang unggul serta berdaya saing.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya penguatan sektor unggulan ekonomi daerah, keterampilan berusaha, dan perluasan kesempatan kerja.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2024)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera dengan ditopang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN				
2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui	Pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	Penguatan sektor unggulan ekonomi daerah, keterampilan berusaha, dan	Akselerasi pencapaian pembangunan yang ditopang sistem pemerintahan

pengembangan layanan umum yang unggul			perluasan kesempatan kerja.	berbasis elektronik
---------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------

6.3. Program Pembangunan Daerah

6.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis dan unggulan unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2020-2024 yang diharapkan akan mendorong terjadinya “lompatan” dalam pembangunan Kabupaten Dairi. Prioritas pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut:

6.3.1.1. DAIRI CERDAS (Akses Pendidikan untuk Semua)

Pemerataan pendidikan lebih diarahkan untuk pemerataan pelayanan pendidikan dan mendorong wilayah kecamatan dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah, yang disinergikan dengan kebijakan pembangunan lainnya yaitu peningkatan mutu layanan pendidikan dasar untuk mencapai standar nasional pendidikan. Lebih lanjut, pelayanan pendidikan di Kabupaten Dairi diarahkan untuk mendorong dan melindungi partisipasi kelompok masyarakat miskin. Hal ini dilakukan untuk mendorong kelompok miskin memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka berpenghasilan sehingga dapat hidup secara layak dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa secara baik.

Sekolah Unggul merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan akses sekaligus mutu pendidikan, antara lain meliputi:

- a. Kelas Pintar; mengembangkan kelas-kelas yang dilengkapi dengan teknologi dan mengembangkan kelas jarak jauh agar bisa mengembangkan pendidikan untuk semua kalangan (SEKOLAH DIGITAL);
- b. Pengembangan minat dan bakat melalui ekstra kurikuler sekolah. Kegiatan ekstra kurikuler yang berorientasi pada penguatan keterampilan untuk pengembangan potensi daerah dan merespon tantangan global.

6.3.1.2. DAIRI SEHAT

Pembangunan sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat,

mencakup fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan rujukan. Pelayanan kesehatan juga harus responsif dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga agenda prioritas dalam Dairi Sehat ini juga pada penyediaan ambulans gratis.

6.3.1.3. AGRI UNGGUL

Pembangunan pertanian AGRI UNGGUL dikembangkan dari konsep pengelolaan pertanian yang cerdas dan berbasis teknologi (*smart farming*). Agri Unggul bertujuan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produksi pertanian dengan tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sedangkan *ultimate outcome* yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan ketahanan pangan yang mantap. Agenda operasional dalam rangka Agri Unggul sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian untuk menguasai teknik budidaya pertanian yang tepat dan didukung dengan penerapan teknologi informasi yang dapat membantu petani dalam prediksi hasil panen, manajemen resiko, keamanan pangan dan pencegahan dan penanggulangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), manajemen operasional sampai kepada pemasaran produk pertanian.
- b. Reaktivasi *Storage* dan industri kecil di tingkat kecamatan/desa. Pengembangan gudang (*storage*) pertanian dan perikanan dilakukan melalui penanganan pasca panen terhadap komoditas unggulan pertanian dengan pemanfaatan dan pengembangan gudang (*storage*) yang ada untuk menampung dan menurunkan resiko kerusakan hasil panen, serta mengatur tata niaga untuk mengendalikan harga komoditas pertanian dan perikanan.
- c. Pengembangan irigasi pertanian desa melalui pembangunan jaringan irigasi usaha tani (Jitut) dan jaringan irigasi desa (Jides), yang didahului penetapan lokasi sumber air dan lahan yang akan dialiri.

6.3.1.4. DAIRI KREASI (Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas)

Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas difokuskan kepada penumbuhan kewirausahaan, peluang dan lapangan

kerja baru serta sinergis dengan berbagai sektor pembangunan ekonomi daerah, melalui:

- a. Ekonomi digital guna meningkatkan nilai kompetitif produk atau komoditas KUKM Kabupaten Dairi di pasar nasional maupun global melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Inkubator bisnis untuk memfasilitasi wirausaha baru khususnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui pembinaan dan pendampingan manajemen usaha, akses modal, serta pemasaran. Penguatan kapasitas SDM untuk mengelola potensi unggulan daerah juga menjadi agenda penting, salah satunya melalui penguatan keterampilan Barista.
- c. *Creative/Start-up hub* diterjemahkan kedalam pengembangan sarana dan prasarana kota dan desa kreatif untuk menunjang pengembangan kualitas produk dan pengembangan promosi produk ekonomi kreatif.

6.3.1.5. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata untuk menopang Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional

Pengembangan daya tarik secara komprehensif melalui peningkatan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas untuk menopang Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Danau Toba. Beberapa agenda prioritas dalam pengembangan daya tarik pariwisata dan industri pariwisata secara umum di Kabupaten Dairi, yaitu:

- a. Pengembangan ekonomi kreatif melalui penguatan lembaga, pengembangan sarana dan prasarana kota (SIDIKALANG BERKAT = Bersih, Kreatif, Aman dan Terang) dan desa kreatif, pengembangan kualitas produk dan pengembangan promosi produk ekonomi kreatif. Dalam hal ini salah satunya melalui pengembangan produk unggulan Kopi Sidikalang dan Barista yang terampil, sehingga dapat memperkuat amenitas pariwisata.
- b. Pengembangan Desa Wisata melalui revitalisasi kearifan lokal dan penguatan kelembagaan. Desa wisata merupakan daya tarik khas dan minat khusus untuk memperkuat destinasi utama Danau Toba.
- c. Pengembangan fasilitas *meeting, incentives, conferences and exhibition* (MICE) dan pusat-pusat informasi kepariwisataan (*tourist information center*) yang berperan sebagai *tourism hub*.

6.3.1.6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Pembangunan infrastruktur memiliki prioritas pada sektor perhubungan, Bina Marga, dan Sarana-prasarana Perdagangan. Prioritas pada sektor tersebut diarahkan untuk:

- a. Mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, misalnya antara destinasi pariwisata dengan kawasan pertanian.
- b. Meningkatkan konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pelosok atau pinggiran, sehingga mampu meningkatkan pemerataan pembangunan.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, terutama berupa pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar semi modern.

6.3.1.7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri

Desa dengan segala kewenangan dan potensinya merupakan entitas penting untuk menopang efektivitas pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran fasilitasi untuk semakin meningkatkan sinergi pembangunan antara desa dengan daerah. Pembangunan desa di Kabupaten Dairi dalam rangka menciptakan Desa Kreatif Unggul (DEKU) melalui agenda prioritas sebagai berikut:

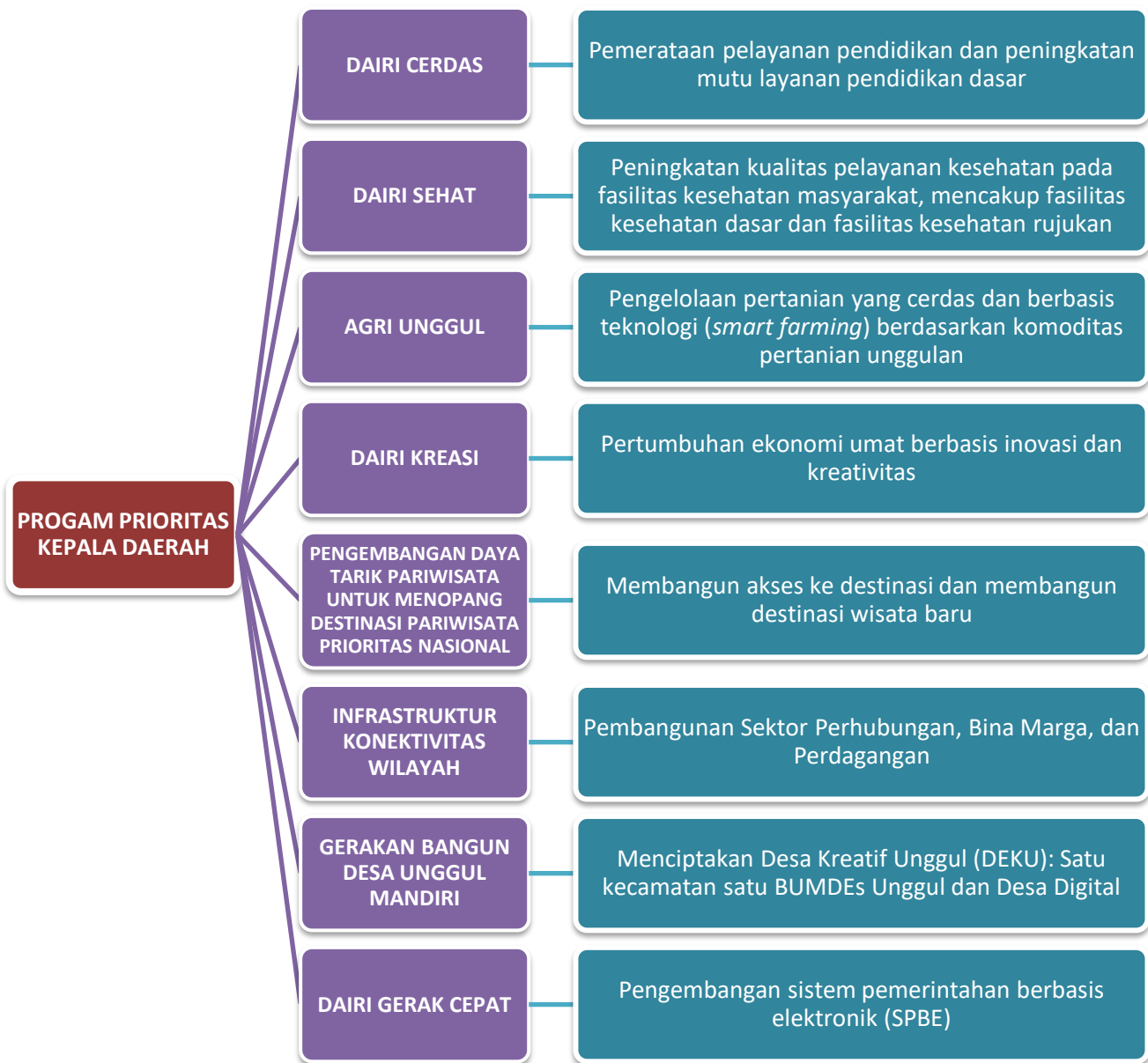
- a. Satu kecamatan satu BUMDes Unggul, melalui berbagai kegiatan operasional berupa pemetaan dan pengklasifikasian komoditas unggulan desa, pendampingan pengembangan usaha BUMDes, pengembangan akses pasar baik melalui pembangunan sarana prasarana, maupun pengembangan kemitraan dengan badan usaha lainnya.
- b. Desa Digital merupakan upaya pemberdayaan desa melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan aplikasi berbasis web/mobile dan pelatihan sumber daya manusia sebagai aktor utama perubahan di desa yang bertujuan untuk mengolah dan mengoptimalkan potensi desa yang ada melalui media informasi dan komunikasi digital, sehingga sebaran informasi dua arah menjadi lebih luas dan lebih beragam.

6.3.1.8. DAIRI GERAK CEPAT (Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Dalam rangka mewujudkan birokrasi unggul ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mencakup penerapan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Sedangkan Inovasi pelayanan publik yang akan dikembangkan dan diterapkan secara berkelanjutan mencakup kebijakan pelayanan bidang perizinan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan persampahan dan layanan ketentraman dan ketertiban.





6.3.2. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah dalam dimensi teknokratik mengacu pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih. Program pembangunan dalam dimensi teknokratik juga membangun keterpaduan antara prioritas pembangunan yang bersifat politik dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi *outcome* dan *impact*. Berikut adalah rincian seluruh program pembangunan daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							Target		Realisasi			
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)		
Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian												
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap		Indikator Tujuan: Pertumbuhan PDRB			Persen	5,01	5,13		-0,94			
		Indikator Tujuan: Indeks Gini			Indeks	0,238	0,234		0,27			
	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Indikator Sasaran: Nilai Tukar Petani (NTP)				Persen	99,39	100,10		115,21		
		Program Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan						4.878,6		2.619,2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			- padi sawah	kw/ha	59,99	60,59		54,97				
			- padi ladang	kw/ha	34,44	34,78		37,27				
- jagung	kw/ha		62,93	63,56		56,34						
Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	99,39	100,10		115,21							

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan Daerah	Indikator Sasaran: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			Angka	90,4	92,3		72,3		
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	90,4	92,30	1.606,3	72,30	1.113,2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase Konsumsi Energi Per kapita	Persen	91,72	91,87		95,44		
				Persentase Konsumsi Protein Per kapita	Persen	95	95,50		104,16		
				Ketersediaan pangan utama (produksi/tahun)	Ton/tahun	59.741	60.338		90,29		
				Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita/hari	3.897	3.995		2.415		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita/hari	93,24	94,64		95,63		
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Sampel	9	10		-		
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB			Persen	0,39	0,4		0,39		
			Program Percepatan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	8	10	1.876,5	10	23,145	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
				Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	Unit	728	733		733		
				Persentase KUKM yang menghasilkan produk	Persen	1,94	2,51		1,96		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				unggulan							
				Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	Orang	100	100		100		
				Jumlah sentra IKM potensial	Sentra	0	1		1		
				Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	0,39	0,4		0,39		
Misi 2: Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing											
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	70,89	70,97		71,57		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indikator Sasaran: Usia Harapan Hidup			Tahun	68,4	68,6		69		
			Program Upaya Kesehatan	Cakupan terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya	Persen	65	70	54.816,3	72	49.647	Dinas Kesehatan
				Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		69		
				Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	Orang	3	2		6		
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Orang	70	65		93		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Persen	85	100		79,95		
				Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	Persen	85	100		81,19		
				Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		72,35		
				Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan	Persen	85	100		65		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Sesuai Standar							
				Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		80		
				Cakupan Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		98,18		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		79,51		
				Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		61,54		
				Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	Persen	85	100		50,46		
				Cakupan Penemuan	Orang	<1	< 1		< 1		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Kasus Baru Kusta (/100.000 Penduduk)							
				Cakupan Angka Kematian Jemaah Haji (/100.000 Penduduk)	Orang	<1	< 1		< 1		
				Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue) (/100.000 Penduduk)	Orang	55	53		59,54		
				Usia Harapan Hidup	Tahun	69,2	69,3		69		
				Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan	Persen	85	100		75		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Sesuai Standar							
				Cakupan Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		50,32		
				Cakupan Keluarga Menjadi Anggota JKN	Persen	80	85		79,69		
				Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Unit	12	18		-		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapat perawatan kesehatan	Persen	85	87	3.786,5	100	1.889,7	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,17	0,16		0,35		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	1,5	1,4		2,49		
				Ketersediaan obat di Puskesmas	Persen	75	80		80		
				Persentase Industry Rumah Tangga Yang Memiliki Izin PIRT	Persen	80	85		70		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan RT ber PHBS	Persen	66	68	843,9	69	-	Dinas Kesehatan
				Cakupan Keluarga Mempunyai Akses / Menggunakan Jamban Sehat	Persen	90	92		90,83		
				Persentase TTU/TPM Yang memenuhi Syarat kesehatan	Persen	85	87		24		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Cakupan desa siaga aktif	Persen	69	70		59		
				Meningkatnya jumlah posyandu mandiri	Posyandu	15	30		-		
			Program Kepemudaan	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan	Orang	1439	1450	651	25	139,9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	OKP	47	50		-		
			Program Keolahragaan	Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga	Cabang Olah Raga	7	7	734,9	6	573,5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/Lapangan Olahraga	Persen	100	100		100		
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indikator Sasaran: Angka Rata-Rata Lama Sekolah			Tahun	9,15	9,17		9,58		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Manajemen Pendidikan	APK PAUD	Persen	29,97	31	79.724,9	32,03	85.808,9	Dinas Pendidikan
				Jumlah PAUD	Unit	191	205		186		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,52	106,82		101,16		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	95,41	95,61		96,9		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	96,63	96,73		100		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,59	76,75		96,9		
				Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	Persen	99,17	99,3		124,27		
				Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Persen	99,37	99,47		89,85		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,57	9,58		9,58		
				Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,29	0,21		0,55		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,47	0,43		0,93		
				Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100		100		
				Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100		100		
				Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI	Persen	100	100		66		
				Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk	Persen	100	100		30		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Usia Sekolah SMP/MTs							
				Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	93	94		35,22		
				Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	95,5	96		36,75		
				Angka Melek Huruf Usia 15-44 Tahun	Persen	99,86	99,87		99,8		
				Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persen	70,96	74,19		60,61		
			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	25.000	25.500	350	3510	650	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah perpustakaan yang ada	Unit	303	305		305		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							Target		Realisasi				
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)			
				Jumlah koleksi buku	Judul	14.680	15.680		560				
				Jumlah perpustakaan yang dikembangkan / dibina	Unit	57	59		59				
				Meningkatnya cakupan keluarga berencana	Indikator Sasaran: Menurunnya kelahiran total/Total fertility rate (TFR)		Persen	2,86	2,84			3,4	
					Program Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	Persen	3,7	3,69	2.508,7		1,93	3.050
						Menurunnya kebutuhan ber KB tetapi tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	4,9	4,85			12,82	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Menurunnya kelahiran total/Total fertility rate (TFR)	Persen	2,86	2,84		3,4		
				Rasio Akseptor KB	Persen	60	60		72,49		
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4		2		
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	0,03	0,028	1.288,5	0,01	101,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	Persen	18,18	36,36		12		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak	Persen	55	60	942	61,29	267	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indikator Sasaran: Persentase Kemiskinan			Persen	8,2	8,14		8,04		
			Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM/PU SKESSOS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	5	5	1.294	-	440	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Jumlah panti sosial/rumah singgah/ rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	1	1		-		
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	5,2	5,5		47,47		
				Persentase meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat KAT	Persen	5	10		-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persen	N/A	100	344,2	3	96,9	Dinas Sosial
				Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persen	N/A	100		13		
				Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persen	N/A	100		13		
				Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti	Persen	N/A	100		10		
				Persentase Kemiskinan	Persen	8,2	8,14		8,14		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Perlindungan Jaminan Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	Persen	N/A	100	1.000	100	459,1	Dinas Sosial
	Menurunnya tingkat pengangguran	Indikator Sasaran: Tingkat pengangguran terbuka			Persen	1,4	1,36		1,75		
			Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	Orang	48	64	530,2	-	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,4	1,36		1,75		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	520	520	315	520	75,4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah											
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Poin	56,31	65,6		63,05		
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Poin	56,31	65,6		63,05		
			Program Persampahan	Timbulan Sampah Yang Ditangani	Persen	45	59	1.899,1	62,96	1.493,9	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Operasionali sasi TPA di kabupaten	≥ 71 (nilai TPA)	71,43	72,12		-		
				Persentase sampah yang tertangani melalui 3R	Ton	71,75	78,92		45,85		
				Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	35,11	58,61		36,49		
				Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah B3	Unit	-	-		-		
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Persen	75	75	586,2	100	691,5	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,31	65,6		63,05		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Peningkatan indeks kualitas air	Indeks	70	71		55,56		
				Peningkatan indeks kualitas udara	Indeks	55,55	81		98,02		
				Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	46,61	50		42,45		
				Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	100	100		100		
				Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	150	150		12,41		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Terlaksananya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Batang	5000	5000		3,527		
				Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	Lokasi	7	7		7		
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	Dokumen	7	4	353,2	1	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengelolaan pariwisata	Indikator Sasaran: Jumlah Kunjungan wisata			Orang	128000	130000		51374		
			Program Destinasi	Jumlah Objek Wisata	Objek	2	2	6.152,4	2	852,9	Dinas Pariwisata,

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Parawisata	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	128000	130000		51374		Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	Persen	1,75	1,8		0,62		
		Indikator Sasaran: Kontribusi Retribusi Wisata terhadap PAD			Persen	1,75	1,8		0,62		
			Program Pemasaran Parawisata	Jumlah event pariwisata	Event	3	3	516,7	1	567,8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Kebudayaan	Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan	Persen	20	20	1.222	4,34	438	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	1	1		1		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Cakupan fasilitasi pengkajian seni budaya daerah	Kegiatan	3	4		-		
				Jumlah grup/ kelompok kesenian	Unit	5	5		5		
				Cakupan pagelaran seni dan budaya	Pagelaran	3	4		-		
				Cakupan sarana dan prasarana seni	Unit	1	1		1		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha	Indikator Sasaran: Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan			Persen	1,94	2,51		1,96		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
ekonomi kreatif			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	Unit	1,544	1,594	1.000	1.634	138,7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
				Jumlah UMKM yang terfasilitasi	Unit	30	40		40		
				Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	Persen	1,94	2,51		1,96		
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	Unit	25	30	362,7	35	53,9	
				Jumlah Koperasi Sehat	Unit	5	10		35		

Misi 4: Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Government* (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)		Indikator Tujuan: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)			Predikat	CC	CC		C		
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indikator Sasaran: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)			Predikat	CC	CC		C		
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	3	1.120	3	426,6	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik		Persen	70,75	71,46	73,38					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Persentase analisis kebijakan organisasi	Persen	100	100		100		
				Cakupan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	Persen	100	100		100		
				Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC		C		
				Nilai LPPD	kriteria	Sedang	Sedang		Tinggi		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasi nya persidangan di DPRD	Persen	100	100	12.429,8	100	7.16,8	Sekretariat DPRD
				Rasio pembahasan prolegda	Persen	15	15		-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		
				Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		
				Jumlah pelaksanaan reses	Kali	3	3		3		
				Terselenggara ranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Kali	15	15		15		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Terciptanya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Persen	100	100		100		
				Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Dokumen	4	4		4		
				Terfasilitasin ya kesehatan anggota DPRD	Persen	100	100		100		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	609	1376	6.948,4	201	56	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklan juti	Persen	90	90	1.060,2	59,4	1.711,7	Inspektorat
				Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan	Persen	100			100		
				Indeks Persepsi	Indeks	N/A			60		
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2	3	232	3	118,3	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Penataan Desa	Jumlah desa cepat berkembang	Desa	27	5	1.700	-	651,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa terbentuk		Desa	15	15	15				
		Jumlah Pembentukan BUMdes dan Bumdes Bersama		BUMdes	35	25	17				
		Persentase Desa yang mempunyai Produk unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan		Persen	10	10	-				
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	Persen	100	100	2.401,2	100	335,3	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				RKPD							
				Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target	Persen	N/A	75		71,24		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,2	78,4	6.022,9	67,65	235,4	Kecamatan Sidikalang
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	77,2	77,4		78,65		Kecamatan Sumbul

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Indeks	76,8	77		82,1		Kecamatan Silima Pungga-Pungga
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	76,6	76,8		76,9		Kecamatan Siempat Nempu
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tigalingga	Indeks	77,4	77,6		77,65		Kecamatan Tigalingga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Indeks	77	77,2		78,65		Kecamatan Tanah Pinem
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks	76	76,2		76.647		Kecamatan Pegagan Hilir
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Indeks	76,4	76,6		78,81		Kecamatan Parbuluan
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat	Indeks	75,8	76		76,61		Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Nempu Hilir							
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks	76,2	76,4		79,3		Kecamatan Siempat Nempu Hulu
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Indeks	74,8	75		77,54		Kecamatan Lae Parira
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Indeks	74,6	74,8		76,61		Kecamatan Gunung Sitember

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Indeks	75	75,2		76,61		Kecamatan Berampu
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Indeks	75,6	75,8		76,81		Kecamatan Silahisabungan
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Indeks	75,4	75,6		77,69		Kecamatan Sitinjo
			Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan di	Indeks	78,2	78,4	3.109,1	78,4	5.904,5	Kecamatan Sidikalang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Kecamatan Sidikalang							
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Pegagan Julu I	Indeks	77,2	77,4		77,41		Kecamatan Sumbul
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Parongil	Indeks	76,8	77		81,89		Kecamatan Silima Pungga-Pungga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Panji Dabutar	Indeks	75,4	75,6		77,69		Kecamatan Sitingo
	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan Asset Daerah	Indikator Sasaran: Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah			Opini	WTP	WTP		WTP		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan APBD tepat waktu (31 Desember)	31 des	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3.237,9	Tepat Waktu	1.624	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Terasistensinya DPA dan Anggaran kas SKPD	Persen	100	100		100		
				Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan	Opini	WTP	WTP		WTP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				daerah							
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Persen	90	90	2.528,6	115,95	1.684,9	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	Persen	1,97	2,5		2,8		
				Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persen	13,5	13,5		14,96		
				Cakupan monitoring dan evaluasi retribusi daerah	Persen	100	100		100		
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			Persen	50	60		42		
			Program Bencana	Indeks Resiko				1.934,8		8.188	Badan Penanggulangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Bencana (IRB):							Bencana Daerah
				- Gempa Bumi	Persen	0,70	0,69		-		
				- Longsor	Persen	0,67	0,66		-		
				- Kebakaran Hutan dan Lahan	Persen	0,64	0,62		-		
				- Cuaca Ekstrem	Persen	0,58	0,56		-		
				- Banjir/ban dang	Persen	0,71	0,70		-		
				- Kekeringan	Persen	0,68	0,67		-		
				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Persen	50	60		42		
	Meningkatnya kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indikator Sasaran: Persentase penegakan Produk hukum daerah			Persen	70	75		75		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan lingkungan yang aman dan nyaman	Persen	100	100	866,2	100	304,8	Satuan Polisi Pamong Praja
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	50	55		55		
				Persentase penegakan produk hukum daerah	Persen	70	75		75		
			Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	orang	700	500	895,8	500	256.,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Forum	3	4		4		
				Terbentuknya tim kewaspadaan dini di daerah	Kecamatan	-	15		15		
				Tersedianya laporan informasi tentang keamanan dan ketertiban	Laporan	-	180		-		
				Jumlah Parpol/Ormas/LSM/masyarakat yang dibina	Parpol,Ormas/LSM,Orang	9 Parpol, 59 Ormas/LSM, 300 Orang	15 Parpol, 59 Ormas/LSM, 300 Orang		10 Parpol, 16 Ormas/LSM, 300 Orang		
Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika											

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah		Indikator Tujuan: Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap			Persen	49,4	56,75		56,61		
	Meningkatnya infrastruktur dasar	Indikator Sasaran: Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap			Persen	49,4	56,75		56,61		
			Program Jalan	Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	Km	20	20	90.836	18,35	23.815,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	58,08	65,28	56,51				

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	88,5	91,21		90,12		
				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persen	100	100		100		
			Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Angka kecelakaan lalulintas	Jumlah Laka	414	108	1.700	81	1.746,4	Dinas Pehubungan
				Cakupan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Persen	100	100		100		
				Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persen	100	100		100		
				Jumlah kendaraan layak jalan	unit	2.500	2.600		2.878		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
		Indikator Sasaran: Capaian Tersedianya Akses Air Bersih			Persen	62,8	63,11		77,78		
		Indikator Sasaran: Persentase luas irigasi dalam kondisi baik			Persen	55,23	62,86		91,97		
			Program Sumber Daya Air	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih/Air Minum Layak	Persen	62,8	63,11	10.962,7	77,78	8.051	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	Persen	59,52	62,86		91,37		
	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Indikator Sasaran: Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Persen	46,8	58,42		29,56		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
			Program Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	84,49	88,67	6.189,8	70,8	2.956,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Km	9,2	8	19.601	9,05	7.047,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	46,8	58,42		29,56		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika		Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik			Poin	70,75	71,46		73,38		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan	Indikator Sasaran: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan penanaman modal dan perizinan			Poin	70,75	71,46		72,8		
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor Jumlah nilai investasi Pertumbuhan nilai realisasi investasi Pertumbuhan nilai investasi PMDN	Unit Milyar (Rp) Milyar (Rp) Persen	15 3.593,35 533,27 20,83	112 4.930,88 623,5 72,87	802,9	115 5.214,76 1.279,26 205,17	461,3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan	Izin	79	85	301,8	42	118,8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				(OSS)							an
				Persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP (tepat waktu)	Persen	100	100		90		
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	70,75	71,46		72,8		
				Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	80	90		88,89		
				Jumlah SDM pada DPMPTSP yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	orang	4	10		-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indikator Sasaran: Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan			Persen	94	96,5		95,5		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP elektronik	Persen	91	93	658,8	95	1.434,6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase pasangan ber akte nikah	Persen	19	25		24,35		
				Persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	32	40		40		
				Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	60	70		73		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	97	100		96		
				Cakupan pelayanan dokumen akta catatan sipil	Persen	25,76	32,5		32,18		
	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik	Indikator Sasaran: Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik			Persen	N/A	20		17,5		
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Diseminasi Informasi	Media	5 Media diseminasi informasi	7 Media diseminasi informasi	7.819	7 Media diseminasi informasi	6.262	Dinas Komunikasi dan informatika
				Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan	Persen	N/A	20		17,5		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				berbasis elektronik							
	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD			Poin	70,75	71,46		73,59		
			Program Upaya Kesehatan	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	Hari	1	1	7.819	2,43	5.305,2	Dinas Kesehatan
			Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang		Kriteria	Dasar	Dasar		-		
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		Indeks	70,75	71,46		73,59		
			BOR (<i>Bad Occupancy Rate</i>)		Persen	73	75		61,35		
			AVLOS (<i>Average Length Of Stay</i>)		Hari	3	3		4,22		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp (juta)	Kinerja	Rp (juta)	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit yang baik	Persen	65	70		80		
				GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	Persen	30	30		21,52		

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian															
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Indikator Tujuan: Tingkat Kemiskinan		Persen	Persen	8,03		8,02		8,00 - 7,80		7,79 - 7,60		7,79 - 7,60	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Indikator Sasaran: Nilai Tukar Petani (NTP)		Persen	Persen	115,21		115,22		115,23		115,24		115,24	
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat	Persen	0,87	9.762,28	0,89	3.285,00	0,91	3.613,50	0,93	3.974,80	0,93	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar	Persen	46,82	-	40,80	-	42,35	-	42,22	-	42,22	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan luas lahan yang diolah dengan alsintan	Persen	40,41	-	39,61	-	43,14	-	46,52	-	46,52	
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Panjang Irigasi tersier dalam kondisi baik	Persen	46,82	5.223,00	48,09	1.000,00	49,38	1.100.	50,66	1.210,00	50,66	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Pesentase Panjang Jalan usaha tani dan jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase embung pertanian yang dibangun/diperbaiki	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase Prasarana penunjang produksi pertanian yang dibangun	Persen	100,00	-	100,00	-	60,00	-	63,00	-	63,00	
				Persentase BPP Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas lahan pertanian yang dilaksanakan pengendalian HPT	Persen	100,00	498,20	100,00	450,00	100,00	495,00	100,00	544,50	100,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase luas lahan pangan yang dijamin dengan AUTP	Persen	0,00	-	35,12	-	70,52	-	100,00	-	100,00	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat (Veteriner)	Persentase penanganan kesehatan hewan/ter nak	Persen	100	768,07	100	806,47	100	856,80	100	889,14	100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok tani yang naik kelas	Persen	13,79	419,24	22,26	500	26,47	550	30,68	605	30,68	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase fasilitasi kerjasama kelompok Tani/Gapok tan dengan pelaku agribisnis yang ditindaklanjuti	Persen	0,00	-	0,10	-	0,20	-	0,30	-	0,30	
	Menurunnya pengangguran daerah	Indikator Sasaran: Tingkat Pengangguran Terbuka			Angka	1,50		1,32		1,30 - 1,20	-	1,19 - 1,10		1,19 - 1,10	
			Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kebijakan rencana tenaga kerja yang dijalankan	Persen	35,00	-	40,00	100.60	45,00	110.66	50,00	121.72	50,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensi	Persen	Persen	122,57	50,00	693,25	50,00	762,57	60,00	838,83	60,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
			Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	Persen	Persen	21,35	22,00	26,46	25,00	29,11	30,00	32,02	30,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
			Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Persen	Persen	47,75	25,00	113,13	30,00	124,44	30,00	136,89	30,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Misi 2: Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing															
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia			Angka	72,24		72,87		73,50		74,09		74,09	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indikator Sasaran: Indeks Pendidikan			Nilai	-		68,83		69,72		69,72		69,72	
			Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf Umur 15-45 Tahun	Persen	99,88	10.822,00	99,89	6.355,05	99,90	6.990,56	99,91	7.689,61	99,91	Dinas Pendidikan
				Persentase lembaga PAUD yang memiliki Izin	Persen	19,00	-	19,10	-	19,20	-	19,30	-	19,30	
				APK PAUD	Persen	34,00	-	36,00	-	38,00	-	40,00	-	40,00	
				APK SD	Persen	103,12	-	104,04	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				APK SMP	Persen	97,00	-	97,10	-	97,20	-	97,30	-	97,30	
				APM SD	Persen	97,00	-	99,65	-	99,75	-	99,85	-	99,85	
				APM SMP	Persen	95,00	-	95,10	-	95,20	-	95,30	-	95,30	
				Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,45	-	0,35	-	0,25	-	0,15	-	0,15	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,85	-	0,75	-	0,65	-	0,55	-	0,55	
				AM SD	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				AM SMP	Persen	99,52	-	99,57	-	99,62	-	99,67	-	99,67	
				Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	Persen	66,00	-	67,00	-	67,00	-	68,00	-	68,00	
				Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs	Persen	30,00	-	31,00	-	31,00	-	32,00	-	32,00	
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen	58,20	-	59,20	-	60,20	-	61,20	-	61,20	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen	28,40	-	29,30	-	30,20	-	31,10	-	31,10	
				Persentase SMP Berakreditasi B	Persen	60,71	-	60,81	-	60,91	-	61,01	-	61,01	
				Jumlah siswa yang masuk SMA unggulan	orang	65,00	-	100,00	-	135,00	-	160,00	-	160,00	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	28,90	2.283,99	29,30	2.484,35	30,15	2.732,78	31,20	3.006,06	31,20	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	75,30	-	76,20	-	77,30	-	78,40	-	78,40	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	89,74	-	89,75	-	89,77	-	89,78	-	89,78	
				Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	2,41	-	2,43	-	2,44	-	2,46	-	2,46	
				Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,49	-	38,51	-	38,53	-	38,55	-	38,55	
				Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	51,77	-	51,79	-	51,81	-	51,83	-	51,83	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1:15	-	1:15	-	1:15	-	1:15	-	1:15	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pelayanan perpustakaan daerah	Persen	47,00	202.38	47,00	50,00	60,00	55,00	70,00	60,50	70,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kualitas kesehatan	Indikator Sasaran: Angka Harapan Hidup			Tahun	69,15		69,98		70,81		71,64		71,64	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Persen	100,00	93.079,97	100,00	30.583,65	100,00	33.642,06	100,00	37.006,27	100,00	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Pelayanan kesehatan balita;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	Persen	80,00	-	85,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	
				Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,77	-	0,65	-	0,60	-	0,55	-	0,55	
				Prevalensi Gizi Kurang	Persen	1,30	-	1,20	-	1,10	-	1,00	-	1,00	
				Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapatkan perawatan Kesehatan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Angka kesakitan DBD	Per 100.000 Penduduk	50,00	-	48,00	-	45,00	-	40,00	-	40,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase KLB Ditangani < 24 jam	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase Keluarga dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	Persen	93,00	-	95,00	-	95,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase penanganan Kejadian gawat darurat sesuai standar	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	Persen	85,00	-	90,00	-	95,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	Persen	85,00	-	90,00	-	95,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standart	Persen	80,00	-	82,00	-	85,00	-	87,00	-	87,00	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS (RSUD)	Persen	100,00	1.510,56	100,00	8.626,81	100,00	9.489,49	100,00	10.438,44	100,00	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	72,00	93,81	69,00	307,75	70,00	338,52	72,00	372,37	72,00	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga aktif	Persen	100,00	435,79	100,00	295,07	100,00	324,58	100,00	357,04	100,00	Dinas Kesehatan
				Persentase Posyandu Aktif	Persen	0,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Pengendalian Penduduk	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	Persen	1,89	30,50	1,85	184,94	1,81	203,43	1,73	223,78	1,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Persen	63,13	80,58	68,33	60,00	72,53	66,00	75,73	72.,60	75,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase peningkatan fungsi kampung berkualitas	Persen	48,14	-	55,56	-	62,96	-	70,37	-	70,37	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok kegiatan /POKTAN (Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia) ber-KB	Persen	71,15	789,98	70,30	793,70	70,45	873,07	70,50	960,37	70,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Meningkatnya Standar Hidup	Indikator Sasaran: Pengeluaran per-kapita				10752,4		10958,9		11095,1		11219,5		11219,5	
			Pemberdayaan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan	Persen	42,62	646,88	42,62	905,00	43,22	995,50	43,83	1.095,50	43,83	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)	Persen	4,80	356,88	5,00	720,00	5,50	792,00	6,00	871,,20	6,00	Dinas Sosial
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial	Persen	43,83	40,00	43,89	500,00	43,95	550,00	44,02	605,00	44,02	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan	Persen	100,00	2.578,71	100,00	360,00	100,00	396,00	100,00	435,00	100,00	Dinas Sosial
			Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas	Persen	0,73	90,15	0,91	349,29	1,10	384,22	1,30	422,64	1,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	Persen	16,66	-	20,83	-	41,66	-	62,50	-	62,50	
				Persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Persen	68,00	-	70,00	-	72,00	-	75,00	-	75,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase perempuan dalam organisasi publik	Persen	5,70	-	5,80	-	5,90	-	6,00	-	6,00	
			Perlindungan perempuan	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan	Persen	100,00	309,44	100,00	115,70	100,00	127,27	100,00	140,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan Keterpenuhi Indikator Kabupaten Layak Anak/ Status Kabupaten Layak Anak	Persen	63,00	55,52	65,00	105,35	67,00	115,88	70,00	127,47	70,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program perlindungan khusus anak	Persentase Anak perlu perlindungan yang mendapatkan pelayanan	Persen	25,00	171,17	27,00	128,94	28,00	141,84	29,00	156,02	29,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<p>Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah</p>															
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka	66,60	-	67,31	-	67,76	-	68,22	-	68,22	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Air			Angka	72,00	-	53,81	-	53,81	-	54,01	-	54,01	
		Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Udara			Angka	82,00	-	85,69	-	85,79	-	85,89	-	85,89	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Lahan			Angka	51,00	-	56,49	-	58,20	-	59,91	-	59,91	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti	Persen	1,00	1.612,24	100,00	1.682,52	100,00	1.850,77	100,00	2.035,85	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola di Kabupaten Dairi	Persen	100,00	228,30	100,00	2.285,80	100,00	2.514,38	100,00	2.765,81	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengendalian B3 dan limbah B3	Persen	100,00	-	100,00	60.000	100,00	66.000	100,00	72.600.	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persen	100,00	60,00	100,00	150,00	100,00	165,00	100,00	181,50	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persen	100,00	-	100,00	70,00	100,00	77,00	100,00	84,70.	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Persen	100,00	-	100,00	400.000	100,00	440.000	100,00	484.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	Persen	0,00	-	100,00	241.000	100,00	265.100	100,00	291.610	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah	Persen	68,00	11.117,20	73,00	8.449,50	72,00	9.294,45	71,00	10.223,89	71,00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Persen	24,00	-	35,00	-	40,00	-	45,00	-	45,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	1,00-2,00	-	2,00-3,00	-	3,00-4,00	-	4,00-5,00	-	4,00-5,00	
	Meningkatnya pengelolaan pariwisata	Indikator Sasaran: Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD			Persen	3,59	-	4,88	-	5,04	-	5,17	-	5,17	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan	Persen	30,00	6.961,74	33,00	3.022,00	37,00	3.324,00	40,00	3.656,62	40,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	Persen	63,00	281,74	63,00	553,00	100,00	608,30	100,00	669,13	100,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM kepariwisataan	Persen	40,00	1.048,41	60,00	400,00	80,00	440,00	100,00	484,00	100,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian	Indikator Sasaran: Laju pertumbuhan perdagangan sektor eceran			Persen	5,93		6,72		7,51		8,30		8,30	
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang meningkat produksi dan kualitasnya	Persen	20,00	876,40	40,00	1.189,14	60,00	1.308,05	80,00	1.438,85	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
				Persentase IKM yang terfasilitasi permodalannya	Persen	20,00		20,00		20,00		20,00		80,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kerjasama pemasaran produk lokal yang dijalankan	Persen	-	97,24	33 (4 kerja sama)	160,00	33 (4 kerja sama)	176,00	33 (4 kerja sama)	193,60	33 (4 kerja sama)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
				Persentase produk lokal yang dipasarkan secara online	Persen	-	-	15,00	-	15,00	-	20,00	-	50,00	
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase harga kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau	Persen	100,00	240,69	100,00	296,79	100,00	326,47	100,00	359,11	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	Persen	100,00	200,50	100,00	313,24	100,00	344,56	100,00	379,02	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar	Persen	9 (1 pasar)	133.741	27 (1 pasar)	408.211	27 (1 pasar)	449.032	37 (1 pasar)	493.936	37 (1 pasar)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal	Persen	10,00	152,97	12,00	70,52	13,00	77,57	15,00	85,33	15,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan melalui aplikasi online	Persen	70,00	51,51	75,00	336,80	80,00	370,48	90,00	407,52	90,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				IKM Perizinan	Nilai	77,75	-	78,00	-	78,50	-	80,00	-	80,00	
				Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	90,00	-	90,00	-	90,00	-	95,00	-	95,00	
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah penanam modal	Persen	21,00	-	22,00	160,00	23,00	176,00	24,00	193,60	24,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Persen	0,00	-	39,00	74,81	40,00	82,29	41,00	90,52	41,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen	16,00	75.435	16,00	70,00	16,00	77,00	16,00	84,70	16,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM dengan peningkatan volume usaha	Persen	20,00	1.034,70	20,00	330,00	20,00	363,00	20,00	399,30	20,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM

Misi 4: Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)		Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	D	-	C	-	CC	-	B	-	B	
	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	Indikator Sasaran: Nilai SAKIP			Nilai	CC	-	B	-	B	-	BB	-	BB	
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	3.220,47	100,00	4.432,79	100,0	4.876,07	100,00	5.363,68	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase bahan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklan juti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklan juti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program perekonomian dan pembangunan	Persentase bahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklan juti	Persen	100,00	2.926,69	100,00	2.644,39	100,0	2.908,83	100,00	3.199,72	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase bahan kebijakan bidang pembangu nan yang ditindaklan juti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program urusan penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kelembagaan	Pering kat Kompo sit	Tingkat Komposi t 3	-	Tingkat Komposi t 3	-	Tingkat Komposi t 3	-	Tingkat Komposit 3	-	Tingkat Komposit 3	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat struktur	Persen	85,00	-	90,00	-	95,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase PD dengan IKM Minimal 80	Persen	8,00	-	10,00	-	12,0	-	15,00	-	15,00	
				Persentase PD dengan SAKIP minimal B	Persen	28,00	-	38,00	-	50,0	-	67,00	-	67,00	
				Persentase usulan kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase pelayanan protokol administrasi umum yang sesuai standar	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	100,00	12.397,18	100,00	14.329,05	100,0	15.761,96	100,00	17.338.,15	100,00	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan	Persen	100,00	859,99	100,00	770,31	100,0	847,34	100,00	932,08	100,00	BAPPEDA
			Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan indikator kinerja RKPD terhadap RPJMD	Persen	100,00	896,00	100,00	751,10	100,0	826,21	100,00	908,83	100,00	BAPPEDA
			Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD	Persen	100,00	514,98	100,00	780,05	100,0	858,06	100,00	943,86	100,00	BAPPEDA
				Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPD	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	
			Program pengembangan SDM	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Persen	78,81	368,12	78,91	1.660,76	79,0	1.826,84	79,13	2.009,52	79,13	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki pendidikan tinggi	Persen	51,95	-	52,38	-	52,5	-	52,49	-	52,49	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program kepegawaian daerah	Persentase pengisian jabatan sesuai kebutuhan	Persen	83,09	1.113,60	80,17	1.482,60	77,3	1.630,88	74,34	1.793,90	74,34	BKPSDM
				Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase penurunan disiplin pegawai	Persen	0,42	-	0,42	-	0,2	-	0,17	-	0,17	
	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	Indikator Sasaran: Opini BPK			Predikat	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai standar	Persen	100,00	202,62	100,00	200,43	100,0	220,47	100,00	242,52	100,00	BKAD
				Persentase PD yang realisasi belanja minimal 95%	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)	
				Persentase layanan penatausahaan keuangan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	
			Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Persen	65,00	1.460,41	75,00	811,00	75,0	892,10	75,00	981.31	75,00	BKAD
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	100,00	1.867,34	100,00	2.535,68	100,0	2.789,25	100,00	3.068,17	100,00	BAPENDA
			Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase pengawasan internal sesuai standar	Persen	90,00	2.243,85	90,00	2.116,00	90,0	2.327,00	90,00	2.560,36	90,00	Inspektorat
				Persentase OPD yang memiliki temuan berulang turun	Persen	90,00	-	90,00	-	90,0	-	90,00	-	90,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase OPD yang menindaklanjuti evaluasi akuntabilitas	Persen	90,00	-	90,00	-	90,0	-	90,00	-	90,00	
			Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona WBK dan WBBM	Persen	25,00	236,77	38,00	241,00	50,0	265,10	50,00	291,61	50,00	Inspektorat
				Persentase OPD yang telah memenuhi rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	Predikat	B	-	B	-	B	-	B	-	B	
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Angka	72	-	74	-	77	-	80	-	80	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik	Persen	97,00	200,00	99,00	-	100,0	575,13	100,00	575,13	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	37,00	-	75,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	98,00	-	99,00	-	99,5	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Perkawinan Tercatat	Persen	20,20	-	27,00	-	50,0	-	75,00	-	75,00	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	28,00	1.245,27	56,00	1.250,00	84,0	1.375,00	100,00	1.512,50	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklan juti	%	100,00	5.136,81	100,00	10.790,34	100,0	11.869,37	100,00	13.056,31	100,00	Kecamatan
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip sesuai dengan standar	%	55,00	26,26	60,00	50,00	65,0	55,00	70,00	60,50.	70,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan arsip dan keutuhan arsip sesuai dengan NSPK (Norma standar, prosedur dan kriteria) kearsipan	%	25,00	24,76	25,00	50,00	25,0	55,00	25,00	60,50	25,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indikator Sasaran: Indeks SPBE			Angka	2,00	-	2,50	-	2,70	-	3,00	-	3,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	Persen	75,00	2.399,78	75,00	2.511,11	75,0	2.762,22	75,00	3.038,49	75,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	20,00	6.084,95	50,00	5.201,26	75,0	5.721,38	100,00	6.293,52	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid	Persen	100,00	-	100,00	133.302	100,0	146.632	100,00	161.295	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian	Persen	100,00	27,18	100,00	167,55	100,0	184,30	100,00	202,74	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat		Indikator Tujuan: Indeks Rasa Aman			Nilai	-	-	0,91	-	0,92	-	0,92	-	0,93	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Meningkatnya ketahanan daerah	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Daerah			Angka	70	-	75	-	80	-	85	-	85	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00	5.546,07	100,00	1.552,70	100,0	1.707,97	100,00	1.878,87	100,00	BPBD
				Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase pelayanan pemulihan pasca bencana	Persen	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penanganan kebakaran yang dilaksanakan	Persen	100,00	859,52	100,00	871,71	100,00	958,88	100,00	1.054,71	100,00	BPBD
	Meningkatnya kohesivitas sosial	Indikator Sasaran: Angka potensi konflik sosial			Jumlah	4	-	3	-	2	-	1	-	1	SATPOL PP
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Persen	60,00	3.027,26	65,00	2.514,41	70,0	2.765,86	75,00	3.042,47	75,00	SATPOL PP
				Persentase penegakan produk hukum daerah	Persen	80,00	-	85,00	-	90,0	-	95,00	-	95,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	146,19	100,00	150,89	100,0	165,98	100,00	182,58	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	100,00	970,10	100,00	994,10	100,0	1.093,51	100,00	1.202,86	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	Persen	100,00	406,10	100,00	525,00	100,0	577,50	100,00	635,25	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan agama	Persentase fasilitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang sesuai peraturan	Persen	100,00	507,17	100,00	554,40	100,0	609,40	100,00	670,34	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Cakupan pencegahan dini potensi konflik di masyarakat	Persen	100,00	-	100,00	115,98	100,0	127,58	100,00	140,33	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya keberdayaan desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun			Persen	0,59	-	0,61	-	0,63	-	0,65	-	0,65	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Meningkatnya kemandirian desa	Indikator Sasaran: Persentase Desa Maju			Persen	0,043	-	0,050	-	0,062	-	0,075	-	0,075	
			Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Persen	6,60	50,00	19,80	100,00	33,0	110,00	39,60	121,00	39,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	60,00	411,52	80,00	650,00	80,1	715,00	80,25	786,50	80,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program administrasi pemerintahan desa	Persentase tingkat Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa	Persen	40,00	7.058,24	50,00	2.941,56	55,6	3.235,72	61,11	3.559,23	61,11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika															
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah		Indikator Tujuan: Indeks Infrastruktur			Persen	47,98	-	49,58	-	51,16	-	51,78	-	51,78	
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Indikator Sasaran: Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar			Persen	70,10%	-	77,09%	-	89,07%	-	89,79%	-	89,79%	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan	Persen	6,89	65.262,74	8,21	33.663,83	9,45	37.030,22	10,69	40.733,24	10,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase panjang jaringan jalan yang terbangun	Persen	64,97	-	65,59	-	66,21	-	66,83	-	66,83	
				Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	90,12	-	90,70	-	91,86	-	93,02	-	93,02	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak	Persen	85,61	1.731,71	87,07	600,00	88,52	660,00	89,98	726,60	89,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan	Persen	79,54	5.786,90	81,30	1.250,00	83,06	1.375,00	84,82	1.512,50	84,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan memiliki rencana tata ruang	Persen	100,00	813,79	100,00	2.250,00	100,00	2.475,00	100,00	2.722,50	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase kawasan memiliki rencana rinci tata ruang	Persen	6,67	-	40,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan wilayah pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	587,17	100,00	300,00	100,00	330,00	100,00	330,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum	Persen	3,37	1.441,05	3,00	600,00	3,00	660,00	3,00	660,00	3,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	100,00	6.000,00	100,00	8.400,00	100,00	9.240,00	100,00	10.164,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan ketersediaan bangunan pemerintah	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase lampu jalan yang terpelihara (penerangan jalan umum)	Persen	60,00	744,64	70,00	6.450,00	80,00	7.095,00	90,00	7.804,50	90,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase tenaga terampil konstruksi terlatih	Persen	12,00	-	32,00	200.000.000	52,00	220.000.000	72,00	242.000.000	72,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Berkurangnya kawasan kumuh	Indikator Sasaran: Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha			Persen	22,06	-	24,99	-	27,91	-	30,83	-	30,83	
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak masyarakat yang terkena dampak program pemerintah	Persen	100,00	49,27	100,00	150,00	100,00	165,00	100,00	181,50	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban bencana	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	Persen	71,02	1.078,27	71,79	4.150,00	72,66	4.565,00	73,53	5.021,50	73,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki jalan lingkungan memadai	Persen	64,18	6.267,16	68,55	4.300,00	72,92	4.730,00	77,29	5.203,00	77,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase di wilayah perumahan dan permukiman	Persen	61,27	1.751,26	62,13	1.550,00	62,99	1.705,00	63,42	1.875,00	63,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan lalu lintas	Indikator Sasaran: Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan memadai			Persen	55	-	60	-	65	-	70	-	70	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan	Persen	60,00	1.078,53	60,00	1.727,95	70,00	1.900,74	70,00	2.090,81	70,00	Dinas Perhubungan
				Cakupan layanan trayek	Persen	10,00	-	10,00	-	10,00	-	15,00	-	15,00	
				Persentase regulasi bidang perhubungan yang tersedia	Persen	60,00	-	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00	

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD tahun 2019-2024. Fungsi RTRW merupakan matra spasial penyusunan perencanaan pembangunan yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Dairi.

Kedudukan RTRW Kabupaten Dairi merupakan penjabaran RTRW Provinsi Sumatera Utara ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang yang operasional. Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai acuan/pedoman dalam:

- a. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan rencana sektoral lainnya di Kabupaten Dairi;
- b. Pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Perwujudan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. Penetapan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- f. Penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten juga harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya) sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034.

6.4.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Dairi

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Dairi yaitu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi meliputi:

- 1) Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah, melalui strategi peningkatan interaksi kawasan untuk perkembangan ekonomi dengan pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya.
- 2) Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, melalui strategi:
 - a) Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b) Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.
 - c) Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d) Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.
- 3) Peningkatan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi), melalui strategi:
 - a) Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah.
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal.

- c) Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi daerah.
- 4) Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung, dan lain-lainnya, melalui strategi:
- a) Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 - b) Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat.
 - c) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - d) Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung.
 - e) Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk *enclave* dan relokasi.
 - f) Melarang aktivitas penduduk dalam hutan lindung.
- 5) Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui strategi:
- a) Peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
 - b) Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c) Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
 - d) Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- 6) Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui strategi:

- 1) Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
- 2) Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- 3) Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- 4) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- 5) Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman.
- 6) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.

6.4.2. Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Dairi

- 1) Pemantapan sistem pusat perkotaan di Kabupaten Dairi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu: Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).
- 2) Pengembangan sistem infrastruktur yang terintegrasi, meliputi: jaringan transportasi darat dan danau, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air baku/bersih dan jaringan prasarana wilayah lainnya yang dikembangkan dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan aksesibilitas secara berkesinambungan, sinergis dan berjenjang antar PKLp, PPL, PPK, hingga ke PKW yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya.

6.4.3. Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Dairi

- 1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung dalam RPJMD tahun 2019-2024 diarahkan pada:

- a) kawasan rawan bencana alam geologi meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan abrasi.
 - b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi cekungan air tanah Sidikalang dan sempadan mata air.
- 2) Kebijakan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2019-2024.
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dalam RPJMD tahun 2019-2024 diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pariwisata untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan produksi komoditas pertanian unggulan dan ketersediaan pangan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a) pertanian tanaman pangan yang dikembangkan pada lahan sawah fungsional dan lahan sawah potensial yang tersebar di seluruh kecamatan,
 - b) pertanian hortikultura yang dikembangkan pada lahan tersebar meliputi Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Berampu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu dan Kecamatan Pegagan Hilir.
 - c) tanaman perkebunan dikembangkan dan diarahkan pada lahan yang tersebar di seluruh kecamatan.
 - d) peternakan diarahkan pada pengembangan sentra peternakan besar dan kecil di seluruh Kecamatan.
 - e) perikanan diarahkan dan dikembangkan untuk perikanan tangkap dan budidaya perikanan meliputi Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kecamatan Pegagan Hilir dan Kecamatan Lae Parira.
 - f) industri diarahkan dan dikembangkan untuk mendukung pengolahan produk pertanian khususnya komoditas

pertanian unggulan dalam rangka peningkatan nilai tambah pertanian dengan memperhatikan konektivitas sentra produksi pertanian.

- g) pariwisata diarahkan dan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam, budaya dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- 4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam RPJMD 2019-2024 diarahkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang terintegrasi dalam pengembangan kepariwisataan, pertanian dan perkotaan serta lingkungan hidup.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi, baik program-program yang mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun untuk memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan.

Jumlah anggaran yang tersedia mengacu pada bab III (Tiga) RPJMD Perubahan ini terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kapasitas riil keuangan mengalami perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 348.515.347.455,41, sementara pada tahun 2022 menurun menjadi Rp. 259.606.710.551,73, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 350.262.298.137,52, sementara pada tahun 2024 kembali menurun sebesar Rp. 349.187.716.594,70. Sementara untuk belanja daerah juga mengalami hal yang sama dengan kapasitas riil keuangan daerah. Pada tahun 2021 belanja daerah sebesar Rp. 1.208.249.492.000,00, menurun pada tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing sebesar Rp. 1.194.539.656873,00 dan Rp. 1.189.984.589.793,69. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.192.468.544.644,30.

Pada dasarnya ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi saja, melainkan bisa dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti APBN maupun pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya kemudian menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Tabel 7. 1 Capaian Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dairi Tahun 2019-2020

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					351.814.700		270.958.555				
1	01	PENDIDIKAN				82.712.150		87.059.718				
1	01	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.861.000	100	1.129.803	Dinas Pendidikan
1	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	600.100	100	66.010	Dinas Pendidikan
1	01	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	56.700	100	40.767	Dinas Pendidikan
1	01	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Pendidikan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 0 1 01 07	Program Manajemen Pendidikan	APK PAUD	Persen	29,97	31	79.024.900	32,03	85.808.966	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD	Unit	191	205		186		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,52	106,82		101,16		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	95,41	95,61		96,9		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	96,63	96,73		100		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,59	76,75		96,9		
		Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	Persen	99,17	99,3		124,27		
		Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Persen	99,37	99,47		89,85		
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,57	9,58		9,58		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,29	0,21		0,55		
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,47	0,43		0,93		
		Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100		100		
		Angka Kelulusan	Persen	100	100		100		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		SMP/MTs								
		Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI	Persen	100	100		66			
		Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	Persen	100	100		30			
		Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	93	94		35,22			
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	95,5	96		36,75			
		Angka Melek Huruf Usia 15-44 Tahun	Persen	99,86	99,87		99,8			
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persen	70,96	74,19		60,61			
1	0108	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	64,98	27,9	1.151.600	18,26	14.172	Dinas Pendidikan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Persentase Guru SD/MI Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	Persen	27,77	87,1		74,41					
		Persentase Guru SMP/MTs Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	Persen	87	27,92		89,72					
		Persentase Guru TK Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	0,66	0,86		2,4					
		Persentase Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	36,39	36,59		38,47					
		Persentase Guru SMP/MTs Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	46,66	46,73		51,75					
1	02	01		KESEHATAN				61.912.150		60.349.864		
1	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.974.400	100	2.331.086	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	363.300	100	723.782	Dinas Kesehatan
1	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	109.900	100	100.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Kesehatan
1	02	01	07	Program Upaya Kesehatan	Cakupan terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Persen	65	70	54.816.300	72	55.305.216	Dinas Kesehatan
					Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		69		
					Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	Orang	3	2		6		
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Orang	70	65		93		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Persen	85	100		79,95			
		Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	Persen	85	100		81,19			
		Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		72,35			
		Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		65			
		Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		80			
		Cakupan Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		98,18			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		79,51			
		Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		61,54			
		Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	Persen	85	100		50,46			
		Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta (/100.000 Penduduk)	Orang	<1	< 1		< 1			
		Cakupan Angka Kematian Jemaah Haji (/100.000 Penduduk)	Orang	<1	< 1		< 1			
		Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue) (/100.000 Penduduk)	Orang	55	53		59,54			
		Usia Harapan Hidup	Tahun	69,2	69,3		69			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		75					
		Cakupan Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	100		50,32					
		Cakupan Keluarga Menjadi Anggota JKN	Persen	80	85		79,69					
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Unit	12	18		-					
1	02	01	08	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapat perawatan kesehatan	Persen	85	87	100			
					Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,17	0,16	0,35			
					Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	1,5	1,4	2,49			
					Ketersediaan obat di Puskesmas	Persen	75	80	80			
					Persentase Industry Rumah Tangga Yang Memiliki Izin PIRT	Persen	80	85	70			
1	0	01	09	Program Pemberdayaan	Cakupan RT ber PHBS	Persen	66	68	843.900	69	-	Dinas

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					Target		Realisasi						
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	2			Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Keluarga Mempunyai Akses / Menggunakan Jamban Sehat	Persen	90	92		90,83			Kesehatan
					Persentase TTU/TPM Yang memenuhi Syarat kesehatan	Persen	85	87		24			
					Cakupan desa siaga aktif	Persen	69	70		59			
					Meningkatnya jumlah posyandu mandiri	Posyandu	15	30		-			
1	02			RSU Sidikalang						48.814.750		50.854.992	
1	02	01		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.704.700	100		862.776	RSUD Sidikalang
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	155.300	100		175.844	RSUD Sidikalang
1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	745.700	100		169.276	RSUD Sidikalang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					Target		Realisasi				
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	02	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	RSUD Sidikalang
1	02	07	Program Upaya Kesehatan	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	Hari	1	1	46.191.200	2,43	49.647.096	RSUD Sidikalang
				Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	Kriteria	Dasar	Dasar		-		
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	70,75	71,46		73,59		
				BOR (<i>Bad Occupacy Rate</i>)	Persen	73	75		61,35		
				AVLOS (<i>Average Length Of Stay</i>)	Hari	3	3		4,22		
				Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit yang baik	Persen	65	70		80		
				GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	Persen	30	30		21,52		
1	03	01	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					115.603.150		38.758.499	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	03	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	2.379.900	100	2.504.417	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	6.699.400	100	103.087	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	07	Program Sumber Daya Air	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih/Air Minum Layak	Persen	62,8	63,11	10.962.700	77,78	8.051.055	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	Persen	59,52	62,86		91,37		

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target		Realisasi		
								Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	03	01	08	Program Bangunan Gedung	Capaian ketersediaan bangunan pemerintah	Persen	100	100	1.270.200	100	2.487.475	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	Lokasi	2	2	500.000	2	850.856	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah lampu jalan yang terpelihara	Unit	200	300		250		
1	03	01	10	Program Jalan	Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	Km	20	20	90.836.000	18,35	23.815.965	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	49,4	56,75		56,51		
					Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	88,5	91,21		90,12		
					Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persen	100	100		100		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	03	01	11	Program Jasa Konstruksi	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Orang	35	100	300.000	76	157.941	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	12	Program Penataan Ruang	Tersedianya dokumen rencana tata ruang	Dokumen	1	2	2.532.100	2	787.703	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Meningkatnya pengendalian ruang	Persen	100	100		100		
					Ketersediaan data/informasi urusan pekerjaan umum	Dokumen		2		2		
1	04	01		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					27.365.850		16.865.805	
1	04	01	07	Program Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	84,49	88,67	6.189.850	70,8	2.956.637	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	01	08	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Km	9,2	8	19.601.800	9,05	7.047.807	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	46,8	58,42		29,56					
1	04	01	09	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan ketersediaan drainase untuk mengurangi terjadinya genangan	Meter	2.700	3.000	958	6.861.361	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
				Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Unit SR	793	800	564				
1	05			KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						744.483		
1	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	658.200	100	342.379	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	110.200	100	145.989	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	01	07	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Orang	700	500	895.800	500	256.115	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Forum	3	4		4		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Terbentuknya tim kewaspadaan dini di daerah	Kecamatan	-	15		15					
		Tersedianya laporan informasi tentang keamanan dan ketertiban	Laporan	-	180		-					
		Jumlah Parpol/Ormas/LSM/masyarakat yang dibina	Parpol,Ormas/LSM,Orang	9 Parpol, 59 Ormas/LSM, 300 Orang	15 Parpol, 59 Ormas/LSM, 300 Orang		10 Parpol, 16 Ormas/LSM, 300 Orang					
1	05	02		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4.521.500		2.621.948		
1	05	02	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	3.405.700	100	1.946.478	SATPOL PP
1	05	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	126.700	100	246.584	SATPOL PP
1	05	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	123.990	SATPOL PP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	05	02	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	SATPOL PP
1	05	02	07	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan lingkungan yang aman dan nyaman	Persen	100	100	866.250	100	304.896	SATPOL PP
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	50	55		55		
					Persentase penegakan produk hukum daerah	Persen	70	75		75		
1	05	03		PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					5.376.150		11.885.325	
1	05	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.657.700	100	2.617.012	BPBD
1	05	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	868.100	100	398.608	BPBD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	05	03	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	52.500	100	-	BPBD
1	05	03	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	BPBD
1	05	03	07	Program Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB):				1.934.800		8.188.077	BPBD
					- Gempa Bumi	Persen	0,703	0,693		-		
					- Longsor	Persen	0,673	0,664		-		
					- Kebakaran Hutan dan Lahan	Persen	0,648	0,622		-		
					- Cuaca Ekstrim	Persen	0,58	0,561		-		
					- Banjir/bandang	Persen	0,718	0,708		-		
					- Kekeringan	Persen	0,684	0,675		-		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Persen	50	60	42								
1	05	03	08	Program Kebakaran	Cakupan palayanan bencana kebakaran	Persen	23	40	845.200	23	681.628	BPBD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	45	60		62					
1	0 6	01		SOSIAL					3.721.950	1.817.921		
1	0 6	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	605.900	100	557.962	Dinas Sosial
1	0 6	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	354.700	100	263.313	Dinas Sosial
1	0 6	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Dinas Sosial
1	0 6	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 0 6 01 07	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM/PUSKESSOS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	5	5	1.294.300	-	440.490	Dinas Sosial
		Jumlah panti sosial/rumah singgah/ rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	1	1		-		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	5,2	5,5		47,47		
		Persentase meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat KAT	Persen	5	10		-		
1 0 6 01 08	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persen	N/A	100	344.200	3	96.986	Dinas Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	Persen	N/A	100		13		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					Target		Realisasi				
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		di luar panti									
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persen	N/A	100		13				
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti	Persen	N/A	100		10				
		Persentase Kemiskinan	Persen	8,2	8,14		8,14				
1	060109	Program Perlindungan Jaminan Sosial		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	Persen	N/A	100	1.000.000	100	459.170	Dinas Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						46.237.449		33.618.933	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 0 1 01		TENAGA KERJA				1.010.550		83.955		
2 0 1 01	07	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	Orang	48	64	530.250	0	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
			Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,4	1,36		1,75		
2 0 1 01	08	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	520	520	315.000	520	75.460	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2 0 1 01	09	Program Hubungan Industrial	Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK	Orang	100	100	165.300	100	8.495	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 0 2 01	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.495.467		909.848	
2 0 2 01 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	484.400	100	325.939	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 0 2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	538.400	100	47.153	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 0 2 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	8.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	0 2	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	0 2	01	07	Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Persen	49	55	119.240	5,71	159.518	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase perempuan dalam berpolitik	Persen	36	36		49,85		
					Persentase perempuan dalam berorganisasi	Persen	30	32		5,62		
2	0 2	01	08	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	0,03	0,028	1.288.500	0,01	101.623	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	Persen	18,18	36,36		12		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 0 2 01 09	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak	Persen	55	60	942.077	61,29	267.615	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 0 3 01	PANGAN					1.606.300		1.113.285	
2 0 3 01 07	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	9,04	9,23	1.606.300	72,30	1.113.285	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Persentase Konsumsi Energi Per kapita	Persen	91,72	91,87		95,44		
		Persentase Konsumsi Protein Per kapita	Persen	95	95,5		104,16		
		Ketersediaan pangan utama (produksi/tahun)	Ton/tahun	59.741	60.338		90,29		
		Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita/hari	3.897	3.995		2415,00		
		Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita/hari	93,24	94,64		95,63		
		Pengawasan dan	Sampel	9	10		-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		pembinaan keamanan pangan										
2	04	01		PERTANAHAN					851.300	3.330.141		
2	04	01	07	Program Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum	Persen	-	58	851.300	1,14	3.330.141	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	05	01		LINGKUNGAN HIDUP							5.759.950	5.089.488
2	05	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	2.602.300	100	2.664.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	196.300	100	239.739	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	0	01	07	Program Persampahan	Timbulan Sampah	Persen	45	59	1.899.100	62,96	1.493.998	Dinas

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Yang Ditangani							Lingkungan Hidup
		Operasionalisasi TPA di kabupaten	≥ 71 (nilai TPA)	71,43	72,12		-		
		Persentase sampah yang tertangani melalui 3R	Ton	71,75	78,92		45,85		
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	35,11	58,61		36,49		
		Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah B3	Unit	-	-		-		
2 0 5 01 08	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Persen	75	75	586.200	100	691.551	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,31	65,6		63,05		
		Peningkatan indeks kualitas air	Indeks	70	71		55,56		
		Peningkatan indeks kualitas udara	Indeks	55,55	81		98,02		
		Peningkatan indeks kualitas tutupan	Indeks	46,61	50		42,45		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					Target		Realisasi				
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		lahan									
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	100	100		100				
		Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	150	150		12,41				
		Terlaksananya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Batang	5000	5000		3.527				
		Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	Lokasi	7	7		7				
2	05	01	09	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	7	4	353.200	1	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	06	01		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.869.450		3.544.090	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 0 6 01 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.194.200	100	497.825	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2 0 6 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	893.600	100	1.611.579	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2 0 6 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2 0 6 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2 0 6 01 07	Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	Persen	91	93	658.800	95	1.434.686	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		Persentase pasangan ber akte nikah	Persen	19	25		24,35		
		Persentase	Persen	32	40		40		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		kepemilikan akte kelahiran										
		Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	60	70		73					
		Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	97	100		96					
		Cakupan pelayanan dokumen akta catatan sipil	Persen	25,76	32,5		32,18					
2	07	01		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.402.450		1.726.456		
2	07	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	663.400	100	430.241	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	116.200	100	273.493	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										dan Desa		
2	07	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	01	07	Program Penataan Desa	Jumlah desa cepat berkembang	Desa	27	5	1.700.000	-	651.623	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa terbentuk	Desa	15	15		15		
					Jumlah Pembentukan BUMdes dan Bumdes Bersama	BUMdes	35	25		17		
					Persentase Desa yang mempunyai Produk unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Persen	10	10		-		
2	07	01	08	Program Kerjasama Desa	Terlaksananya kerjasama antar desa	Persen	NA	100	800.000	25	24.690	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 0 7 01 09	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Profil Desa sesuai standard	Desa	27	27	600.000	27	122.619	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	10	100		100		
		Persentase Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.	Persen	80	100		100		
2 0 7 01 10	Program Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persen	NA	100	400.000	100	223.790	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 0 8 01	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.585.100		3.163.352	
2 0 8 01 07	Program Pengendalian Penduduk	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR	Persen	60	60,5	400.700	72,49	98.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
		Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	34,5	34,6		57		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	20	19,5		37,96		Penduduk dan KB			
2	08	01	08	Program Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	Persen	3,7	3,69	2.508.700	1,93	3.050.060	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
					Menurunnya kebutuhan ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	4,9	4,85		12,82		
					Menurunnya kelahiran total/Total fertility rate (TFR)	Persen	2,86	2,84		3,4		
					Rasio Akseptor KB	Persen	60	60		72,49		
					Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4		2		
2	08	01	09	Program Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	3,46	3,45	675.700	28,21	14.842	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	71	71,5		50		Penduduk dan KB			
		Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	Persen	3,46	3,44		53,26					
2	09	01		PERHUBUNGAN		4.049.750		3.121.623				
2	09	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.127.800	100	855.656	Dinas Perhubungan
2	09	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	929.100	100	463.464	Dinas Perhubungan
2	09	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	56.095	Dinas Perhubungan
2	09	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	09	01	07	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Angka kecelakaan lalulintas	Jumlah Laka	414	108	1.700.000	81	1.746.408	Dinas Perhubungan
				Cakupan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Persen	100	100	100				
				Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persen	100	100	100				
				Jumlah kendaraan layak jalan	Unit	2.500	2.600	2.878				
2	09	01	08	Program Pelayaran	Jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Unit	4	4	170.000	-	-	Dinas Perhubungan
2	10	01		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.875.000		7.268.716	
2	10	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	600.300	100	798.329	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	332.850	100	206.289	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	2.000	Dinas Komunikasi dan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										Informatika		
2	1 0	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 0	01	07	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi	Media	5 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7.819.000	7 Media desiminasi informasi	6.262.098	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persen	N/A	20		17,5		
2	1 1	01		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					1.362.700		192.685	
2	1 1	01	07	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	Unit	25	30	362.700	35	53.905	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Koperasi Sehat	Unit	5	10		35		
2	1	01	08	Program Pemberdayaan	Jumlah usaha kecil	Unit	1,544	1,594	1.000.000	1,634	138.780	Dinas

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	menengah yang bertumbuh								Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi	Unit	30	40		40					
		Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	Persen	1,94	2,51		1,96					
2	1 2	01		PENANAMAN MODAL					2.226.382	1.314.976		
2	1 2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	802.900	100	610.791	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1 2	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	195.932	100	124.048	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	1 2	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	-	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	1 2	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab										
					Target		Realisasi												
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
2	1 2	01	07	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor	Unit	15	112		115									Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerja an
					Jumlah nilai investasi	Milyar (Rp)	3.593,35	4.930,88	802.900	5,214,76		461.337							
					Pertumbuhan nilai realisasi investasi	Milyar (Rp)	533,27	623,50		1,279,26									
					Pertumbuhan nilai investasi	Persen	20,83	72,87		205,17									
2	1 2	01	08	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	Izin	79	85		42									Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerja an
					Persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP (tepat waktu)	Persen	100	100		90									
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	70,75	71,46	301.800	72,80		118.800							
					Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	80	90		88,89									
					Jumlah SDM pada DPMPPTSP yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	Orang	4	10		-									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1 3	01		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					2.500.000		713.557	
2	1 3	01	07	Program Kepemudaan	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan	Orang	1439	1450	1.000.000	25	139.980	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
					Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	OKP	47	50		-		
2	1 3	01	08	Program Keolahragaan	Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga	Cabang Olah Raga	7	7	1.500.000	6	573.577	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
					Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/Lapangan Olahraga	Persen	100	100		100		
2	1 4	01		STATISTIK					406.000		42.153	
2	1 4	01	07	Program Statistik Sektoral	Jumlah Ketersediaan Data Statistik Daerah	Dokume n	0 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	406.000	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	42.153	Dinas Komunikasi dan Informatikan
2	1 5	01		PERSANDIAN					200.000		-	

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target		Realisasi		
								Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	15	01	07	Program Peningkatan Pelayan Persandian	Penerapan pengamanan informasi dan persandian	Persen	NA	100	200.000	100	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01		KEBUDAYAAN					1.222.000		438.036	
2	16	01	07	Program Kebudayaan	Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan	Persen	20	20	1.222.000	4,34	438.036	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
					Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	1	1		1		
					Cakupan fasilitasi pengkajian seni budaya daerah	Kegiatan	3	4		-		
					Jumlah grup/ kelompok kesenian	Unit	5	5		5		
					Cakupan pagelaran seni dan budaya	Pagelaran	3	4		-		
					Cakupan sarana dan prasarana seni	Unit	1	1		1		
2	17	01		PERPUSTAKAAN					1.600.550		1.414.877	
2	17	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	785.600	100	475.483	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1 7	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	342.100	100	274.425	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	1 7	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	14.950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	1 7	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	1 7	01	07	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	25.000	25.500	350.000	3510	650.019	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah perpustakaan yang ada	Unit	303	305		305		
					Jumlah koleksi buku	Judul	14.680	15.680		560		
					Jumlah perpustakaan yang dikembangkan/ dibina	Unit	57	59		59		
2	1 8	01		KEARSIPAN					214.500		151.695	
2	1 8	01	07	Program Pegelolaan Arsip	Jumlah pengelolaan arsip secara baku	OPD	-	10	214.500	10	151.695	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Informasi kearsipan	Arsip	989	215		478		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		yang akurat								
		Meningkatnya SDM kearsipan terlatih	Orang	200	100		86			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					35.271.550		15.290.837		
3	01	PERIKANAN				630.000		371.998		
3	01	07	Program Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan	Persen	47,64	57,2	10,9	371.998	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Konsumsi ikan	Persen	0,84	0,89	0,9		
3	02	PARIWISATA				8.914.250		3.876.880		
3	02	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.735.805	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	194.537	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	0 2	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	0 2	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	0 2	01	07	Program Destinasi Parawisata	Jumlah Objek Wisata	Objek	2	2	6.152.400	2	852.988	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
					Jumlah Kunjungan wisata	Orang	128000	130000		51374		
					Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	Persen	1,75	1,8		0,62		
3	0 2	01	08	Program Pemasaran Parawisata	Jumlah event pariwisata	Event	3	3	516.700	1	567.850	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 0 2 01 09	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sumber daya manusia kepariwisataan	Orang	100	100	69.300	100	525.700	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 0 3 01	PERTANIAN					10.290.850		8.549.159	
3 0 3 01 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.869.400	100	1.539.395	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 0 3 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	451.500	100	593.466	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 0 3 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	327.600	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 0 3 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 0 3 01 07	Program Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan							
		- Padi Sawah	kw/ha	59,99	60,59		54,97		
		- Padi Ladang	kw/ha	34,44	34,78		37,27		
		- Jagung	kw/ha	62,93	63,56		56,34		
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	99,39	100,1		115,21		
		Produksi Hortikultura							
		- Jeruk Manis	Ton	52,577	53,629	4.878.600	23,469	2.619.222	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		- Kentang	Ton	72.864,600	74.321,89 2		2823,8		
		- Wortel	Ton	32,680	33,007		310,6		
		- Tomat	Ton	1.988,760	2.008,648		2784,5		
		- Cabe	Ton	71.307,010	73.446,22 0		20586,6		
		- Bawang Merah	Ton	2.925,350	3.013,111		374,9		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Kubis	Ton	3.543,920	3.614,798		7201,4		
		- Manggis	Ton	545,415	550,869		300,1		
		- Durian	Ton	16.689,974	17.023,77 4		2057,1		
		- Duku	Ton	819,520	827,715		1509,4		
		- Alpukat	Ton	1.940,870	1.960,279		2155,3		
		Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat							
		- Kopi	Ton	12.086,400	12.448,99 2		14.556		
		- Kakao	Ton	318,890	344,401		-		
		- Gambir	Ton	254,400	274,752		-		
		- Lada	Ton	17,400	17,582		-		
		- Kemiri	Ton	6.674,000	7.207,920		-		
		- Tembakau	Ton	906,000	915,459		166,42		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		- Kemenyan	Ton	0,700	1,050		-					
		- Aren	Ton	28,000	32,200		-					
		- Nilam	Ton	21,800	22,300		-					
		Jumlah Populasi Pternakan										
		- Sapi	Ekor	3.205	3.260		3.603					
		- Kerbau	Ekor	3.014	3.075		3.120					
		- Babi	Ekor	110.090	111.302		1.510					
		- Ayam	Ekor	1.175.723	1.188.830		994.786					
3	0 3	01	08	Program Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Unit	41	45	1.237.000	7	1.322.290	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	0 3	01	09	Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya organisme pengganggu tanaman	Persen	100	100	400.000	100	729.054	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	0 3	01	10	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang di bina	Kelompo k	453	1.580	600.000	1.669	1.083.959	Dinas Pertanian,

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Cakupan penyuluh pertanian	Persen	100	100		100		Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Terlaksananya Promosi Hasil Produksi Pertanian	Event	1	3		-			
3	03	01	11	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak				Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
				- Sapi	Persen	33	33,33	15,4		
				- Kerbau	Persen	35	35,7	18,85		
				- Babi	Persen	7,1	7,17	7,15		
				- Kambing	Persen	8,08	8,24	5,66		
				- Ayam	Persen	1,1	1,12	0,91		
				- Anjing	Persen	30,6	30,91	29,98		
3	06	01		PERDAGANGAN				3.399.100	870.871	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 0 6 01 07	Program Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pameran / promosi produk daerah	Pameran	6	12	400.000	1	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 0 6 01 08	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah kemitraan antara pedagang Kabupaten Dairi dengan pengusaha diluar Kabupaten Dairi	Kemitraan	2	5	2.077.500	1	435.717	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/e- commerce	System	-	1		1		
		Jumlah pasar yang representatif	Pasar	5	6		-		
3 0 6 01 09	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrolgian	Unit	500	700	921.600	600	435.154	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	Unit	500	650		574		
3 0 01	PERINDUSTRIAN							1.621.929	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
						12.037.350						
3	07	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	970.300	100	617.412	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	830.600	100	322.904	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	07	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	07	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 0 7 01 07	Program Percepatan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	8	10	1.876.500	10	23.145	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	Unit	728	733		733		
		Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	Persen	1,94	2,51		1,96		
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	Orang	100	100		100		
		Jumlah sentra IKM potensial	Sentra	-	1		1		
		Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	0,39	0,4		0,39		
3 0 7 01 08	Program Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang meningkat teknologi industri	IKM	7	10	8.237.100	10	658.468	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	URUSAN PENUNJANG					46.324.205		33.644.488	
4 0 01	PERENCANAAN							1.792.196	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
						5.000.950						
4	01	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.285.700	100	756.023	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	191.200	100	309.556	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	55.801	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target	Persen	NA	75	1.000.000	71,24	335.430	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										Daerah		
4	01	08	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	2.401.200	100	335.386	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah	
			Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target	Persen	N/A	75	71,24					
4	02		KEUANGAN									
4	02	01	KEUANGAN DAN ASET DAERAH					6.810.900		3.894.936		
4	02	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 bulan	12 bulan	1.674.900	100	1.107.579	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Bulan	12 bulan	12 bulan	485.300	100	689.523	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	417.600	100	74.710	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	02	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan dokumen laporan keuangan daerah	31 desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	775.900	100	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	02	01	07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan APBD tepat waktu (31 Desember)	31 des	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3.237.900	Tepat Waktu	1.624.085	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Terasistensinya DPA dan Anggaran kas SKPD					Persen	100	100	100				
Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah					Opini	WTP	WTP	WTP				
4	02	01	08	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi BMD	Persen	100	100	219.300	100	399.039	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rasio pemanfaatan Aset					Persen	100	100	100				
4	02	02		PENDAPATAN DAERAH					4.563.250		3.433.537	
4	02	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.398.300	100	1.261.317	Badan Pendapatan Daerah
4	02	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	513.500	100	448.064	Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	02	03	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	39.221	Badan Pendapatan Daerah
4	02	04	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Badan Pendapatan Daerah
4	02	07	07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Persen	90	90	2.528.600	115,95	1.684.935	Badan Pendapatan Daerah
Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah					Persen	1,97	2,5	2,8				
Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah					Persen	13,5	13,5	14,96				
Cakupan monitoring dan evaluasi retribusi daerah					Persen	100	100	100				
4	03	01		KEPEGAWAIAN DAERAH					11.867.200		4.127.974	
4	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	720.500	100	469.990	BKPSDM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 3 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	121.400	100	163.395	BKPSDM
4 0 3 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	100.000	100	120.000	BKPSDM
4 0 3 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	BKPSDM
4 0 3 01 07	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	609	1376	6.848.450	201	1.892.336	BKPSDM
4 0 3 01 08	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan	Orang	17	40	1.000.000	-	-	BKPSDM
4 0 3 01 09	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	3.145	1.496	2.859.000	N/A	1.444.555	BKPSDM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Jumlah Dokumen dan Naskah Kebutuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Dokumen/Naskah	3.251	309		383					
		Jumlah OPD yang dikunjungi untuk Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	OPD	45	47		41					
		Jumlah pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kali	17	4		6					
4	04	01	10	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi penerbitan SK Pensiun/Purna	Orang	385	191	200.000	239	37.698	BKPSDM
4	05	01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					700.000		306.414	
4	05	01	07	Program Penelitian dan Pengembangan	Penerapan replikasi jejaring inovasi daerah	Persen	-	100	700.000	87,50	306.414	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
				Terbangunnya penerapan sistem manajemen berbasis	Persen	-	100	-				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		e-kelitbangan										
		Dokumen kajian penelitian dan pengembangan	Dokumen	2	5		3					
4	06	01		INSPEKTORAT				2.743.585		2.666.978		
4	06	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	908.200	100	610.132	Inspektorat
4	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	420.200	100	226.698	Inspektorat
4	06	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	105.000	100	-	Inspektorat
4	06	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Inspektorat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	060107 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	Persen	90	90	1.060.285	59,4	1.711.761	Inspektorat
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan	Persen	100	100		100		
		Indeks Persepsi	Indeks	N/A	60		-		
4	060108 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2	3	232.050	3	118.387	Inspektorat
4	0801	KECAMATAN SIDIKALANG				4.122.260		7.454.339	
4	080101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	965.000	100	959.801	Kec. Sidikalang
4	080102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	199.200	100	354.538	Kec. Sidikalang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 8 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Sidikalang
4 0 8 01 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sidikalang	Persen	-	60	704.360	-	235.412	Kec. Sidikalang
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,2	78,4		67,65		
4 0 8 01 08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan di Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,2	78,4	2.238.700	78,4	5.904.588	Kec. Sidikalang
4 0 8 02	KECAMATAN SUMBUL					1.330.260		1.435.908	
4 0 8 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	329.280	100	292.451	Kec. Sumbul
4 0 8 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	109.830	100	137.125	Kec. Sumbul

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 8 02 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Sumbul
4 0 8 02 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sumbul	Persen	-	60	530.250	-	65.332	Kec. Sumbul
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	77,2	77,4		78,65		
4 0 8 02 08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Pegagan Julu I	Indeks	77,2	77,4	345.900	77,41	941.000	Kec. Sumbul
4 0 8 03	KECAMATAN SILIMA PUNGGAPUNGA					1.090.250		1.554.462	
4 0 8 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	297.500	100	342.168	Kec. Silima Pungga-pungga
4 0 8 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	145.400	100	248.194	Kec. Silima Pungga-pungga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 8 03 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Silima Pungga-pungga
4 0 8 03 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Silima Pungga-pungga	Persen	-	60	372.750	-	20.000	Kec. Silima Pungga-pungga
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-pungga	Indeks	76,8	77	82,1				
4 0 8 03 08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Parongil	Indeks	76,8	77	259.600	81,89	944.100	Kec. Silima Pungga-pungga
4 0 8 04	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU					719.670		445.823	
4 0 8 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	224.800	100	164.414	Kec. Siempat Nempu
4 0 8 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana	Persen	100	100	87.800	100	133.437	Kec. Siempat Nempu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Aparatur	kantor/aparatur								
4 0 8	04 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Siempat Nempu
4 0 8	04 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Siempat Nempu	Persen	-	60	392.070	-	147.972	Kec. Siempat Nempu
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	76,6	76,8	76,9				
4 0 8	05	KECAMATAN TIGALINGGA					750.250		449.124	
4 0 8	05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	194.500	100	193.046	Kec. Tigalingga
4 0 8	05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	126.000	100	79.493	Kec. Tigalingga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 8 05 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Tigalingga
4 0 8 05 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Tigalingga	Persen	-	60	414.750	-	176.585	Kec. Tigalingga
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tigalingga	Indeks	77,4	77,6	77,65				
4 0 8 06	KECAMATAN TANAH PINEM					778.120		848.839	
4 0 8 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	225.200	100	317.044	Kec. Tanah Pinem
4 0 8 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	96.600	100	263.019	Kec. Tanah Pinem
4 0 8 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Tanah Pinem

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		dan pelaporan kinerja perangkat daerah										
4	08	06	07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Tanah Pinem	Persen	-	60	-	441.320	268.776	Kec. Tanah Pinem
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Indeks	77	77,2	78,65				
4	08	07		KECAMATAN PEGAGAN HILIR						637.050	585.952	
4	08	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	180.000	234.094	Kec. Pegagan Hilir
4	08	07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	100	61.950	188.028	Kec. Pegagan Hilir
4	08	07	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan	Persen	100	100	100	15.000	-	Kec. Pegagan Hilir

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		dan pelaporan kinerja perangkat daerah										
4	08	07	07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Pegagan Hilir	Persen	-	60	-	380.100	163.830	Kec. Pegagan Hilir
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks	76	76,2	76,64				
4	08	08		KECAMATAN PARBULUAN						659.150	518.206	
4	08	08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	176.900	162.874	Kec. Parbuluan
4	08	08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	100	81.900	173.895	Kec. Parbuluan
4	08	08	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan	Persen	100	100	100	15.000	-	Kec. Parbuluan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		dan pelaporan kinerja perangkat daerah										
4	08 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	-	60	385.350	-	181.437	Kec. Parbuluan			
08		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Indeks	76,4	76,6		78,81					
4	08	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR				619.500		390.686				
4	08	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	163.000	100	174.466	Kec. Siempat Nempu Hilir
4	08	09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	74.800	100	118.615	Kec. Siempat Nempu Hilir
4	08	09	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Siempat Nempu Hilir

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		dan pelaporan kinerja perangkat daerah								
4	080907	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	-	60	366.700	-	97.605	Kec. Siempat Nempu Hilir	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks	75,8	76		76,61			
4	0810	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU				709.890		461.335		
4	081001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	197.190	100	156.345	Kec. Siempat Nempu Hulu	
4	081002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100.800	100	135.399	Kec. Siempat Nempu Hulu	
4	081004	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Siempat Nempu Hulu	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		dan pelaporan kinerja perangkat daerah								
4	081007	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	-	60	396.900	-	169.591	Kec. Siempat Nempu Hulu	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks	76,2	76,4		79,3			
4	0811	KECAMATAN LAE PARIRA				603.550		431.750		
4	081101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	167.200	100	197.812	Kec. Lae Parira	
4	081102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	68.250	100	149.700	Kec. Lae Parira	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	08	11	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Lae Parira
4	08	11	07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Lae Parira	Persen	-	60	353.100	-	84.238	Kec. Lae Parira
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Indeks	74,8	75		77,54		
4	08	12		KECAMATAN GUNUNG SITEMBER					754.830		374.433	
4	08	12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	209.370	100	155.735	Kec. Gunung Sitember
4	08	12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	164.850	100	94.175	Kec. Gunung Sitember

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 8 12 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Gunung Sitember
4 0 8 12 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Gunung Sitember	Persen	-	60	365.610	-	124.523	Kec. Gunung Sitember
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Indeks	74,6	74,8		76,61		
4 0 8 13	KECAMATAN BERAMPU					579.250		416.776	
4 0 8 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	153.700	100	195.959	Kec. Berampu
4 0 8 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	82.950	100	148.497	Kec. Berampu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 8 13 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Berampu
4 0 8 13 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Berampu	Persen	-	60	327.600	-	72.320	Kec. Berampu
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Indeks	75	75,2		76,61		
4 0 8 14	KECAMATAN SILAHISABUNGAN					579.780		361.777	
4 0 8 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	174.600	100	191.499	Kec. Silahisabunga n
4 0 8 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	85.680	100	82.996	Kec. Silahisabunga n

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 0 8 14 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Silahisabunga n
4 0 8 14 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Silahisabungan	Persen	-	60	304.500	-	87.282	Kec. Silahisabunga n
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Indeks	75,6	75,8	76,81				
4 0 8 15	KECAMATAN SITINJO					704.510		1.693.043	
4 0 8 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	153.700	100	283.469	Kec. Sitinjo
4 0 8 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	82.950	100	115.641	Kec. Sitinjo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	08	15	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	15.000	100	-	Kec. Sitinjo
4	08	15	07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sitinjo	Persen	-	60	187.960	-	103.400	Kec. Sitinjo
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Indeks	75,4	75,6	77,69				
4	08	15	08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Panji Dabutar	Indeks	75,4	75,6	264.900	77,69	1.190.533	Kec. Sitinjo
5				URUSAN PENDUKUNG					56.798.753		18.145.274	
5	01	01		SEKRETARIAT DAERAH					38.590.670		4.990.869	
5	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	16.757.000	100	610.132	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 0 1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	12.468.000	100	226.698	Sekretariat Daerah
5 0 1 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	551.250	100	-	Sekretariat Daerah
5 0 1 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	30.000	100	-	Sekretariat Daerah
5 0 1 01 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase SDA yang memiliki disiplin	Persen	100	100	156.900	100	145.000	Sekretariat Daerah
5 0 1 01 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	3	1.120.000	3	426.679	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	Persen	70,75	71,46		73,38		
		Persentase analisis kebijakan organisasi	Persen	100	100		100		
		Cakupan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	Persen	100	100		100		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC		C		
		Nilai LPPD	Kriteria	Sedang	Sedang		Tinggi		
5		Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	Persen	100	100		83,33		
		Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik	Persen	100	100		100		
	01	Efisiensi hasil tender	Persen	3,15	3,25	1.084.400	3	624.661	Sekretariat Daerah
	08	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah	Persen	100	100		80,76		
		Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	100	100		100		
5		Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan	Naskah	24	24				
	01	Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun	Kali	4	6	1.419.820		262.668	Sekretariat Daerah
	09								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persen	100	100		100		
		Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik daerah	Persen	100	100		100		
5		Rekomendasi LKPJ	Ada/Tidak ada	Ada	Ada		Ada		
		Terwujudnya pelayanan kesehatan	Persen	100	100		-		
	01	Cakupan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Persen	100	100	3.655.700	51,08	1.417.722	Sekretariat Daerah
	10	Persentase penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Persen	100	100		-		
5		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/Rastra	Orang	16.525	16.525				
	01	Terwujudnya peran serta dan kesetaraan	Persen	100	100	381.000	100	149.675	Sekretariat Daerah
	11								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target		Realisasi		
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		gender dalam pembangunan							
5	01 12 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis Produk hukum daerah yang terfasilitasi	Jenis	4	4	595.600	4	757.703	Sekretariat Daerah
		Cakupan jenis produk hukum yang disosialisasikan	Persen	100	100		100		
		Cakupan Perda yang disosialisasikan	Persen	100	100		100		
		Persentase fasilitasi bantuan hukum	Persen	100	100		100		
5	01 13 Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani	Persen	100	100	371.000	100	369.931	Sekretariat Daerah
		Cakupan pengendalian inflasi daerah	Persen	100	100		100		
		Persentase Peningkatan Cakupan layanan PDAM Tirta Nciho menurut wilayah teknis	Persen	8	8		8		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Target		Realisasi					
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Persentase Kios Yang Dikelola PD Pasar yang Ditempati Pedagang	Persen	90	92		89					
5	02	01		SEKRETARIAT DPRD				18.208.083	13.154.405			
5	02	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	2.632.000	100	2.376.051	Sekretariat DPRD
5	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	Persen	100	100	1.705.500	100	3.616.532	Sekretariat DPRD
5	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	239.000	-	-	Sekretariat DPRD
5	02	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	17.850	100	-	Sekretariat DPRD
5	02	01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi	Persen	100	100	1.183.850	-	-	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		sesuai bidangnya								
5	02 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya persidangan di DPRD	Persen	100	100	12.429.883	100	7.161.822	Sekretariat DPRD	
		Rasio pembahasan prolegda	Persen	15	15		-			
		Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu			
		Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu			
		Jumlah pelaksanaan reses	Kali	3	3		3			
		Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Kali	15	15		15			
		Terciptanya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Persen	100	100		100			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Target		Realisasi			
					Kinerja	Rp X 1000	Kinerja	Rp X 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Dokumen	4	4		4			
		Terfasilitasinya kesehatan anggota DPRD	Persen	100	100		100			
		JUMLAH				36.446.657		371.658.087		

Tabel 7. 2 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 2021-2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	268,53	100 %	201,84	100 %	222,03	100 %	244,23	100 %	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf Umur 15-45 Tahun	0 %	0 %	0	99,88 %	100.822,34	99,89 %	6.355,05	99,90 %	6.990,55	99,91 %	7.689,61	0 %	0	Dinas Pendidikan
				Persentase lembaga PAUD yang memiliki Izin	0 %	0 %	0	19,00 %	0	19,10 %	0	19,20 %	0	19,30 %	0	19,30 %	0	Dinas Pendidikan
				APK PAUD	0 %	0 %	0	33,39 %	0	34,36 %	0	35,33 %	0	36,30 %	0	36,30 %	0	Dinas Pendidikan
				APK SD	0 %	0 %	0	98,72 %	0	99,22 %	0	99,71 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pendidikan
				APK SMP	0 %	0 %	0	97,00 %	0	97,10 %	0	97,20 %	0	97,30 %	0	97,30 %	0	Dinas Pendidikan
				APM SD	0 %	0 %	0	89,84 %	0	90,29 %	0	90,74 %	0	91,18 %	0	91,18 %	0	Dinas Pendidikan
				APM SMP	0 %	0 %	0	90,45 %	0	90,72 %	0	90,99 %	0	91,26 %	0	91,26 %	0	Dinas Pendidikan
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0 %	0 %	0	0,45 %	0	0,35 %	0	0,25 %	0	0,15 %	0	0,15 %	0	Dinas Pendidikan
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0 %	0 %	0	0,85 %	0	0,75 %	0	0,65 %	0	0,55 %	0	0,55 %	0	Dinas Pendidikan
				AM SD	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)	
		AM SMP	0 %	0 %	0	99,52 %	0	99,57 %	0	99,62 %	0	99,67 %	0	99,67 %	0	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	0 %	0 %	0	66,00 %	0	67,00 %	0	67,00 %	0	68,00 %	0	68,00 %	0	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs	0 %	0 %	0	30,00 %	0	31,00 %	0	31,00 %	0	32,00 %	0	32,00 %	0	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	0 %	0 %	0	25,85 %	0	27,14 %	0	28,43 %	0	29,72 %	0	29,72 %	0	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	0 %	0 %	0	25,85 %	0	27,14 %	0	28,43 %	0	29,72 %	0	29,72 %	0	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP Berakreditasi B	0 %	0 %	0	60,71 %	0	60,81 %	0	60,91 %	0	61,01 %	0	61,01 %	0	Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa yang masuk SMA unggulan	0 Org	0 Org	0	65 Orang	0	100 Orang	0	135 Orang	0	160 Orang	0	160 Orang	0	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	0 %	0 %	0	34,24 %	0	35,95 %	0	37,66 %	0	39,37 %	0	39,37 %	0	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi	0 %	0 %	0	25,35 %	0	26,61 %	0	27,88 %	0	29,15 %	0	29,15 %	0	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
				minimum														
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	0 %	0 %	0	38,49 %	0	39,66 %	0	40,83 %	0	58,14 %	0	58,14 %	0	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	0 %	0 %	0	28,90 %	2.283,99	29,30 %	2.484,35	30,15 %	2.732,78	31,20 %	3.006,06	31,20 %	0	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	0 %	0 %	0	75,30 %	0	76,20 %	0	77,30 %	0	78,40 %	0	78,40 %	0	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	0 %	0 %	0	89,74 %	0	89,75 %	0	89,77 %	0	89,78 %	0	89,78 %	0	Dinas Pendidikan
				Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	0 %	0 %	0	2,41 %	0	2,43 %	0	2,44 %	0	2,46 %	0	2,46 %	0	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik	0 %	0 %	0	38,49 %	0	38,51 %	0	38,53 %	0	38,55 %	0	38,55 %	0	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik	0 %	0 %	0	51,77 %	0	51,79 %	0	51,81 %	0	51,83 %	0	51,83 %	0	Dinas Pendidikan
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0 %	0 %	0	1:15 %	0	1:15 %	0	1:15 %	0	1:15 %	0	1:15 %	0	Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal dalam penilaian kelayakan usul perizinan yang diselenggarakan oleh masyarakat	0 %	0 %	0	23,25 %	0	34,88 %	0	46,51 %	0	58,14 %	0	58,15 %	0	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	77.125,96	100 %	80.119,45	100 %	88.131,39	100 %	96.944,53	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil;	0 %	0 %	0	100 %	93.079,97	100 %	30.583,69	100 %	33.642,06	100 %	37.006,27	100 %	0	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)		
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Dinas Kesehatan
		Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	0 %	0 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	0	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Gizi Buruk	0 %	0 %	0	0,77 %	0	0,65 %	0	0,60 %	0	0,55 %	0	0,55 %	0	0	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Gizi Kurang	0 %	0 %	0	1,3 %	0	1,2 %	0	1,1 %	0	1 %	0	1 %	0	0	Dinas Kesehatan
		Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapatkan perawatan Kesehatan	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)		
			Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Angka kesakitan DBD	0 Per 100.000 Penduduk	0 Per 100.000 Penduduk	0	50 Per 100.000 Penduduk	0	48 Per 100.000 Penduduk	0	45 Per 100.000 Penduduk	0	40 Per 100.000 Penduduk	0	40 Per 100.000 Penduduk	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Dinas Kesehatan
			Persentase KLB Ditangani < 24 jam	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Persentase Keluarga dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	0 %	0 %	0	93 %	0	95 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Persentase penanganan Kejadian gawat darurat sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	0 %	0 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)		
			Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	0 %	0 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standart	0 %	0 %	0	80 %	0	82 %	0	85 %	0	87 %	0	87 %	0	Dinas Kesehatan
			Persentase penilaian Standar SNARS (RSUD)	0 %	0 %	0	78 %	27.150,84	80 %	2.421,68	85 %	40.465,68	85 %	42.575,53	85 %	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemenuhan upaya peningkatan pelayanan (RSUD)	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (RSUD)	0 %	0 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	95 %	0	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
			Persentase Pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS (RSUD)	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan	
			CRR (Cost Recovery Rate) (RSUD)	0 Nilai	0 Nilai	0	59,15 Nilai	0	59,61 Nilai	0	62,08 Nilai	0	65,45 Nilai	0	65,45 Nilai	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS (RSUD)	0 %	0 %	0	100 %	8.634,28	100 %	826.813,28	100 %	10.331,14	100 %	11.131,14	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan	0 %	0 %	0	72 %	93.81	69 %	307.75	70 %	338.52	72 %	372.37	72 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga aktif	0 %	0 %	0	100 %	435.79	100 %	295.07	100 %	324.58	100 %	357.04	100 %	0	Dinas Kesehatan
			Persentase Posyandu Aktif	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	12.517,85	100 %	15.045,25	100 %	16.549,78	100 %	18.204,76	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1		03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	0 %	0 %	0	92,17 %	5.678,57	93,06 %	2.250	93,96 %	2.475	94,85 %	2.722,5	94,85 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1		03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan	0 %	0 %	0	79,54 %	5.786,90	81,30 %	1.250	83,06 %	1.375	84,82 %	1.512,5	84,82 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1		03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan TPS3R di wilayah kecamatan	0 %	0 %	0	13,33 %	0	20,00 %	1.000	33,33 %	1.100	46,67 %	1.210	46,67 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1		03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak	0 %	0 %	0	85,61 %	1.731,71	87,07 %	600	88,52 %	660	89,98 %	726	89,98 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1		03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase di wilayah perumahan dan permukiman	0 %	0 %	0	61,27 %	1.751,26	62,13 %	1.550	62,99 %	1.705	63,42 %	1.875,50	63,42 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1		03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman	0 %	0 %	0	100 %	1.246,11	100 %	1.225,00	0 %	0	0 %	0	0 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 %	0 %	0	100 %	600,00	100 %	8.400,00	100 %	9.240,00	100 %	10.164,00	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan ketersediaan bangunan pemerintah	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase lampu jalan yang terpelihara (penerangan jalan umum)	0 %	0 %	0	60,00 %	744,64	70,00 %	6.450,00	80,00 %	7.095,00	90,00 %	7.804,50	90,00 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan	0 %	0 %	0	6,89 %	65.262,74	8,21 %	33.663,83	9,45 %	37.030,22	10,69 %	40.733,24	10,69 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase panjang jaringan jalan yang terbangun	0 %	0 %	0	64,97 %	0	65,59 %	0	66,21 %	0	66,83 %	0	66,83 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	0 %	0 %	0	90,12 %	0	90,70 %	0	91,86 %	0	93,02 %	0	93,02 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih	0 %	0 %	0	12,00 %	0	32,00 %	200,00	52,00 %	220,00	72,00 %	242,00	72,00 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan memiliki rencana tata ruang	0 %	0 %	0	100 %	813,79	100 %	2.250,00	100 %	2.475,00	100 %	2.722,50	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase kawasan memiliki rencana rinci tata ruang	0 %	0 %	0	6,67 %	0	40,00 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
				Cakupan wilayah pemanfaatan ruang yang terkendali	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak masyarakat yang terkena dampak program pemerintah	0 %	0 %	0	100 %	49,27	100 %	150,00	100 %	165,00	100 %	181,50	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban bencana	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	0 %	0 %	0	71,02 %	1.078,27	71,79 %	4.150,00	72,66 %	4.565,00	73,53 %	5.021,50	73,53 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki jalan lingkungan memadai	0 %	0 %	0	64,18 %	6.267,17	68,55 %	4.300,00	72,92 %	4.730,00	77,29 %	5.203,00	77,29 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	6.002,95	100 %	6.452,15	100 %	7.097,37	100 %	7.807,10	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	0 %	0 %	0	60 %	3.027,26	65 %	2.514,41	70 %	2.765,86	75 %	3.042,44	75 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
				Persentase penegakan produk hukum daerah	0 %	0 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	95 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	5.639,70	100 %	6.335,67	100 %	8.767,23	100 %	8.675,96	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0 %	0 %	0	100 %	4.329,13	100 %	4.310,34	100 %	4.943,87	100 %	4.720,26	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase pelayanan informasi rawan bencana	0 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase pelayanan pemulihan pasca bencana	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayananan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	0 %	0 %	0	100 %	825,00	100 %	995,00	100 %	1.032,00	100 %	1.135,20	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	3.580,93	100 %	3.545,20	100 %	3.899,72	100 %	4.289,69	100 %	0	Dinas Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan	0 %	0 %	0	34,15 %	646,88	34,63 %	905,00	35,10 %	995,50	35,58 %	1.095,05	35,58 %	0	Dinas Sosial	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)	0 %	0 %	0	4,80 %	356,88	5 %	720,00	5,5 %	792,00	6 %	871,20	6 %	0	Dinas Sosial	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial	0 %	0 %	0	34,15 %	40,01	34,20 %	500,00	34,25 %	550,00	34,30 %	605,00	34,30 %	0	Dinas Sosial	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan	0 %	0 %	0	100 %	2.578,71	100 %	360,00	100 %	396,00	100 %	435,60	100 %	0	Dinas Sosial	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				0		0		0		0		0		0		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kebijakan rencana tenaga kerja yang dijalankan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	45.00 %	360,00	70.00 %	0	70.00 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensi	0 %	0 %	0	0 %	70,00	0 %	70,00	0,12 %	700,00	0,15 %	970,00	0,15 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	0 %	0 %	0	20.00 %	75,90	22.00 %	83,49	25.00 %	191,83	30.00 %	211,02	30.00 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	0 %	0 %	0	0,87 %	170,00	1,00 %	1.345,50	1.50 %	276,55	2.00 %	304,20	2.00 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															

Kode			Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas	0 %	0 %	0	0,73 %	90,15	0,91 %	349,29	1,1 %	384,22	1,3 %	422,64	1,3 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	0 %	0 %	0	20,83 %	0	41,66 %	0	62,50 %	0	76,92 %	0	76,92 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	0 %	0 %	0	68 %	0	70 %	0	72 %	0	75 %	0	75 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
				Persentase perempuan dalam organisasi publik	0 %	0 %	0	5,7 %	0	5,8 %	0	5,9 %	0	6 %	0	6 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Perempuan dalam Politik	0 %	0 %	0	0,2 %	0	0,25 %	0	0,25 %	0	0,27 %	0	0,27 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan	0 %	0 %	0	100 %	309,44	100 %	115,70	100 %	127,27	100 %	140,00	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan Keterpenuhi Indikator Kabupaten Layak Anak/ Status Kabupaten Layak Anak	0 %	0 %	0	63 %	59,52	65 %	105,35	67 %	115,88	70 %	127,47	70 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak perlu perlindungan yang mendapatkan pelayanan	0 %	0 %	0	25 %	171,17	100 %	128,94	100 %	141,84	100 %	156,02	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung kedaulatan dan kemandirian pangan	0 %	0 %	0	70,00 %	250,00	80,00 %	270,00	90,00 %	297,00	100 %	326,70	100 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	0 %	0 %	0	0,38 %	255,10	0,39 %	350,00	0,40 %	385,00	0,41 %	423,50	0,41 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
			Persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	0 %	0 %	0	78,00 %	0	81,00 %	0	84,00 %	0	87,00 %	0	87,00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	0 %	0 %	0	75,00 %	0	78,00 %	0	81,00 %	0	84,00 %	0	84,00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	0 %	0 %	0	62,00 %	95,97	72,00 %	0	0,00 %	590,00	0,00 %	649,00	0,00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 %	0 %	0	100 %	587,17	100 %	300,00	100 %	330,00	100 %	330,00	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum	0 %	0 %	0	3,37 %	1.441,05	3,00 %	600,00	3,00 %	660,00	3,00 %	660,00	3,00 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	5.208,98	100 %	5.149,11	100 %	5.664,02	100 %	6.230,43	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang sesuai	0 %	0 %	0	100 %	166,60	100 %	1.758,74	100 %	1.934,61	100 %	2.128,08	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
				standar														
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	1.612,24	100 %	1.682,52	100 %	1.850,77	100 %	2.035,85	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola di Kabupaten Dairi	0 %	0 %	0	100 %	228,30	100 %	2.285,80	100 %	2.514,38	100 %	2.765,81	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengendalian B3 dan limbah B3	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	60,000	100 %	66,00	100 %	72,60	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	0 %	0 %	0	100 %	60,00	100 %	150,00	100 %	165,00	100 %	181,50	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	70,00	100 %	77,00	100 %	84,70	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	400,00	100 %	440,00	100 %	484,00	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	241,00	100 %	265,10	100 %	291,61	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah	0 %	0 %	0	68 %	11.117,20	73 %	8.449,50	72 %	9.294,45	71 %	10.223,89	71 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	0 %	0 %	0	24 %	0	35 %	0	40 %	0	45 %	0	45 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	9.170,28	100 %	7.216,70	100 %	7.938,37	100 %	8.732,21	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	0 %	0 %	0	97,00 %	200,00	99,00 %	0	100,0 %	575,13	100 %	575,13	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0 %	0 %	0	37,00 %	0	75,00 %	0	100,0 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	0 %	0 %	0	98,00 %	0	99,00 %	0	99,5 %	100,00	100 %	110,00	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Perkawinan Tercatat	0 %	0 %	0	27,00 %	0	50,0 %	0	75,0 %	0	90,0 %	0	90,00 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	0 %	0 %	0	28,00 %	1.245,27	56,00 %	1.250,00	84,0 %	1.375,00	100 %	1.512,50	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	3.165,94	100 %	3.303,04	100 %	3.633,35	100 %	3.996,68	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Desa	0 %	0 %	0	6,60 %	50,00	19,80 %	100,00	33,0 %	110,00	39,60 %	121,00	39,60 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tingkat Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa	0 %	0 %	0	40 %	7.058,24	50 %	2.941,56	55,6 %	3.235,72	61,11 %	3.559,29	61,11 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	0 %	0 %	0	60 %	411,52	80,1 %	650,00	80,25 %	715,00	80,25 %	786,50	80,25 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	3.831,69	100 %	3.883,29	100 %	4.271,62	100 %	4.698,78	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	0 %	0 %	0	1,82 %	30,50	1,71 %	184,94	1,61 %	203,43	1,51 %	223,78	1,51 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	0 %	0 %	0	63,13 %	8.585,22	68,33 %	60,00	72,53 %	66,00	75,73 %	72,60	75,73 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase peningkatan fungsi kampung berkualitas	0 %	0 %	0	48,14 %	0	55,56 %	0	62,96 %	0	70,37 %	0	70,37 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota kelompok kegiatan /POKTAN (Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia) ber-KB	0 %	0 %	0	70,25 %	789,98	71,25 %	793,70	72,25 %	873,07	73,25 %	960,37	73,25 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	4.834,94	100 %	5.228,23	100 %	5.751,05	100 %	6.326,15	100 %	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA J)	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan	0 %	0 %	0	60,00 %	1.078,55	60,00 %	1.727,95	70,00 %	1.900,74	70,00 %	2.090,81	70,00 %	0	Dinas Perhubungan	
				Cakupan layanan trayek	0 %	0 %	0	10,00 %	0	10,00 %	0	10,00 %	0	15,00 %	0	15,00 %	0	Dinas Perhubungan	
				Persentase regulasi bidang perhubungan yang tersedia	0 %	0 %	0	60,00 %	0	0 %	0	80,00 %	0	80,00 %	0	80,00 %	0	Dinas Perhubungan	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	3.753,21	100 %	4.357,63	100 %	4.793,40	100 %	5.272,74	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	0 %	0 %	0	75,00 %	2.399,78	75,00 %	2.511,11	75,0 %	2.762,22	75,00 %	3.038,44	75,00 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	"Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi"	0 %	0 %	0	20,00 %	6.084,95	50,00 %	5.201,26	75,0 %	5.721,38	100 %	6.293,52	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	0 %	0 %	0	16 %	75,43	16 %	70,00	16 %	77,00	16 %	84,70	16 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi yang terlatih	0 %	0 %	0	0 %	0	4 %	80,00	4 %	88,00	4 %	96,80	12 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM dengan peningkatan volume usaha	0 %	0 %	0	20 %	1.034,70	20 %	330,00	20 %	363,00	20 %	399,30	20 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	5.024,32	100 %	5.554,75	100 %	6.180,23	100 %	6.798,25	100 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal	0 %	0 %	0	10 %	310,00	12 %	70,50	13 %	0,00	15 %	450,00	15 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penanam modal	0 %	0 %	0	21 %	120,00	22 %	252,00	23 %	145,20	24 %	159,72	24 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan	0 %	0 %	0	70 %	165,40	75 %	255,00	80 %	420,00	90 %	462,00	90 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				IKM Perizinan	0 Nilai	0 Nilai	0	72,17 Nilai	0	78 Nilai	0	78,5 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	0 %	0 %	0	88 %	0	89 %	0	89,5 %	0	90 %	0	95 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala	0 %	0 %	0	1,2 %	325,00	1,2 %	411,40	1,5 %	434,24	1,6 %	491,66	1,6 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	K
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	0 %	0 %	0	0 %	0	39 %	50,00	40 %	100,00	41 %	110,00	41 %	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	6.717,48	100 %	6.986,88	100 %	7.685,57	100 %	8.454,12	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0 %	0 %	0	21 %	604,98	21 %	950,00	25 %	1.045,00	27 %	1.149,50	27 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
				Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda	0 %	0 %	0	0 %	0	2 %	0	2 %	0	2 %	0	2 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan	0 %	0 %	0	32 %	924,84	32 %	1.330,89	36 %	1.463,98	37 %	1.610,38	37 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	133,30	100,0 %	146,63	100 %	161,29	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian	0 %	0 %	0	100 %	27,18	100 %	167,55	100,0 %	184,30	100 %	202,74	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 %	0 %	0	36 %	882,79	100 %	1.234,79	100 %	1.358,27	100 %	1.494,10	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Tingkat partisipasi lembaga masyarakat dalam pengembangan budaya daerah	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian	0 %	0 %	0	0 %	0	50 %	200,00	100 %	220,00	100 %	242,00	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Situs dan beda cagar budaya yang dilestarikan	0 %	0 %	0	2,5 %	234,69	2,5 %	620,00	10 %	682,00	10 %	750,20	10 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pelayanan perpustakaan daerah	0 %	0 %	0	47 %	202,38	47 %	50,00	60 %	55,00	70 %	60,50	70 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	3.138,22	100 %	527,00	100 %	579,70	100 %	637,67	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase ketersediaan arsip sesuai dengan standar	0 %	0 %	0	55,00 %	26,26	60,00 %	50,00	65,0 %	55,00	70,00 %	60,50	70,00 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat keberadaan arsip dan keutuhan arsip sesuai dengan NSPK (Norma standar, prosedur dan kriteria) kearsipan	0 %	0 %	0	25,00 %	24,76	25,00 %	50,00	25,0 %	55,00	25,00 %	60,50	25,00 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi perikanan	0 %	0 %	0	10,00 %	731,29	12,00 %	400,00	14,00 %	440,00	16,00 %	484,00	16,00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan	0 %	0 %	0	30 %	6.961,74	33 %	3.022,00	37 %	3.324,20	40 %	3.656,62	40 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)				
				Jumlah Pendampingan Desa Wisata	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
				Persentase Masyarakat di Desa Wisata yang berperan dalam pengembangan kemitraan pariwisata	0 %	0 %	0	40 %	0	60 %	0	80 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	0 %	0 %	0	63 %	281,74	63 %	553,00	100 %	608,30	100 %	669,13	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM kepariwisataan	0 %	0 %	0	40 %	1.048,41	60 %	400,00	80 %	440,00	100 %	484,00	100 %	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	17.084,36	100 %	17.967,98	100 %	19.764,78	100 %	21.741,25	100 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat	0 %	0 %	0	0,87 %	9.762,28	0,89 %	3.285,00	0,91 %	3.613,50	0,93 %	3.974,85	0,93 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
				Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar	0 %	0 %	0	46.82 %	0	40.80 %	0	42.35 %	0	42.22 %	0	42.22 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Cakupan luas lahan yang diolah dengan alsintan	0 %	0 %	0	40.41 %	0	39.61 %	0	43.14 %	0	46.52 %	0	46.52 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Irigasi tersier dalam kondisi baik	0 %	0 %	0	46.82 %	5.223,78	48.09 %	1.000,00	49.38 %	1.100,00	50.66 %	1.210,00	50.66 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase Panjang Jalan usaha tani dan jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	0 %	0 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase embung pertanian yang dibangun/diperbaiki	0 %	0 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase Prasarana penunjang produksi pertanian yang dibangun	0 %	0 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	60.00 %	0	63.00 %	0	63.00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase BPP Kecamatan dalam kondisi baik	0 %	0 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan kesehatan hewan/ternak	0%	0 %	0	100%	768,07	100%	806,47	100%	856,80	100%	889,14	100%	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas lahan pertanian yang dilaksanakan pengendalian HPT	0 %	0 %	0	100.00 %	498,28	100.00 %	450,00	100.00 %	495,00	100.00 %	544,50	100.00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase luas lahan pangan yang dijamin dengan AOTP	0 %	0 %	0	0.00 %	0	35.12 %	0	70.52 %	0	100.00 %	0	100.00 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani yang naik kelas	0 %	0 %	0	13.79 %	419,24	22.26 %	500,00	26.47 %	550,00	30.68 %	605,00	30.68 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase fasilitasi kerjasama Kelompok Tani/Gapoktan dengan pelaku agribisnis yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	0.00 %	0	0.10 %	0	0.20 %	0	0.30 %	0	0.30 %	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar	0 %	0 %	0	9 (1 pasar) %	133,74	27 (1 pasar) %	408,21	27 (1 pasar) %	449,03	37 (1 pasar) %	493,93	37 (1 pasar) %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau	0 %	0 %	0	100 %	240,69	100 %	296,79	100 %	326,47	100 %	359,11	100 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTP yang sudah tertib ukur	0 %	0 %	0	100 %	200,50	100 %	313,24	100 %	344,56	100 %	379,02	100 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase kerjasama pemasaran produk lokal yang dijalankan	0 %	0 %	0	33 (4kerja sama) %	97,24	33 (4kerja sama) %	160,00	33 (4kerja sama) %	176,00	33 (4kerja sama) %	193,60	33 (4kerja sama) %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase produk lokal yang dipasarkan secara online	0 %	0 %	0	0 %	0	15 %	0	15 %	0	20 %	0	50 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	4.490,78	100 %	36,96	100 %	40,65	100 %	44,72	100 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat produksi dan kualitasnya	0 %	0 %	0	20 %	876,40	40 %	1.189,14	60 %	1.308,05	80 %	1.438,85	80 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Persentase IKM yang terfasilitasi permodalannya	0 %	0 %	0	20 %	0	20 %	0	20 %	0	20 %	0	80 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata pada SIINas	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	40 %	50,00	40 %	55,00	80 %	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01		SEKRETARIAT DAERAH																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	33.809,22	100 %	37.449,01	100 %	41.193,91	100 %	45.313,30	100 %	0	Sekretariat Daerah
				Indeks Kelembagaan	0 Tingkat Komposit	0 Tingkat Komposit	0	3 Tingkat Komposit	0	3 Tingkat Komposit	0	3 Tingkat Komposit	0	3 Tingkat Komposit	0	3 Tingkat Komposit	0	Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat struktur	0 %	0 %	0	85,00 %	0	90,00 %	0	95,00 %	0	100 %	0	100 %	0	Sekretariat Daerah
				Persentase PD dengan IKM Minimal 80	0 %	0 %	0	8,00 %	0	10,00 %	0	12,00 %	0	15,00 %	0	15,00 %	0	Sekretariat Daerah
				Persentase PD dengan SAKIP minimal B	0 %	0 %	0	28,00 %	0	38,00 %	0	50,0 %	0	67,00 %	0	67,00 %	0	Sekretariat Daerah
				Persentase usulan kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Sekretariat Daerah
				Persentase pelayanan protokol administrasi umum yang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	0 %	0 %	0	100 %	3.220,47	100 %	4.432,79	100 %	4.876,07	100 %	5.363,68	100 %	0	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
			Persentase bahan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Sekretariat Daerah
			Persentase bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	2.926,69	100 %	2.644,39	100 %	2.908,83	100 %	3.199,72	100 %	0	Sekretariat Daerah
				Persentase bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Sekretariat Daerah
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	23.678,09	100 %	24.249,80	100 %	26.674,78	100 %	29.342,26	100 %	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	12.397,18	100 %	12.397,18	100 %	12.397,18	100 %	17.338,15	100 %	0	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	4.650,38	100 %	5.288,87	100 %	5.817,76	100 %	6.399,54	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5		01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan indikator kinerja RKPd terhadap RPJMD	0 %	0 %	0	100 %	896,00	100 %	751,10	100 %	826,21	100 %	908,83	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5		01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD	0 %	0 %	0	100 %	514,98	100 %	780,05	100 %	858,06	100 %	943,86	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
					Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPd	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	02			KEUANGAN															
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	5.344,65	100 %	5.167,06	100 %	5.683,77	100 %	6.252,14	100 %	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5		02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan daerah sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	202.623,51	100 %	200.431,66	100 %	220.474,83	100 %	242.522,31	100 %	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase PD yang realisasi belanja minimal 95%	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
			Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu	31 Desember tahun anggaran	31 Desember tahun anggaran	0	31 Desember tahun anggaran	0	31 Desember tahun anggaran	0	31 Desember tahun anggaran	0	31 Desember tahun anggaran	0	31 Desember tahun anggaran	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase layanan penatausahaan keuangan sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	0 %	0 %	0	65,00 %	1.460,41	75,00 %	811,00	75,00 %	892,10	765,00 %	981,31	75,00 %	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	4.675,81	100 %	4.989,84	100 %	5.488,83	100 %	6.037,71	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	0 %	0 %	0	100 %	1.867,34	100 %	2.535,68	100 %	2.789,25	100 %	3.068,17	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	3.280,98	100 %	3.506,01	100 %	3.856,61	100 %	4.242,27	100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian jabatan sesuai kebutuhan	0 %	0 %	0	83,09 %	1.113,60	80,17 %	1.482,62	77,3 %	1.630,88	74,34 %	1.793,97	74,34 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
			Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase penurunan disiplin pegawai	0 %	0 %	0	0,42 %	0	0,42 %	0	0,2 %	0	0,17 %	0	0,17 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	0 %	0 %	0	78,81 %	368,12	78,91 %	1.660,76	79,0 %	1.826,84	79,13 %	2.009,52	79,13 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase ASN yang memiliki pendidikan tinggi	0 %	0 %	0	51,95 %	0	52,38 %	0	52,5 %	0	52,49 %	0	52,49 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0	100 %	859,99	100 %	770,31	100 %	847,34	100 %	932,08	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0	0	100 %	5.929,66	100 %	6.501,61	100 %	7.151,77	100 %	7.866,95	100 %	0	Inspektorat
6		01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan internal sesuai standar	0 %	0	0	90,00 %	2.243,85	90,00 %	2.116,00	90,00 %	2.327,60	90,00 %	2.560,36	90,00 %	0	Inspektorat
					Persentase OPD yang memiliki temuan berulang turun	0 %	0	0	90,00 %	0	90,00 %	0	90,00 %	0	90,00 %	0	90,00 %	0	Inspektorat
					Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	0 %	0	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Inspektorat
					Persentase OPD yang menindaklanjuti evaluasi akuntabilitas	0 %	0	0	90,00 %	0	90,00 %	0	90,00 %	0	90,00 %	0	90,00 %	0	Inspektorat
6		01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona WBK dan WBBM	0 %	0	0	25,00 %	236,77	38,00 %	241,00	50,0 %	265,10	50,00 %	291,61	50,00 %	0	Inspektorat
					Persentase OPD yang telah memenuhi rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi		0		Predikat B	0	Predikat B	0	Predikat B	0	Predikat B	0	Predikat B	0	Inspektorat
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01			KECAMATAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	5.783,86	100 %	5.844,38	100 %	6.428,82	100 %	7.071,70	100 %	0	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	2.367,36	100 %	5.474,56	100 %	6.022,02	100 %	6.624,22	100 %	0	Kecamatan Sidikalang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	71,87	100 %	261,90	100 %	288,09	100 %	316,90	100 %	0	Kecamatan Sidikalang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	44,99	100 %	30,69	100 %	33,76	100 %	37,13	100 %	0	Kecamatan Sidikalang
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	2.892,65	100 %	3.461,96	100 %	3.808,15	100 %	4.188,97	100 %	0	Kecamatan Sumbul
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	537,70	100 %	1.225,00	100 %	1.347,50	100 %	1.482,25	100 %	0	Kecamatan Sumbul

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	0 %	0	100 %	37,54	100 %	225,00	100 %	247,50	100 %	272,25	100 %	0	Kecamatan Sumbul	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	59,32	100 %	75,50	100 %	83,05	100 %	91,35	100 %	0	Kecamatan Sumbul	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	2.747,64	100 %	2.993,36	100 %	3.292,69	100 %	3.621,96	100 %	0	Kecamatan Silima Pungga punga
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	556,46	100 %	1.244,42	100 %	1.368,87	100 %	1.505,75	100 %	0	Kecamatan Silima Pungga punga	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	19,87	100 %	172,16	100 %	189,37	100 %	208,31	100 %	0	Kecamatan Silima Pungga punga	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)		K	Rp (jt)	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	77,50	100 %	66,00	100 %	72,60	100 %	79,86	100 %	0	Kecamatan Silima Pungga punga	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	2.084,37	100 %	2.322,14	100 %	2.554,36	100 %	2.809,79	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	89,10	100 %	185,69	100 %	204,26	100 %	224,69	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	25,55	100 %	134,28	100 %	147,70	100 %	162,47	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	29,03	100 %	81,02	100 %	89,12	100 %	98,03	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1.993,98	100 %	2,339,43	100 %	2.573,37	100 %	2.830,71	100 %	0	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	140,58	100 %	179,77	100 %	197,75	100 %	217,52	100 %	0	Kecamatan Tiga Lingga	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	12,94	100 %	350,16	100 %	385,17	100 %	423,69	100 %	0	Kecamatan Tiga Lingga	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	33,50	100 %	99,29	100 %	109,21	100 %	120,14	100 %	0	Kecamatan Tiga Lingga	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	2.016,40	100 %	2.278,68	100 %	2.506,55	100 %	2.757,21	100 %	0	Kecamatan Tanah Pinem

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	106,79	100 %	191,40	100 %	210,54	100 %	231,59	100 %	0	Kecamatan Tanah Pinem	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	37,43	100 %	173,80	100 %	191,18	100 %	210,29	100 %	0	Kecamatan Tanah Pinem	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	32,12	100 %	94,60	100 %	104,06	100 %	114,46	100 %	0	Kecamatan Tanah Pinem	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1.718,18	100 %	1.838,26	100 %	2.022,09	100 %	2.224,29	100 %	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	124,96	100 %	75,42	100 %	82,96	100 %	91,26	100 %	0	Kecamatan Pegagan Hilir	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	50,34	100 %	129,87	100 %	142,86	100 %	157,15	100 %	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	32,67	100 %	39,02	100 %	42,92	100 %	47,21	100 %	0	Kecamatan Pegagan Hilir
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1.733,50	100 %	2.093,82	100 %	2.303,20	100 %	2.533,52	100 %	0	Kecamatan Parbuluan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	77,32	100 %	145,00	100 %	159,50	100 %	175,45	100 %	0	Kecamatan Parbuluan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	40,42	100 %	206,80	100 %	227,48	100 %	250,22	100 %	0	Kecamatan Parbuluan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)		K	Rp (jt)	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	73,75	100 %	97,29	100 %	107,01	100 %	117,72	100 %	0	Kecamatan Parbuluan	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1.736,77	100 %	1.753,72	100 %	1.929,10	100 %	2.122,01	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	93,72	100 %	79,43	100 %	87,37	100 %	96,11	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	40,35	100 %	110,00	100 %	121,00	100 %	133,10	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	54,31	100 %	89,15	100 %	98,06	100 %	107,87	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1,869,20	100 %	2,053,22	100 %	2,258,54	100 %	2484,39	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	135,69	100 %	159,50	100 %	175,45	100 %	192,99	100 %	0	Kecamatan Nempu Hulu	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	80,18	100 %	200,20	100 %	220,22	100 %	242,24	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	45,26	100 %	74,99	100 %	82,48	100 %	90,73	100 %	0	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1.710,99	100 %	1.804,01	100 %	1.984,41	100 %	2.182,85	100 %	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	79,87	100 %	59,29	100 %	65,21	100 %	71,74	100 %	0	Kecamatan Lae Parira	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	47,81	100 %	133,10	100 %	146,41	100 %	161,05	100 %	0	Kecamatan Lae Parira	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	29,32	100 %	32,67	100 %	35,93	100 %	39,53	100 %	0	Kecamatan Lae Parira	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1.525,12	100 %	1.525,12	100 %	1.677,63	100 %	1.845,39	100 %	0	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	129,92	100 %	129,92	100 %	142,91	100 %	157,21	100 %	0	Kecamatan Gunung Sitember	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	112,53	100 %	112,53	100 %	123,78	100 %	136,16	100 %	0	Kecamatan Gunung Sitember	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	88,14	100 %	88,14	100 %	96,96	100 %	106,65	100 %	0	Kecamatan Gunung Sitember	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	1.537,06	100 %	1.611,87	100 %	1.773,05	100 %	1.950,36	100 %	0	Kecamatan Berampu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	85,81	100 %	70,90	100 %	77,99	100 %	85,79	100 %	0	Kecamatan Berampu	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	24,25	100 %	102,85	100 %	113,13	100 %	124,44	100 %	0	Kecamatan Berampu	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	20,58	100 %	21,78	100 %	23,95	100 %	26,35	100 %	0	Kecamatan Berampu	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	%	0	100 %	1,440,97	100 %	1,774,94	100 %	1,952,44	100 %	2,147,68	100 %	0	Kecamatan Silahisabungan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	104,98	100 %	97,04	100 %	106,74	100 %	117,42	100 %	0	Kecamatan Silahisabungan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	38,55	100 %	121,00	100 %	133,10	100 %	146,41	100 %	0	Kecamatan Silahisabungan	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	41,134	100 %	42,35	100 %	46,58	100 %	51,24	100 %	0	Kecamatan Silahisabungan	
X	X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program cpenunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	2.385,98	100 %	2.518,95	100 %	2.770,85	100 %	3.047,94	100 %	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	0 %	0 %	0	100 %	26,89	100 %	29,55	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	Kecamatan Sitinjo	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	506,49	100 %	1.472,95	100 %	1.620,25	100 %	1.782,27	100 %	0	Kecamatan Sitinjo	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	51,88	100 %	185,76	100 %	204,33	100 %	224,76	100 %	0	Kecamatan Sitinjo	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai	0 %	0 %	0	100 %	15,80	100 %	23,04	100 %	25,34	100 %	27,87	100 %	0	Kecamatan Sitinjo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (jt)			
			standar															
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	2.512,23	100 %	2.681,32	100 %	2.949,45	100 %	3.244,39	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	0 %	0 %	0	100 %	146,19	100 %	150,89	100 %	165,98	100 %	182,58	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	0 %	0 %	0	100 %	970,10	100 %	994,10	100 %	1.093,51	100 %	1.202,86	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	0 %	0 %	0	100 %	406,10	100 %	525,00	100 %	577,50	100 %	635,25	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp (jt)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K		Rp (jt)
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang sesuai peraturan	0 %	0 %	0	100 %	507,17	100 %	554,00	100 %	609,40	100 %	670,34	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan pencegahan dini potensi konflik di masyarakat	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	115,98	100 %	127,58	100 %	140,33	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

8.1. Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi

Pada sub bab ini akan ditampilkan capaian realisasi indikator kinerja utama daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 berdasarkan perbandingan antara rencana jumlah program dan kegiatan dengan realisasi pada masing-masing perangkat daerah.

Tabel 8. 1 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	JENIS IKU	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN RPJMD HINGGA 2020
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,13	-0,94	5,33	-17,64
2.	Indeks Gini	Indeks	0,234	0,27	0,226	83,70
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100,10	115,21	100,14	115,05
4.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	92,30	72,30	100,00	72,30
5.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	0,40	0,39	0,44	90,91
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,97	71,57	71,29	100,39
7.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,6	69,00	69,00	100,00
8.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,17	9,58	9,21	104,02
9.	Menurunnya Kelahiran Total/ Total	Persen	2,84	3,40	2,76	81,18

No	JENIS IKU	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN RPJMD HINGGA 2020
	<i>Fertility Rate (TFR)</i>					
10.	Persentase Kemiskinan	Persen	8,14	8.04	7,90	98,83
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,36	1,75	1,28	73,14
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,60	63,05	69,60	90,59
13.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	130.000	51.374	150.000	34,25
14.	Kontribusi Retribusi Wisata Terhadap PAD	Persen	1,80	0,62	2,00	31
15.	Persentase KUKM yang Menghasilkan Produk Unggulan	Persen	2,51	1,96	4,41	44,44
16.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	C	B	67,47
17.	Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100
18.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Persen	60,00	42,00	80,00	52,50
19.	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	Persen	75,00	75,00	95,00	78,95
20.	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	56,75	56,51	78,70	71,93
21.	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih	Persen	63,11	77.78	64,39	120,78
22.	Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	62,86	91,37	73,34	124,58
23.	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	58,42	29.56	85,53	34,56
24.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan	Poin	71,46	73,38	74,36	98,68

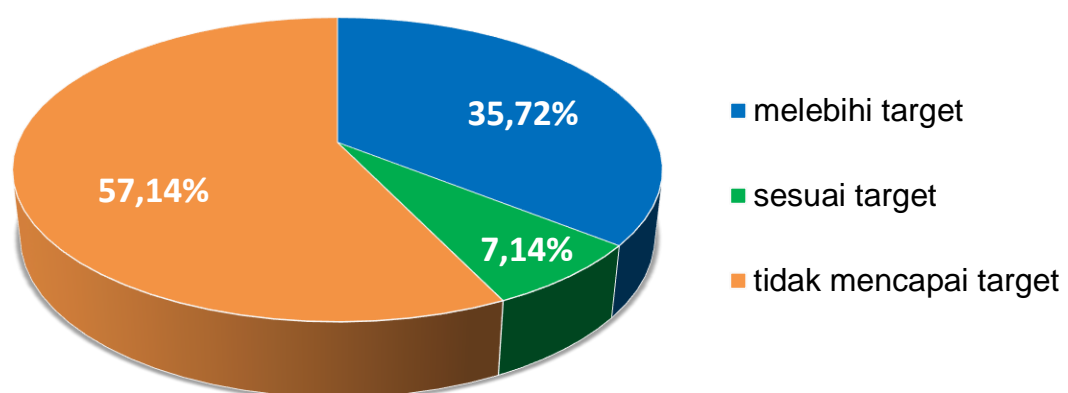
No	JENIS IKU	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN RPJMD HINGGA 2020
	Publik					
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penanaman Modal dan Perizinan	Poin	71,46	72,80	74,36	97,90
26.	Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	96,50	95,50	100,00	95,50
27.	Persentase OPD Menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	20,00	17,50	100,00	17,50
28.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Poin	71,46	73,59	74,36	98,64

Tabel 8. 2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2020 Berdasarkan Perbandingan antara Rencana Jumlah Program dan Kegiatan dengan Realisasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN	KATEGORI
1	Dinas Pendidikan	77,90	T
2	Dinas Kesehatan	56,00	R
3	RSUD Sidikalang	53,10	R
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	33,30	SR
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55,30	R
6	Satuan Polisi Pamong Praja	64,80	R
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38,40	SR
8	Dinas Sosial	66,10	S
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	50,00	SR
10	Dinas Lingkungan Hidup	50,00	SR
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57,50	R
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12,80	SR
13	Dinas Perhubungan	42,10	SR
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	72,90	S
15	Dinas Penanaman Modal, PTSPK	68,80	S
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,20	S
17	Dinas Pariwisata, Budpora	54,60	R
18	Dinas Pertanian KPP	35,90	SR
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM	56,10	R

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN	KATEGORI
20	BAPPEDA	58,00	R
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	80,30	T
22	Badan Pendapatan Daerah	62,90	R
23	Badan Kepegawaian, dan PSDM	56,20	R
24	Inspektorat	65,60	S
25	Sekretariat Daerah	51,60	R
26	Sekrateriat Dewan	47,30	SR
27	Kecamatan Sidikalang	75,00	S
28	Kecamatan Sumbul	83,80	T
29	Kecamatan Silima Pungga-pungga	74,10	S
30	Kecamatan Siempat Nempu	45,60	SR
31	Kecamatan Tigalingga	70,50	S
32	Kecamatan Tanah Pinem	96,60	ST
33	Kecamatan Pegagan Hilir	84,80	T
34	Kecamatan Parbuluan	61,20	R
35	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	70,50	S
36	Kecamatan Lae Parira	66,60	S
37	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	59,50	R
38	Kecamatan Gunung Sitember	72,70	S
39	Kecamatan Berampu	84,80	T
40	Kecamatan Silahisabungan	44,80	SR
41	Kecamatan Sitinjo	66,60	S

Grafik 8. 1 Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

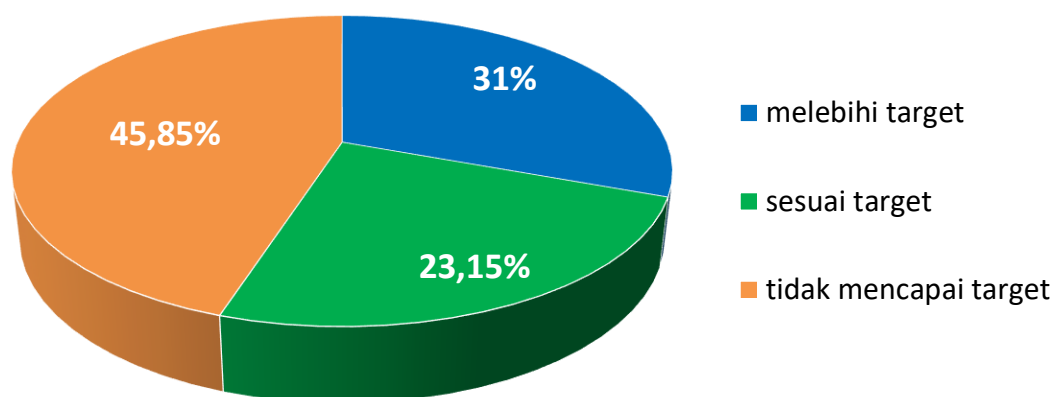


Dengan rincian:

1. 10 indikator kinerja (35,72%) melebihi target dengan kategori sangat memuaskan (>100);

2. 2 indikator kinerja (7,14%) sesuai target dengan kategori sangat memuaskan (=100);
3. 16 indikator kinerja (57,14 %) tidak mencapai target dengan rincian:
 - Sebanyak 4 indikator kinerja atau 25 % tidak mencapai target dengan kategori sangat memuaskan (>90–100);
 - Sebanyak 3 indikator kinerja atau 18,75 % tidak mencapai target dengan kategori memuaskan (>80–90);
 - Sebanyak 4 indikator kinerja atau 25 % tidak mencapai target dengan kategori sangat baik (>70–80);
 - Sebanyak 1 indikator kinerja atau 6,25 % tidak mencapai target dengan kategori baik (> 60–70);
 - Sebanyak 1 indikator kinerja atau 6,25 tidak mencapai target dengan kategori cukup (> 50–60);
 - Sebanyak 2 indikator kinerja atau 12,5 tidak mencapai target dengan kategori kurang (>30–50);
 - Sebanyak 1 indikator kinerja atau 6,25 tidak mencapai target dengan kategori sangat kurang (0-30).

Grafik 8. 2 Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020



Dengan rincian:

1. Ada 71 indikator kinerja atau 31 % melebihi target dengan kategori sangat memuaskan (> 100);
2. Ada 53 indikator kinerja atau 23,15 % sesuai target dengan kategori sangat memuaskan (=100);
3. Ada 105 indikator kinerja atau 45,85 % tidak mencapai target, dengan rincian:
 - Sebanyak 20 indikator kinerja atau 19,05 % tidak mencapai target dengan kategori sangat memuaskan (> 90–100);
 - Sebanyak 12 indikator kinerja atau 11,43 % tidak mencapai target dengan kategori memuaskan (>80-90);
 - Sebanyak 11 indikator kinerja atau 10.48 % tidak mencapai target dengan kategori sangat baik (>70-80);
 - Sebanyak 8 indikator kinerja atau 7,62 % tidak mencapai target dengan kategori baik (> 60–70);
 - Sebanyak 4 indikator kinerja atau 3,81 tidak mencapai target dengan kategori cukup (> 50–60);
 - Sebanyak 10 indikator kinerja atau 9,52 tidak mencapai target dengan kategori kurang (>30–50);

Sebanyak 40 indikator kinerja atau 38,09 tidak mencapai target dengan kategori sangat kurang (0–30).

8.2. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Dairi.

Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
			2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
			Realisasi	Target	Realisasi								
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	-	100,10	115,21	100,11	100,12	100,13	100,14	115,21	115,22	115,23	115,24
2	Nilai SAKIP	Predikat	47,23 (C)	C	CC	B	B	B	B	CC	B	B	BB
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks SPBE	Poin	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,50	2,70	3,00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	77,17	-	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	72,00	74,00	77,00	80,00
6	Indeks Infrastruktur	Persen	-	-	-	-	-	-	-	47,98	49,58	51,16	51,78
7	Indeks Pendidikan	Poin	-	-	-	-	-	-	-	-	68,83	69,27	69,72
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,79	68,60	68,79	68,70	68,80	68,90	69,00	69,15	69,98	70,81	71,64
9	Pengeluaran Per-kapita	Rp. (x 1.000)	10.602,00	-	10.350,00	-	-	-	-	10.752,4	10.958,9	11.095,1	11.219,5
10	Indeks Desa Membangun	Poin	-	-	0,59	-	-	-	-	0,59	0,61	0,63	0,65

Indikator kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro nasional sebagai berikut.

Tabel 8. 4 Indikator Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Capaian	Target Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,42	71,57	72,24	72,87	73,50	74,09	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,70	8,04	8,03	8,02	8.00 - 7.80	7.79 - 7.60	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,59	1,75	1,50	1,32	1,30-1,20	1,19-1,10	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,01	-0,94	1,00-2,00	2,00-3,00	3,00-4,00	4,00-5,00	
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,290	NA	0,23	0,23	0,22	0,22	

8.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut adalah IKU dari masing – masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 8. 5 Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
1	Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	68,83	69,27	69,72
		Predikat SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	A	B	B	B	BB
2	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Nilai	68,79	68,60	69,00	68,70	68,80	68,90	69,00	69,15	69,98	70,81	71,64
		BOR (Bad Accupacy Rate)	Persen	79,81	75,00	61,35	76,00	77,00	78,00	79,00	76,00	77,00	78,00	79,00
		AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		TOI (Turn Over Interval)	Hari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		GDR (Gross Death Rate)	Persen	12,00	30,00	21,00	29,00	29,00	29,00	28,00	29,00	29,00	29,00	28,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Persen	-	71,46	73,59	72,17	72,89	73,62	74,36	75,00	77,00	79,00	81,00
		Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	Predikat	Perdana	Perdana	Perdana	Dasar	Madya	Madya	Madya	Perdana	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang terlayani jaringan irigasi	Persen	-	91,37	91,37	65,48	68,10	70,72	73,34	92,17	93,06	93,96	94,85
		Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	49,40	56,81	55,24	62,22	68,06	73,10	78,70	58,47	60,41	62,27	64,14

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	-	77,78	80,41	80,89	81,37	81,85	82,33	79,54	81,30	83,06	84,82
		Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	-	6,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	12,50	43,75	100,00	100,00
		Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	Persen	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	Persen	-	19,14	20,48	20,00	20,00	20,00	20,00	22,06	24,99	27,91	30,83
		Cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	Persen	-	64,52	1,14	2,50	2,50	2,50	2,50	67,18	72,62	90,18	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
4	Satpol PP	Persentase penurunan pelanggaran K3	Persen	5,00	-	5,00	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	85,00	-	85,00	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	CC	-	B	-	-	-	-	B	B	B	BB
6	Dinas Sosial	Persentase PPKS	Persen	-	-	-	-	-	-	-	59,30	59,08	58,80	58,52
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
7	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Ketenagakerjaan	Tingkat kesempatan kerja	Persen	98,42	-	98,25	-	-	-	-	-	98,30	98,35	98,40
		Persentase peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Persen	9,52	-	32,50	-	-	-	-	-	12,00	13,00	15,00
		IKM Perizinan	Nilai	71,50	71,46	72,8	72,17	72,89	73,62	74,36	72,17	78	78,5	80,00
		Predikat SAKIP	Predikat	B	-	B	-	-	-	-	B	B	B	BB
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	Unmet Need	Persen	-	4,85	12,82	4,80	4,75	4,70	4,65	12,57	12,32	12,07	11,82
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	62,14	-	61,14	-	-	-	-	61,17	61,20	61,23	61,26
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100,10	100,10	115,21	100,11	100,12	100,13	100,14	115,21	115,22	115,23	115,24
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	BB	BB	BB	BB
10	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,65	65,60	63,05	66,60	67,60	68,60	69,60	66,60	67,31	67,76	68,22
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	BB
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persen	58,05	60,08	60,09	-	-	-	-	64,75	93,63	97,50	100,00

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD				
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				Realisasi	Target	Realisasi									
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase status desa maju	Persen	0,025	-	0,031	-	-	-	-	0,043	0,050	0,062	0,075	
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB	
13	Dinas Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan memadai	Persen	55,00	60,00	0,00	55,00	60,00	65,00	70,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Angka	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,50	2,70	3,00	
		Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE	persen	-	10,00	17,50	20,00	30,00	40,00	50,00	43,00	65,00	86,00	91,00	
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB	
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah	Persentase peningkatan omset IKM	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	
		Persentase peningkatan pendapatan sektor perdagangan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	8,50
		Persentase peningkatan omset koperasi aktif	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	5,50
		Persentase peningkatan omset UMKM Binaan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
		Predikat SAKIP	Predikat								B	B	BB	BB
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4,54	-	2,23	-	-	-	-	3,59	4,88	5,04	5,17
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	55,80	37,50	45,45	50,00
		Persentase Budaya Benda dan Tak Benda Yang dilestarikan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23	24
		Persentase peningkatan wirausahawan muda	Persen	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	8
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	BB
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0,022	-	0,022	-	-	-	-	-	10,00	11,00	12,00
		Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	72,00	-	74,00	-	-	-	-	77,00	80,00	85,00	88,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
18	Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	Kategori		Sedang	-					Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
		Persentase efektivitas pengendalian	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
		kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan												
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik
		Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	12,00	17,00
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat		B	B	-	-	-	-	B	B	B	B
		Maturitas SPIP	Level	2	2	2	-	-	-	-	2	3	3	3
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
19	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	65,00	70,00	75,00	80,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan	Persen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	55,00	60,00	70,00	80,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
22	Badan Pengelola Pendapatan daerah	Persentase peningkatan PAD	Persen	-	-	-	-	-	-	-	21,55	22,43	23,03	24,30
		Predikat SAKIP	Predikat		-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	53 (Sangat Rendah)	53,56 (Sangat Rendah)	53,56 (Sangat Rendah)	-	-	-	-	54,00	55,00	56,00	57,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
24	Inspektorat Daerah	Persentase tindak lanjut temuan internal dan eksternal	Persen	-	90,00	59,40	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00
		Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	3	3	-	-	-	-	3	3	3	4
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB
25	Kecamatan Sidikalang	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
26	Kecamatan Sumbul	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
27	Kecamatan Silima Punggapungga	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
28	Kecamatan Siempat Nempu	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
29	Kecamatan Tigalingga	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
30	Kecamatan Tanah Pinem	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
31	Kecamatan Pegagan Hilir	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
32	Kecamatan Parbuluan	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi								
35	Kecamatan Lae Parira	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
36	Kecamatan Gunung Sitember	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
37	Kecamatan Berampu	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
38	Kecamatan Silahi Sabungan	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
39	Kecamatan Sitinjo	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka Potensi Konflik Sosial	Poin	5	5	4	4	3	1	0	4	3	2	1
		Persentase partisipasi politik masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB

8.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja daerah berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun IKK Kabupaten Dairi disajikan sebagai berikut.

Tabel 8. 6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dairi Tahun 2019 -2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1,1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	29,97	32,03	33,39	34,36	35,33	36,30	36,30
1,2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	96,63	99,45	98,72	99,22	99,71	100,00	100,00
1,3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	76,59	94,90	99,40	99,70	99,99	100,00	100,00
1,4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	-	12,63	12,73	12,83	12,93	12,93
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
2,1	Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	persen	71,00	71,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00
2,2	Cakupan pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,3	Persentase penanganan kejadian gawat darurat sesuai standar	pesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,4	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	persen	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2,5	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	78,00	78,00	80,00	82,00	85,00	87,00	87,00
2,6	Persentase puskesmas dengan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persen	38,00	38,00	44,00	56,00	67,00	78,00	78,00
2,7	Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	persen	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2,8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	81,00	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
2,10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	72,00	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	69,00	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,13	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	65,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	62,00	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	54,00	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,20	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	42,00	42,00	58,00	64,00	64,00	67,00	67,00
2,21	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,22	Cakupan pemenuhan upaya peningkatan pelayanan	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,23	Persentase penilaian Standar SNARS	Persen	-	-	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,24	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	Persen	-	-	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2,25	Persentase Pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,26	CRR (Cost Recovery Rate)	Persen	-	-	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2,27	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang								
3,1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	-	6,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
3,2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	-	81,00	80,00	81,00	83,00	85,00	85,00
3,3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	-	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
3,4	Rasio kepatuhan IMB	Persen	-	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3,5	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	-	57,00	58	60,00	62,00	64,00	64,00
3,6	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	12,00	12,00	18,00	24,00	30,00	30,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4,1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	-	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	12,00
4,4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
5,1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	-	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	1.700,00
5,4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	-	-	-	300,00	350,00	350,00	1.000,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
5,5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,7	Persentase waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	-	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
6,1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	-	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6,2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
1,1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
1,2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,15
1,3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	0	0,87	0,87	1,00	1,50	2,00	2,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
2,1	Persentase perangkat daerah yang melakukan analisis ARG dalam penyusunan program / kegiatan	Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
2,2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	1,30	1,30	1,27	1,24	1,21	1,19	1,19
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
3,1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	-	-	-	115,00	120,00	125,00	125,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
4,1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4,2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah	-	0	1	1	1	1	1
4,3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Jumlah	-	1	1	1	1	1	1
4,4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	65,50	65,50	66,60	67,31	67,76	68,22	68,22
5,2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	59	59	68	73	72	71	71
5,3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6,1	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Persen	94,00	93,00	97,00	99,00	100,00	100,00	100,00
6,2	Persentase Kepemilikan KIA	Persen	-	-	37,00	75,00	100,00	100,00	100,00
6,3	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	69,00	70,00	98,00	99,00	99,50	100,00	100,00
6,4	Persentase Perkawinan Tercatat	Persen	20,20	25,00	27,00	50,00	75,00	90,00	90,00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
7,1	Persentase pengentasan desa tertinggal/ sangat tertinggal	Persen	65,00	35,00	25,00	15,00	5,00	0,00	0,00
7,2	Persentase peningkatan status desa berkembang, maju dan mandiri	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	85,00
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
8,1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	74,90	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00
8,2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Persen	5,23	5,00	4,80	4,60	4,40	4,20	4,20
8,3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	74,90	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00
8,4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	72,48	72,49	72,97	73,49	73,97	73,29	73,29
8,5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8,6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	41,26	56,93	57,13	57,33	57,53	57,73	57,73
8,7	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	Persen	92,61	92,61	92,93	93,25	93,57	93,89	93,89
8,8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	1,80	1,50	1,20	0,90	0,60	0,50	0,50
8,9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
9,1	Rasio konektivitas	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
9,2	Kinerja lalu lintas	Persen	60,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
10,1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
10,2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	-	-	-	75,00	75,00	100,00
10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
11,1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	33,00	-	-	36	39	43	43,00
11,2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	2,10	2,10	2,48	3,21	3,94	4,67	4,67

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
12,1	Persentase peningkatan investasi	Persen	9.52	9.75	10,00	12,00	13,00	15,00	15,00
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								
13,1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	21,00	21,00	21,00	25,00	27,00	27,00	27,00
13,2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
14,1	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100,00	100,00
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
16,1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	-	-	-	50,00	60,00	70,00	70,00
16,2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Nilai	-	-	-	10,00	11,00	12,00	12,00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
17,1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	72,00	74,00	77,00	80,00	85,00	88,00	88,00
17,2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	30	32	33	40	45	52	52
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
18,1	Rasio cagar budaya yang terlestarikan	Persen	2,5	2,5	2,5	10	10	10	10
C	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
1,1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	2.578,50	2.833,77	2.835,77	2.838,00	2.840,00	2.842,00	2.842,00
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
2,1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	6,00	6,69	14,00	19,00	21,00	22,00	22,00
2,2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	Persen	98,57	12,00	25,80	37,50	45,45	50,00	50,00
2,3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2,91	2,70	2,80	2,85	2,90	2,95	2,95
2,4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	-	0,62	0,82	0,90	1,00	1,10	1,10
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
3,1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun								
	- Padi Sawah	kw/ha	54,90	54,90	55,70	56,50	57,30	58,10	58,10
	- Padi Ladang	kw/ha	37,20	37,20	38,00	38,50	38,90	39,20	39,20
	- Jagung	kw/ha	56,30	56,30	58,20	59,20	59,80	61,10	61,10
	- Bawang Merah	kw/ha	71,00	71,00	73,00	74,00	75,00	76,00	76,00
	- Kubis	kw/ha	89,40	89,40	89,80	89,90	90,00	91,00	91,00
	- Kopi Robusta	Kilo	737,59	748,70	752,10	783,93	898,14	1053,44	1053,44
	- Kopi Arabika	Kilo	1.031,62	1.033,36	1.129,49	1.236,63	1.404,72	1.665,13	1.665,13
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
4,1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	70,00	-	-	80,00	90,00	100,00	100,00
4,2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
5,1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	1	1	1	2	2	2	9
5,2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D	Urusan Penunjang Pemerintahan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sekretariat Daerah								
1,1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	3,50	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1,2	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
1,3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1,4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	2	3	3	3	3
2	Sekretariat Dewan								
2,1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2,2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2,3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Perencanaan								
3,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,4	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Keuangan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
4,1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	-	28,86	26,79	28,81	28,81	28,81	28,81
4,2	Rasio PAD terhadap APBD non migas	Persen	-	10,30	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
4,3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	-	85,10	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
4,4	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4,5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-	9,65	9,50	9,00	8,50	7,50	7,50
4,6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-	3,64	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00
4,7	Persentase aset yang terinventarisasi	Persen	-	65,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	-	13,26	11,00	10,00	9,00	8,00	8,00
4,9	Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
4,10	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang tersedia	Persen	-	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,11	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen	-	91,50	92,00	92,50	92,50	93,00	93,00
4,12	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	Persen	-	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,50
4,13	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	-	13,50	13,25	13,50	13,75	14,00	14,00
4,14	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	Persen	-	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Kepegawaian								
5,1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	Persen	81,00	81,00	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00
5,2	Rasio pegawai fungsional	Persen	75,00	75,00	71,00	66,00	62,00	57,00	57,00
5,3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	79,00	79,00	79,00	79,00	80,00	80,00	80,00
5,4	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	30,00	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00	32,00
6	Penelitian dan Pengembangan								
6,1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	-	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
6,2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Pengawasan								
7,1	Persentase tindak lanjut temuan internal dan external	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7,2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

9.1. Pedoman Transisi

Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan mulai dari Perubahan RKPD Tahun 2022, RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, bahwa yang melatar belakangi perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah terjadinya perubahan yang mendasar yaitu perubahan kebijakan nasional dan terjadinya pandemi covid-19. Dampak dari kedua hal tersebut menyebabkan perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 memiliki kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan mencapai target

- kinerja sebagaimana termuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 4. Dalam memastikan pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dapat berjalan baik, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi wajib memastikan keselarasan saat penjabaran dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan RKPD, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan;
 5. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terdapat target kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai, maka perlu dirumuskan kembali target kinerja baru dan selanjutnya disesuaikan dalam RKPD.

Sidikalang, 7 Maret 2022
Bupati Dairi,

ttd.

Dr. Eddy Keleng Ate Berutu

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH

NIP. 19820909 200903 1 010